PEMERINTAH
KABUPATEN
NGANJUK









LPPD

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN

2024

Bupati :
Dr. Drs. H. Marhaen Djumadi., A.Md., S.E., S.H., M.M., M.Ba.

Wakil Bupati :
Trihandi Cahyo Saputro., S.T.

(0358) 321749 www.nganjukkab.go.id Jl. Basuki Rahmad No. 1 Nganjuk

KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas curahan rahmat dan limpahan karunia-Nya, sehingga telah dapat disusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024 dalam rangka menyajikan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih sistematis dan akurat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024 mencakup hasil kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Nganjuk selama periode Tahun Anggaran 2024 berdasarkan 5 (lima) kelompok utama capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu pada tataran :

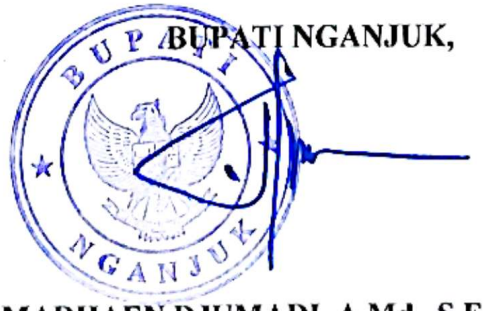
1. Capaian kinerja makro;
2. Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan;
3. Capaian akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah;
4. Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan; dan
5. Capaian kinerja penerapan standar pelayanan minimal.

Sebagai upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif, efisien, akuntabel dan transparan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik *(good governance)* maka laporan ini disusun dengan berdasarkan pada data statistik dasar Badan Pusat Statistik dan data statistik sektoral Perangkat Daerah dalam rangka mengetahui capaian kinerja pemerintahan daerah dan sebagai bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depannya.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024 ini disusun semoga bermanfaat bagi semua pihak.

Nganjuk, 27 Maret 2025

BUPATI NGANJUK,



Dr. Drs. H. MARHAEN DJUMADI, A.Md., S.E., S.H., M.M., M.BA.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.1.1 Penjelasan Umum 1
a. Undang-Undang Pembentukan Daerah 1
b. Data Geografis Wilayah 3
c. Jumlah Penduduk 8
d. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan 12
e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah, dan Pegawai Pemerintahan 12
f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 20
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah 33
A. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah 33
B. Visi dan Misi Kepala Daerah 52
C. Program Pembangunaan Daerah Berdasarkan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah 57
D. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan 61
1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal 79

BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAERAH 85
2.1 Capaian Kinerja Makro 85
2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 87
2.2.1 Indikator Kinerja Kunci 87
2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan 103
2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah 106
2.3.1 Analisis Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja 117

BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN 326
3.1 Tugas Pembantuan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman,

dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk 326
3.2 Tugas Pembantuan Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk 349

BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL 353
4.1 Urusan Pendidikan 356
4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar 356
4.1.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah 357
4.1.3 Realisasi 358
4.1.4 Alokasi Anggaran 363
4.1.5 Dukungan Personil 368
4.1.6 Permasalahan dan Solusi 371
4.2 Urusan Kesehatan 371
4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar 371
4.2.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah 373
4.2.3 Realisasi 374
4.2.4 Alokasi Anggaran 390
4.2.5 Dukungan Personil 396
4.2.6 Permasalahan dan Solusi 398
4.3 Urusan Pekerjaan Umum 398
4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar 398
4.3.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah 399
4.3.3 Realisasi 399
4.3.4 Alokasi Anggaran 403
4.3.5 Dukungan Personil 405
4.3.6 Permasalahan dan Solusi 405
4.4 Urusan Perumahan Rakyat 406
4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar 406
4.4.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah 406
4.4.3 Realisasi 407
4.4.4 Alokasi Anggaran 410
4.4.5 Dukungan Personil 411
4.4.6 Permasalahan dan Solusi 412
4.5 Urusan Trantibumlinmas (Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum)
4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar 412

4.5.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah....414
4.5.3 Realisasi....415
4.5.4 Alokasi Anggaran....416
4.5.5 Dukungan Personil....417
4.5.6 Permasalahan dan Solusi....418
4.6 Urusan Trantibumlinmas (Sub Urusan Kebakaran)....419
4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar....419
4.6.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah....420
4.6.3 Realisasi....420
4.6.4 Alokasi Anggaran....422
4.6.5 Dukungan Personil....423
4.6.6 Permasalahan dan Solusi....424
4.7 Urusan Trantibumlinmas (Sub Urusan Kebencanaan)....424
4.7.1 Jenis Pelayanan Dasar....424
4.7.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah....427
4.7.3 Realisasi....427
4.7.4 Alokasi Anggaran....429
4.7.5 Dukungan Personil....431
4.7.6 Permasalahan dan Solusi....431
4.8 Urusan Sosial....432
4.8.1 Jenis Pelayanan Dasar....432
4.8.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah....433
4.8.3 Realisasi....435
4.8.4 Alokasi Anggaran....438
4.8.5 Dukungan Personil....440
4.8.6 Permasalahan dan Solusi....440

BAB V PENUTUP....442

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

1.1.1 Penjelasan Umum

a. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Sebagai suatu wilayah pemerintahan daerah, Kabupaten Nganjuk dibentuk dan ditetapkan sebagai daerah otonom di lingkup wilayah Provinsi Jawa Timur sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Selanjutnya berdasarkan pasal 69 dan pasal 70 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewajiban Bupati dan Wakil Bupati sebagai Kepala Daerah adalah menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Berdasarkan hal tersebut, maka Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024 ini disusun.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, ruang lingkup laporan ini meliputi : (1) capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri atas capaian kinerja makro, capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, dan capaian akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah, (2) capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan, dan (3) laporan penerapan standar pelayanan minimal.

Dalam penyusunan dan penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024, sejumlah aturan perundang-undangan digunakan sebagai landasan yakni antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6868);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019- 2024;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2003 Nomor 19 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk; dan
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026.

b. Data Geografis Wilayah

1. Letak Geografis

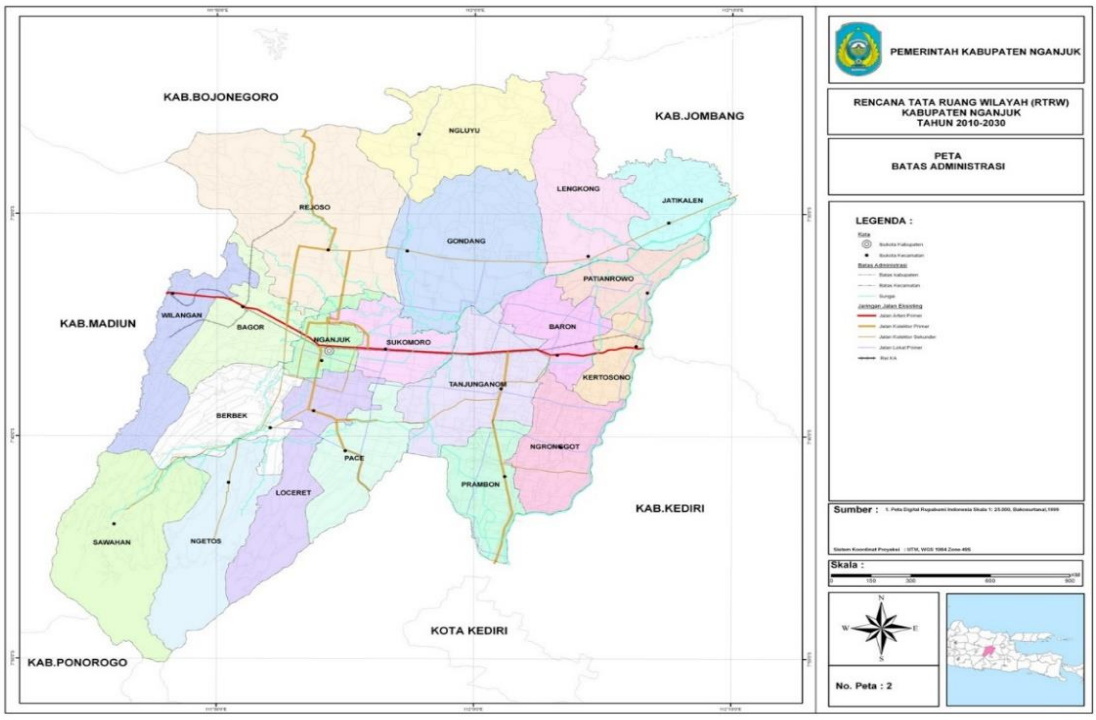
Kabupaten Nganjuk merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang terletak di bagian barat Provinsi Jawa Timur. Secara astronomis, Kabupaten Nganjuk terletak pada koordinat 111º5’ sampai dengan 111º13’ Bujur Timur dan 7º20’ sampai dengan 7º50’ Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Nganjuk adalah seluas 1.288,22 km². Kabupaten Nganjuk memiliki 20 kecamatan, dimana wilayah paling luas berada di Kecamatan Rejoso sebesar 156,82 km² dan paling kecil di wilayah Kecamatan Nganjuk dengan luas 23,49 km². Posisi Kabupaten Nganjuk dibatasi oleh beberapa kabupaten lain, yaitu:

Sebelah utara : Kabupaten Bojonegoro
Sebelah selatan : Kabupaten Kediri dan Kabupaten Tulungagung
Sebelah timur : Kabupaten Jombang dan Kabupaten Kediri
Sebelah barat : Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Madiun

Secara geografis, wilayah Kabupaten Nganjuk tersebar ke dalam 3 wilayah dataran yaitu 110.433,93 ha (85,68%) terletak di dataran rendah, 11.577,68 ha (8,98%) di dataran sedang, dan 6.885,55 ha (5,34%) di dataran tinggi. Wilayah tersebut tersebar dari sisi selatan Kabupaten Nganjuk yaitu Gunung Wilis bagian utara hingga kaki

Gunung Kendeng bagian selatan. Wilayah Kecamatan di kaki Gunung Wilis di antaranya Kecamatan Ngetos, Kecamatan Sawahan, Kecamatan Wilangan, sebagian Kecamatan Loceret dan Kecamatan Pace. Sedangkan di bagian utara yaitu di kaki Gunung Kendeng adalah Kecamatan Ngluyu.

Gambar 1.1
Peta Administrasi Kabupaten Nganjuk



Geografis Kabupaten Nganjuk berada pada titik tengah persimpangan jalan Provinsi Jawa Timur. Keberadaannya menjadi penghubung antara Ibukota Provinsi, Kota Surabaya, dengan wilayah Jawa Timur bagian barat. Hal ini menjadikan Kabupaten Nganjuk memiliki potensi sektor jasa dan perdagangan yang besar sebagai daerah penghubung perdagangan. Selain itu, kondisi geografis yang luas dengan jenis wilayah yang beragam berdampak pada jumlah kecamatan sehingga membutuhkan adanya pendekatan dalam pengembangan tata ruang.

Secara rinci luas wilayah Kabupaten Nganjuk per kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Nganjuk

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Persentase Terhadap Luas Kabupaten (%)
1	Sawahan	11.588,60	9,47
2	Ngetos	6.021,20	4,92
3	Berbek	4.829,70	3,94

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Persentase Terhadap Luas Kabupaten (%)
4	Loceret	6.869,50	5,61
5	P a c e	4.845,70	3,96
6	Tanjunganom	7.084,20	5,79
7	Prambon	4.115,80	3,36
8	Ngronggot	5.298,50	4,33
9	Kertosono	2.267,50	1,85
10	Patianrowo	3.559,30	2,91
11	Baron	3.680,20	3,01
12	Gondang	9.594,30	7,84
13	Sukomoro	3.538,80	2,89
14	Nganjuk	2.258,60	1,84
15	Bagor	5.115,30	4,18
16	Wilangan	5.063,90	4,14
17	Rejoso	15.166,30	12,39
18	Ngluyu	8.614,90	7,04
19	Lengkong	8.717,30	7,12
20	Jatikalen	4.203,50	3,43
TOTAL		**122.433,10**	**100,00**

Sumber data : Badan Pusat Statistik

1) Klimatologi dan Hidrologi

Seperti halnya daerah lain yang berada di sekitar garis khatulistiwa, Kabupaten Nganjuk beriklim tropis dan memiliki 2 (dua) musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Di tahun 2024, Kabupaten Nganjuk mengalami musim penghujan pada bulan Januari sampai dengan bulan April, musim kemarau pada bulan Mei sampai dengan bulan Oktober, dan kembali mengalami musim penghujan pada bulan November sampai dengan bulan Desember. Hal ini dapat diketahui dengan melihat jumlah curah hujan yang terjadi sepanjang tahun. Rincian terkait jumlah curah hujan dan jumlah hari hujan yang terjadi selama tahun 2024 tersaji pada tabel berikut :

Tabel 1.2
Curah Hujan di Kabupaten Nganjuk Tahun 2024

Bulan	Jumlah Curah Hujan	Jumlah Hari Hujan	Rata-Rata Harian Penyinaran Matahari
Januari	343,40	18	4,1
Februari	319,86	17	4,4
Maret	311,95	14	4,1
April	220,84	13	4,3
Mei	13,64	1	5,6
Juni	52,20	3	7,5

Bulan	Jumlah Curah Hujan	Jumlah Hari Hujan	Rata-Rata Harian Penyinaran Matahari
Juli	10,50	1	5,9
Agustus	4,60	1	6,2
September	33,73	3	7,7
Oktober	9,91	2	6,8
November	216,41	12	6,7
Desember	478,16	19	5,0

Sumber data : Badan Pusat Statistik

Tabel 1.3
Suhu dan Kelembapan di Kabupaten Nganjuk Tahun 2024

Bulan	Suhu/Temperatur (°C)			Kelembapan (%)		
	Minimum	Rata-Rata	Maksimum	Minimum	Rata-Rata	Maksimum
Januari	23,30	26,90	31,80	68,00	87,23	98,00
Februari	20,40	24,50	31,20	60,00	83,88	100,00
Maret	20,40	24,36	31,20	64,00	85,65	100,00
April	19,60	24,71	30,60	54,00	84,27	100,00
Mei	20,40	25,06	30,40	62,00	85,49	100,00
Juni	20,00	25,31	31,60	57,00	75,71	98,00
Juli	15,00	24,52	31,00	56,00	77,63	98,00
Agustus	16,00	23,92	30,40	57,00	74,59	98,00
September	18,40	24,68	31,60	52,00	65,48	83,50
Oktober	19,00	25,43	32,40	51,25	68,40	85,50
November	20,40	26,27	32,60	52,25	68,81	86,50
Desember	18,20	25,15	31,20	67,75	81,79	91,25

Sumber data : Badan Pusat Statistik

Tabel 1.4
Kecepatan Angin dan Tekanan Udara di Kabupaten Nganjuk Tahun 2024

Bulan	Kecepatan Angin (m/det)			Tekanan Udara (mb)		
	Minimum	Rata-Rata	Maksimum	Minimum	Rata-Rata	Maksimum
Januari	0,00	3,62	15,00	986,20	998,00	1002,40
Februari	0,00	1,13	6,70	930,80	934,75	1016,90
Maret	0,00	1,00	4,60	931,60	935,60	938,70
April	0,00	1,39	6,70	930,50	934,69	938,60
Mei	0,00	1,13	4,60	930,10	934,03	993,50
Juni	0,00	1,32	4,60	930,60	934,67	1014,50
Juli	0,00	1,25	5,10	932,20	935,57	938,50
Agustus	0,00	1,28	5,14	932,00	935,78	938,30
September	0,00	1,46	15,43	934,70	936,68	938,30
Oktober	0,00	1,47	10,20	934,00	936,17	938,10
November	0,00	1,45	6,17	934,90	936,25	938,10

Bulan	Kecepatan Angin (m/det)			Tekanan Udara (mb)		
	Minimum	Rata-Rata	Maksimum	Minimum	Rata-Rata	Maksimum
Desember	0,00	1,34	6,17	932,70	934,77	937,00

Sumber data : Badan Pusat Statistik

2) Topografi

Wilayah Kabupaten Nganjuk merupakan daratan yang memiliki kontur datar, bergelombang dan berbukit. Kondisi topografi ini terbagi menjadi dua bagian menurut ketinggiannya yaitu 25-100 meter dari permukaan laut (dpl) dan 100-1.000 meter dpl. Wilayah dengan ketinggian 25-100 meter dpl seluas 62%, sedangkan ketinggian 100-1.000 meter dpl seluas 34,05%. Kondisi luasan topografi tersebut tersebar keseluruh wilayah dengan rincian sebagai berikut :

a) Kondisi wilayah yang berada diketinggian 25-100 meter di atas permukaan air laut dengan luas wilayah sekitar 798,670 km^2 atau 62% dari seluruh luas wilayah. Wilayah kecamatan yang berada pada ketinggian ini sebanyak 15 kecamatan yaitu Kecamatan Wilangan, Bagor, Nganjuk, Sukomoro, Rejoso, Gondang, Loceret, Pace, Tanjunganom, Prambon, Ngronggot, Kertosono, Patianrowo, Lengkong, dan Jatikalen.

b) Kondisi wilayah yang berada di ketinggian 100-1.000 meter di atas permukaan air laut dengan luas wilayah sekitar 437,99 km^2 atau 34,05% dari seluruh luas wilayah. Wilayah kecamatan yang berada pada ketinggian ini sebanyak 11 kecamatan yaitu Kecamatan Ngluyu, Lengkong, Gondang, Rejoso, Wilangan, Bagor, Berbek, Ngetos, Pace, Sawahan, dan Loceret. Adapun wilayah Kecamatan Rejoso, Ngluyu, Gondang, Jatikalen berada di bagian utara Kabupaten Nganjuk merupakan daerah pegunungan (Pegunungan Kendeng) dengan ketinggian 60-897 meter dpl yang merupakan daerah hutan jati, lahan potensial untuk tanaman tembakau, bahan galian kapur, hutan produksi, dan hutan lindung. Sedangkan wilayah Kecamatan Ngetos, Sawahan, Berbek, Loceret, Pace, dan Wilangan berada di sebelah selatan dan barat wilayah Kabupaten Nganjuk yang berada di lereng Gunung Wilis potensial untuk tanaman perkebunan, hortikultura, hutan produksi dan hutan lindung.

c) Wilayah dengan ketinggian lebih dari 1.000 meter di atas permukaan air laut dengan luas wilayah 631,23 km^2 atau 4,89% dari luas wilayah terdiri atas 2 wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Sawahan dan Kecamatan Ngetos. Wilayah ini berada di bagian selatan Kabupaten Nganjuk yang merupakan daerah

pegunungan (Gunung Wilis) dengan ketinggian 1.000 sampai dengan 2.563 m dpl, potensial untuk hutan produksi dan hutan lindung. Terdapat enam kecamatan yang memiliki dua jenis topografi yaitu berada pada ketinggian 25-100 meter dpl dan 100-1.000 meter dpl. Keenam kecamatan tersebut yaitu Kecamatan Lengkong, Rejoso, Wilangan, Bagor, Pace, dan Loceret. Selain dikelompokkan dari kondisi konturnya, wilayah Kabupaten Nganjuk juga terbagi menurut tingkat kelerengannya, yaitu:

- Wilayah dengan kelerengan antara 0%-2%, luasnya meliputi 52,95% dari luas wilayah Kabupaten Nganjuk yang tersebar di hampir seluruh wilayah. Wilayah ini cukup baik untuk kegiatan budidaya berupa pertanian maupun untuk kegiatan permukiman.
- Wilayah dengan kelerengan 2%-15%, luasnya meliputi 29,86% dari seluruh luas wilayah kabupaten dan tersebar di seluruh wilayah kecamatan. Wilayah ini cukup sesuai untuk kegiatan pertanian dan permukiman.
- Wilayah dengan kelerengan 15%-40%, luasnya meliputi 10,50% dari luas wilayah kabupaten yang tersebar di Kecamatan Ngetos, Sawahan, Berbek, Loceret, Wilangan, Rejoso, Gondang, Ngluyu dan Lengkong. Wilayah ini sesuai untuk kegiatan pertanian tanaman tahunan/tanaman keras.
- Wilayah dengan kelerengan > 40%, luasnya meliputi sekitar 6,68% dari luas wilayah kabupaten yang tersebar di Kecamatan Sawahan, Ngetos, Wilangan dan Ngluyu. Merupakan wilayah yang seharusnya dihutankan karena merupakan kawasan penyangga tanah, air dan menjaga keseimbangan ekosistem.

c. Jumlah Penduduk

Karakteristik penduduk menurut umur dan jenis kelamin berguna dalam membantu menyusun perencanaan pemenuhan kebutuhan dasar bagi penduduk sesuai dengan kebutuhan kelompok umur masing-masing, baik kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan lain sebagainya. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk, jumlah penduduk Kabupaten Nganjuk pada Tahun 2024 mencapai 1.152.575 jiwa, yang terdiri atas 579.531 penduduk laki-laki dan 573.044 penduduk perempuan. Apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk pada Tahun 2023 yang mencapai 1.139.617 jiwa, maka dapat diketahui bahwa terdapat peningkatan jumlah penduduk sebesar 12.958 jiwa.

Tabel 1.5
Jumlah Penduduk Kabupaten Nganjuk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2024 (Jiwa)

No	Kecamatan	Penduduk Laki-Laki	Penduduk Perempuan	Jumlah Penduduk
1	Sawahan	20.253	20.104	40.357
2	Ngetos	20.065	19.904	39.969
3	Berbek	30.936	30.103	61.039
4	Loceret	39.497	39.210	78.707
5	Pace	34.965	34.197	69.162
6	Prambon	38.057	37.611	75.668
7	Ngronggot	44.178	42.962	87.140
8	Kertosono	28.697	28.589	57.286
9	Patianrowo	23.508	22.852	46.360
10	Baron	28.652	27.963	56.615
11	Tanjunganom	61.126	60.588	121.714
12	Sukomoro	24.535	24.298	48.833
13	Nganjuk	35.283	35.791	71.074
14	Bagor	32.143	32.045	64.188
15	Wilangan	15.884	15.852	31.736
16	Rejoso	37.272	37.030	74.302
17	Gondang	29.111	28.822	57.933
18	Ngluyu	7.301	7.282	14.583
19	Lengkong	17.389	17.231	34.620
20	Jatikalen	10.679	10.610	21.289
TOTAL		**579.531**	**573.044**	**1.152.575**

Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk

Tabel 1.6
Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Nganjuk Per Kecamatan Tahun 2015-2024 (Jiwa)

No	Kecamatan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Sawahan	35.883	36.524	37.134	37.874	38.458	39.109	39.515	39.572	39.705	40.357
2	Ngetos	34.731	35.406	36.147	37.001	37.736	38.433	38.835	38.910	39.200	39.969
3	Berbek	54.702	55.752	56.813	57.896	58.882	59.827	60.484	60.606	60.131	61.039
4	Loceret	69.537	70.879	72.180	73.670	74.897	76.144	77.084	77.114	77.914	78.707
5	Pace	61.213	62.473	63.597	64.903	65.996	67.148	67.900	67.986	68.435	69.162
6	Prambon	66.706	68.103	69.367	70.717	71.989	73.254	74.020	74.207	74.725	75.668
7	Ngronggot	76.864	78.581	80.149	81.837	83.266	84.751	85.591	85.832	86.066	87.140
8	Kertosono	51.247	52.328	53.232	54.202	55.154	56.091	56.633	56.727	56.925	57.286
9	Patianrowo	41.157	41.918	42.660	43.469	44.203	44.966	45.601	45.558	45.902	46.360
10	Baron	49.566	50.631	51.545	52.680	53.656	54.612	55.262	55.341	56.024	56.615
11	Tanjunganom	108.215	110.339	112.252	114.522	116.533	118.486	119.916	119.998	120.687	121.714
12	Sukomoro	42.935	43.777	44.539	45.444	46.203	46.989	47.527	47.567	48.204	48.833
13	Nganjuk	63.432	64.613	65.710	66.782	67.770	68.787	69.753	69.608	70.283	71.074
14	Bagor	57.204	58.218	59.185	60.640	61.262	62.195	62.898	62.918	63.497	64.188
15	Wilangan	28.104	28.698	29.182	29.775	30.276	30.759	31.081	31.146	31.331	31.736
16	Rejoso	66.782	68.016	69.130	70.352	71.446	72.545	73.336	73.399	73.668	74.302
17	Gondang	51.171	52.126	53.007	54.055	54.845	55.751	56.289	56.435	57.155	57.933
18	Ngluyu	13.296	13.507	13.672	13.869	14.033	14.217	14.372	14.400	14.480	14.583
19	Lengkong	30.883	31.401	31.867	32.410	32.933	33.492	33.833	33.895	34.139	34.620
20	Jatikalen	19.199	19.513	19.810	20.134	20.415	20.768	20.980	21.000	21.146	21.289
		1.022.827	**1.042.803**	**1.061.178**	**1.081.910**	**1.099.953**	**1.118.324**	**1.130.910**	**1.132.219**	**1.139.617**	**1.152.575**

Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk

Tabel 1.7
Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Nganjuk Per Kecamatan Tahun 2015-2024

No	Kecamatan	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)									
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Sawahan	0.37	0.33	0.31	0.28	0.24	0.71	1.74	0.55	0.33	0.16
2	Ngetos	0.25	0.21	0.19	0.15	0.12	0.97	2.50	0.80	0.74	0.19
3	Berbek	0.28	0.24	0.22	0.19	0.15	0.93	0.34	0.77	0.79	0.15
4	Loceret	0.24	0.21	0.19	0.15	0.12	0.89	0.54	0.73	1.03	0.10
5	Pace	0.08	0.05	0.03	0.00	-0.04	1.09	0.61	0.91	0.66	0.10
6	Tanjunganom	0.54	0.51	0.47	0.45	0.41	0.75	0.57	0.59	0.69	0.12
7	Prambon	0.46	0.43	0.41	0.37	0.34	0.61	0.93	0.45	0.27	0.12
8	Ngronggot	0.60	0.57	0.54	0.51	0.47	1.01	1.90	0.84	0.35	0.63
9	Kertosono	0.18	0.15	0.12	0.09	0.05	0.70	-0.28	0.54	0.75	0.99
10	Patianrowo	0.35	0.32	0.29	0.26	0.22	0.82	-0.02	0.66	1.22	0.10
11	Baron	0.36	0.32	0.30	0.27	0.23	1.18	0.62	1.01	0.57	0.85
12	Gondang	0.21	0.18	0.15	0.12	0.08	0.96	0.27	0.79	1.32	0.13
13	Sukomoro	0.73	0.69	0.67	0.63	0.60	1.02	-0.31	0.85	0.96	0.11
14	Nganjuk	0.51	0.48	0.46	0.42	0.39	0.46	-0.59	0.31	0.91	0.10
15	Bagor	0.44	0.41	0.39	0.35	0.32	0.75	-0.50	0.59	0.59	0.12
16	Wilangan	0.22	0.19	0.16	0.13	0.10	1.17	0.96	0.99	0.37	0.86
17	Rejoso	0.46	0.42	0.40	0.37	0.33	0.76	0.49	0.60	1.26	0.13
18	Ngluyu	0.10	0.07	0.05	0.01	-0.03	0.34	0.80	0.19	0.55	0.71
19	Lengkong	0.35	0.31	0.29	0.26	0.22	0.56	-0.36	0.40	0.71	0.14
20	Jatikalen	0.40	0.36	0.35	0.30	0.28	0.43	-0.65	0.14	0.69	0.67
TOTAL		**0.38**	**0.35**	**0.33**	**0.30**	**0.26**	**0.82**	**0.50**	**0.66**	**0.65**	**0.11**

Sumber data : Badan Pusat Statistik

Ditinjau dari laju pertumbuhan penduduk dalam sepuluh tahun terakhir, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Nganjuk pada Tahun 2024 tercatat sebesar 0,11 persen atau turun 0,54 persen bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2015, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Nganjuk sebesar 0,38 persen dan terus mengalami tren fluktuatif pada tahun-tahun berikutnya.

d. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan

Secara administratif Kabupaten Nganjuk terbagi atas 20 Kecamatan yang meliputi 264 Desa dan 20 Kelurahan. Rincian jumlah desa dan kelurahan pada masing-masing kecamatan tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 1.8
Kecamatan, Desa dan Kelurahan di Kabupaten Nganjuk

No	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Jumlah
1	Bagor	19	2	21
2	Jatikalen	11	-	11
3	Kertosono	13	1	14
4	Lengkong	16	-	16
5	Loceret	22	-	22
6	Nganjuk	2	13	15
7	Ngetos	9	-	9
8	Ngluyu	6	-	6
9	Ngronggot	13	-	13
10	Pace	18	-	18
11	Patianrowo	11	-	11
12	Prambon	14	-	14
13	Rejoso	24	-	24
14	Sawahan	9	-	9
15	Sukomoro	10	2	12
16	Tanjunganom	14	2	16
17	Wilangan	6	-	6
18	Baron	11	-	11
19	Berbek	19	-	19
20	Gondang	17	-	17
TOTAL		**264**	**20**	**284**

e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah, dan Pegawai Pemerintahan

Dalam menjalankan roda Pemerintahan Daerah Kabupaten Nganjuk, maka dibentuklah Perangkat Daerah yang memiliki 3 tujuan mendasar yaitu, (1) untuk mewujudkan tujuan pemberian otonomi, (2) untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu, dan (3) untuk melaksanakan pelayanan publik. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah memiliki beberapa tugas

yaitu membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif (Sekretariat Daerah), menyelenggarakan administrasi yang mendukung tugas dan fungsi DPRD (Sekretariat DPRD), membantu kepala daerah membina dan mengawasi pelaksanaan oleh perangkat daerah (Inspektorat), melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah (Dinas) dan untuk melaksanakan fungsi penunjang (Badan).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk dan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, berikut adalah Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Nganjuk :

Tabel 1.9
Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Nganjuk

No.	Perangkat Daerah
1.	Sekretariat Daerah
2.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3.	Inspektorat Daerah
4.	Dinas Pendidikan
5.	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
6.	Dinas Kesehatan
7.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
8.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
11.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
12.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
13.	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
14.	Dinas Tenaga Kerja
15.	Dinas Komunikasi dan Informatika
16.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
17.	Dinas Perhubungan
18.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
19.	Dinas Lingkungan Hidup
20.	Dinas Pertanian
21.	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
22.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
23.	Satuan Polisi Pamong Praja
24.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
25.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
26.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
27.	Badan Pendapatan Daerah
28.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
29.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
30.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No.	Perangkat Daerah
31.	RSUD Nganjuk
32.	RSUD Kertosono
33.	Kecamatan Nganjuk
	Kelurahan Payaman
	Kelurahan Kartoharjo
	Kelurahan Kauman
	Kelurahan Ringinanom
	Kelurahan Begadung
	Kelurahan Cangkringan
	Kelurahan Bogo
	Kelurahan Ploso
	Kelurahan Ganung Kidul
	Kelurahan Mangundikaran
	Kelurahan Werungotok
	Kelurahan Kramat
	Kelurahan Jatirejo
34.	Kecamatan Bagor
	Kelurahan Kedondong
	Kelurahan Guyangan
35.	Kecamatan Rejoso
36.	Kecamatan Sukomoro
	Kelurahan Kapas
	Kelurahan Sukomoro
37.	Kecamatan Pace
38.	Kecamatan Tanjunganom
	Kelurahan Warujayeng
	Kelurahan Tanjunganom
39.	Kecamatan Kertosono
	Kelurahan Banaran
40.	Kecamatan Prambon
41.	Kecamatan Berbek
42.	Kecamatan Loceret
44.	Kecamatan Ngronggot
45.	Kecamatan Lengkong
46.	Kecamatan Patianrowo
47.	Kecamatan Gondang
48.	Kecamatan Baron
49.	Kecamatan Wilangan
50.	Kecamatan Ngluyu
51	Kecamatan Ngetos
52.	Kecamatan Sawahan
53.	Kecamatan Jatikalen

Sumber daya manusia merupakan bagian terpenting dalam pelaksanaan fungsi dan tugas suatu instansi. Fungsi penting dari manajemen sumber daya manusia dalam mencapai tujuan-tujuan strategisnya adalah kecukupan jumlah personel dan kualitas yang baik. Pengelolaan aspek manajemen sumber daya manusia dalam sebuah instansi

memenuhi kebutuhan tersebut, maka harus di dukung oleh sistem informasi kepegawaian yang baik. Informasi manajemen yang berfungsi untuk mengelola data, manajemen dan administrasi kepegawaian sebuah instansi.

Pemerintah daerah dalam menjalankan fungsinya perlu didukung oleh Pegawai Negari Sipil sebagai aparatur pelayanan publik. Peningkatan kualitas pembangunan, kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik perlu didukung oleh jumlah PNS yang memiliki kompetensi dan berkualitas. Analisa terkait kebutuhan dan kualitas PNS selaku pelayan publik harus dioptimalkan sebagai bagian dari pendukung utama kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Jumlah PNS Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.10
Jumlah PNS di Lingkup Pemerintah Kabupaten Nganjuk
Menurut Jenis Jabatan Tahun 2024 (Di Luar Guru)

No	Nama Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan	PNS			Jumlah
			Struktural	Pelaksana	Fungsional	
1	SEKRETARIAT DAERAH	Unsur Pendukung Sekretariat Daerah	1			1
	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	Unsur Pendukung Sekretariat Daerah	4	13	6	23
	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Unsur Pendukung Sekretariat Daerah	6	9	21	36
	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	Unsur Pendukung Sekretariat Daerah	5	34	6	45
2	STAF AHLI	Unsur Pendukung Sekretariat Daerah	3			3
3	SEKRETARIAT DPRD	Unsur Pendukung Sekretariat DPRD	5	13	4	22
4	INSPEKTORAT DAERAH	Unsur Pengawasan	8	5	36	49
5	DINAS PENDIDIKAN	Urusan Pendidikan ,	6	112	3674	3792
6	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Urusan Kepemudaan dan Olahraga , Urusan Kebudayaan , Urusan Pariwisata	6	18	8	32
7	DINAS KESEHATAN	Urusan Kesehatan	7	38	30	75
	PUSKESMAS NGANJUK	Urusan Kesehatan	0	3	46	49
	PUSKESMAS BAGOR	Urusan Kesehatan	0	3	46	49
	PUSKESMAS REJOSO	Urusan Kesehatan	0	4	55	59
	PUSKESMAS SUKOMORO	Urusan Kesehatan	0	1	38	39
	PUSKESMAS PACE	Urusan Kesehatan	0		40	40
	PUSKESMAS TANJUNGANOM	Urusan Kesehatan	0	5	47	52
	PUSKESMAS KERTOSONO	Urusan Kesehatan	0	5	39	44
	PUSKESMAS PRAMBON	Urusan Kesehatan	0	4	43	47
	PUSKESMAS BERBEK	Urusan Kesehatan	0	1	47	48

No	Nama Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan	PNS			Jumlah
			Struktural	Pelaksana	Fungsional	
	PUSKESMAS LOCERET	Urusan Kesehatan	0	6	47	53
	PUSKESMAS NGRONGGOT	Urusan Kesehatan	0	5	48	53
	PUSKESMAS LENGKONG	Urusan Kesehatan	0	1	33	34
	PUSKESMAS GONDANG	Urusan Kesehatan	0	2	41	43
	PUSKESMAS PATIANROWO	Urusan Kesehatan	0	1	32	33
	PUSKESMAS BARON	Urusan Kesehatan	0	3	42	45
	PUSKESMAS WILANGAN	Urusan Kesehatan	0	4	32	36
	PUSKESMAS NGLUYU	Urusan Kesehatan	0	0	26	26
	PUSKESMAS NGETOS	Urusan Kesehatan	0	1	29	30
	PUSKESMAS SAWAHAN	Urusan Kesehatan	0	2	31	33
	PUSKESMAS JATIKALEN	Urusan Kesehatan	0	1	25	26
8	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Urusan Sosial , dan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6	5	8	19
9	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5	13	6	24
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6	17	3	26
11	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6	13	8	27
12	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Urusan Penanaman Modal	3	9	6	18
13	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Urusan Perindustrian dan Urusan Perdagangan	6	45	9	60
14	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	4	9	3	16
15	DINAS TENAGA KERJA	Urusan Tenaga Kerja dan Sub Urusan Transmigrasi	3	3	5	11
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Urusan Komunikasi dan Informatika . Urusan Statistik dan Urusan Persandian	6	8	7	21
17	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Urusan Pertanahan	25	117	13	155
18	DINAS PERHUBUNGAN	Urusan Perhubungan	8	38	5	51
19	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan	5	19	6	30
20	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Urusan Lingkungan Hidup	7	68	8	83
21	DINAS PERTANIAN	Urusan Pertanian	10	30	103	143

No	Nama Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan	PNS			Jumlah
			Struktural	Pelaksana	Fungsional	
22	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	Urusan Pangan dan Urusan Kelautan dan Perikanan	5	11	5	21
23	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	Urusan Kearsipan , dan Urusan Perpustakaan	5	5	7	17
24	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4	36	6	46
25	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	Sub Urusan Kebakaran	5	6	2	13
26	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Unsur Penunjang Perencanaan dan Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan	7	8	13	28
27	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Unsur Penunjang Keuangan	5	25	8	38
28	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Unsur Penunjang Keuangan	5	26	4	35
29	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Unsur Penunjang Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan	5	17	8	30
30	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Unsur Pemerintahan Umum	5	4	4	13
31	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Sub Urusan Kebakaran	5	3	5	13
32	RUMAH SAKIT DAERAH NGANJUK	Urusan Kesehatan	7	65	372	444
33	RUMAH SAKIT DAERAH KERTOSONO	Urusan Kesehatan	14	44	264	322
34	KECAMATAN NGANJUK	Unsur Kewilayahan	8	28	0	36
35	KECAMATAN BAGOR	Unsur Kewilayahan	5	7	0	12
36	KECAMATAN REJOSO	Unsur Kewilayahan	5	10	0	15
37	KECAMATAN SUKOMORO	Unsur Kewilayahan	6	5	0	11
38	KECAMATAN PACE	Unsur Kewilayahan	7	10	0	17
39	KECAMATAN TANJUNGANOM	Unsur Kewilayahan	6	17	0	23
40	KECAMATAN KERTOSONO	Unsur Kewilayahan	6	13	0	19
41	KECAMATAN PRAMBON	Unsur Kewilayahan	8	7	0	15
42	KECAMATAN BERBEK	Unsur Kewilayahan	8	8	0	16
43	KECAMATAN LOCERET	Unsur Kewilayahan	8	8	0	16
44	KECAMATAN NGRONGGOT	Unsur Kewilayahan	6	4	0	10
45	KECAMATAN LENGKONG	Unsur Kewilayahan	6	4	0	10
46	KECAMATAN PATIANROWO	Unsur Kewilayahan	4	8	0	12
47	KECAMATAN GONDANG	Unsur Kewilayahan	7	6	0	13
48	KECAMATAN BARON	Unsur Kewilayahan	7	10	0	17
49	KECAMATAN WILANGAN	Unsur Kewilayahan	7	5	0	12

No	Nama Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan	PNS			Jumlah
			Struktural	Pelaksana	Fungsional	
50	KECAMATAN NGLUYU	Unsur Kewilayahan	8	3	0	11
51	KECAMATAN NGETOS	Unsur Kewilayahan	7	4	0	11
52	KECAMATAN SAWAHAN	Unsur Kewilayahan	7	10	0	17
53	KECAMATAN JATIKALEN	Unsur Kewilayahan	6	2	0	8
54	KELURAHAN GUYANGAN KECAMATAN BAGOR	Unsur Kewilayahan	4	1	0	5
55	KELURAHAN KEDONDONG KECAMATAN BAGOR	Unsur Kewilayahan	3	2	0	5
56	KELURAHAN KAPAS KECAMATAN SUKOMORO	Unsur Kewilayahan	4	3	0	7
57	KELURAHAN SUKOMORO KECAMATAN SUKOMORO	Unsur Kewilayahan	3	1	0	4
58	KELURAHAN TANJUNGANOM KECAMATAN TANJUNGANOM	Unsur Kewilayahan	5	3	0	8
59	KELURAHAN WARUJAYENG KECAMATAN TANJUNGANOM	Unsur Kewilayahan	5	6	0	11
60	KELURAHAN BANARAN KECAMATAN KERTOSONO	Unsur Kewilayahan	5	1	0	6
61	KELURAHAN BEGADUNG KECAMATAN NGANJUK	Unsur Kewilayahan	4	2	0	6
62	KELURAHAN BOGO KECAMATAN NGANJUK	Unsur Kewilayahan	5	0	0	5
63	KELURAHAN CANGKRINGAN KECAMATAN NGANJUK	Unsur Kewilayahan	4	1	0	5
64	KELURAHAN GANUNGKIDUL KECAMATAN NGANJUK	Unsur Kewilayahan	4	1	0	5
65	KELURAHAN JATIREJO KECAMATAN NGANJUK	Unsur Kewilayahan	5	2	0	7
66	KELURAHAN KARTOHARJO KECAMATAN NGANJUK	Unsur Kewilayahan	3	2	0	5
67	KELURAHAN KAUMAN KECAMATAN NGANJUK	Unsur Kewilayahan	4	2	0	6
68	KELURAHAN KRAMAT KECAMATAN NGANJUK	Unsur Kewilayahan	5	3	0	8
69	KELURAHAN MANGUNDIKARAN KECAMATAN NGANJUK	Unsur Kewilayahan	5	2	0	7
70	KELURAHAN PAYAMAN KECAMATAN NGANJUK	Unsur Kewilayahan	5	1	0	6
71	KELURAHAN PLOSO KECAMATAN NGANJUK	Unsur Kewilayahan	5	2	0	7

No	Nama Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan	PNS			Jumlah
			Struktural	Pelaksana	Fungsional	
72	KELURAHAN RINGINANOM KECAMATAN NGANJUK	Unsur Kewilayahan	5	3	0	8
73	KELURAHAN WERUNGOTOK KECAMATAN NGANJUK	Unsur Kewilayahan	4	1	0	5
JUMLAH						**7048**

Sumber data : BKPSDM Kab. Nganjuk

Tabel 1.11
Statistik ASN Pemerintah Kabupaten Nganjuk Menurut Jenis Jabatan
Tahun 2020 – 2024

No.	Jenis Jabatan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Struktural	674	615	372	623	430
2.	Fungsional Umum	1.609	2.617	2.610	2.087	1.149
3.	Fungsional Pendidikan	4.799	3.167	3.077	3.343	3.664
4.	Fungsional Kesehatan	1.489	2.189	1.974	1.281	1.435
5.	Fungsional Lainnya	0	99	102	216	356
6	PPPK					4.399
Jumlah ASN		**8.571**	**8.687**	**8.135**	**7.550**	**11.433**

Sumber data : BKPSDM Kab. Nganjuk

Pada tabel di atas, terlihat bahwa komposisi pegawai ASN di Kabupaten Nganjuk pada tahun 2024 sebagian besar didominasi oleh PPPK dan diikuti dengan fungsional pendidikan (guru tenaga pendidik). Jumlah ASN struktural dan fungsional umum semakin menurun disebabkan karena adanya pegawai yang pensiun. Diharapkan dengan adanya penerimaan PPPK dapat memenuhi kebutuhan personil yang diharapkan sehingga kondisi ini akan berdampak baik terhadap kinerja pemerintahan dan pelayanan publik.

Tabel 1.12
Statistik ASN Pemerintah Kabupaten Nganjuk Menurut Pendidikan
Tahun 2020 - 2024

No.	Pendidikan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	SD	116	66	57	43	37

No.	Pendidikan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
2.	SLTP	139	130	101	84	85
3.	SLTA	948	1.171	893	775	1.016
4.	D-I	22	7	7	7	2
5.	D-II	135	91	91	55	65
6.	D-III	796	1.026	1.113	1.076	1.420
7.	D-IV	215	153	153	146	184
8.	S1	5.598	5.607	5.300	4.875	8.053
9.	S2	598	432	416	486	568
10.	S3	4	4	4	3	3
Jumlah ASN		**8.571**	**8.687**	**8.135**	**7.550**	**11.433**

Sumber data : BKPSDM Kab. Nganjuk

f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

1) Realisasi Menurut Jenis Pendapatan

Perencanaan pendapatan daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan realisasi pendapatan tahun sebelumnya, juga berdasarkan perkiraan pertumbuhan ekonomi daerah tahun 2024 yang berpengaruh terhadap masing-masing jenis penerimaan daerah. Pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Nganjuk diarahkan pada potensi pendapatan yang selama ini telah menjadi penerimaan daerah dengan tetap mengupayakan pendapatan yang baru. Pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. PAD berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dana perimbangan berasal dari bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dan penerimaan lain-lain. Bagian lain-lain pendapatan daerah yang sah berasal dari pendapatan hibah, bagi hasil pajak dari pemerintah provinsi, dana penyesuaian dan otonomi khusus, serta bantuan keuangan dari pemerintah provinsi.

Kebijakan perencanaan pendapatan daerah Tahun Anggaran 2024 untuk penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah Khusus Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 03 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum; Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha; dan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perijinan Tertentu. Sesuai arahan

Kementrian Dalam Negeri, Pendapatan mengalami pemutakhiran pada level jenis di aplikasi SIPD-RI.

Berikut arah kebijakan pendapatan dalam upaya meningkatkan kapasitas riil keuangan daerah antara lain:

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dengan melaksanakan penggalian potensi, pendataan obyek pajak/subyek pajak serta melakukan penyesuaian tarif yang diatur dengan Peraturan Daerah.
2. Optimalisasi pajak daerah juga dilaksanakan melalui restrukturisasi Pajak. Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis pajak yang yang bertujuan untuk menyelaraskan obyek pajak antara pajak pusat dan daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak.
3. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan melaksanakan sosialisasi kepada wajib pajak, pemberian sanksi kepada wajib pajak yang tidak patuh, melaksanakan pemasangan alat perekam transaksi, pemberian reward/hadiah kepada wajib pajak/wajib pungut dan meningkatkan pengawasan pajak.
4. Meningkatkan pengelolaan pajak dengan menggunakan sistem aplikasi pengelolaan pajak dan retribusi, pelayanan pajak secara online, pembayaran nontunai, melaksanakan pelayanan pajak keliling, berkoordinasi dengan instansi terkait, optimalisasi penagihan piutang pajak dan melaksanakan rekonsiliasi pajak daerah dengan tempat pembayaran.
5. Pendataan, optimalisasi dan pemanfaatan aset-aset idle pemerintah daerah sehingga dapat menambah pendapatan asli daerah.
6. Melaksanakan pendataan kendaraan di Wilayah Kabupaten Nganjuk serta berkoordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 terkait Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan mempersiapkan Peraturan Daerah sebagai landasan hukum pengenaan tarif.
7. Optimalisasi pungutan retribusi daerah.
8. Optimalisasi kinerja Badan Layanan Umum Daerah sehingga dapat mendukung kemandirian keuangan daerah.
9. Melaksanakan koordinasi, pembinaan, rekonsiliasi perangkat daerah penghasil.
10. Optimalisasi pemanfaatan dana salur, kinerja pemerintah daerah, ketepatan pelaporan sebagai syarat penerimaan dana transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi.

Tabel 1.13
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2024

No	Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
4	**Pendapatan Daerah**	**2.804.569.512.470,00**	**2.834.668.602.772,33**	**101,07**
4.1	Pendapatan Asli Daerah	481.571.527.997,00	486.161.502.239,33	100,95
4.2	Pendapatan Transfer	2.322.997.984.473,00	2.348.507.100.533,00	101,10
4.3	Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0	0	0

Sumber data : LRA TA 2024 (Unaudited) per 15 Februari 2025

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2024 tercapai sebesar Rp. 2.834.668.602.772,33 dengan penjelasan sebagai berikut :

a) Pendapatan Asli Daerah

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Kebijakan perencanaan PAD yaitu dengan penggalian sumber-sumber pendapatan pada sektor pajak dan retribusi daerah terus ditingkatkan, baik dengan jalan intensifikasi maupun ekstensifikasi secara selektif dan tidak berpotensi menghambat akselerasi perkembangan aktivitas ekonomi masyarakat. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nganjuk dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan. Namun demikian proporsinya masih relatif kecil bila dibandingkan dengan APBD secara keseluruhan. Untuk itu perencanaan ke depan harus diusahakan tetap semakin meningkat, sehingga prosentasenya terhadap APBD akan semakin besar. Dalam upaya peningkatan pendapatan diusahakan agar tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat.

Di tahun 2024, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp. 486.161.502.239,33 atau 100,95% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 481.571.527.997,00. Adapun rincian target dan realisasi PAD Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.14
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024

No	Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
4.1	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**481.571.527.997,00**	**486.161.502.239,33**	**100,95**
4.1.01	Pajak Daerah	153.308.200.000,00	164.519.508.865,00	107,31
4.1.02	Retribusi Daerah	306.950.339.998,00	301.393.391.072,94	98,19
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.641.297.791,00	4.641.297.791,06	100,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	16.671.690.208,00	15.607.304.510,33	93,62

Sumber data : LRA TA 2024 (Unaudited) per 15 Februari 2025

1) Pajak Daerah

   Realisasi penerimaan yang bersumber dari pendapatan Pajak Daerah adalah sebesar Rp. 164.519.508.865,00 atau 107,31% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.153.308.200.000,00.

2) Retribusi Daerah

   Realisasi penerimaan yang bersumber dari pendapatan Retribusi Daerah adalah sebesar Rp. 301.393.391.072,94 atau 98,19% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 306.950.339.998,00.

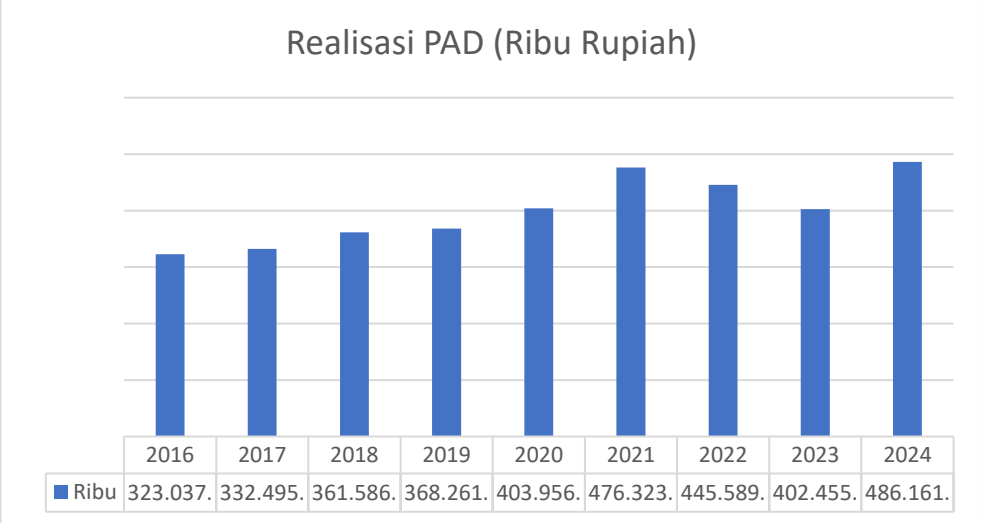
3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

   Realisasi pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan secara keseluruhan sebesar Rp. 4.641.297.791,06 atau 100% dari target yang ditetapkan yakni Rp. 4.641.297.791,00.

4) Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

   Realisasi penerimaan dari pos ini secara umum dapat memenuhi target dengan realisasi sebesar Rp. 15.607.304.510,33 atau 93,62% dari target yang ditetapkan yaitu Rp. 16.671.690.208,00.

Gambar 1.2
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024



Secara umum dapat disimpulkan bahwa semua komponen PAD dapat tercapai melampaui target yang telah ditetapkan. Di tahun 2024, perolehan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 486.161.502.239,33 atau 100,95% dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Bila dibandingkan dengan perolehan PAD tahun 2023 sebesar Rp. 402.487.512.960,60 maka terdapat kenaikan perolehan pendapatan sebesar Rp. 83.673.989.278,73.

b) Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer pada tahun 2024 telah mencapai sebesar Rp. 2.348.507.100.533,00 atau 101,10% dari target yang ditetapkan nilainya sebesar Rp. 2.322.997.984.473,00. Pendapatan Transfer terdiri atas realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp. 2.125.777.785.955,00 atau 100,55% dari target Rp. 2.114.152.654.473,00 dan realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp. 222.729.314.578,00 atau 106,65% dari target Rp. 208.845.330.000,00.

Tabel 1.15
Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2024

No	Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
4.2	**Pendapatan Transfer**	2.322.997.984.473,00	2.348.507.100.533,00	101,10
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.114.152.654.473,00	2.125.777.785.955,00	100,55
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	208.845.330.000,00	222.729.314.578,00	106,65

Sumber data : LRA TA 2024 (Unaudited) per 15 Februari 2025

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan utama dalam pengelolaan pendapatan daerah adalah bagaimana memanfaatkan pendanaan yang masih terbatas untuk memenuhi tuntutan pembangunan daerah yang terus meningkat. Selain itu kebijakan Pemerintah Pusat terhadap dana transfer yang tidak bersifat final menjadi permasalahan tersendiri untuk pemerintah daerah karena alokasi dana transfer sangat bergantung pada kinerja Pendapatan Dalam Negeri yang dihimpun oleh Pemerintah Pusat.

Dengan permasalahan tersebut di atas, Pemerintah Daerah harus cermat, tepat dan hati-hati dalam mengelola seluruh anggaran pendapatan daerah sehingga mampu memenuhi seluruh kebutuhan pembangunan. Pemerintah Daerah harus mampu memperhitungkan proyeksi penerimaan daerah secara tepat dengan mempertimbangkan kondisi aktual kehidupan perekonomian ditingkat nasional, regional dan internal di Kabupaten Nganjuk.

2) Realisasi Menurut Jenis Belanja

Penyusunan alokasi belanja daerah merupakan hal penting dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah. Belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

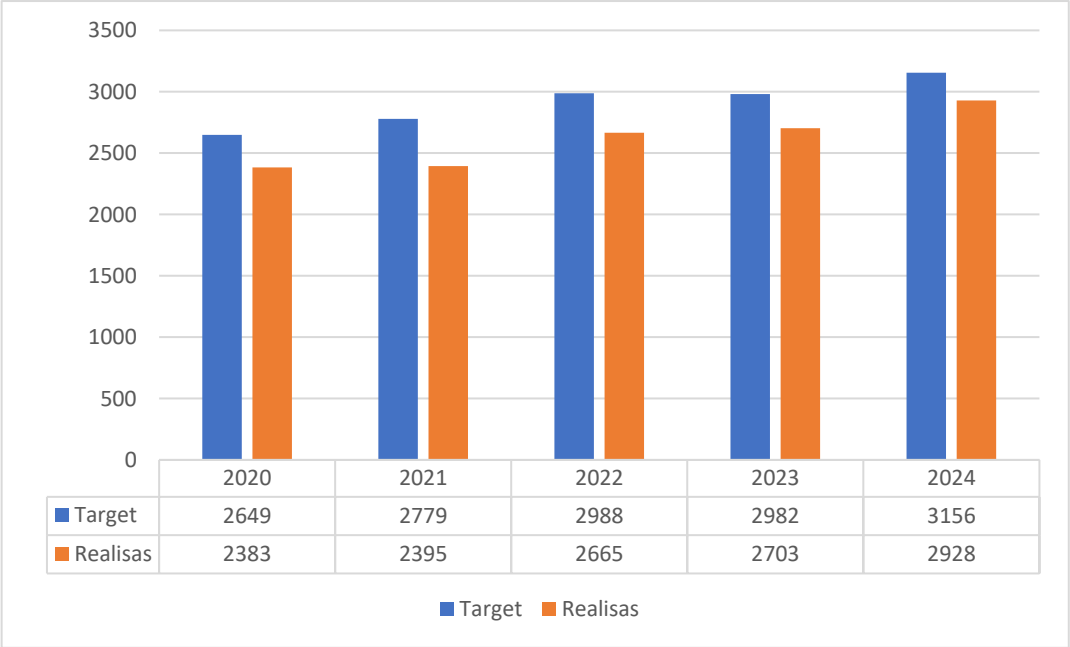
Secara prinsip pemanfaatan belanja daerah harus tetap mengedepankan efisiensi dan efektivitas sesuai dengan prioritas, yang diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis daerah. Pengelolaan belanja daerah yang diarahkan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik adalah dengan mengingat bahwa daerah berwenang mengatur dan mengurus urusan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu dalam pengelolaan belanja daerah harus dapat mencerminkan upaya-upaya dalam mengembangkan dan meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka mengelola belanja daerah yang berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat tersebut, maka dalam pelaksanaannya perlu memperhatikan *output* atas *input* yang telah dialokasikan sesuai target kinerja dari masing-masing Perangkat Daerah.

Kebijakan Belanja Daerah antara lain diarahkan pada: (1) Belanja untuk pemenuhan SPM; (2) Optimalisasi Belanja sesuai Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2024; (3) Dukungan belanja mandatory dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi

Jawa Timur; (4) Dukungan penyelenggaraan dan pengamanan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Legislatif, dan Pemilukada Tahun 2024; (5) Optimalisasi Forum Coorporate Sosial Responsibility; dan (6) Belanja lain dan belanja tidak terduga.

Deskripsi singkat realisasi belanja daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 dapat dilihat pada grafik berikut :

Gambar 1.3
Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2024 (Trilyun)



	2020	2021	2022	2023	2024
Target	2649	2779	2988	2982	3156
Realisas	2383	2395	2665	2703	2928

a) Target dan Realisasi Belanja Daerah

Pagu belanja daerah sesuai dengan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp. 3.156.317.558.374,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 2.928.371.783.276,78 atau 92,78%. Belanja Daerah meliputi Belanja Operasi yang dianggarkan sebesar Rp. 2.308.999.965.465,00 dan terealisasi Rp. 2.110.262.394.277,04 atau 91,39%, Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp. 409.304.842.914,00 dan terealisasi Rp. 392.972.257.999,74 atau 96,01%, Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp. 14.057.818.295,00 dan terealisasi Rp. 2.014.691.000,00 atau 14,33%, dan Belanja Transfer dianggarkan sebesar Rp. 423.954.931.700,00 dan terealisasi Rp. 423.122.440.000,00 atau 99,80%. Rincian target dan realisasi Belanja Daerah tersaji pada tabel berikut :

Tabel 1.16
Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2024

No	Belanja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
5	**BELANJA DAERAH**	**3.156.317.558.374,00**	**2.928.371.783.276,78**	**92,74**
5.1	**Belanja Operasi**	**2.308.999.965.465,00**	**2.110.262.394.277,04**	**91,39**
5.1.01	Belanja Pegawai	1.212.445.685.349,00	1.096.732.007.113,13	90,46
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	949.393.106.903,00	868.153.766.033,91	91,44
5.1.05	Belanja Hibah	133.150.423.213,00	131.630.571.130,00	98,86
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	14.010.750.000,00	13.746.050.000,00	98,11
5.2	**Belanja Modal**	**409.304.842.914,00**	**392.972.257.999,74**	**96,01**
5.2.01	Belanja Tanah	678.740.000,00	558.507.500,00	82,29
5.2.02	Belanja Peralatan dan Mesin	92.197.620.931,00	85.091.348.389,83	92,29
5.2.03	Belanja Gedung dan Bangunan	126.776.757.981,00	121.792.634.929,41	96,07
5.2.04	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi	180.940.817.260,00	176.963.643.805,50	97,80
5.2.05	Belanja Aset Tetap Lainnya	7.551.288.800,00	7.512.499.375,00	99,49
5.3	**Belanja Tidak Terduga**	**14.057.818.295,00**	**2.014.691.000,00**	**14,33**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	14.057.818.295,00	2.014.691.000,00	14,33
5.4	**Belanja Transfer**	**423.954.931.700,00**	**423.122.440.000,00**	**99,80**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	18.015.264.900,00	18.015.264.900,00	100,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	405.939.666.800,00	405.107.175.100,00	99,79

Sumber data : LRA TA 2024 (Unaudited) per 15 Februari 2025

Penjelasan lebih lanjut terhadap penyerapan belanja daerah sebagai berikut:

a.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp. 2.110.262.394.277,04 atau 91,39% dari target Rp. 2.308.999.965.465,00 yang meliputi Belanja Pegawai terserap sebesar 90,46%, Belanja Barang dan Jasa terserap sebesar 91,44%, Belanja Hibah terserap sebesar 98,86%, dan Belanja Bantuan Sosial terserap sebesar 98,11%.

a.2 Belanja Modal

Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp. 392.972.257.999,74 atau 96,01% dari target Rp. 409.304.842.914,00 yang meliputi Belanja Tanah terserap sebesar 82,29%, Belanja Peralatan dan Mesin sebesar 92,29%, Belanja Gedung dan Bangunan sebesar 96,07%, Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar 97,80%, dan Belanja Aset Tetap Lainnya sebesar 99,49%.

a.3 Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp. 2.014.691.000,00 atau 14,33% dari target Rp. 14.057.818.295,00.

a.4 Belanja Transfer

Belanja Transfer Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp. 423.122.440.000,00 atau 99,80% dari target Rp. 423.954.931.700,00 yang meliputi Belanja Bagi Hasil terserap sebesar 100,00% dan Belanja Bantuan Keuangan sebesar 99,79%.

3) Realisasi Menurut Jenis Pembiayaan

Dalam struktur APBD pembiayaan merupakan bagian penting yang bisa menutup anggaran apabila terjadi belanja daerah lebih besar dari pendapatan (defisit) dan sebaliknya apabila terjadi pendapatan lebih besar dari belanja, kelebihan pendapatan dapat dimanfaatkan dalam pembiayaan ini. Pembiayaan daerah di Tahun 2024 meliputi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dan penerimaan piutang daerah. SILPA diperoleh dari realisasi belanja yang lebih rendah dibandingkan rencana yang disebabkan antara lain oleh adanya sisa lelang, efisiensi belanja kegiatan yang belum bisa dilaksanakan, dan adanya pelampauan target pendapatan. Sedangkan pengeluaran pembiayaan digunakan untuk investasi jangka panjang yang direncanakan untuk penyertaan modal PT BPR Anjuk Ladang, PDAM, PDAU dan Bank UMKM Jatim. Kebijakan umum pembiayaan pada dasarnya merupakan bagian dari kebijakan umum pemerintah daerah yang dilakukan agar prioritas kegiatan daerah yang menjadi tuntutan masyarakat dan bertujuan untuk tetap terjaminnya terselenggaranya pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, meningkatkan pelayanan, meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat dan berfungsi sebagai penunjang terhadap pencapaian sasaran dari kegiatan yang diinginkan. Sebagai akibat dari banyaknya belanja daerah yang harus dianggarkan sementara pendapatan daerah sangat terbatas, sehingga mengakibatkan terjadinya defisit yang harus ditutup dari pembiayaan.

a) Target dan Realisasi Pembiayaan

Realisasi Penerimaan Pembiayaan pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp.352.632.439.018,01 atau 100,02% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.352.548.045.904,00. Penerimaan Pembiayaan terdiri atas dua komponen yaitu penerimaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya terealisasi sebesar Rp. 352.530.045.904,01 atau 100,00% dari target Rp. 352.530.045.904,00 dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

terealisasi Rp. 102.393.114,00 atau 568,85 dari target Rp. 18.000.000,00. Sedangkan realisasi Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp. 800.000.000,00 atau 100% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 800.000.000,00. Adapun rincian target dan realisasi pembiayaan daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 1.17
Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2024

No	Pembiayaan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	352.548.045.904,00	352.632.439.018,01	**100.02**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	352.530.045.904,00	352.530.045.904,01	100.00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberiaan Pinjaman Daerah	18.000.000,00	102.393.114,00	568,85
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**800.000.000,00**	**800.000.000,00**	**100**
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	800.000.000,00	800.000.000,00	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	**351.748.045.904,00**	**351.832.439.018,01**	**100,02**

Sumber data : LRA TA 2024 (Unaudited) per 15 Februari 2025

4) Pelaksanaan Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang Memuat Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja

Secara prinsip pemanfaatan belanja daerah harus tetap mengedepankan efisiensi dan efektivitas sesuai dengan prioritas, yang diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis daerah. Pengelolaan belanja daerah yang diarahkan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik adalah dengan mengingat bahwa Daerah berwenang mengatur dan mengurus urusan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu dalam pengelolaan belanja daerah harus dapat mencerminkan upaya-upaya dalam mengembangkan dan meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka mengelola belanja daerah yang berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat tersebut, maka dalam pelaksanaannya memperhatikan output atas input yang telah dialokasikan sesuai dengan target kinerja dari masing-masing Perangkat Daerah. Deskripsi singkat realisasi Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.18
Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran Tahun Anggaran 2024

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.692.815.717.040	1.541.260.496.061,06	358.162.338.895	343.995.341.581,03	0	0,00	0	0,00
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	932.292.493.116	841.694.000.115,00	112.360.202.175	110.960.773.636,50	0	0,00	0	0,00
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	609.886.075.388	560.526.978.146,06	33.647.929.322	26.123.010.469,00	0	0,00	0	0,00
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	87.452.260.571	81.076.710.455,00	197.888.527.076	193.001.081.605,50	0	0,00	0	0,00
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	14.464.353.750	13.132.299.217,00	4.958.925.430	4.853.145.812,00	0	0,00	0	0,00
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	28.535.234.465	25.858.719.140,00	9.019.227.392	8.793.266.004,03	0	0,00	0	0,00
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	20.185.299.750	18.971.788.988,00	287.527.500	264.064.054,00	0	0,00	0	0,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	192.792.624.218	180.312.166.489,31	24.266.175.145	23.529.866.263,58	0	0,00	0	0,00
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	10.771.248.652	9.569.351.954,00	325.881.650	310.888.950,00	0	0,00	0	0,00
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.273.496.900	1.204.961.417,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	7.164.162.941	6.729.559.007,98	240.600.300	236.431.225,00	0	0,00	0	0,00
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	3.279.878.000	2.548.995.683,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	28.758.240.428	27.002.659.750,58	5.632.905.422	5.525.452.715,30	0	0,00	0	0,00
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI	7.147.016.350	6.682.054.450,00	2.232.641.650	2.226.100.497,00	0	0,00	0	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	12.147.014.911	11.611.286.359,00	243.821.319	243.291.000,00	0	0,00	0	0,00
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	28.031.417.880	27.201.349.406,00	221.612.250	214.971.850,00	0	0,00	0	0,00
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	35.299.090.350	33.044.445.674,23	7.760.408.435	7.569.932.747,94	0	0,00	0	0,00
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	19.851.698.134	18.790.849.983,00	2.775.268.711	2.677.885.150,00	0	0,00	0	0,00
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	6.254.454.599	5.548.200.187,00	1.047.057.539	1.025.735.979,00	0	0,00	0	0,00
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	9.852.602.976	9.008.558.092,29	955.334.400	925.892.500,00	0	0,00	0	0,00
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	11.845.669.880	10.746.404.841,00	202.674.000	198.680.000,00	0	0,00	0	0,00
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	502.403.000	496.065.450,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	800.696.000	741.924.858,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.863.691.600	2.843.958.685,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	1.048.416.727	951.281.246,00	600.194.281	521.665.435,00	0	0,00	0	0,00
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	5.901.424.890	5.590.259.445,23	2.027.775.188	1.852.938.214,34	0	0,00	0	0,00
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	68.904.113.801	64.100.565.489,45	5.680.376.450	4.951.178.712,73	0	0,00	0	0,00
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.007.786.883	972.014.755,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.532.222.900	3.276.609.423,00	231.740.000	173.983.000,00	0	0,00	0	0,00
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	48.206.492.418	44.572.733.204,00	1.281.074.900	1.175.892.700,00	0	0,00	0	0,00
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	4.929.934.560	4.666.053.155,00	3.545.850.000	2.993.659.512,73	0	0,00	0	0,00

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	11.206.327.040	10.595.304.952,45	621.711.550	607.643.500,00	0	0,00	0	0,00
3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	21.350.000	17.850.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	139.471.457.694	127.434.042.122,36	8.724.040.118	8.477.484.375,00	0	0,00	0	0,00
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	64.053.923.725	58.118.139.207,36	4.580.272.952	4.377.148.750,00	0	0,00	0	0,00
4.02	SEKRETARIAT DPRD	75.417.533.969	69.315.902.915,00	4.143.767.166	4.100.335.625,00	0	0,00	0	0,00
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	58.276.234.640	51.624.863.793,80	1.588.034.656	1.530.177.641,00	14.057.818.295	2.014.691.000,00	423.954.931.700	423.122.440.000,00
5.01	PERENCANAAN	9.192.023.190	8.642.034.911,00	350.815.150	329.050.141,00	0	0,00	0	0,00
5.02	KEUANGAN	29.956.571.200	26.050.535.865,80	1.112.443.506	1.094.878.000,00	14.057.818.295	2.014.691.000,00	423.954.931.700	423.122.440.000,00
5.03	KEPEGAWAIAN	9.416.490.450	8.341.536.046,00	124.776.000	106.249.500,00	0	0,00	0	0,00
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	2.360.000.000	1.983.433.363,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	7.351.149.800	6.607.323.608,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	12.186.453.057	11.187.338.164,00	1.617.551.793	1.601.497.916,00	0	0,00	0	0,00
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	12.186.453.057	11.187.338.164,00	1.617.551.793	1.601.497.916,00	0	0,00	0	0,00
7	UNSUR KEWILAYAHAN	86.825.487.784	77.924.914.211,06	8.863.979.994	8.538.712.510,40	0	0,00	0	0,00
7.01	KECAMATAN	86.825.487.784	77.924.914.211,06	8.863.979.994	8.538.712.510,40	0	0,00	0	0,00
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	57.727.877.231	56.418.007.946,00	402.345.863	347.999.000,00	0	0,00	0	0,00
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	57.727.877.231	56.418.007.946,00	402.345.863	347.999.000,00	0	0,00	0	0,00
	Jumlah	**2.308.999.965.465**	**2.110.262.394.277,04**	**409.304.842.914**	**392.972.257.999,74**	**14.057.818.295**	**2.014.691.000,00**	**423.954.931.700**	**423.122.440.000,00**

Sumber data : LRA TA 2024 (Unaudited) per 15 Februari 2025

1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah

A. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Berdasarkan perumusan permasalahan pembangunan di atas dan hasil analisis capaian kinerja pembangunan daerah Kabupaten Nganjuk periode 2018 - 2022 sebagaimana diuraikan pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 - 2026 BAB II Gambaran Kondisi Umum Daerah, maka permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Nganjuk meliputi aspek sebagai berikut:

1. Permasalahan Aspek Kesejahteraan Rakyat

a. Belum optimalnya upaya pengentasan kemiskinan yang ditunjukkan dengan angka kemiskinan ekstrem yang naik.

Tingkat kemiskinan merupakan kondisi yang mencerminkan belum terwujudnya kesejahteraan rakyat pada aspek ekonomi. Angka kemiskinan menunjukkan penurunan pada tahun 2021 sebesar 11,85% dan tahun 2022 sebesar 10,70%. Hal yang perlu menjadi perhatian adalah meskipun angka kemiskinan menurun akan tetapi angka kemiskinan ekstrem menunjukkan angka yang meningkat. Angka kemiskinan ekstrem Kabupaten Nganjuk pada tahun 2021 sebesar 1,11% meningkat pada tahun 2022 menjadi 1,36%. Kemiskinan ekstrem merupakan kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tapi juga akses pada layanan sosial (United Nations, 1996). Berdasarkan Bank Dunia, penduduk miskin ekstrem adalah penduduk yang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak lebih dari USD 1,9 PPP (Purchasing Power Parity). Pada Maret 2021, Garis Kemiskinan Ekstrem diperkirakan sebesar Rp11.941,12/orang/hari atau Rp358.233,6/orang/bulan (BPS, 2021)

b. Belum optimalnya intensifikasi serta diversifikasi produksi pertanian.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nganjuk diukur dari pertumbuhan/perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan menunjukkan tren pemulihan setelah pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi menurun di posisi – 1,71%, kemudian tumbuh pada tahun 2021 menjadi 3,61% serta pada tahun 2022 menjadi 4,84%, dengan sektor unggulan pertanian yang meskipun produksinya meningkat dan masih menjadi sektor dominan namun kontribusinya mengalami tren penurunan (tahun 2017 sebesar 30,78%, tahun 2022 menjadi 27,33%) seiring dengan peningkatan kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor serta sektor industri pengolahan. Sebagai daerah yang mayoritas penduduk bergantung pada sektor pertanian sebagai

mata pencaharian, maka sektor pertanian membutuhkan prioritas penyelesaian masalah melalui upaya intensifikasi pertanian serta diversifikasi produk pertanian. Selain itu, tantangan utama pada sektor pertanian adalah perubahan iklim yang berpengaruh pada masa tanam ataupun masa panen serta kualitas hasil pertanian sehingga peran teknologi pertanian dan pengendalian mutu menjadi penting. Di samping itu, adanya wabah penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak yang terjadi pada Tahun 2022 harus menjadi perhatian dengan kebijakan surveilanse, pengendalian serta pengawasan terhadap komoditas hewan ternak selama Pandemi Covid-19 terbukti sektor primer menjadi sektor penopang utama dan cenderung resistan terhadap situasi global. Secara rinci permasalahan strategis di sektor pertanian antara lain :

- Kurangnya penerapan pupuk berimbang, kualitas bibit, benih dan teknologi pertanian yang masih rendah (belum bersertifikat) serta penerapan teknologi yang masih terbatas
- Terbatasnya ketersediaan infrastruktur prasarana pertanian
- Kurang optimalnya pemanfaatan alat mesin pertanian
- Perlunya kebijakan terkait peningkatan kesejahteraan petani dan meningkatkan produksi pertanian salah satunya dengan penetapan Perda LP2B
- Berkembangnya penyakit hewan menular strategis baik yang bersifat zoonosis maupun tidak
- Belum optimalnya pelaksanaan Gerakan pengendalian OPT
- Adanya ancaman bencana pertanian akibat perubahan iklim dan serangan OPT
- Kurangnya pengetahuan dan keterampilan petani, terjadinya alih fungsi lahan pertanian.

c. *Belum optimalnya pemberdayaan usaha mikro, kecil dan koperasi serta pengembangan ekonomi kreatif.*

Belum optimalnya pemberdayaan koperasi ditunjukkan dengan sebanyak 372 koperasi aktif dari 972 koperasi yang terdaftar, hal ini karena kurangnya pengawasan dan pembinaan secara intensif. Pelaku usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal menunjukkan peningkatan, dilihat dari bertambahnya pelaku usaha yang memiliki legalitas. Dari data yang diambil dari tahun 2021, pertumbuhan jumlah pelaku usaha mikro sebanyak 7.389 dan untuk tahun berjalan 2022 data sementara saat ini sampai dengan bulan Agustus 2022 sebanyak 4.080 pelaku usaha mikro yang mayoritas sekitar 70% merupakan sektor usaha informal. Penyebab utama permasalahan ini adalah kurangnya sinergi dalam pemberdayaan usaha mikro dan

koperasi yang dapat diatasi dengan cara meningkatkan keterpaduan program pemerintah daerah dengan seluruh stakeholder. Permasalahan strategis terkait dengan sektor koperasi, usaha mikro antara lain :

- Prosentase koperasi yang sehat masih rendah sebesar 26,5%
- Pertumbuhan koperasi yang sehat masih rendah sebesar 0,8%
- Pertumbuhan pelaku usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal masih rendah sebesar 2%
- Pemahaman pengurus koperasi terhadap regulasi perkoperasian masih rendah
- Pengembangan ekonomi kreatif masih belum optimal

d. *Belum optimalnya penanganan ketahanan pangan.*

Ketahanan pangan masih menjadi tantangan di Kabupaten Nganjuk. Ketahanan pangan suatu daerah diindikasikan antara lain dalam bentuk ketersediaan pangan dan akses pangan. Dalam hal ketersediaan pangan, meskipun secara target kinerja periode 2016 – 2018 telah terpenuhi target peningkatan ketersediaan pangan pada tahun 2016 sebesar 3,73% Tahun 2017 sebesar 3,50% dan pada tahun 2018 sebesar 3,07%. Dari data tersebut meskipun ketersediaan makanan tercukupi, tetapi ada kecenderungan penurunan. pada tahun 2022 ketersediaan pangan baru tercapai 94,25 % dibandingkan target yang diharapkan. Salah satu penyebab penurunan adalah makin berkurangnya lahan produktif yang beralih fungsi. Selain itu permasalahan strategis terkait ketahanan pangan dan perikanan antara lain dapat diuraikan sebagai berikut :

- Konsumsi masyarakat terhadap gizi seimbang masih kurang
- Tingginya fluktuasi harga pangan
- Masih banyaknya pangan yang mengandung bahan tambahan
- Pangan yang kurang untuk dikonsumsi
- Produksi ikan konsumsi menurun
- Harga pakan ikan masih tinggi
- Ketersediaan bibit ikan unggul masih kurang
- Teknologi budidaya perikanan masih rendah
- Tingkat konsumsi ikan masih rendah
- Terbatasnya sarana dan prasarana hasil perikanan

e. *Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan seni budaya dan kepariwisataan daerah dan desa berbasis potensi budaya, kearifan lokal serta pemberdayaan produk unggulan daerah.*

Kabupaten Nganjuk memiliki kekayaan seni, budaya, dan potensi pariwisata, namun pengembangannya belum optimal. Event kesenian dan kebudayaan yang diselenggarakan dalam periode 2018-2022 hanya berjumlah 8 kegiatan setiap tahun. Pada tahun 2022, sekitar 30% dari warisan seni budaya telah dilestarikan dari total 37 warisan seni budaya yang menjadi potensi Kabupaten Nganjuk. Sementara itu, pelestarian situs dan benda cagar budaya sudah cukup optimal dengan capaian kinerja 100% pada tahun 2022. Pada tahun 2022, peresmian Bendungan Semantok menjadi momentum pengembangan destinasi wisata baru Kawasan Bendungan Semantok. Penyebab utama permasalahan pengembangan seni, budaya, dan pariwisata adalah pengembangan pariwisata dan pengelolaan destinasi wisata belum optimal terkait peran masyarakat, pelaku usaha pariwisata, promosi dan manajemen pariwisata, serta pengembangan dan pengelolaan kekayaan kebudayaan daerah yang beragam belum optimal.

f. Pemerataan aksesibilitas pendidikan belum optimal.

Salah satu upaya yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah melalui pendidikan. Pemerataan dan kualitas pendidikan masih menjadi permasalahan di Kabupaten Nganjuk. Dilihat dari segi pemerataan Angka Partisipasi Murni tingkat SD/MI pada tahun 2022 masih sebesar 89,37%, tingkat SMP/MTs masih di kisaran 94,79%, SMA/MA/SMK sebesar 63,35%, dan PAUD kurang dari 100%. Selain itu masih ada anak putus sekolah SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK karena berbagai hal. Angka partisipasi sekolah pada jenjang PAUD dan Sekolah Dasar belum mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi penduduk usia sekolah di rentang usia 5-6 Tahun dan 7-15 Tahun belum menempuh pendidikan sesuai dengan usianya. Dari sisi kualitas pendidikan, angka literasi di Kabupaten Nganjuk telah mencapai kompetensi minimum yaitu tercapai dengan nilai rata-rata sebesar 1,85 (dengan rentang nilai 1-3), bahwa peserta didik memiliki kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi dan mengevaluasi beragam jenis teks. Kemudian capaian numerik peserta didik masih berada pada area merah yaitu dengan rata-rata pencapaian sebesar 1,68 (dengan rentang nilai 1-3). Hal ini menunjukkan bahwa peserta didik di Kabupaten Nganjuk belum memiliki kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan. Kemudian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang berakreditasi B masih tercapai sebesar 35,52%. Hal ini menunjukkan bahwa 35,52% belum memenuhi standar

nasional pendidikan. Oleh sebab itu, diperlukan strategi dan arah kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan pendidikan. Penyebab utama permasalahan pendidikan adalah belum optimalnya pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar dan menengah, mutu pendidik dan tenaga kependidikan yang masih kurang, serta manajemen pelayanan pendidikan yang belum optimal.

g. Belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan.

Derajat kesehatan masyarakat merupakan bagian dari aspek kesejahteraan rakyat dalam lingkup fokus kesejahteraan sosial. Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Nganjuk yang di dalamnya memuat Indikator Indeks Kesehatan dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. IPM pada tahun 2017 sebesar 70,69 dan tahun 2022 meningkat menjadi 72,93 yang mengindikasikan kesejahteraan masyarakat meningkat. Sedangkan usia harapan hidup masyarakat Nganjuk pada tahun 2017 sebesar 71,44 dan di tahun 2022 meningkat menjadi 71,95 tahun. Hal ini mengindikasikan derajat kesehatan masyarakat semakin membaik. Meskipun demikian, untuk mewujudkan sumber daya manusia masyarakat Kabupaten Nganjuk yang berkualitas, masih terdapat permasalahan kesehatan yang harus diselesaikan antara lain:

- Angka kematian bayi 5,81 per 1000 kelahiran, angka kematian ibu 245,5 per 100.000 kelahiran, balita gizi buruk, balita stunting 11%, serta penyakit HIV dan TBC
- Bangunan fisik Puskesmas dan Pustu belum semua memenuhi standar
- Jumlah, sebaran, dan kualitas tenaga kesehatan masih belum merata
- Kualitas pelayanan kesehatan belum maksimal
- Cakupan pembiayaan kesehatan bagi penduduk miskin baru mencapai 74,58% dari target 100%

Di samping itu, pertumbuhan penduduk harus dikendalikan sehingga anak-anak yang baru lahir akan meningkatkan *human capital* di masa depan. Berdasarkan data BPS jumlah penduduk Kabupaten Nganjuk tahun 2022 adalah sebesar 1.120.637 atau meningkat 0,98% yang tentunya membutuhkan strategi dan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Permasalahan strategis di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana antara lain :

- Adanya mitos/kultur yang negatif terhadap jenis KB MOP, Pasangan Usia Subur (PUS) tidak ber- KB yang Tidak Ingin Anak Lagi (TIAL) dan Ingin Anak Tunda (IAT) perlu pembinaan menjadi Peserta KB
- Masih terdapat keluarga beresiko stunting yang perlu mendapat pendampingan

- Adanya keterbatasan daya dukung (kapasitas SDM dan kestabilan sistem informasi pusat) dalam validasi data KB
- Pengembangan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) belum maksimal
- Pengelolaan Kampung Keluarga Berkualitas (KB) masih belum maksimal
- Pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) masih belum maksimal

h. *Belum optimalnya pengarusutamaan gender dan hak anak.*

Kesetaraan dan keadilan gender serta pemenuhan hak anak merupakan bagian dari kesejahteraan rakyat yang ingin dicapai pada aspek kesejahteraan sosial. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Nganjuk mulai tahun 2018 sebesar 93,26 dan di tahun 2021 masih di kisaran 93,26. Sehingga ini stagnan dan perlu di tingkatkan. Namun demikian, permasalahan utama yang terjadi adalah perbedaan pendapatan rata-rata antara perempuan jauh lebih kecil dari laki-laki serta partisipasi perempuan dalam jabatan publik (DPRD, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa) masih kurang. Ini menjadi masalah, sebab dengan jumlah penduduk perempuan lebih banyak daripada penduduk laki-laki serta meningkatnya kesadaran mengenai peran perempuan dalam kehidupan sosial, akan menimbulkan permasalahan perempuan yang perlu mendapatkan penyelesaian. Di sisi lain terkait perlindungan dan pemenuhan hak anak, menimbulkan tuntutan kebutuhan antara lain pendidikan, kesehatan, perlindungan dari ancaman kekerasan, dan hak-hak anak lainnya. Secara umum permasalahan teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan dan anak antara lain:

- Perlu ditingkatkannya kapasitas SDM terkait psikolog klinis dan konselor
- Penanganan kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak secara terpadu masih kurang maksimal.
- Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh migran.
- Belum adanya dukungan layanan PPA berupa UPT PPA sesuai Amanat UU Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) bagi Kabupaten/Kota wajib memiliki UPT PPA
- Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan seksual, dan penipuan, terlihat dari kasus pornografi dan cyber crime.
- Belum tersedianya aplikasi pengelolaan Data Gender dan Anak

2. Permasalahan Daya Saing Daerah

a. Belum optimalnya peningkatan kualitas infrastruktur pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman serta keselamatan transportasi.

Ketersediaan infrastruktur yang berkualitas serta penyelenggaraan transportasi yang berkeselamatan berkontribusi dalam peningkatan produktivitas, konsumsi, kualitas hidup masyarakat, pergerakan arus orang, barang dan jasa, menciptakan daya tarik investasi dan bermuara pada pertumbuhan ekonomi serta daya saing daerah. Kabupaten Nganjuk sudah berupaya untuk menyediakan infrastruktur yang berkualitas serta penyelenggaraan transportasi yang berkeselamatan namun masih terdapat beberapa permasalahan dalam pemenuhannya. Permasalahan pada infrastruktur pekerjaan umum di antaranya:

- Masih terdapat masyarakat yang belum mengakses sanitasi layak (kloset leher angsa dilengkapi dengan tangki septik), serta sulitnya mewujudkan akses sanitasi aman sesuai dengan target RPJMN Tahun 2024 sebesar 15% karena Kabupaten Nganjuk belum memiliki IPLT.
- Capaian akses air minum jaringan perpipaan Kabupaten Nganjuk masih 15,2% belum mencapai 30% sesuai dengan target yang ditetapkan RPJMN pada tahun 2024. Untuk itu diperlukan upaya peningkatan, perluasan dan pembangunan SPAM jaringan perpipaan baik melalui PDAM, penyelenggaraan SPAM oleh Dinas PUPR maupun kegiatan berbasis masyarakat.
- Kurangnya ketersediaan air irigasi dibandingkan dengan kebutuhan
- Tingkat kerusakan jalan dan jembatan kabupaten lebih cepat dibanding laju pembangunan jalan. Disamping itu Pasal 9 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, mengamanatkan setiap ruas jalan harus ditetapkan statusnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan pengelompokannya yaitu Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten, Jalan Kota, dan Jalan Desa sehingga perlu adanya penetapan status seluruh ruas jalan di Kabupaten Nganjuk sesuai dengan pengelompokan dan kewenangan penetapannya.
- Terdapat ruas jalan yang berada dalam kawasan hutan
- Masih terdapat bangunan gedung daerah yang tidak berfungsi dengan baik
- Kurang optimalnya penyediaan infrastruktur persampahan untuk menunjang layananan pengelolaan persampahan
- Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai

Adapun permasalahan pada pemenuhan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman di antaranya:

- Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah
- Perlunya penyediaan rumah bagi warga terdampak bencana maupun program pemerintah (SPM Bidang Perumahan)
- Penanganan Kawasan kumuh di kabupaten Nganjuk sampai dengan 2022 baru mencapai 62,74% dari luasan kawasan kumuh 131,2 Ha yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati Nomor 188/208/K/411.012/2020 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Nganjuk
- Menurunnya kualitas lingkungan permukiman yang berpotensi menimbulkan kawasan kumuh baru.
- Masih terbatasnya penyediaan prasarana dan sarana dasar permukiman
- Rendahnya pemahaman teknis masyarakat dan dunia usaha dalam pengembangan perumahan dan kawasan permukiman
- Masih adanya masalah pertanahan (pemanfaatan tanah kosong untuk kepentingan umum yang belum terinventarisasi, proses legalisasi pengadaan tanah untuk pembangunan fasilitas umum yang tertunda, proses administrasi tukar menukar lahan/ kawasan hutan untuk kepentingan umum dan permukiman).

Dari sisi pemenuhan keselamatan transportasi terdapat permasalahan masih tingginya rasio kecelakaan lalu lintas (per 10.000 kendaraan) yang dipengaruhi oleh:

- Rendahnya kesadaran pengguna lalu lintas
- Terdapat kendaraan yang tidak memenuhi syarat laik teknis jalan
- Adanya perlintasan sebidang kereta api yang tidak berpalang pintu
- Kurangnya fasilitas perlengkapan jalan
- Peningkatan volume kendaraan pribadi
- Kondisi sarana dan prasarana transportasi darat urang memadai.
- Belum optimalnya pelayanan angkutan sekolah

b. Belum optimalnya peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Permasalahan strategis terkait peningkatan kualitas lingkungan hidup antara lain :

- Menurunnya kualitas air sungai sebagai sumber air baku
- Belum optimalnya penanganan sampah perkotaan
- Belum optimalnya pengendalian, pencemaran dan kerusakan lingkungan

- Belum optimalnya management pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun
- Masih kurangnya ruang terbuka hijau (RTH)
- Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup

c. *Belum optimalnya strategi peningkatan iklim investasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja terdidik pada sektor pertanian, perdagangan dan industri.*

Iklim investasi merupakan bagian dari aspek daya saing daerah yang mempengaruhi tingkat investasi. Investasi merupakan salah satu indikator penting dalam peningkatan kegiatan pembangunan perekonomian daerah. Investasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru sehingga dapat diharapkan mampu mengurangi beban pengangguran dan menanggulangi masalah kemiskinan. Kinerja investasi di Kabupaten Nganjuk berdasarkan nilai investasi antara tahun 2017 - 2021 menunjukkan terjadi fluktuasi nilai investasi dari tahun ke tahun. Faktor eksternal yang paling berpengaruh adalah pada tahun 2020-2021 situasi pandemi covid-19 yang berpengaruh pada perekonomian. Pada tahun 2022 dan seterusnya yang menunjukkan tren pemulihan harus dijadikan momentum untuk Kabupaten Nganjuk agar dapat memaksimalkan potensi dan keunggulan komparatif untuk menarik investasi. Faktor pendukung bagi tumbuhnya iklim investasi daerah, seperti kondusifitas daerah yang ditunjukkan dengan angka kriminalitas dan gangguan trantibum ataupun potensi konflik daerah, infrastruktur pendukung, dan faktor letak geografis yang strategis. Permasalahan strategis terkait penanaman modal adalah menurunnya realisasi investasi penanaman modal yang antara lain dikarenakan belum optimalnya kebijakan yang mendorong iklim penanaman modal yang kondusif dan proses pelayanan perizinan belum berjalan secara optimal. Sementara itu, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2013, jenis pajak daerah terdapat 10 jenis meliputi Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; Pajak Parkir; Pajak Air Tanah; Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Untuk mendukung peningkatan investasi, telah diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal. Salah satu faktor dan strategi

pendorong investasi adalah kebijakan penataan ruang yang belum optimal. Permasalahan di bidang penataan ruang antara lain :

- Belum dikembangkannya Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh. Hal ini disebabkan oleh belum berkembangnya sinergitas serta kerjasama antar pelaku-pelaku pengembangan kawasan (pemerintah, swasta, masyarakat)
- Belum efektifnya penerapan regulasi maupun dokumen perencanaan tata ruang dalam pengendalian pemanfaatan ruang, karena Rencana Detail Tata Ruang yang tersusun masih belum ditetapkan sebagai peraturan daerah
- Perkembangan kawasan perkotaan yang tidak seimbang, dan belum sesuai dengan pemanfaatannya.
- Pada sektor ketenagakerjaan, permasalahan strategis antara lain tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) masih tinggi sebesar 4,74% pada tahun 2022, belum tersedianya Balai/Workshop Latihan Kerja, masih adanya sengketa antara pengusaha dan pekerja, dan terbatasnya kuota penempatan transmigran tidak sebanding dengan animo masyarakat yang ingin mengikuti program transmigrasi.
- Permasalahan strategis sektor perdagangan dan perindustrian antara lain daya saing industri masih rendah ditunjukkan dengan rendahnya kualitas produk dan standarisasi produk, jumlah Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang dilayani belum maksimal, penataan sarana dan prasarana distribusi perdagangan belum optimal, belum dicapai stabilisasi harga yang masih ditentukan pedagang/pasar, belum siapnya produk yang siap diekspor dan belum optimalnya penataan toko modern.

d. Kurangnya akselerasi penciptaan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), reformasi birokrasi dan electronic government menuju pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean government).

Masih terdapat permasalahan dalam tata kelola pemerintahan di Kabupaten Nganjuk yang bisa dilihat dari adanya kesenjangan kinerja urusan penunjang pemerintahan daerah antara lain pelayanan publik, perencanaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan sumber daya aparatur sipil negara, yang perlu didukung teknologi pengawasan, dan fungsi penyusunan kebijakan daerah. Hal ini dapat dilihat pada nilai SAKIP Tahun 2022 yang memperoleh predikat B dan predikat IRB B serta nilai indeks SPBE 2,18 atau kategori Cukup membuktikan perlunya akselerasi untuk peningkatan kualitas reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Pada aspek pengelolaan keuangan, masih terdapat permasalahan terutama ketergantungan pendapatan daerah

pada dana transfer meskipun kontribusi pendapatan asli daerah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun padahal pajak daerah berpotensi naik seiring dengan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Nganjuk. Penyebab utama permasalahan adalah pengelolaan Pendapatan Asli Daerah kurang optimal, tuntutan pelayanan semakin tinggi di tengah perkembangan jumlah wajib pajak dan aparatur pelaksana pemungutan Pendapatan Asli Daerah yang kurang proporsional dan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Selain itu, terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang secara substansi menekankan kemandirian fiskal daerah perlu menjadi fokus perhatian dalam perbaikan tata Kelola APBD ke depannya. Selain itu juga, belum optimalnya tata kelola aset daerah dan komitmen Perangkat Daerah dalam penyusunan dokumen pengganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan menjadi permasalahan utama pada pengelolaan keuangan daerah. Penyebab utama permasalahan kepegawaian adalah belum optimalnya peningkatan kapasitas dan kompetensi yang mengarah pada peningkatan profesionalisme sumber daya aparatur; belum optimalnya pengembangan karier aparatur; belum optimalnya standar kompetensi jabatan untuk seluruh level jabatan; belum terintregasi Sistem Informasi Kepegawaian Kabupaten Nganjuk; belum optimalnya analisa kebutuhan pengembangan kompetensi; objektivitas sistem penilaian kinerja yang belum terukur pada aspek pengawasan, dan masih terdapat permasalahan menyangkut efektivitas tindak lanjut temuan pengawasan. Penyebab utama permasalahan adalah kurangnya sumber daya manusia aparatur pengawas khususnya jumlah auditor yang masih kurang. Permasalahan lainnya dalam fungsi koordinasi ini adalah realisasi nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang pada tahun 2021 mendapat predikat B (65,51) dan Indeks Reformasi Birokrasi pada tahun 2021 mendapat predikat CC (59,04) . Penyebab utama permasalahan antara lain kurangnya kapasitas sumber daya manusia, kurang maksimalnya pelayanan publik, belum optimalnya manajemen pemerintahan berbasis kinerja, penerapan e-gov untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan juga belum menunjukkan hasil yang optimal.

e. *Belum optimalnya koordinasi upaya kesiapsiagaan dan mitigasi bencana serta penciptaan stabilisasi ketentraman, ketertiban, kerukunan yang menjunjung tinggi budaya gotong royong masyarakat.*

Penanganan kebencanaan serta penciptaan keamanan dan ketertiban merupakan bagian dari pelayanan urusan dasar wajib yang diselenggarakan pemerintahan daerah. Kabupaten Nganjuk tergolong daerah kategori tinggi rawan bencana dengan skor Indeks Resiko Bencana sebesar 152,8. Penyebab utama permasalahan antara lain disebabkan belum adanya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Nganjuk, aparatur yang ada belum memiliki kompetensi dan jumlah yang memadai, perlu adanya pemutakhiran kajian atas risiko bencana dan pemetaannya, dan belum optimalnya tim reaksi cepat penanggulangan bencana di skala / tingkat kabupaten. Di samping itu masih ada konflik yang terkait pemilihan kepala desa maupun perangkat desa, tindak pidana, perkelahian antar perguruan silat serta adanya gangguan trantibum akibat proses perizinan dan aktifitas perusahaan, rendahnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi perda dan perkada, dan peran Linmas Tingkat Desa/Kelurahan yang belum optimal. Selain itu, situasi kondusif menjelang dan pasca pelaksanaan Pemilu, Pemilukada dan Pilpres atau situasi politik Tahun 2024 - 2025 harus menjadi fokus perhatian pemerintah. Masih rendahnya partisipasi masyarakat untuk melakukan deteksi dini terjadinya konflik sosial dan rendahnya jiwa nasionalisme dan patriotisme untuk memelihara nilai-nilai kebangsaan menjadi indikasi permasalahan sosial.

3. Permasalahan terkait Pelayanan Publik

a. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Optimalisasi pelayanan publik diukur dengan Indeks Kepuasan Masyarakat pada Tahun 2022 secara umum berada di kategori Baik, akan tetapi pada beberapa aspek pengukuran perlu peningkatan terutama pada aspek ketepatan kecepatan penyelenggaraan pelayanan publik.
b. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang masih kurang. Dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas dan akses pelayanan yang dapat diberikan oleh pemerintah, maka pelayanan yang diberikan bukan hanya pelayanan yang diorientasikan untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat, tetapi merupakan pelayanan dasar yang harus diterima oleh masyarakat. Pada pencapaian standar pelayanan minimal Tahun 2022 masih ada beberapa bidang yang harus menjadi prioritas terutama bidang kesehatan. Penilaian pencapaian SPM menjadi salah satu parameter/formulasi utama dalam pengalokasian dana transfer daerah.

4. Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

a. Lingkungan Eksternal

Telaah Isu Strategis Internasional SDG's

Salah satu isu strategis di tingkat internasional yang relevan bagi perencanaan pembangunan antara lain: pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals / SDG's)*. Indonesia sebagai salah satu negara yang meratifikasi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan berkewajiban untuk mendukung pencapaian target SDG's. SDG's (*Sustainable Development Goals*) merupakan sebuah program pembangunan berkelanjutan di mana di dalamnya terdapat 17 tujuan dengan 169 target yang terukur dengan tenggat waktu yang ditentukan. SDG's adalah agenda pembangunan dunia yang bertujuan untuk kesejahteraan manusia dan planet bumi. SDG's ini diterbitkan pada tanggal 21 Oktober 2015 menggantikan program sebelumnya yaitu MDG's (*Millennium Development Goals*) sebagai tujuan pembangunan bersama sampai tahun 2030 yang disepakati oleh banyak negara dalam forum resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Jadi kerangka pembangunan yang berkaitan dengan perubahan situasi dunia yang sebelumnya menggunakan konsep MGD's sekarang diganti dengan SDG's. Seperti yang telah diutarakan sebelumnya, SDG's (*Sustainable Development Goals*) mempunyai 17 tujuan dengan 169 target, di mana tujuan dan target-target dari SDGs ini bersifat global serta dapat diaplikasikan secara universal yang dipertimbangkan dengan berbagai realitas nasional, kapasitas serta tingkat pembangunan yang berbeda dan menghormati kebijakan serta prioritas nasional. Tujuan dan target SDG's tidaklah berdiri sendiri, perlu adanya implementasi yang dilakukan secara terpadu. Tujuan dari SDG's (*Sustainable Development Goals*) yang dikutip dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia antara lain sebagai berikut:

1. Menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan bagi seluruh orang di segala usia.
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi, dan mendorong pertanian yang berkelanjutan.
3. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun.
4. Membangun infrastruktur yang berketahanan, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta membina inovasi.
5. Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi seluruh orang.
6. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif, dan berkelanjutan, serta kesempatan kerja penuh, produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua orang.
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, terjamin, berkelanjutan serta modern bagi semua orang.
8. Menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi setiap orang.
9. Menjadikan kota dan pemukiman manusia inklusif, berketahanan, aman dan berkelanjutan.
10. Menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh perempuan.
11. Mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua orang, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan.
12. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim serta dampaknya.
13. Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antara negara.
14. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
15. Melestarikan dan menggunakan samudera, lautan dan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan.
16. Memperkuat perangkat-perangkat implementasi (*means of implementation*) dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.
17. Melindungi, memperbarui, dan mendorong pemakaian ekosistem daratan yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati.

Mempertimbangkan kesepakatan global *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan perubahan iklim, Pemerintah Kabupaten Nganjuk menyusun perencanaan daerah tahun 2018-2023 dengan memprioritaskan: (1) meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan; (2) meningkatkan kualitas sumber daya manusia; (3) meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat; (4) mengatur tata kelola pemerintahan daerah yang baik; (5) menciptakan kondisi masyarakat stabil, harmonis, dan kolaboratif.

Telaah Isu Strategis Revolusi Industri 4.0

Saat ini dunia telah memasuki era revolusi industri 4.0. Revolusi tersebut memberikan tantangan dan peluang bagi perkembangan perekonomian ke depan. Di satu sisi, digitalisasi, otomatisasi, dan penggunaan kecerdasan buatan dalam aktivitas ekonomi akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam produksi modern, serta memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi konsumen. Teknologi digital juga membantu proses pembangunan di berbagai bidang di antaranya pendidikan melalui pembelajaran jarak jauh (*distance learning*), pemerintahan melalui *egovernment,* inklusi keuangan melalui *financial technology* (*fin-tech*), dan pengembangan UMKM seiring berkembangnya *e-commerce*. Namun di sisi lain, perkembangan revolusi industri 4.0 berpotensi menyebabkan hilangnya pekerjaan di dunia. Diperkirakan 60 persen jabatan pekerjaan di dunia akan tergantikan oleh otomatisasi. Di Indonesia, diperkirakan 51,8 persen potensi pekerjaan yang akan hilang.

RPJMN Tahun 2020-2024

Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 adalah: ***Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong.*** Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 9 Misi Pembangunan yaitu:

2. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia.
3. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing.
4. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan .
5. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.
6. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa.
7. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya.
8. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga.

9. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
10. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi sebagai berikut :

1. Pembangunan SDM

   Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.
2. Pembangunan Infrastruktur

   Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
3. Penyederhanaan Regulasi

   Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.
4. Penyederhanaan Birokrasi

   Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.
5. Transformasi Ekonomi

   Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Senada dengan arahan presiden yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPMJN) 2020-2024, maka RPJMD Kabupaten Nganjuk mengambil peran secara aktif yang disebut tri cita bakti yaitu : (1) Infrastruktur publik yang berkualitas (senada dengan arahan kedua yaitu Pembangunan Infrastuktur), (2) Sumber Daya Manusia yang Unggul (senada dengan arahan pertama yaitu Pembangunan SDM), dan (3) Kemandirian Ekonomi (senada dengan arahan kelima Transformasi Ekonomi) adalah meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing produk lokal di pasaran yang lebih luas untuk kesejahteraan masyarakat.

Telaah Isu Strategis RPJMD Jawa Timur Tahun 2019-2024

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 menyebutkan bahwa RPJMD Kabupaten/Kota harus mengacu pada RPJMD Provinsi. Amanah ini agar terjadi sinkronisasi sehingga perencanaan pembangunan di tingkat bawah dan yang lebih tinggi saling melengkapi satu sama lain agar ketercapaian visi dan misi yang diemban dua dokumen perencanaan tersebut dapat menunjang satu sama lain. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 merupakan salah satu acuan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Nganjuk. Visi RPJMD Provinsi Jawa Timur adalah: **"TERWUJUDNYA MASYARAKAT JAWA TIMUR YANG ADIL, SEJAHTERA, UNGGUL DAN BERAKHLAK DENGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PARTISIPATORIS INKLUSIF MELALUI KERJA BERSAMA DAN SEMANGAT GOTONG ROYONG"**

Visi Pembangunan Provinsi Jawa Timur tersebut ditindaklanjuti dengan misi sebagai berikut :

1. **Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah.**

   Pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah Jawa Timur dengan kemitraan baik masyarakat sipil maupun sektor privat bertujuan agar tidak tercipta konsentrasi kemakmuran pada kalangan kelompok sosial yang kaya, daerah urban, maupun wilayah tertentu saja tetapi untuk meningkatkan kesejahteraan yang merata seluruh warga jawa timur . Tujuan dari semua itu proses pembangunan di Jawa Timur akan memastikan hak rakyat atas pekerjaan yang layak untuk kemanusiaan adalah pelaksanaan dari daulat rakyat.

2. **Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan.**

   Pembangunan di Jawa Timur memperhatikan prinsip-prinsip keadilan sosial yang terdiri dari keadilan distributif, keadilan rekognitif, dan keadilan partisipatoris. Selain itu dimensi keadilan juga memperhatikan aspek rekognitif (pengakuan) terhadap kebutuhan-kebutuhan khusus yang dimiliki oleh perempuan dan anak dan lansia, kelompok difabel, maupun kelompok masyarakat berbasis budaya yang membutuhkan perhatian khusus. Keadilan dalaam proses pembangunan juga memiliki dimensi politik, dimana ruang partisipasi yang luas menjadi perhatian dalam praktik tata kelola pemerintahan yang terbangun. Pembangunan sumber daya

manusia di Provinsi Jawa Timur dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, antara lain: peningkatan kualitas kehidupan, akses pendidikan dan jaminan kesehatan di Jawa Timur.

3. **Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan.**

   Tata kelola pemerintahan di Jawa Timur telah menciptakan standar penilaian dan tolok ukur untuk menilai kinerja dirinya melalui slogan CETTAR (Cepat, Efisien, Tanggap, Transparan, Akuntabel dan Responsif). Prinsip itu bertujuan agar proses pembangunan sebagai pengejawantahan proses kolaborasi, partnership dan inklusi antara pemerintah Jawa Timur dengan masyarakat sipil dan sektor privat sebagai arena untuk memacu birokrasi pemerintah untuk menyediakan pelayanan yang bersih dan anti-korupsi, prima dan berkeadilan bagi warga Jawa Timur.

4. **Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya.**

   Pemerintah Jawa Timur mendorong pembangunan yang berlandaskan pada prinsip pembangunan berkelanjutan yang didalamnya memuat harmonisasi antara aktivitas sosial, ekonomi dan budaya serta ekologi. Pembangunan yang mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan cara menserasikan aktivitas manusia dengan kapasitas daya dukung dan daya tamping lingkunngan hidup sebagai penopang sehingga dapat terwujud keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan budaya dengan kondisi lingkungan hidup.

Telaah Isu Strategis RTRW

Penataan ruang sebagai suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara yang satu dan yang lain dan harus dilakukan sesuai dengan kaidah penataan ruang sehingga diharapkan (i) dapat mewujudkan pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan; (ii) tidak terjadi pemborosan pemanfaatan ruang; dan (iii) tidak menyebabkan terjadinya penurunan kualitas ruang. Peraturan Pemerintah Nomor 08 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah menyebutkan salah satu prinsip dalam

penyusunan RPJMD adalah bahwa RPJMD harus merupakan Integrasi dari rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah. Hal ini akan mendukung terciptanya koordinasi antar pelaku pembangunan agar terjadi integrasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu dan antar fungsi pemerintahan sehingga mampu menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta optimalisasi partisipasi masyarakat dan akan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Rencana Tata Ruang Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2021, menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026. Visi Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk adalah **Memajukan Kabupaten Nganjuk sebagai pusat pertanian di wilayah tengah Provinsi Jawa Timur yang didukung pengembangan sektor pariwisata, perdagangan, jasa dan industri.** Misi penataan ruang kabupaten Nganjuk adalah :

1. Memajukan ekonomi masyarakat melalui pembangunan pertanian, pariwisata, perdagangan, jasa dan industri yang berwawasan lingkungan dengan didukung oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai;
2. Mengembangkan struktur ekonomi berdaya saing;
3. Pemerataan pembangunan di segala bidang di setiap wilayah kecamatan, desa/kelurahan;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan buatan dengan berwawasan kelestarian lingkungan;dan
5. Mewujudkan kemudahan memperoleh akses untuk meningkatkan kualitas hidup.

Tujuan penataan ruang daerah adalah untuk mewujudkan Kabupaten Nganjuk sebagai kabupaten yang maju dan berdaya saing berbasis pertanian, perdagangan, jasa dan industri secara berkelanjutan.

b. Isu Strategis Daerah

Dari rumusan Permasalahan Pembangunan Daerah (aspek kesejahteraan dan aspek daya saing) serta permasalahan urusan, serta disinergikan dengan hasil penelaahan isu strategis internasional (*SDG's*), nasional maupun regional dapat dirumuskan isu-isu strategis utama Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026, sebagai berikut:

1. Penurunan angka kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim

2. Penurunan prevalensi balita gizi buruk, prevalensi balita stunting, serta Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi
3. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan
4. Pengendalian angka kelahiran penduduk
5. Peningkatan keadilan dan kesetaraan gender serta pemenuhan hak anak
6. Peningkatan kualitas infrastruktur pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman, serta keselamatan transportasi dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan kawasan permukiman layak huni
7. Pertumbuhan dan pemerataan perekonomian daerah yang inklusif melalui pengembangan sektor industri dan perdagangan yang didukung iklim investasi yang kondusif yang didukung kesiapan tenaga kerja terlatih dan terampil sesuai kebutuhan pasar kerja
8. Kesiapan menghadapi situasi global perekonomian
9. Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian melalui intensifikasi dan diversifikasi komoditas pertanian untuk medukung ketahanan pangan daerah
10. Pembangunan pariwisata daerah yang difokuskan pada pengembangan ekonomi kreatif melalui peningkatan nilai tambah sektor kesenian, kebudayaan, UKM dan koperasi
11. Peningkatan sarana prasarana, kualitas pendidikan dasar dan peningkatan literasi
12. Melaksanakan tata kelola Pemerintahan yang baik
13. Menciptakan stabilisasi keamanan, ketentraman, ketertiban dan kerukunan
14. Peningkatan kemandirian desa melalui pemberdayaan masyarakat dan optimalisasi tata kelola pemerintahan desa yang baik
15. Peningkatan dan optimalisasi potensi pendapatan asli daerah
16. Menjaga kualitas lingkungan hidup dan ketaatan terhadap tata ruang dalam rangka mendukung ketahanan iklim dan mitigasi bencana

Berdasarkan permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis di atas, selanjutnya dirumuskan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan serta Program Pembangunan Daerah dan Program Perangkat Daerah pada Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.

B. Visi dan Misi Kepala Daerah

1) Visi

Visi adalah suatu gambaran atau cita-cita masa depan yang ingin diwujudkan. Berdasarkan kondisi Kabupaten Nganjuk saat ini, tantangan yang dihadapi dalam masa

20 tahun mendatang dan dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki Kabupaten Nganjuk, selaras pula dengan tujuan pembangunan nasional, maka visi Kabupaten Nganjuk berdasarkan RPJPD Tahun 2005-2025 adalah: **"NGANJUK YANG MAJU, ADIL, DAN SEJAHTERA".** Visi pembangunan daerah tahun 2005–2025 tersebut mengarah pada pencapaian tujuan nasional yang harus dapat diukur untuk mengetahui tingkat kemajuan, keadilan dan kesejahteraan yang ingin dicapai.

2) Misi

Dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Nganjuk tersebut ditempuh melalui 6 (enam) misi pembangunan sebagai berikut :

1. *Mewujudkan masyarakat Nganjuk yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika dan berbudaya*, adalah memperkuat jati diri dan karakter daerah melalui pendidikan yang bertujuan membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama, melaksanakan interaksi antarbudaya, mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya daerah, dan memiliki kebanggaan sebagai daerah Indonesia dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan daerah.
2. *Mewujudkan Nganjuk yang berdaya saing*, adalah mengedepankan pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan Iptek melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan menuju inovasi secara berkelanjutan; membangun infrastruktur yang maju serta menyempurnakan produk-produk hukum daerah dan reformasi birokrasi dan memperkuat perekonomian daerah yang berbasis pada keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pelayanan publik.
3. *Mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan yang berkeadilan*, adalah menyelenggarakan pembangunan daerah yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyararakat, mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, kelompok, kecamatan, desa dan kelurahan yang masih lemah; menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara efektif; menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi; serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan termasuk gender. Di samping itu pemenuhan hak-hak dasar masyarakat semakin ditingkatkan, seperti layanan

kesehatan, akses pendidikan, pembangunan perumahan, memperkuat sistem jaminan sosial, peningkatan upah tenaga kerja.

4. *Mewujudkan masyarakat yang demokratis, berlandaskan hukum yang didukung oleh profesionalisme aparatur*, adalah memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil; memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah; menjamin pengembangan media dan kebebasan media dalam mengomunikasikan kepentingan masyarakat; dan melakukan pembenahan struktur hukum dan meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil, memantapkan reformasi birokrasi menuju profesionalisme aparatur dalam memberikan pelayanan publik dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik.
5. *Mewujudkan Nganjuk yang aman, tentram, tertib, dan damai*, adalah membangun dan menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat; meningkatkan kerja sama dengan TNI dan Polri dalam ikut serta bela negara dan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dalam upaya menciptakan rasa aman dan damai dalam masyarakat.
6. *Mewujudkan Nganjuk yang asri, nyaman dan lestari*, adalah memperbaiki pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi; meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan; memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan; memberikan keindahan dan kenyamanan kehidupan; serta meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan.

3) Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025

Sebagai ukuran tercapainya NGANJUK YANG MAJU, ADIL, DAN SEJAHTERA pembangunan daerah dalam 20 tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok sebagai berikut :

a. Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Nganjuk yang Beriman dan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, Beretika dan Berbudaya ditandai oleh hal-hal berikut:

1. Terwujudnya karakter masyarakat yang tangguh, kompetitif, dan bermoral berdasarkan falsafah Pancasila yang dicirikan dengan watak dan perilaku manusia dan masyarakat yang beriman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, toleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, tulus ikhlas, berkembang, dinamis, dan berorientasi Iptek.
2. Semakin mantapnya budaya masyarakat yang tercermin dalam meningkatnya peradaban, harkat dan martabat manusia, dan memperkuat jati diri dan kepribadian.
3. Terwujudnya pelestarian dan pengembangan seni dan nilainilai luhur budaya daerah, khususnya seni budaya tradisi dan bahasa serta sastra daerah.

b. Terwujudnya Nganjuk yang Berdaya Saing ditandai oleh hal-hal berikut :

1. Terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga terdapat peningkatan pendapatan perkapita, daya beli masyarakat dan penurunan jumlah pengangguran pada setiap tahapan pembangunan.
2. Terwujudnya peningkatan kualitas SDM, termasuk meningkatkan kualitas tenaga kerja agar mampu bersaing di pasar kerja baik regional, nasional maupun internasional serta peran perempuan dalam pembangunan. Secara umum peningkatan kualitas SDM ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG), serta tercapainya pertumbuhan penduduk yang seimbang.
3. Terbangunnya struktur perekonomian daerah yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang berbasis potensi daerah. Sektor pertanian dalam arti luas, dan industri pengolahan hasil pertanian menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditi berkualitas, industri manufaktur yang berdaya saing global, serta jasa yang perannya meningkat dengan kualitas pelayanan lebih bermutu dan berdaya saing.
4. Meningkatnya kualitas SDM pengelola, kualitas produk, penguasaan terhadap akses modal dan pemasaran, serta kualitas dan kuantitas produk UMKM dan koperasi; yang didukung dengan kelancaran dan volume usaha perdagangan serta peningkatan investasi.
5. Meningkatnya infrastruktur dan layanan wisata yang profesional, berkembangnya obyek wisata potensial, meningkatnya jumlah dan lama kunjungan wisatawan, serta terselenggaranya kegiatan-kegiatan kesenian dan budaya secara berkesinambungan yang berbasis pada budaya lokal.

6. Terwujudnya jaringan infrastruktur transportasi yang handal dan terintegrasi berbasis pada efisiensi dan berkeadilan.
7. Terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang handal dan efisien sesuai kebutuhan, termasuk tingkat elektrifikasi rumah tangga dan dunia usaha.
8. Tersedianya sarana dan prasarana publik yang mantap di sektor transportasi, telekomunikasi, air bersih, fasilitas umum, perumahan, pendidikan, kesehatan dan energi.
9. Meningkatnya aksesibilitas sarana dan prasarana publik yang dapat dinikmati secara adil dan merata oleh segenap lapisan masyarakat.

c. **Terwujudnya Pembangunan yang Lebih Merata dan Berkeadilan** ditandai oleh hal-hal berikut :
   1. Tingkat pembangunan yang makin merata ke seluruh kecamatan, desa dan kelurahan diwujudkan dengan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, termasuk berkurangnya kesenjangan antar kecamatan, desa dan kelurahan;
   2. Kemandirian pangan dapat dipertahankan pada tingkat aman dan dalam kualitas gizi yang memadai serta tersedianya instrumen jaminan pangan untuk tingkat rumah tangga.
   3. Terpenuhi kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukungnya bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang yang berkelanjutan, efisien, dan akuntabel untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.
   4. Terwujudnya lingkungan perkotaan dan perdesaan yang sesuai dengan kehidupan yang baik, berkelanjutan, serta mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat, mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, berkurangnya angka kemiskinan dan pengangguran.

d. **Terwujudnya masyarakat yang demokratis, berlandaskan hukum yang didukung oleh profesionalisme aparatur**, ditandai oleh hal-hal berikut :
   1. Terciptanya supremasi hukum dan penegakan HAM yang bersumber pada peraturan perundangan yang berlaku yang mencerminkan kebenaran, keadilan, akomodatif dan aspiratif.
   2. Terwujudnya konsolidasi demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik lokal yang dapat diukur dengan adanya pemerintahan yang berdasarkan hukum, birokrasi yang profesional dan netral.

3. Meningkatnya profesionalisme aparatur untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab, serta profesional yang mampu mendukung pembangunan daerah.

e. Terwujudnya Kabupaten Nganjuk yang Aman, Tentram, Tertib, dan Damai ditandai oleh hal-hal berikut :

1. Rendahnya tingkat kriminalitas dalam setiap aspek kehidupan masyarakat.
2. Rendahnya intensitas dan frekuensi konflik sosial yang ditimbulkan karena isu SARA dan kesenjangan sosial ekonomi.
3. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam bidang ketentraman dan ketertiban, keamanan, bela bangsa dan negara.
4. Terbinanya semangat/jiwa nasionalisme, patriotisme, serta persatuan dan kesatuan pada pribadi dan semua aspek kehidupan bermasyarakat.
5. Terwujudnya rasa aman masyarakat dalam melaksanakan semua aktifitasnya.

f. Terwujudnya Nganjuk yang asri, nyaman dan lestari

1. Membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup yang dicerminkan oleh tetap terjaganya fungsi, daya dukung, dan kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari.
2. Terpeliharanya kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing daerah, serta modal pembangunan daerah.
3. Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan.
4. Tersedianya ruang publik yang cukup nyaman dan indah sebagai tempat bermain dan rekreasi keluarga.

C. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah

Program Pembangunan Daerah mencakup program unggulan berdasarkan prioritas dan identifikasi isu strategis daerah dan telah disepakati bersama dalam Forum Konsultansi Publik, serta merupakan Program Perangkat Daerah yang bersifat strategis yang outcome-nya mendukung langsung dengan Sasaran RPD maupun sesuai dengan visi misi RPJPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 selaras dengan arahan pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Timur dalam RPJMN 2020-2024 serta RPJMD Provinsi Jawa

Timur 2019-2024. Dengan demikian, program pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Adapun program prioritas adalah sebagai berikut :

1. ***Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dasar yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah***

   Salah satu prioritas utama dengan tujuan mewujudkan infrastruktur dasar jalan dan jembatan yang mantap dan merata di wilayah Kabupaten Nganjuk. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa infrastruktur dasar yang berkualitas merupakan faktor daya saing daerah yang utama yang dapat mendukung aktivitas sosial dan ekonomi suatu daerah. Komitmen membangun infrastruktur ini akan direalisasikan dengan kebijakan, program dan/atau kegiatan antara lain: komitmen PIKK untuk infrastruktur; operasional Unit Reaksi Cepat Penambal Jalan (URCPJ); meningkatkan kualitas (mutu) jalan; normalisasi saluran irigasi dan melanjutkan pembangunan waduk dan embung; penataan kawasan industri, implementasi dari Perpres 80 Tahun 2019 terutama fokus pada pengembangan dan pembangunan Kawasan Selingkar Wilis.

2. ***Pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial***

   Sesuai dengan amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem menjadi salah satu fokus utama yang harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, fokus pada prioritas ini adalah mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui kegiatan-kegiatan lintas sektor; penguatan sistem jaminan sosial, pelayanan PMKS dan lansia miskin, Peningkataan Akses Pendidikan Bagi Siswa Kurang Mampu di antaranya melalui beasiswa bagi siswa miskin, rehabilitasi Rumah Tidak layak Huni, Peningkatan Universal Health Coverage (UHC) Bagi Masyarakat Miskin, Peningkatan Akses Sanitasi dan Air Minum Layak Bagi Masyarakat Miskin, melaksanakan program-program KB serta perbaikan database sasaran penerima manfaat pengent serta dukungan program lintas sektor untuk memastikan bahwa seluruh program penanggulangan kemiskinan dapat tepat sasaran.

3. ***Peningkatan kesempatan kerja***

   Salah satu variabel yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat adalah pengurangan tingkat pengangguran. Pengurangan angka pengangguran menjadi prioritas pada Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026. Komitmen ini direalisasikan dengan peningkatan kesempatan dan perluasan lapangan pekerjaan salah satunya dengan pelaksanaan job fair, pelatihan ketrampilan dan kewirausahaan,

peningkatan kerjasama dengan swasta untuk penempatan tenaga kerja terdidik dan terlatih.

4. ***Peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat***

   Komitmen ini akan direalisasikan dengan kebijakan, program dan/atau kegiatan antara lain: akses pelayanan kesehatan terjangkau; peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang meliputi peningkatan sarana-prasarana kesehatan, tenaga kesehatan dan peningkatan kualitas tata kelola manajemen kesehatan dengan penyiapan standarisasi BLUD untuk 20 PKM selain itu prioritas utama bidang kesehatan antara lain penanganan masalah stunting.

5. ***Peningkatan kualitas pendidikan***

   Kualitas pendidikan merupakan salah satu layanan dasar dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Nganjuk. Komitmen ini akan direalisasikan dengan kebijakan, program dan/atau kegiatan antara lain: bantuan khusus siswa miskin; meningkatkan kesejahteraan pendidik; pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi kuliah S1.

6. ***Pengendalian dan pelestarian lingkungan hidup***

   Pertumbuhan industri dan jasa di Kabupaten Nganjuk serta pembangunan infrastruktur harus seimbang dan selaras dengan pelestarian dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup. Komitmen ini dilaksanakan dengan pemenuhan ruang terbuka hijau, pengendalian pencemaran lingkungan dan pelibatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan.

7. ***Pengembangan potensi pariwisata daerah***

   Komitmen ini akan direalisasikan dengan kebijakan, program dan/atau kegiatan antara lain: mengembangkan obyek wisata & sarana olah raga yang sudah ada; membuka obyek wisata baru salah satunya dengan pengembangan kawasan wisata Bendungan Semantok; meningkatkan promosi pariwisata; meningkatkan sumber daya manusia pelaku wisata; serta pembentukan kawasan wisata desa/desa wisata.

8. ***Peningkatan dan penguatan perekonomian daerah***

   Komitmen ini akan direalisasikan dengan kebijakan antara lain: revitalisasi pasar sebagai sarana perdagangan; bangga, bela & beli produk lokal; pemberdayaan Koperasi dan UMKM; optimalisasi sektor perindustrian dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan daerah serta peningkatan investasi.

9. ***Pengembangan agropolitan dan food estate***

   Komitmen ini akan direalisasikan dengan kebijakan, program dan/atau kegiatan antara lain: intensifikasi pertanian; inovasi pengolahan produk pertanian sehingga

memiliki branding yang dikenal & disukai masyarakat; promosi produk unggulan pertanian. Selain itu, revitalisasi bidang pertanian dan peternakan dilaksanakan dengan kebijakan, program dan/atau kegiatan antara lain: penyediaan dan pengembangan sarana pertanian, pengembangan kemandirian pangan daerah serta pengembangan kawasan agropolitan dan minapolitan yang membutuhkan intervensi lintas sektoral.

10. ***Pelestarian seni budaya lokal***

    Komitmen ini akan direalisasikan dengan kebijakan, program dan/atau kegiatan antara lain: menciptakan identitas khas Nganjuk dalam hal busana, seni & budaya; merevitalisasi sarana dan prasarana kesenian yang ada dan memberdayakan kelompok-kelompok seni budaya agar tercipta seni budaya Nganjuk yang dikenal sampai ke tingkat Nasional.

11. ***Pemberdayaan ekonomi kreatif***

    Komitmen ini akan direalisasikan dengan kebijakan, program dan/atau kegiatan antara lain: mengembangkan industri mikro dengan memanfaatkan teknologi informasi; meningkatkan kreatifitas pemuda untuk menemukan & mengembangkan produk-produk unggulan baru; mendirikan lembaga dan pusat ekonomi kreatif di Kabupaten Nganjuk; menumbuhkembangkan BUM Desa.

12. ***Peningkatan profesionalisme birokrasi dan kualitas pelayanan publik***

    Menyadari bahwa birokrasi merupakan unsur utama penyelenggaraan pemerintahan daerah, meningkatkan profesionalisme birokrasi yang inovatif, bersih, tanpa korupsi, sehingga mampu melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik yang prima yang didukung dengan impelementasi e-government adalah tujuan utama penyelenggaraan birokrasi. Selain itu, sinergitas antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik akan terus ditingkatkan. Komitmen ini akan direalisasikan dengan kebijakan antara lain: *mobile one stop service* pelayanan administrasi kependudukan setiap Kecamatan dan mal pelayanan publik; mutasi, promosi, rekrutmen, ijin belajar yang bebas dari pungutan (tanpa upeti);penerapan *merit system*; mewujudkan pusat pengaduan pelayanan publik: pemberian *reward and punishment* untuk pegawai; biaya pendidikan bagi peningkatan pendidikan formal untuk ASN; memotivasi ASN, pembangunan dan pelayanan publik.

13. ***Menjaga stabilitas sosial politik dan kesiapsiagaan terhadap bencana***

    Komitmen ini akan direalisasikan dengan kebijakan penciptaan situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif serta kondisi sosial politik yang harmonis menjelang, saat dan pasca pelaksanaan Pemilu, Pilpres dan Pemilukada. Selain itu, pelibatan seluruh elemen masyarakat baik itu forkopimda, NGO dan lain-lain dalam menciptakan stabilitas dan kerukunan hidup masyarakat dari aspek kesiapsiagaan terhadap bencana prioritas pada mitigasi, kesiapsiagaan dan quick response terhadap kejadian bencana.

14. ***Percepatan Transformasi Digital***

    Meningkatkan daya guna dan hasil guna manajemen pemerintahan dan kualitas pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi digital, melalui pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, penguatan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi, serta pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah yang lengkap, valid, mutakhir.

D. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diukur melalui penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang dijabarkan dalam dua indikator kinerja, yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati Nganjuk dan Wakil Bupati Nganjuk dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator kinerja yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam hal ini adalah indikator yang menggambarkan dampak final/akhir (*final impact*) dari pembangunan sebagai agregasi dari hasil (*outcome*) multi-urusan pemerintahan daerah. Secara umum indikator kinerja daerah menggambarkan tingkat keberhasilan dalam 3 aspek, yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing. Dalam indikator kinerja daerah ini aspek kesejahteraan masyarakat diukur dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Kesalehan Sosial, Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Publik Pemerintah Daerah, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Gender, Pemenuhan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan, Indeks Resiko Bencana, Laju Inflasi, Indeks Gini, Persentase Koperasi Sehat, dan Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro.

Kesejahteraan masyarakat yang diharapkan dapat tercapai pada akhir Tahun 2024 ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat dicapai karena meningkatnya kontribusi pertanian

pangan dan agro, tingginya investasi, peningkatan iklim usaha industri mikro, kecil dan koperasi, serta tumbuhnya ekonomi sektor pariwisata. Semua itu bisa terwujud berkat daya saing Kabupaten Nganjuk yang semakin kuat.

Pada akhirnya, pertumbuhan ekonomi mampu mengurangi pengangguran dengan semakin banyak warga Kabupaten Nganjuk yang mendapatkan pekerjaan dan meningkat pendapatannya. Peningkatan pendapatan warga, termasuk para petani, dengan sendirinya akan mengurangi tingkat kemiskinan. Di sisi lain, keberhasilan pembangunan tercapai dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan yang hal ini menandai prinsip pembangunan berkelanjutan telah diterapkan di Kabupaten Nganjuk.

Gambaran lengkap ukuran keberhasilan pembangunan Kabupaten Nganjuk tahun 2024 sesuai sasaran yang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.19
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Pertumbuhan Ekonomi Daerah	%	4,92	4,93	100,20%
2	Indeks Gini	Indeks	≤ 0,30	0,289	100,00%
3	Tingkat Kemiskinan Daerah	%	10,50	10,17	103,24%
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,6	3,87	118,86%
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	67,38	69,07	102,51%
6	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	73,49	75,24	102,38%
7	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	63,79	82,92	129,99%
8	Indeks Kesalehan Sosial	Indeks	89,803	91,03	101,37%

1. Pertumbuhan Ekonomi Daerah

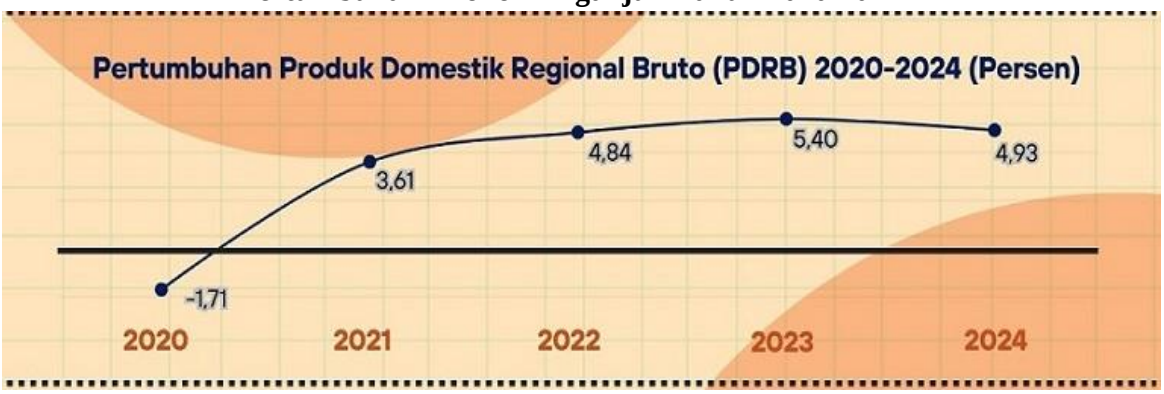
Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat. Indikator ini juga dimaksudkan menghitung seberapa jauh keberhasilan pembangunan di suatu daerah dalam suatu periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan fiskal yang terjadi di suatu daerah seperti pertambahan sektor-sektor ekonomi, pertambahan fasilitas infrastruktur serta pertambahan aktifitas-aktifitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dihitung dari nilai tertimbang sektor-sektor PDRB. Pertumbuhan tinggi dan stabil menjadi cita-cita daerah yang melaksanakan pembangunan. Target pertumbuhan ekonomi Kabupaten

Nganjuk pada tahun 2024 adalah sebesar 4,92 persen. Target tersebut bisa diungkit dari pertumbuhan sektor perdagangan, sektor industri serta jasa-jasa.

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nganjuk dihitung dari perkembangan PDRB menurut harga konstan. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nganjuk. Tahun 2024 Kabupaten Nganjuk memiliki pertumbuhan ekonomi sebesar 4,93 atau 100,20% dari target Indikator Kinerja Utama dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 yang ditetapkan sebesar 4,92 .Hal ini jauh berbeda dengan tahun 2020 yang tercatat pertumbuhanya sebesar -1,71, artinya perekonomian masyarakat Kabupaten Nganjuk tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 sebesar 5,40.

PDRB Kabupaten Nganjuk dalam 5 tahun terakhir mengalami perkembangan yang fluktuatif. Tahun 2024, Berdasarkan PDRB seri 2010 atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha tercatat PDRB Kabupaten Nganjuk sebesar 21.614,91 milyar rupiah. Sedangkan PDRB seri 2010 atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha tercatat PDRB Kabupaten Nganjuk sebesar 36.270,56 milyar rupiah. Lapangan usaha yang memiliki andil terbesar diantaranya Transportasi dan Pergudangan mampu menyumbang tertinggi PDRB sebesar 11,25 persen, Jasa Lainnya sebesar 7,96 persen, dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 7,85 persen. Sementara lapangan usaha yang memiliki andil terendah adalah Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 1,57 persen

Gambar 1.4
Pertumbuhan Ekonomi Nganjuk Tahun 2020-2024



Sumber data : Badan Pusat Statistik

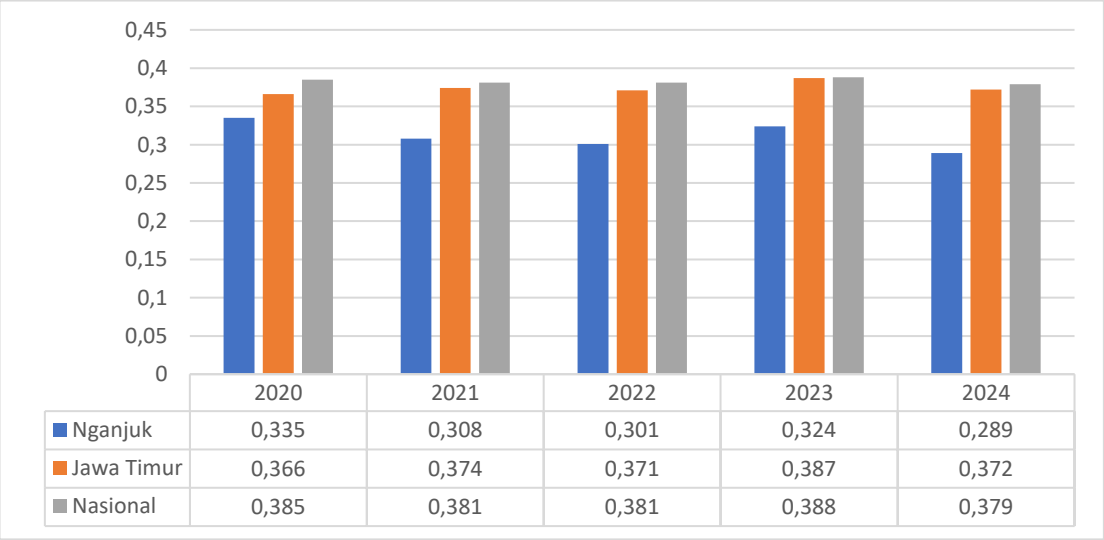
2. Indeks Gini

Indeks Gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh. Indeks Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan benar-benar sempurna terjadi. Jika nilai Indeks Gini kurang dari 0,3 masuk dalam kategori ketimpangan “rendah”; nilai antara 0,3 hingga 0,5 masuk dalam

kategori ketimpangan “moderat”; dan nilai lebih besar dari 0,5 berada dalam kategori ketimpangan “tinggi”.

Indeks Gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh. Indeks Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna terjadi. Jika nilai Indeks Gini kurang dari 0,3, maka masuk dalam kategori ketimpangan “rendah”; nilai antara 0,3 hingga 0,5 masuk dalam kategori ketimpangan “moderat”, dan jika nilainya lebih besar dari 0,5 dikatakan berada dalam ketimpangan “tinggi”.

Gambar 1.5
Indeks Gini Kabupaten Nganjuk Tahun 2020-2024



	2020	2021	2022	2023	2024
Nganjuk	0,335	0,308	0,301	0,324	0,289
Jawa Timur	0,366	0,374	0,371	0,387	0,372
Nasional	0,385	0,381	0,381	0,388	0,379

Sumber data : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, realisasi nilai Indeks Gini Kabupaten Nganjuk pada tahun 2024 sebesar 0,289 atau tercapai 100% dari target Indikator Kinerja Utama dalam RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 yang ditetapkan sebesar ≤0,30 termasuk dalam kategori ketimpangan “rendah”. Realisasi nilai Indeks Gini pada tahun 2024 mengalami penurunan 0,035 dibandingkan nilai tahun 2023 sebesar 0,324.

3. Tingkat Kemiskinan

Salah satu indikator di bidang sosial dan kesejahteraan rakyat adalah tingkat kemiskinan. Tingkat kemiskinan merupakan fenomena sosial yang menuntut perhatian serius dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Pengertian kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar

seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan perangkat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses pada pendidikan dan pekerjaan. Jumlah penduduk miskin di suatu daerah didasarkan atas garis kemiskinan. Penduduk yang pendapatan perbulannya di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Pada tahun 2024, tingkat kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,72 persen dibanding tahun 2023. Kabupaten Nganjuk berada pada urutan ke-24 se-Jawa Timur setelah Kabupaten Kediri, dengan persentase penduduk miskin sebesar 10,17 persen.

Dari hasil penghitungan BPS, garis kemiskinan Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 sebesar 539.714 rupiah per kapita per bulan. Garis kemiskinan ini mengalami kenaikan sebesar 26.149 rupiah dibanding garis kemiskinan tahun sebelumnya. Dengan demikian, untuk dapat dikategorikan sebagai penduduk non-miskin di Kabupaten Nganjuk, seseorang perlu mempunyai pendapatan minimal 539.714 rupiah per bulan.

Indeks kedalaman kemiskinan (P1) mengindikasikan jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Pada tahun 2024, P1 Kabupaten Nganjuk sebesar 1,04 poin mengalami penurunan sebesar 0,14 dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 1,48. Nilai P1 dapat digunakan untuk menghitung biaya minimal pengentasan kemiskinan dengan syarat biaya tersebut merata ke seluruh penduduk miskin. Indeks keparahan kemiskinan (P2) mengindikasikan ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin. Pada tahun 2024, P2 Kabupaten Nganjuk sebesar 0,180 poin mengalami penurunan sebesar 0,14 dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 0,310.

Angka kemiskinan Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 mengalami penurunan 0,72 persen apabila dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Tahun 2023 menjadi 10,17 persen atau 103,24% dari target Indikator Kinerja Utama dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 yang ditetapkan sebesar 10,5%. Hal ini menunjukan bahwa program intervensi kemiskinan Pemerintah Kabupaten Nganjuk cukup efektif dalam pengetasan kemiskinan yang didukung dengan program pengendalian harga kebutuhan pokok.

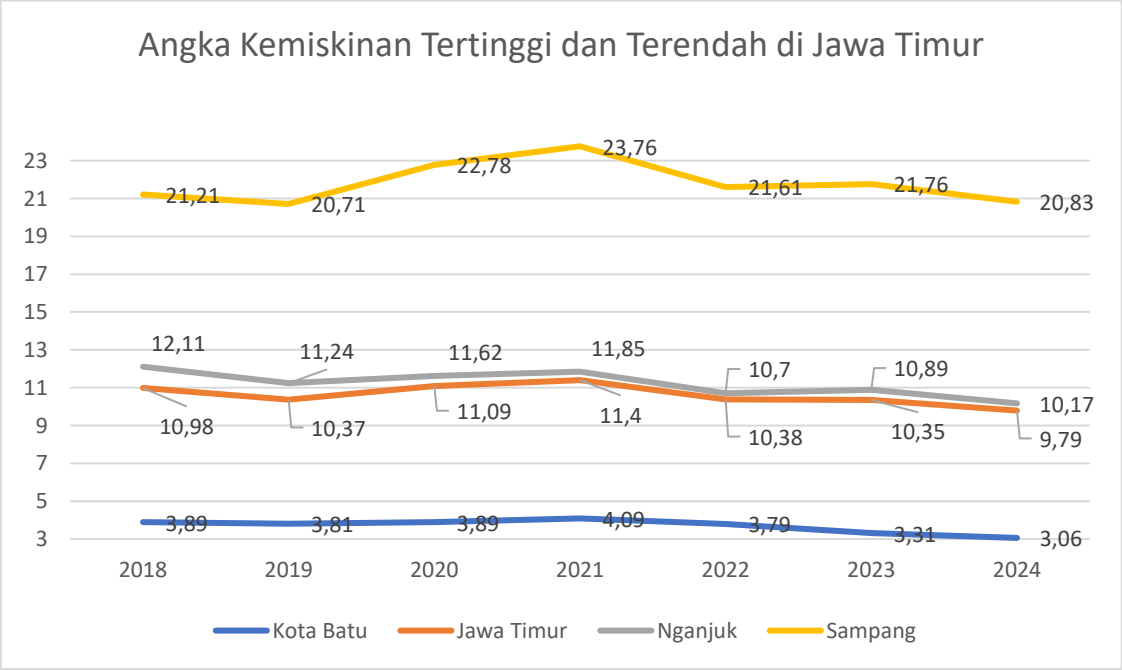
Tabel 1.20

Garis Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin dan Persentasenya Tahun 2004-2024

Tahun	Garis Kemiskinan/GK (rupiah per kapita sebulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	Persentase Penduduk Miskin
(1)	(2)	(3)	(4)
2004	119.543,00	240,60	23,38
2005	141.055,00	235,80	23,35
2006	164.648,00	255,40	25,83
2007	175.927,00	230,50	23,79
2008	176.322,00	191,90	19,77
2009	211.670,00	167,30	17,22
2010	232.275,00	151,70	14,91
2011	253.819,00	142,10	13,88
2012	273.260,00	136,10	13,22
2013	295.806,00	140,80	13,60
2014	308.506,00	136,50	13,14
2015	322.820,00	132,04	12,69
2016	341.653,00	127,90	12,25
2017	358.216,00	125,52	11,98
2018	388.186,00	127,28	12,11
2019	408.160,00	118,51	11,24
2020	428.882,00	122,73	11,62
2021	446.232,00	125,53	11,85
2022	474.429,00	113,63	10,70
2023	513.565,00	115,86	10,89
2024	539.714,00	108,37	10,17

Sumber : BPS Kabupaten Nganjuk, Susenas 2004-2024

Gambar 1.6
Angka Kemiskinan Kabupaten Nganjuk



Sumber data : Badan Pusat Statistik

Tabel 1.21
Persentase Penduduk Miskin di Jawa Timur Tahun 2018-2024

No Urut	Kab/Kota	Persentase Penduduk Miskin (Persen)					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kota Batu	3.81	3.89	4.09	3.79	3.31	3.06
22	Jawa Timur	10.37	11.09	11.4	10.38	10.35	9,17
24	Nganjuk	11.24	11.62	11.85	10.7	10.89	10.17
39	Sampang	20.71	22.78	23.76	21.61	21.76	20.83

Sumber data : Badan Pusat Statistik

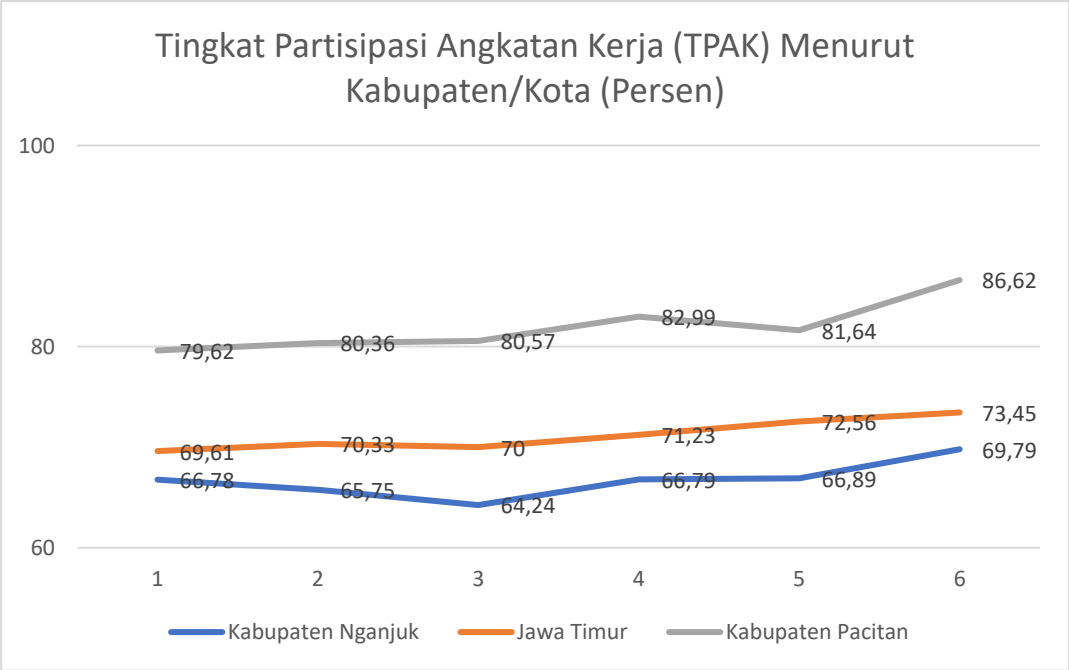
4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Ukuran tingkat kesejahteraan masyarakat daerah bisa dilakukan dengan mengukur tingkat pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan dan berusaha mendapatkan pekerjaan. semakin tinggi tingkat pengangguran terbuka maka semakin rendah tingkat kesejahteraan masyarakat yang berakibat munculnya berbagai masalah sosial. Target dalam tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Nganjuk pada tahun 2024 ditetapkan sebesar 4,6 persen. Upaya untuk menurunkan tingkat pengangguran dengan cara meningkatkan kegiatan-kegiatan yang banyak menyerap tenaga kerja yang bisa dicapai dengan peningkatan investasi, pelatihan kerja, kegiatan padat karya, penyaluran tenaga kerja

melalui bursa kerja, menumbuhan wirausaha baru khususnya Usaha Mikro dan Kecil yang didukung kemudahan akses permodalan.

Salah satu indikator yang menjadi tolak ukur keberhasilan di sektor ketenagakerjaan adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk yang berumur sepuluh tahun ke atas. TPAK Kabupaten Nganjuk bergerak fluktuatif pada periode tahun 2019 - 2024. TPAK Kabupaten Nganjuk mencapai titik terendah pada tahun 2021, kemudian meningkat pada tahun 2024 sebesar 69,79 persen.

Gambar 1.7
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Nganjuk 2019-2024 (Persen)



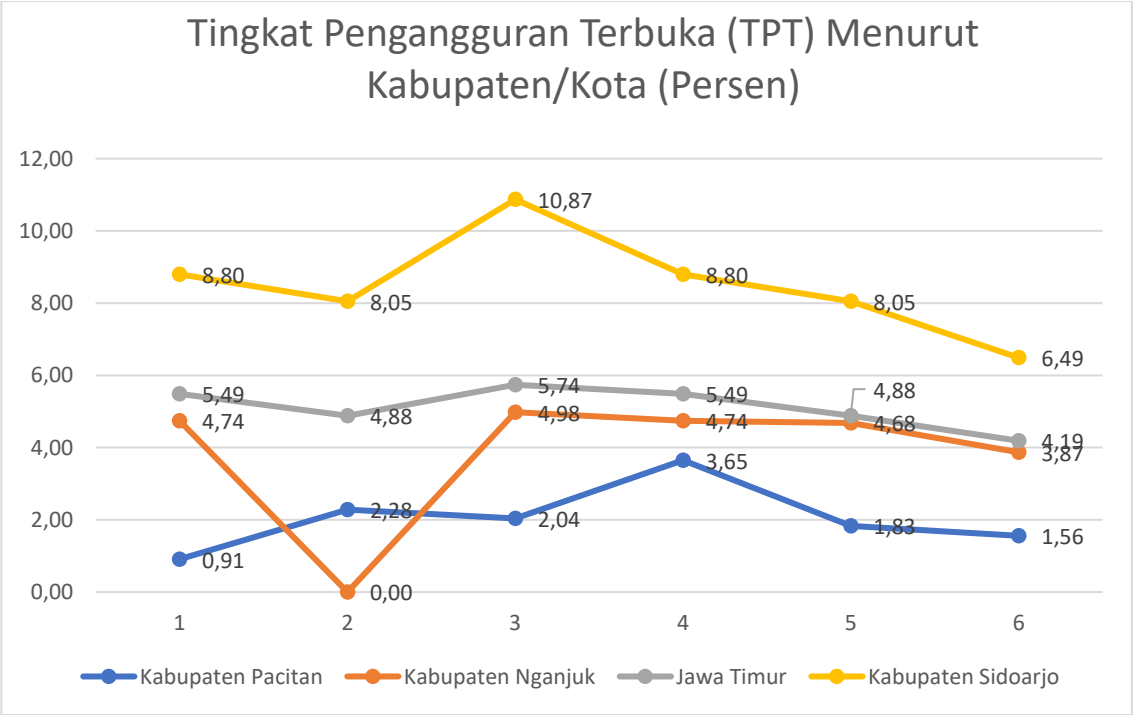
Sumber data : Badan Pusat Statistik

Tabel 1.22
Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan Masing-Masing Perangkat Daerah

No Urut	Kabupaten/Kota Se Jawa Timur	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kabupaten/Kota (Persen)					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
4	Kabupaten Nganjuk	66,78	65,75	64,24	66,79	66,89	69,79
20	Jawa Timur	69,61	70,33	70	71,23	72,56	73,45
39	Kabupaten Pacitan	79,62	80,36	80,57	82,99	81,64	86,62

Sumber data : Badan Pusat Statistik

Gambar 1.8
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Nganjuk 2017-2024 (Persen)



Sumber data : Badan Pusat Statistik

Tabel 1.23
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa Timur Tahun 2018-2024

No. Urut	Kabupaten/Kota Se Jawa Timur	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota (Persen)					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kabupaten Pacitan	0.91	2.28	2.04	3.65	1.83	1.56
16	Kabupaten Nganjuk	4,74	4,68	4,98	4,74	4,68	3.87
22	Jawa Timur	5,49	4,88	5,74	5,49	4,88	4.19
39	Kabupaten Sidoarjo	8,8	8,05	10,87	8,8	8,05	6.49

Sumber data : Badan Pusat Statistik

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan perbandingan antara jumlah penganggur terhadap jumlah angkatan kerja. Tidak seperti anggapan umum, penganggur bukanlah orang-orang yang tidak melakukan kegiatan selama periode survei, namun penduduk yang aktif mencari kerja. Oleh karena itu, anak sekolah dan pengurus rumah tangga tidak tergolong penganggur karena tidak aktif mencari kerja.

Sesuai dengan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), tingkat penganggur terbuka terdiri dari empat komponen. Pertama, mereka yang tidak bekerja dan mencari

pekerjaan. Kedua, mereka yang tidak bekerja dan mempersiapkan usaha. Ketiga, mereka yang tidak bekerja, dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Keempat, mereka yang tidak bekerja, dan tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja, tetapi belum mulai bekerja.

Sebagaimana terlihat pada tabel di atas, TPT Kabupaten Nganjuk dalam kurun waktu tahun 2019-2024 kecenderungannya mengalami penurunan dari 4,68% pada tahun 2023 menjadi 3,87% pada tahun 2024 atau 118,86% dari target Indikator Kinerja Utama dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 yang ditetapkan sebesar 4,60%. Dalam melihat capaian indikator ketenagakerjaan, pelaksanaan job fair bisa menjadi salah satu sarana untuk memangkas waktu tunggu karena bisa mempercepat pertemuan antara pencari kerja berkemampuan khusus ini dengan penyedia lapangan pekerjaan yang membutuhkan tenaga kerja dengan kemampuan khusus tersebut.

5. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Dimensi pembangunan sesuai dengan amanat dari Pemerintah Pusat adalah pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Tutupan Lahan. Indeks Kualitas Air (IKA) adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) adalah nilai yang menggambarkan kualitas Tutupan Lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dapat digunakan untuk mengevaluasi secara umum kualitas lingkungan hidup dan tren pencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. IKLH difokuskan pada media lingkungan air, udara dan tutupan lahan. IKLH juga dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, nilai IKLH dapat digunakan sebagai instrumen indikator keberhasilan Pemerintah Daerah dalam mengelola dan mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Kualitas air diukur pada sungai yang melewati Kabupaten Nganjuk yaitu Sungai Widas dan Sungai Kuncir. Pengukuran dilakukan pada 3 (tiga) titik yaitu hulu, tengah, dan hilir yang diukur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dan diharapkan dapat mewakili 2 (dua) musim yaitu kemarau dan penghujan. Adapun 8 (delapan) parameter yang digunakan dalam pengukuran kualitas air yaitu DO, BOD, COD, TSS, pH, NO3-N, Total Phosphat dan Fecal Coli. Kualitas udara diukur pada lokasi yang mewakili kawasan perumahan, transportasi, industri dan perkantoran di Kabupaten Nganjuk, untuk parameter yang diukur adalah NO2 dan SO2. Sedangkan kualitas tutupan lahan dihitung berdasarkan tutupan hutan, RTH, dan tutupan vegetasi lainnya yang ditampilkan dalam peta deliniasi yang dilengkapi dengan luasan dan titik koordinat. Semakin tinggi IKLH, kondisi Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Nganjuk semakin baik.

Target pencapaian IKLH Kabupaten Nganjuk pada tahun 2024 sesuai Indikator Kinerja Utama dalam RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 sebesar 67,38. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk, nilai IKLH tahun 2024 telah tercapai 69,07.

Tabel 1.24
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Nganjuk
Tahun 2021-2024

No	Tahun	Indeks Kualitas Air	Indeks Kualitas Udara	Indeks Tutupan Lahan	IKLH
1	2021	53.33	78.84	54.86	62.34
2	2022	61.61	79.45	54.91	65.32
3	2023	60.97	81.89	56.13	66.33
4	2024	56,25	88,18	55,74	69,07

Sumber data : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk

6. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks pembangunan manusia mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat dengan menggabungkan 3 indeks yaitu indeks pendidikan, indeks kesehatan serta indeks daya beli. Target indeks pembangunan manusia tahun 2024 adalah 73,49. Upaya untuk meningkatkan nilai IPM tersebut adalah dengan meningkatkan nilai indeks pendidikan dengan memberikan akses kepada masyarakat yang belum menamatkan pendidikan dasar untuk mengikuti kejar paket A, paket B, dan paket C.

Komponen IPM diperoleh dengan metode penghitungan yang terdiri atas 3 aspek yang diukur dengan 4 indikator yakni Aspek Umur Panjang dan Hidup Sehat yang

diukur dengan Umur Harapan Hidup (UHH) Saat Lahir, Aspek Pengetahuan yang diukur dengan Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah, serta Aspek Standar Hidup Layak yang diukur dengan Pengeluaran Riil Perkapita Tahun yang disesuaikan.

Perkembangan IPM Kabupaten Nganjuk selama tahun 2020-2024 sebagai berikut :

Tabel 1.25
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Nganjuk Menurut Komponen
Tahun 2020 – 2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Umur Panjang dan Hidup Sehat						
Umur Harapan Hidup (UHH) Saat Lahir	Tahun	73.85	73.9	74.17	74.43	74.64
Pengetahuan						
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12.86	12.87	13.07	13.17	13.18
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7.64	7.78	8.12	8.24	8.25
Standar Hidup Layak						
Pengeluaran Riil Per Kapita (yang disesuaikan)	Ribu Rupiah	12.130	12.172	12.349	12.821	13.376
IPM	Indeks	72.78	73.03	73.95	74.7	75.24
Pertumbuhan IPM	Poin	0.01	0.25	0.92	0.75	0.54

Sumber data : Badan Pusat Statistik

Pada aspek Umur Panjang dan Hidup Sehat, terdapat indikator Umur Harapan Hidup (UHH) Saat Lahir yang menunjukkan bahwa pada tahun 2024 mencapai 74,64 tahun, naik apabila dibandingkan dengan tahun 2023 yakni 74,43 tahun.

Pada aspek Pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Meningkatnya angka HLS dan RLS menunjukkan bahwa pembangunan manusia di sisi pendidikan lambat laun mengalami kemajuan di Kabupaten Nganjuk. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Nganjuk di Tahun 2024 adalah 13,18 tahun dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Tahun 2024 adalah 8,25 tahun, meningkat apabila dibandingkan dengan HLS dan RLS Tahun 2023 sebesar 13,17 tahun dan 8,24 tahun.

Sedangkan pada aspek Standar Hidup Layak, indikator Pengeluaran Riil Per Kapita (yang disesuaikan) menunjukkan capaian pada tahun 2024 sebesar 13.376 ribu rupiah, naik bila dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 12.821 ribu rupiah.

Gambar 1.9
Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2024 Menurut Kabupaten/Kota Terdekat



Sumber data : Badan Pusat Statistik

Tabel 1.26
Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur Tahun 2023-2024

Kabupaten/Kota	Umur Harapan Hidup saat Lahir[1] (tahun)		Harapan Lama Sekolah (tahun)		Rata-rata Lama Sekolah (tahun)		Pengeluaran Riil per Kapita per tahun yang Disesuaikan (ribu rupiah) Sekolah (tahun)		IPM	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Kediri	74,85	75,07	13,62	13,63	8,24	8,26	11.952	12.388	74,68	75,18
Jombang	74,43	74,64	13,59	13,61	8,77	8,78	11.999	12.454	75,16	75,67
Nganjuk	74,43	74,64	13,17	13,18	8,24	8,25	12.821	13.376	74,70	75,24
Madiun	74,59	74,79	13,23	13,27	7,95	8,20	12.259	12.668	74,02	74,81
Bojonegoro	74,72	74,91	12,92	13,18	7,45	7,59	10.776	11.204	71,80	72,75
Kota Kediri	75,74	75,94	15,45	15,71	10,69	10,92	13.276	13.670	80,97	81,88
Kota Madiun	75,40	75,67	14,44	14,54	11,82	12,11	17.115	17.518	83,71	84,51
Jawa Timur	74,87	75,07	13,38	13,43	8,11	8,28	12.421	12.852	74,65	75,35

Sumber data : Badan Pusat Statistik

Secara umum Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Nganjuk berdasarkan tabel di atas mengalami kenaikan. Berdasarkan perhitungan BPS, pada Tahun 2023 IPM Kabupaten Nganjuk berada di angka 74,70 dan terus meningkat pada Tahun 2024 sebesar 75,24. Nilai IPM Kabupaten Nganjuk pada tahun 2024 ini berada di atas nilai IPM Nasional sebesar 75,02 dan di bawah IPM Jawa Timur yang berada di angka 75,35.

Berdasarkan perhitungan Badan Pusat Statistik, Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Nganjuk pada tahun 2024 tercatat 75,24 berada pada urutan ke 4 dari 7 Kabupaten/Kota yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Nganjuk. Hal tersebut menunjukkan pembangunan manusia di Kabupaten Nganjuk tidak tertinggal dengan Kabupaten/Kota terdekat. Karena kemajuan pembangunan manusia secara umum pada suatu wilayah dapat ditunjukkan dengan perkembangan angka IPM. Berdasarkan dari nilai IPM Kabupaten/Kota terdekat dengan Kabupaten Nganjuk, diketahui 4 Kabupaten yaitu Nganjuk, Madiun, Jombang, Kediri, dan Bojonegoro termasuk dalam kriteria IPM Tinggi ($70 \leq IPM < 80$). Sedangkan nilai IPM pada dua Kota terdekat dengan Kabupaten Nganjuk memiliki kriteria IPM Sangat Tinggi ($IPM \geq 80$) yaitu Kota Madiun dan Kota Kediri.

7. Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi didasarkan atas indeks kepuasan masyarakat terhadap integritas pemerintah dan indeks presepsi masyarakat terhadap birokrasi yang baik dan bebas dari KKN, akuntabilitas kinerja pemerintah serta pelayanan publik. Target indeks reformasi birokrasi Kabupaten Nganjuk pada tahun 2024 ditetapkan sebesar 63,79. Upaya-upaya untuk mencapai target tersebut dilakukan dengan cara pelaksanaan birokrasi pemerintahan yang baik serta rekrutmen maupun penempatan pegawai berdasar sistem merit, penerapan e-government menuju smart city, pelaksanaan kinerja yang akuntabel serta pelayanan publik yang semakin baik dan inovatif.

Dalam pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nganjuk, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia telah melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 1.27
Penilaian Evaluasi Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2024

No	Indikator	Bobot	Skor	Nilai
I	**RB General**	**100.00**	**1469.78**	**73.44**
A	**Strategi Pelaksanaan RB General**	**10.00**	**186.00**	**8.08**
1	Rencana Aksi Pembangunan RB General	3.0	93.00	2.55
2	Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General	7.0	93.00	5.53
B	**Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi**	**40.00**	**778.03**	**25.70**
3	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	3.0	2.00	1.20
4	Tingkat Maturitas SPIP	4.0	3.19	2.55
5	Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	3.5	0.50	0.50
6	Nilai SAKIP	4.0	70.07	2.80
7	Tingkat Digitalisasi Arsip	2.5	98.71	2.47
8	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	2.5	5.00	2.50
9	Indeks Kualitas Kebijakan	2.5	60.56	1.51
10	Indeks Reformasi Hukum	2.5	96.66	2.42
11	Indeks Pembangunan Statistik	2.5	2.04	1.02
12	Indeks Tata Kelola Pengadaan	2.5	75.89	1.90
13	Indeks Sistem Merit	4.0	260.00	2.54
14	Indeks Pelayanan Publik	2.0	4.57	1.83
15	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	2.0	97.84	1.96
16	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	2.5	1.00	0.50
C	**Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi**	**50.00**	**505.75**	**39.66**
17	Indeks SPBE	9.0	3.84	6.92
18	Capaian IKU Makro	4.0	94.42	3.78
19	Capaian IKU Non Makro	6.0	80.95	3.40
20	Opini BPK	5.0	3.00	5.00
21	Tindak Lanjut Rekomendasi	4.0	94.83	3.79
22	Indeks BerAkhlak	4.0	72.63	2.91
23	Survei Penilaian Integritas	10.0	68.62	6.86
24	Survei Kepuasan Masyarakat	8.0	87.46	7.00
II	**RB Tematik**	**20.00**	**9.48**	**9.48**
A	**Strategi Pembangunan**	**5.00**	**2.74**	**2.74**
25	Pengentasan Kemiskinan (Strategi Pembangunan	1.0	0.69	0.69
26	Realisasi Investasi (Strategi Pembangunan)	1.0	0.54	0.54
27	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting (Strategi Pembangunan)	1.0	0.51	0.51
28	Penggunaan Produk Dalam Negeri (Strategi Pembangunan)	1.0	1.00	1.00
29	Pengendalian Inflasi (Strategi Pembangunan)	1.0	0.00	0.00
B	**Capaian Indikator Dampak**	**15.00**	**6.74**	**6.74**
30	Pengentasan Kemiskinan (Capaian Dampak)	3.0	1.14	1.14
31	Realisasi Investasi (Capaian Dampak)	3.0	1.69	1.69
32	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan	3.0	0.95	0.95
33	Penggunaan	3.0	2.96	2.96
34	Pengendalian	3.0	0.00	0.00
III	**Jumlah**	**120.0**	**1479.26**	**82.92**

Tabel 1.28
Penilaian Evaluasi Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2020 – 2024

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai 2020	Nilai 2021	Nilai 2022	Nilai 2023	Nilai 2024
A	**RB General**						
I	Strategi Pelaksanaan RB General	100.00					8.08
II	Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi	40.00					25.70
III	Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi	50.00					39.66
Total RB General (A)		**100.00**	**31,27**	**28,57**	**31,57**	**63,66**	**73.44**
B	**RB Tematik**						
1	Strategi Pembangunan	5					2.74
2	Capaian Indikator Dampak	15					6.74
Total RB Tematik (B)		**20.00**	**29,74**	**30,47**	**28,61**	**2,99**	**9.48**
Indeks Reformasi Birokrasi (A+B)		**120.0**	**61,01**	**59,04**	**60,18**	**66,65**	**82.92**

Sumber : Kementrian PAN dan RB

Dari tabel penilaian dapat diketahui bahwa Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Nganjuk di Tahun 2024 adalah 82,92 dengan kategori “A”, atau 129,99% dari target Indikator Kinerja Utama dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 yang ditetapkan sebesar 63,79. Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai pada RB General dan RB Tematik.

Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah melakukan upaya perbaikan dan tindak lanjut rekomendasi pada tahun 2024 diantaranya yaitu :

1. Perbaikan mendasar terhadap proses promosi dan mutasi pegawai dengan internalisasi aturan mengenai sistem merit dan pengelolaan suap/gratifikasi di instansi bagi seluruh tingkat jabatan.
2. Perbaikan mendasar terhadap upaya pencegahan suap/gratifikasi dengan memastikan hal-hal berikut:
    a. Implementasi dan internalisasi kebijakan, regulasi, mekanisme pelaporan/pengelolaan gratifikasi di instansi.
    b. Menegakkan sanksi/hukuman penerimaan suap/gratifikasi dari pihak eksternal dalam bentuk apapun secara adil dan konsisten.
    c. Pelatihan dan komunikasi rutin dengan pegawai/pimpinan agar tercipta perilaku yang menghindari penerimaan suap/gratifikasi.
    d. Penguatan mekanisme pengaduan dan tindak lanjutnya serta perlindungan terhadap pelapor baik dari pihak internal maupun eksternal.

3. Intensifikasi, sosialisasi, serta kampanye penegakan aturan mengenai pengelolaan benturan kepentingan serta penyalahgunaan perjalanan dinas, mark up anggaran, penyalahgunaan pengadaan barang dan jasa, hingga penyalahgunaan honor kegiatan.
4. Perbaikan mendasar terhadap upaya pencegahan korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa yang sudah dilakukan serta memastikan hal-hal berikut:
    a. Implementasi proses dan alur dari perencanaan hingga pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    b. Internalisasi terkait dengan peran dan independensi unit kerja pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    c. Penguatan mekanisme probity audit berkala untuk mendeteksi adanya masalah dalam proses pengadaan barang dan jasa.
    d. Mengintensifkan penggunaan vendor management system.
    e. Pengelolaan benturan kepentingan dalam proses pengadaan.
    f. Penyesuaian proses pengadaan dan pembayaran secara elektronik yang sudah disiapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Intensifikasi, sosialisasi, dan kampanye aturan mengenai sistem merit dan pengelolaan benturan kepentingan dalam pengelolaan SDM di seluruh tingkat jabatan di instansi.
6. Intensifikasi, sosialisasi, dan kampanye mengenai upaya pencegahan yang telah dilakukan kepada seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal, khususnya yang berkaitan dengan hal-hal berikut:
    a. Penegakan sanksi/hukuman terkait pelanggaran perdagangan pengaruh berdasarkan kode etik dan/atau regulasi internal lainnya.
    b. Adanya larangan perdagangan pengaruh terhadap seluruh pegawai/pimpinan di instansi, disertai contoh dari pimpinan.
    c. Kebijakan, regulasi, dan mekanisme penanganan benturan kepentingan di instansi.
    d. Upaya peningkatan integritas bagi calon pimpinan/pejabat di instansi dan deklarasi konflik kepentingan yang dimiliki sebelum menjabat dan secara tahunan.
    e. Penguatan mekanisme pengawasan internal untuk mendeteksi perdagangan pengaruh sebelum, saat, dan setelah pimpinan menduduki jabatan.
7. Mempertahankan upaya internalisasi kesadaran dan perilaku untuk melaporkan LHKPN.

8. Mempertahankan penyediaan informasi tentang pelaksanaan tugas yang memadai, meskipun sebagian besar responden menganggap penyediaan informasi sudah baik.
9. Perbaikan mendasar dan menyeluruh dalam upaya meningkatkan prosedur layanan dengan memastikan berbagai hal berikut:
    a. Penyederhanaan proses bisnis yang tetap berada dalam koridor peraturan perundang-undangan.
    b. Optimalisasi penggunaan teknologi dalam pengambilan keputusan terkait dengan layanan yang diberikan.
    c. Melakukan evaluasi dan memotret sudut pandang pengguna layanan terkait dengan prosedur dan kejelasan layanan.

8. Indeks Kesalehan Sosial

Kesalehan Sosial adalah sikap seseorang yang memiliki unsur kebaikan (salih) atau manfaat dalam kerangka hidup bermasyarakat. Sikap Kesalehan Sosial meliputi solidaritas sosial, toleransi, mutualitas, tengah-tengah, stabilitas. Penetapan indikator kesalehan sosial terdiri atas solidaritas sosial (sosial ekonomi), kerjasama/mutualitas, toleransi (kerukunan beragama dan budaya), adil serta menjaga ketertiban umum (tertib sosial).

Indeks Kesalehan Sosial merupakan gabungan indeks kepedulian sosial dan indeks kepedulian lingkungan. Indeks ini merupakan manifestasi akan kesalehan sosial masyarakat berupa kepedulian akan lingkungan sosial dan lingkungan alam. Dimensi kepedulian sosial terbentuk dari 4 dimensi, yaitu Kerjasama, Solidaritas Sosial, Toleransi dan Menjaga Ketertiban Umum. Sedangkan dimensi kepedulian lingkungan termasuk dalam Dimensi Menjaga Ketertiban Umum (Tertib Sosial), yaitu Konservasi Lingkungan dan Restorasi Lingkungan.

Skor Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Nganjuk pada tahun 2024 adalah sebesar 91.03 atau 101,37% dari target Indikator Kinerja Utama dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 yang ditetapkan sebesar 89,80.

Kedepannya Pemerintah Kabupaten Nganjuk berupaya agar Indeks Kesalehan Sosial terus meningkat tiap tahunnya. Pemerintah perlu bersinergi dengan stakeholder lain untuk melakukan berbagai langkah strategis dalam peningkatan kesalehan sosial, agar nilai-nilai agama dapat memberi kontribusi positif bagi pembangunan sesuai yang diharapkan.

1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

A. Dasar Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 18 bahwa penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. SPM disusun sebagai alat Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menjamin ketersediaan akses dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara merata. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa SPM adalah jenis pelayanan dasar yang merupakan hak konstitusional rakyat untuk memperolehnya.

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan. Oleh karena itu, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran wajib memperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Penerapan SPM menjadi suatu hal yang sangat penting dan mendasar karena dengan melaksanakan SPM, maka basis untuk kesejahteraan masyarakat dapat terbangun setidaknya bila semua sasaran minimal dapat terwujud.

Dasar hukum yang dipergunakan sebagai acuan dalam proses penyelenggaraan Penerapan SPM Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Nganjuk; dan
5. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/881/K/411.013/2024 tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Nganjuk.

B. Jenis Pelayanan Dasar

Pelayanan dasar yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah terdiri atas 6 (enam) jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh 8 (delapan) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk, yaitu :

Tabel 1.29
Perangkat Daerah Pengampu SPM di Pemerintahan Kabupaten Nganjuk

No.	Perangkat Daerah	Bidang SPM	Jenis Pelayanan Dasar
1.	Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk	Urusan Pendidikan	1. Pendidikan anak usia dini 2. Pendidikan dasar 3. Pendidikan kesetaraan
2.	Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk	Urusan Kesehatan	1. Pelayanan kesehatan ibu hamil 2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin 3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir 4. Pelayanan kesehatan balita 5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar 6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif 7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut 8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi 9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus 10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat 11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis 12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*)
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk	Urusan Pekerjaan Umum	1. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari 2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik

No.	Perangkat Daerah	Bidang SPM	Jenis Pelayanan Dasar
4.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk	Urusan Perumahan Rakyat	1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah Kabupaten 2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah Kabupaten
5.	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk	Urusan Trantibumlinmas (Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban)	1. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum
6.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk	Urusan Trantibumlinmas (Sub Urusan Bencana Daerah)	1. Pelayanan informasi rawan bencana 2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
7.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nganjuk	Urusan Trantibumlinmas (Sub Urusan Kebakaran)	1. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
8.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk	Urusan Sosial	1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti 2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti 3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti 4. Gelandangan dan pengemis di luar panti 5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kabupaten

C. Prinsip Penerapan SPM

a. Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
b. Penerapan SPM diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.
c. Ketentuan mengenai Mutu Pelayanan Dasar sesuai dengan Standar Teknis yang diatur oleh menteri teknis yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar setelah berkoordinasi dengan Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.
d. Pembiayaan Penerapan SPM oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada APBD, APBN, dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

D. Tahapan Penerapan SPM

Tahapan dalam proses penyelenggaraan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Nganjuk sesuai dalam ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data

   Perangkat Daerah Pengampu SPM melaksanakan pengumpulan data meliputi :

   a. Jumlah dan identitas lengkap Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar Warga Negara secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasarnya.
   b. Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk jumlah sarana, prasarana, dan sumber daya manusia yang tersedia.
   c. Pengumpulan data ditujukan untuk pencapaian 100% dari target dan indikator kinerja pencapaian SPM setiap tahun.
   d. Hasil pengumpulan data diintegrasikan dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Kebutuhan Dasar

   Perangkat Daerah Pengampu SPM melaksanakan perhitungan kebutuhan meliputi :

   a. Perangkat Daerah menghitung selisih kebutuhan terhadap ketersediaan barang dan/atau jasa dan sarana dan/atau prasarana berdasarkan jumlah Warga Negara penerima dan Mutu Pelayanan Dasar sesuai dengan Standar Teknis SPM.

b. Ketersediaan diperoleh dari pihak Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, lembaga non pemerintah, masyarakat, dan/atau Pemerintah Daerah**.**
c. Hasil penghitungan digunakan untuk menyusun kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar berpedoman pada Standar Biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
d. Perangkat Daerah menghitung Warga Negara penerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu memperoleh barang dan/atau jasa yang telah tersedia.
e. Warga Negara penerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu dikarenakan : (1) miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, (2) sifat barang dan/atau jasa yang tidak dapat diakses atau dijangkau sendiri, (3) kondisi bencana, dan/atau (4) kondisi lain yang tidak memungkinkan untuk dapat dipenuhi sendiri.

3. Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar

   Perangkat Daerah Pengampu SPM melaksanakan penyusunan rencana meliputi :

   a. Pemerintah Daerah menyusun rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan penghitungan Warga Negara yang berhak menerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu yang dimuat dalam dokumen RPJMD dan RKPD.
   b. Perangkat Daerah memprioritaskan penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar berdasarkan penghitungan ke dalam Renstra PD dan Renja PD sesuai dengan tugas dan fungsi.
   c. Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar merupakan salah satu tolok ukur Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

4. Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar

   a. Perangkat Daerah melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar.
   b. Perangkat Daerah menetapkan target pencapaian program, kegiatan, dan sub kegiatan berdasarkan data jumlah penerima Pelayanan Dasar yang diperoleh setiap tahunnya.
   c. Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar berupa penyediaan barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, sumber daya manusia yang dibutuhkan dan/atau melakukan kerja sama daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar

Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar dituangkan dalam dokumen perencanaan melalui tahapan sebagai berikut :

a. Pemerintah Daerah menyusun rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan penghitungan Warga Negara yang berhak menerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu yang dimuat dalam dokumen RPJMD dan RKPD.
b. Perangkat Daerah memprioritaskan penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar berdasarkan penghitungan ke dalam Renstra PD dan Renja PD sesuai dengan tugas dan fungsi.
c. Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar merupakan salah satu tolok ukur kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
d. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan memastikan program, kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dimuat dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD.
e. Perangkat Daerah memprioritaskan anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar setelah tercantum dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD.
f. Tim Anggaran Pemerintah Daerah memastikan anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.
g. Anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan disusun berdasarkan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar.

BAB II
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Capaian kinerja makro tersaji dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Makro

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024	Perubahan (%)
1	Indeks Pembangunan Manusia	74,70	75,24	0,72
2	Angka Kemiskinan	10,89	10,17	- 6,61
3	Angka Pengangguran	4,68	3,87	- 17,31
4	Pertumbuhan Ekonomi	5,40	4,93	- 8,70
5	Pendapatan Per Kapita	33.646,95	36.270,56	7,80
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,324	0,289	- 10,80

Sumber data : Badan Pusat Statistik

Keterangan:

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat; pengetahuan; dan standar hidup layak.
2. Angka kemiskinan merupakan persentase penduduk miskin pada daerah yang bersangkutan. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan

dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

3. Angka pengangguran adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran adalah penduduk yang tidak memiliki pekerjaan dan memenuhi kriteria: (1) aktif mencari pekerjaan, (2) sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, serta (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.
4. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan produksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian di suatu wialayah. Peningkatan barang modal, angkatan kerja, teknologi, dan sumber daya manusia dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.
5. Pendapatan per kapita adalah indikator yang mengukur rata-rata pendapatan setiap penduduk di suatu daerah, dihitung dengan membagi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah dengan jumlah penduduknya.
6. Ketimpangan pendapatan (*gini ratio)* memiliki rentang nilai antara 0 sampai dengan 1. Nilai 0 berarti tidak ada kesenjangan ekonomi atau perekonomian merata pada daerah tersebut. Sementara itu, nilai 1 menunjukkan nilai kesenjangan maksimal.

Nilai Koefisien	Distribusi Pendapatan
< 0,4	Tingkat ketimpangan rendah
0,4 – 0,5	Tingkat ketimpangan sedang
> 0,5	Tingkat ketimpangan tinggi

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Capaian kinerja memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang. Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan tersaji dalam tabel sebagai berikut :

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci

Tabel 2.2
Capaian Indikator Kinerja Kunci

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus Capaian	Capaian Kinerja Tahun 2024	Sumber Data
1.	PENDIDIKAN	1. Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	$\frac{\text{Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD}}{\text{Jumlah anak usia 5-6 tahun pada Kabupaten/Kota yang bersangkutan}} \times 100\%$	$\frac{29.190}{30.287} \times 100\%$ = 96.38%	Dinas Pendidikan Dinas Dukcapil
		2. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	$\frac{\text{Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar}}{\text{Jumlah anak usia 7-12 tahun pada Kabupaten/Kota yang bersangkutan}} \times 100\%$	$\frac{100.673}{96.605} \times 100\%$ = 104,21%	Dinas Pendidikan Dinas Dukcapil
		3. Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	$\frac{\text{Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama}}{\text{Jumlah anak usia 13-15 tahun pada Kabupaten/Kota yang bersangkutan}} \times 100\%$	$\frac{60.541}{53.739} \times 100\%$ = 112,66%	Dinas Pendidikan Dinas Dukcapil
		4. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.	$\frac{\text{Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan}}{\text{Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada Kabupaten/Kota yang bersangkutan}} \times 100\%$	$\frac{373}{373} \times 100\%$ = 100%	Dinas Pendidikan
2.	KESEHATAN	1. Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	$\frac{\text{Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan}}{\text{Jumlah penduduk di Kabupaten/Kota}} \times 100\%$	$\frac{874}{1.152.575} \times 100\%$ = 0,76%	Dinas Kesehatan Dinas Dukcapil

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus Capaian	Capaian Kinerja Tahun 2024	Sumber Data
		2. Persentase RS Rujukan tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi	$\frac{\text{Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi}}{\text{Jumlah RS di Kabupaten/Kota}} \times 100\%$	$\frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$	Dinas Kesehatan
		3. Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	$\frac{\text{Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan}}{\text{Jumlah ibu hamil di Kabupaten/Kota}} \times 100\%$	$\frac{9.813}{9.813} \times 100\% = 100\%$	Dinas Kesehatan
		4. Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	$\frac{\text{Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan}}{\text{Jumlah ibu bersalin di Kabupaten}} \times 100\%$	$\frac{10.825}{10.825} \times 100\% = 100\%$	Dinas Kesehatan
		5. Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	$\frac{\text{Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah bayi baru lahir di Kabupaten}} \times 100\%$	$\frac{10.814}{10.814} \times 100\% = 100\%$	Dinas Kesehatan
		6. Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah balita di Kabupaten}} \times 100\%$	$\frac{53.783}{53.783} \times 100\% = 100\%$	Dinas Kesehatan
		7. Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah anak usia pendidikan dasar di Kabupaten}} \times 100\%$	$\frac{143.827}{150.344} \times 100\% = 95{,}66\%$	Dinas Kesehatan Dinas Dukcapil
		8. Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah orang usia 15-59 tahun di Kabupaten}} \times 100\%$	$\frac{694.131}{735.912} \times 100\% = 94{,}32\%$	Dinas Kesehatan Dinas Dukcapil
		9. Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas di Kabupaten}} \times 100\%$	$\frac{147.739}{190.810} \times 100\% = 77{,}43\%$	Dinas Kesehatan Dinas Dukcapil
		10. Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah penderita hipertensi di Kabupaten}} \times 100\%$	$\frac{214.542}{214.542} \times 100\% = 100\%$	Dinas Kesehatan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus Capaian	Capaian Kinerja Tahun 2024	Sumber Data
		11. Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah penderita DM di Kabupaten}} \times 100\%$	$\frac{22.841}{22.841} \times 100\% = 100\%$	Dinas Kesehatan
		12. Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah penderita ODGJ di Kabupaten}} \times 100\%$	$\frac{2.197}{2.197} \times 100\% = 100\%$	Dinas Kesehatan
		13. Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah penderita TBC di Kabupaten}} \times 100\%$	$\frac{10.164}{12.408} \times 100\% = 81{,}91\%$	Dinas Kesehatan
		14. Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar}}{\text{Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di Kabupaten}} \times 100$	$\frac{25.234}{25.234} \times 100\% = 100\%$	Dinas Kesehatan
3.	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1. Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten	$\frac{\text{Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten (ha)}}{\text{Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kabupaten (ha)}} \times 100\%$	$\frac{52.345}{54.030} \times 100\% = 96{,}88\%$	Dinas PUPR
		2. Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten	$\frac{\text{Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten (m)}}{\text{Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan Kabupaten (m)}} \times 100$	$\frac{3.281}{3.281} \times 100\% = 100\%$	Dinas PUPR
		3. Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	$\frac{\text{Luas irigasi kewenangan Kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasi dan pelihara (ha) di tahun existing}}{\text{Luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten}} \times 100\%$	$\frac{14.264}{14.951} \times 100\% = 95{,}40\%$	Dinas PUPR
		4. Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten	$\frac{\text{Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindugi dalam sebuah Kabupaten}}{\text{Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh Kabupaten}} \times 100\%$	$\frac{332.674}{334.245} \times 100\% = 99{,}53\%$	Dinas PUPR

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus Capaian	Capaian Kinerja Tahun 2024	Sumber Data
		5. Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	$\frac{\text{Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD}}{\text{Jumlah rumah di Kabupaten}}$ x 100%	$\frac{324.057}{334.245}$ x 100% = 96,95%	Dinas PUPR
		6. Rasio kepatuhan IMB Kabupaten	$\frac{\text{Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya}}{\text{Jumlah IMB yang berlaku}}$ x 100%	$\frac{37}{37}$ x 100% = 100%	Dinas PUPR
		7. Tingkat kemantapan jalan Kabupaten	$\frac{\text{Panjang jalan kewenangan Kabupaten yang mantap}}{\text{Panjang jalan keseluruhan di wilayah Kabupaten}}$ x 100%	$\frac{1.010.931}{1.481.997}$ x 100% = 68,21%	Dinas PUPR
		8. Rasio tenaga operator / teknisi / analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analis}}{\text{Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analis di wilayah Kabupaten}}$ x 100%	$\frac{168}{168}$ x 100% = 100%	Dinas PUPR
		9. Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	$\frac{\text{Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa terjadi kecelakaan konstruksi}}{\text{Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya}}$ x 100	$\frac{563}{563}$ x 100% = 100%	Dinas PUPR
4.	PERUMAHAN RAKYAT	1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten	$\frac{\text{Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n}}{\text{Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n}}$ x 100	$\frac{72}{72}$ x 100% = 100%	Dinas PRKPP
		2. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah Kabupaten	$\frac{\text{Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan}}$ x 100%	Nihil	Dinas PRKPP
		3. Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten yang ditangani	$\frac{\text{Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha)}}{\text{Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha}}$ x 100%	$\frac{72,32}{155,88}$ x 100% = 46,39%	Dinas PRKPP

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus Capaian	Capaian Kinerja Tahun 2024	Sumber Data
		4. Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	$\frac{\text{Jumlah unit rumah tidak layak huni}}{\text{Jumlah total unit rumah Kabupaten}} \times 100\%$	$\frac{9.575}{316.157} \times 100\% = 3{,}03\%$	Dinas PRKPP
		5. Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	$\frac{\text{Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU}}{\text{Jumlah unit rumah Kabupaten}} \times 100\%$	$\frac{2.290}{3.728} \times 100\% = 61{,}43\%$	Dinas PRKPP
5.	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1. Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang ditangani}}{\text{Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk}} \times 100\%$	$\frac{39}{39} \times 100\% = 100\%$	Satpol PP
		2. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	$\frac{\text{Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan}}{\text{Jumlah keseluruhan Perda/Perkada yang memuat sanksi}} \times 100\%$	$\frac{10}{11} \times 100\% = 90{,}91\%$	Satpol PP
		3. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	$\frac{\text{Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana}}{\text{Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sesuai target yang ditetapkan}} \times 100\%$	$\frac{300}{300} \times 100\% = 100\%$	BPBD
		4. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	$\frac{\text{Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana}}{\text{Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana di wilayah Kabupaten}} \times 100\%$	$\frac{2.365}{1.148.611} \times 100\% = 0{,}20\%$	BPBD
		5. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	$\frac{\text{Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana}}{\text{Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana}} \times 100$	$\frac{12}{12} \times 100\% = 100\%$	BPBD
		6. Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	$\frac{\text{Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di Kabupaten dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/ Perangkat Daerah + jumlah layanan pemadaman di Kabupaten dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dan/atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah}}{\text{Jumlah kejadian kebakaran di Kabupaten}} \times 10$	$\frac{176}{182} \times 100\% = 96{,}70\%$	Dinas Damkar

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus Capaian	Capaian Kinerja Tahun 2024	Sumber Data
		7. Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran (menit)	9,44 menit	Dinas Damkar
6.	SOSIAL	1. Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	$\frac{\text{Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti}}{\text{Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis}} \times 100\%$	$\frac{1.719}{1.719} \times 100\% = 100\%$	Dinas Sosial PPPA
		2. Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten	$\frac{\text{Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran}}{\text{Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah Kabupaten yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten}} \times 100\%$	$\frac{48}{48} \times 100\% = 100\%$	Dinas Sosial PPPA
7.	TENAGA KERJA	1. Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	$\frac{\text{Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD}}{\text{Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kabupaten}} \times 100$	$\frac{4}{5} \times 100\% = 80\%$	Dinas Tenaga Kerja
		2. Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi}}{\text{Jumlah tenaga kerja keseluruhan}} \times 100\%$	$\frac{12.969}{24.579} \times 100\% = 52,76\%$	Dinas Tenaga Kerja
		3. Tingkat produktivitas tenaga kerja	$\frac{\text{PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan)}}{\text{Jumlah tenaga kerja}}$	$\frac{21.614.910.000}{603.100} \times 100\% = 3.583.967,83\%$	Dinas Tenaga Kerja
		4. Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak}}{\text{Jumlah perusahaan}} \times 100\%$	$\frac{120}{220} \times 100\% = 54,54\%$	Dinas Tenaga Kerja
		5. Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme Layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	$\frac{\text{Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan}}{\text{Jumlah pencaker yang terdaftar}} \times 100\%$	$\frac{4.749}{6.487} \times 100\% = 73,21\%$	Dinas Tenaga Kerja
8.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN	1. Persentase ARG pada belanja langsung APBD	$\frac{\text{Jumlah ARG pada belanja operasional dan modal APBD}}{\text{Jumlah seluruh belanja operasional dan modal APBD}} \times 100\%$	$\frac{769.662.432.211}{2.718.304.808.379} \times 100\%$	Dinas Sosial PPPA

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus Capaian	Capaian Kinerja Tahun 2024	Sumber Data
	PERLINDUNGAN ANAK			= 28,31%	
		2. Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten	$\frac{\text{Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat Kabupaten yang didampingi}}{\text{Jumlah anak korban kekerasan yang menjadi kewenangan kabupaten (Penduduk usia kurang dari 18 tahun)}} \times 100\%$	$\frac{38}{38} \times 100\%$ = 100%	Dinas Sosial PPPA
		3. Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	$\frac{\text{Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan}}{\text{Jumlah penduduk perempuan}} \times 100.000$	$\frac{40}{573.044} \times 100\%$ = 6,98%	Dinas Sosial PPPA
9.	PANGAN	1. Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	$\frac{\text{Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten}}{\text{Jumlah target cadangan pangan pemerintah kabupaten yang ditetapkan}} \times 100\%$	$\frac{5.171,04}{157,66} \times 100\%$ = 3.279,87%	Dinas KPP
10.	PERTANAHAN	1. Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	$\frac{\text{Luas tanah sesuai peruntukkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)}}{\text{Seluruh luas tanah yang diberikan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)}} \times 100\%$	$\frac{103.011}{103.011} \times 100\%$ = 100%	Dinas PRKPP
		2. Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	$\frac{\text{Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum}}{\text{Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum}} \times 100\%$	$\frac{15.532}{15.532} \times 100\%$ = 100%	Dinas PRKPP
		3. Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	$\frac{\text{Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)}}{\text{Luas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang diterbitkan}} \times 100\%$	$\frac{385.666}{385.666} \times 100\%$ = 100%	Dinas PRKPP
		4. Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	$\frac{\text{Jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0.5 ha}}{\text{Jumlah penerima tanah obyek landreform}} \times 100\%$	Nihil	Dinas PRKPP
		5. Tersedianya tanah untuk masyarakat	$\frac{\text{Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan izin membuka tanah}}{\text{Luas izin membuka tanah yang diterbitkan}} \times 100\%$	Nihil	Dinas PRKPP

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus Capaian	Capaian Kinerja Tahun 2024	Sumber Data
		6. Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani}}{\text{Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan}} \times 100\%$	Nihil	Dinas PRKPP
11.	LINGKUNGAN HIDUP	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten	IKLH Kabupaten = (IKA x 0,376) + (IKU x 0,405) + (ITH x 0,219). IKA = Indeks Kualitas Air IKU = Indeks Kualitas Udara IKL = Indeks Kualitas Lahan	69,07	Dinas Lingkungan Hidup
		2. Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten	$\frac{\text{Jumlah Total volume sampah yang dapat ditangani}}{\text{Jumlah seluruh Total volume timbunan sampah tahun berjalan Kabupaten}} \times 100\%$	$\frac{72.620,86}{167.099,92} \times 100\%$ = 43,46%	Dinas Lingkungan Hidup
		3. Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	$\frac{\text{Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan pemerintah Kabupaten}}{\text{Usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan}} \times 100\%$	$\frac{19}{30} \times 100\%$ = 63,33%	Dinas Lingkungan Hidup
12.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1. Perekaman KTP elektronik	$\frac{\text{Jumlah Penduduk wajib KTP-el yang telah melakukan perekaman}}{\text{Jumlah penduduk wajib KTP-el}} \times 100\%$	$\frac{886.210}{891.216} \times 100\%$ = 99,44%	Dinas Dukcapil
		2. Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	$\frac{\text{Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA}}{\text{Jumlah anak usia 0-17 tahun}} \times 100\%$	$\frac{78.445}{261.334} \times 100\%$ = 30,02%	Dinas Dukcapil
		3. Persentase Penduduk usia 0 - 18 tahun Yang Mempunyai Akte Kelahiran	$\frac{\text{Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir}}{\text{Jumlah anak usia 0-18 tahun}} \times 100\%$	$\frac{266.427}{293.820} \times 100\%$ = 90,68%	Dinas Dukcapil
		4. Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	$\frac{\text{Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama}}{\text{Jumlah PD}} \times 100\%$	$\frac{8}{17} \times 100\%$ = 47,06%	Dinas Dukcapil
13.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1. Persentase pengentasan desa tertinggal	$\frac{\text{Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun}}{\text{Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n)}} \times 100\%$	$\frac{1}{1} \times 100\%$ = 100%	Dinas PMD

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus Capaian	Capaian Kinerja Tahun 2024	Sumber Data
		2. Persentase peningkatan status desa mandiri	$\frac{\text{Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun}}{\text{Jumlah desa berkembang (per-awal tahun n)}} \times 100$		Dinas PMD
14.	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1. TFR (Angka Kelahiran Total)	$\text{TFR} = 5\sum_{i=1}^{7} \text{ASFR i}$ $\text{ASFR i} = \frac{b_i}{p_i^f} \times k$ TFR : Angka Kelahiran Total ASFR : Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur bi : Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur i pada tahun tertentu pi : Jumlah penduduk perempuan kelompok umur i pada pertengahan tahun yang sama i : Kelompok umur (i=1 untuk kelompok umur 15-19, i=2 untuk kelompok umur 20-24,....., i=7 untuk kelompok umur 45-49 k : Bilangan Konstanta biasanya 1000	1,52	Dinas PPKB
		2. Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	$\frac{\text{Jumlah peserta KB aktif modern}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur}} \times 100\%$	$\frac{126.986}{172.032} \times 100\%$ = 73,81%	Dinas PPKB
		3. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	$\frac{\text{Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)}} \times 100\%$	$\frac{11.040}{172.032} \times 100\%$ = 6,42%	Dinas PPKB
15.	PERHUBUNGAN	1. Rasio konektivitas Kabupaten	Rasio konektivitas Kabupaten = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan) • IK1 (angkutan jalan) = (Jumlah trayek yang dilayani pada Kabupaten x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada Kabupaten tersebut) • IK2 (angkutan sungai, danau dan penyeberangan) = jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi pada Kabupaten tersebut x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada Kabupaten tersebut)	0,2	Dinas Perhubungan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus Capaian	Capaian Kinerja Tahun 2024	Sumber Data
			Keterangan: IK1 (Angkutan Jalan) • Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek AKAP • Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKAP dalam kurun waktu tertentu IK2 (Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan) • Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah lintasan perintis ditambah lintasan komersil • Jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah kebutuhan lintas penyeberangan baik lintas penyeberangan perintis maupun komersil untuk menghubungkan antar wilayah yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyeberangan: 1. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70, bobot angkutan jalan = 30) 2. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP 50, bobot angkutan jalan = 50) 3. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30 (bobot angkutan jalan = 70) 4. Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut (bobot angkutan SDP = 0, bobot angkutan jalan = 100) Bobot Trayek atau Lintas: a. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), bobot = 1 b. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot = 0.8 c. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (<3 dalam seminggu), Bobot = 0.5		

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus Capaian	Capaian Kinerja Tahun 2024	Sumber Data
		2. V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	V/C ratio di jalan Kabupaten	0,3	Dinas Perhubungan
16.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	$\frac{\text{Jumlah PD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo}}{\text{Jumlah PD}} \times 100\%$	$\frac{52}{52} \times 100\% = 100\%$	Dinas Kominfo
		2. Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	$\frac{\text{Jumlah layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi}}{\text{Jumlah Layanan Publik}} \times 100\%$	$\frac{106}{116} \times 100\% = 91{,}38\%$	Dinas Kominfo
		3. Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah Kabupaten	$\frac{\text{Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah Kabupaten}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$	$\frac{775.293}{798.374} \times 100\% = 97{,}11\%$	Dinas Kominfo
17.	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	1. Meningkatnya koperasi yang berkualitas	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset}}{\text{Jumlah seluruh koperasi}} \times 100\%$	$\frac{259}{356} \times 100\% = 72{,}75\%$	Dinas Koperasi UM
		2. Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha}}{\text{Jumlah usaha mikro keseluruhan}} \times 100\%$	$\frac{15.574}{41.013} \times 100\% = 37{,}97\%$	Dinas Koperasi UM
18.	PENANAMAN MODAL	1. Persentase peningkatan investasi di Kabupaten	$\frac{\text{Jumlah investasi tahun n - jumlah investasi tahun n-1 di Kabupaten}}{\text{Jumlah investasi tahun n-1 di Kabupaten}} \times 100\%$	$\frac{1.359.191.202.844 - 624.264.000.000}{624.264.000.000} \times 100\% = 117{,}73\%$	Dinas PMPTSP
19.	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	1. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	$\frac{\text{Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di Kabupaten}}{\text{Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di Kabupaten}} \times 100\%$	$\frac{23.517}{246.745} \times 100\% = 9{,}53\%$	Dinas Porabudpar
		2. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	$\frac{\text{Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di Kabupaten}}{\text{Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di Kabupaten}} \times 100\%$	$\frac{66.029}{246.745} \times 100\% = 26{,}76\%$	Dinas Porabudpar

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus Capaian	Capaian Kinerja Tahun 2024	Sumber Data
		3. Peningkatan prestasi olahraga	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	5 Medali	Dinas Porabudpar
20.	STATISTIK	1. Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	$\frac{\text{Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah}}{\text{Jumlah PD}}$ x 100%	$\frac{52}{52}$ x 100% = 100%	Dinas Kominfo
		2. Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	$\frac{\text{Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah}}{\text{Jumlah PD}}$ x 100%	$\frac{52}{52}$ x 100% = 100%	Dinas Kominfo
21.	PERSANDIAN	1. Tingkat keamanan informasi pemerintah	$\frac{\text{Jumlah nilai per area keamanan informasi}}{\text{Jumlah area penilaian}}$ x 100%	$\frac{527}{645}$ x 100% = 81,70%	Dinas Kominfo
22.	KEBUDAYAAN	1. Terlestarikannya Cagar Budaya	$\frac{\text{Jumlah cagar budaya yang dilestarikan}}{\text{Jumlah cagar budaya yang terdata}}$ x 100%	$\frac{103}{305}$ x 100% = 33,77%	Dinas Porabudpar
23.	PERPUSTAKAAN	1. Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat	77,26	Dinas Arsipus
		2. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM) UPLM 1 = Pemerataan layanan perpustakaan UPLM 2 = Ketercukupan koleksi UPLM 3 = Ketercukupan tenaga perpustakaan UPLM 4 = Tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan UPLM 5 = Perpustakaan ber-SNP UPLM 6 = Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan UPLM 7 = Anggota perpustakaan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat =	42,08	Dinas Arsipus

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus Capaian	Capaian Kinerja Tahun 2024	Sumber Data
			$\Sigma \frac{\text{UPLM}}{\text{ALM}}$ x 100		
24.	KEARSIPAN	1. Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	T = (a + i + s + j)/4 T = Tingkat ketersediaan arsip a = Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip i = Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip s = Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik j = Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	85	Dinas Arsipus
		2. Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	T = (m + b + g + a + c + i)/6 T = Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban m = Tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK b = Tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK g = Tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah Kabupaten/Kota dengan NSPK a = Tingkat kesesuaian kegiatan autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK c = Tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK i = Tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK	100	Dinas Arsipus
25.	KELAUTAN & PERIKANAN	1. Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten (sumber data: one data KKP)	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten (sumber data: one data KKP)	$\frac{11.599}{11.155}$ x 100% = 103,98%	Dinas KPP
26.	PARIWISATA	1. Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	$\frac{\text{Jumlah wisatawan tahun n - Jumlah wisatawan tahun n-1}}{\text{Jumlah wisatawan tahun n-1}}$ x 100%	$\frac{1-0}{0}$ x 100% = 0%	Dinas Porabudpar

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus Capaian	Capaian Kinerja Tahun 2024	Sumber Data
		2. Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten	$\frac{\text{Jumlah wisatawan tahun n - Jumlah wisatawan tahun n-1}}{\text{Jumlah wisatawan tahun n-1}} \times 100\%$	$\frac{367.522 - 350.550}{350.550} \times 100\%$ = 4,84%	Dinas Porabudpar
		3. Tingkat hunian akomodasi	$\frac{\text{Jumlah kamar yang terjual}}{\text{Jumlah kamar yang tersedia}} \times 100\%$	$\frac{22.660}{220.825} \times 100\%$ = 10,26%	Dinas Porabudpar
		4. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	$\frac{\text{Total Nilai kontribusi sektor pariwisata pada PDRB}}{\text{Total PDRB Berlaku}} \times 100\%$	$\frac{744.100.000.000}{36.270.000.000.000} \times 100\%$ = 2,05%	Dinas Porabudpar
		5. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	$\frac{\text{Total realiasi PAD dari sektor pariwisata}}{\text{Total realisasi PAD}} \times 100\%$	$\frac{9.881.048.702}{486.161.502.239} \times 100\%$ = 2,03%	Dinas Porabudpar
27.	PERTANIAN	1. Produktivitas pertanian per hektar per tahun	$\frac{\text{Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun (Ton)}}{\text{Luas panen (ha)}} \times 100\%$	$\frac{749.212,96}{112.290,16} \times 100\%$ = 667,21%	Dinas Pertanian
		2. Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	$\frac{\text{Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun berjalan (t) - jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)}}{\text{Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)}} \times 100\%$	$\frac{2.021 - 4.594}{4.594} \times 100\%$ = - 56,01%	Dinas Pertanian
28.	KEHUTANAN			100	Bukan kewenangan
29.	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	1. Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di Kabupaten	$\frac{\text{Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin}}{\text{Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi}} \times 100\%$	100	Bukan kewenangan
30.	PERDAGANGAN	1. Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	$\frac{\text{Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah pelaku usaha di wilayah Kabupaten}} \times 100\%$	Nihil	Dinas Indag

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus Capaian	Capaian Kinerja Tahun 2024	Sumber Data
		2. Persentase kinerja realisasi pupuk	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{RDKK}}$ x 100%		
		3. Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	$\frac{\text{Jumlah UTTP bertanda tera sah yang berlaku pada tahun berjalan}}{\text{Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah Kabupaten}}$ x 100%	$\frac{8.761}{9.831}$ x 100% = 89,12%	Dinas Indag
31.	PERINDUSTRIAN	1. Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten	$\frac{\text{Jumlah industri kecil dan menengah pada tahun n – jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1}}{\text{Jumlah indutri kecil dan menengah tahun n-1}}$ x 100%	$\frac{1.563}{1.530}$ x 100% = 2,16%	Dinas Indag
		2. Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	$\frac{\text{Jumlah Indikator Pembangunan Industri dalam RPIK}}{\text{Jumlah Indikator Pembangunan Industri dalam RIPIP}}$ x 100% Jika terdapat N indikator pembangunan industri dalam RPIK maka nilai masing-masing bobot indikator adalah (100/N)% Untuk masing-masing penilaian indikator adalah persentase capaian indikator dibagi target dikali (100/N)% Nilai akhir adalah akumulasi dari N indikator tersebut	14,51	Dinas Indag
		3. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	$\frac{\text{Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan}}$ x 100%	$\frac{28}{352}$ x 100% = 7,95%	Dinas Indag
		4. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	$\frac{\text{Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan}}$ x 100%	Nihil	Dinas Indag
		5. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten	$\frac{\text{Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan}}$ x 100%	Nihil	Dinas Indag

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus Capaian	Capaian Kinerja Tahun 2024	Sumber Data
		6. Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	1) Keterkinian informasi industri : - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%) - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%) - Tidak menyampaikan informasi industri (0%) 2) Kelengkapan informasi industri meliputi : - Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%) - Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%) Nilai akhir adalah akumulasi dari kelengkapan dan keterkinian informasi industri (1 + 2)	100	Dinas Indag
32.	TRANSMIGRASI			100	Bukan kewenangan

2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Tabel 2.3
Capaian Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang

No.	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Capaian Kinerja Tahun 2024	Sumber Data
1.	PERENCANAAN DAN KEUANGAN	1. Rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	$\frac{\text{Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan}}{\text{Jumlah APBD}} \times 100\%$	$\frac{306.646.949.042}{2.928.371.783.277} \times 100\% = 10,47\%$	BPKAD
		2. Rasio PAD	$\frac{\text{Jumlah PAD}}{\text{Jumlah PDRB non migas}} \times 100\%$	$\frac{486.161.502.239,33}{2.834.668.602.772,3} \times 100\% = 17,15\%$	BPKAD
		3. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0) / level 1 / level 2 / level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	3,862	Inspektorat
		4. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0) / level 1 / level 2 / level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	3	Inspektorat
		5. Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	$\frac{\text{Jumlah belanja urusan pemerintahan – transfer expenditures}}{\text{Jumlah belanja APBD}} \times 100\%$	$\frac{1.964.885.773.147}{2.928.371.783.277} \times 100\% = 67,10\%$	BPKAD
		6. Opini Laporan Keuangan	Opini Laporan Keuangan	9 WTP 1 WDP	BPKAD
2.	PENGADAAN	1. Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	$\frac{\text{Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n}}{\text{Jumlah kontrak keseluruhan tahun n}} \times 100\%$	$\frac{0}{804} \times 100\% = 0\%$	Bagian Pengadaan, Setda
		2. Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	$\frac{\text{Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif}}{\text{Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif}} \times 100\%$	$\frac{5.091}{5.116} \times 100\% = 99,51\%$	Bagian Pengadaan, Setda
		3. Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	$\frac{\text{Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan}}{\text{Total belanja langsung}} \times 100\%$	$\frac{468.730.385.284.49}{1.406.502.645.163.6} \times 100\% = 33.31\%$	Bagian Pengadaan, Setda

No.	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Capaian Kinerja Tahun 2024	Sumber Data
		4. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	$\frac{\text{Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n) - Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1)}}{\text{Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1)}}$ x	$\frac{465.406.794.057,68 - 424.131.073.477,67}{424.131.073.477,67}$ x 100% = 9,73%	Bagian Pengadaan, Setda
3.	KEPEGAWAIAN	1. Rasio pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$\frac{\text{Jumlah pegawai menurut pendidikan PT ke atas}}{\text{Jumlah pegawai dengan pendidikan SMA ke bawah}}$ x 100%	$\frac{1.353}{2.465}$ x 100% = 54,88%	BKPSDM
		2. Rasio pegawai fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan	$\frac{\text{Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan)}}{\text{Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)}}$ x 100%	$\frac{516}{2.465}$ x 100% = 20,93%	BKPSDM
		3. Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$\frac{\text{Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi}}{\text{Seluruh jumlah pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)}}$ x 100%	$\frac{150}{516}$ x 100% = 29,07%	BKPSDM
4.	MANAJEMEN KEUANGAN	1. Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	$\left(\left(\frac{\text{Nilai absolut dari total belanja dalam realisasi}}{\text{Total belanja APBD}}\right)\text{-1}\right)$ x 100%	$\frac{2.505.249.343.277}{2.278.061.429.164}$ x 100% = 9,97%	BPKAD
		2. Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	$\left(\left(\frac{\text{Nilai absolut dari total PAD dalam realisasi}}{\text{Total PAD dalam APBD}}\right)\text{-1}\right)$ x 100%	$\frac{486.161.502.239,33}{413.210.731.761}$ x 100% = 17,65%	BPKAD
		3. Manajemen Aset	Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak) Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak) Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak) Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)	Ya	BPKAD
		4. Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	$\frac{\text{Nilai realisasi SiLPA}}{\text{Total belanja anggaran tahun sebelumnya}}$ x 100%	$\frac{258.129.258.513,56}{2.573.094.818.356}$ x 100%	BPKAD

No.	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Rumus	Capaian Kinerja Tahun 2024	Sumber Data
				= 10,03%	
5.	TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK	1. Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	$\frac{\text{Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda}}{\text{Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda}} \times 100\%$	$\frac{1.903.344.179.142,6}{2.079.341.677.955} \times 100\%$ = 91,53%	BPKAD
		2. Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	$\frac{\text{Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website pemda}}{\text{Total jumlah dokumen yang telah dirinci}} \times 100\%$	$\frac{12}{12} \times 100\%$ = 100%	BPKAD

2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan. Pada birokrasi, akuntabilitas instansipemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi instansi yang bersangkutan.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu dilaksanakan sebagai alat ukur untuk mengetahui kemampuan organisasi dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi, di mana hasil yang dicapai akan menjadi media evaluasi yang efektif bagi upaya perbaikan kinerja Instansi Pemerintah. Hal itu sejalan dengan Agenda Penguatan Pengawasan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang mewajibkan dilakukannya reviu atas pencapaian Kinerja Utama Instansi Pemerintah yang titik beratnya pada penilaian efektivitas dan efisiensi pencapaian kinerja.

Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam hal ini adalah indikator tujuan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 yang menggambarkan dampak final/akhir (*final impact*) dari pembangunan sebagai agregasi dari hasil (*outcome*) urusan pemerintahan daerah. Secara umum indikator kinerja daerah menggambarkan tingkat keberhasilan dalam 4 aspek, yaitu :

1) **“Nganjuk Tumbuh”** dengan tujuan : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan penanggulangan kemiskinan melalui pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup diukur dengan :
    a. Pertumbuhan Ekonomi Daerah;
    b. Indeks Gini;
    c. Tingkat Kemiskinan Daerah;
    d. Tingkat Pengangguran Terbuka; dan
    e. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).
2) **“Nganjuk Sehat dan Cerdas”** dengan tujuan Meningkatnya kualitas pembangunan manusia yang unggul dan berdaya saing diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia.
3) **“Nganjuk Akuntabel”** dengan tujuan Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik diukur dengan Indeks Reformasi Birokrasi.
4) **“Nganjuk Harmonis”** dengan tujuan Meningkatnya kondisi sosial masyarakat yang harmonis dan berbudaya diukur dengan Indeks Kesalehan Sosial.

Gambaran lengkap ukuran keberhasilan pembangunan Kabupaten Nganjuk Tahun 2024, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

a. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Perjanjian Kinerja

Tabel 2.5

Capaian Kinerja Tahun 2024

No	Tujuan Pembangunan Daerah	Sasaran Strategis Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Tahun 2024			Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Target	Realisasi	Capaian	
1	NGANJUK TUMBUH								
	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemerataan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Hidup		Pertumbuhan Ekonomi Daerah	%	4,48	4,92	4,93	100,20%	
			Indeks Gini	Indeks	0,30	≤ 0,30	0,289	103,80%	
			Tingkat Kemiskinan Daerah	%	10,70	10,50	10,17	103,24%	
			Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,98	4,6	3,87	118,86%	
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	67,37	67,38	69,07	102,51%	
		Meningkatkan Produktifitas Ekonomi Lokal	Pertumbuhan PDRB ADHK Lapangan Usaha Industri Pengolahan	%	11,7	11,80	6,67	56,53%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Pertumbuhan PDRB ADHK Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, serta Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	5,3	5,4	4,90	90,74%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Nilai Investasi Daerah	Rp	4.529.076.183.502	1.050.000.000.000	1.359.191.202.844	129,45%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Meningkatkan Kesejahteraan Petani dan Pemenuhan Kebutuhan Konsumsi Pangan	Nilai Tukar Petani (NTP)	Nilai	102	102,5	111,51	108,79%	Dinas Pertanian
			Skor Pola Pangan Harapan	Skor	95,30	88	93,39	106,12%	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		Meningkatkan Daya Saing Produk Unggulan Daerah	Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan	Hari	0,2	0,25	0,224	89,6%	Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata
			Pertumbuhan Koperasi Sehat	%	0,8	0,95	1,15	121,05%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
			Rata-rata Peningkatan Volume Usaha Mikro	%	10	15	12,99	86,6%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		Mengurangi Penduduk Miskin Melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Angka Kemiskinan Ekstrim	%	1,36	0,5	0,47	106,38%	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Indeks Desa Membangun (IDM)	Indeks	0,7421	0,7795	0,78191	100,31%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Tujuan Pembangunan Daerah	Sasaran Strategis Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Tahun 2024			Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Target	Realisasi	Capaian	
		Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	67	67,5	69,79%	103,39%	Dinas Tenaga Kerja
		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Indeks	61,61	59,51	56,25	94,52%	Dinas Lingkungan Hidup
			Indeks Kualitas Udara	Indeks	79,45	80,85	88,18	109,07%	Dinas Lingkungan Hidup
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	54,91	55,99	55,74	99,55%	Dinas Lingkungan Hidup
		Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Akses Hunian Layak, serta Keselamatan Transportasi	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	Indeks	82	85	84,23	99,09%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Persentase Rumah Layak Huni	%	96,44	96,94	96,97	100,03%	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan
			Rasio Kecelakaan Per 10.000 Kendaraan	Nilai	23,61	22,5	22.09	101,86%	Dinas Perhubungan
2	**NGANJUK SEHAT DAN CERDAS**								
	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing		Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	72,93	73,49	75,24	102,38%	
		Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	Indeks	0,8	0,8	0.84	105%	Dinas Kesehatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Prestasi Kepemudaan	Indeks Pendidikan	Indeks	0,63	0,64	0,64	100%	Dinas Pendidikam Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
			Jumlah Pemuda Berprestasi	Orang	68	70	72	102,86%	Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata
		Meningkatkan Keadilan dan Kesetaraan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	93,76	93,97	94,75 (Data BPS 2023)	100,83%	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3	**NGANJUK AKUNTABEL**								
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	60,18	63,79	82,92	129,99%	
		Meningkatkan Birokrasi yang Akuntabel dan Efektif, Serta Pelayanan Publik yang Prima	Nilai SAKIP	Nilai	66,59	69,25	70,07	101,18%	Sekretariat Daerah Bappeda
			Opini BPK Terhadap LKPD	Opini	WTP	WTP	WTP	100%	Inspektorat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
			Nilai Maturitas SPIP	Nilai	3,111	3,150	3,862	122,60%	Inspektorat

No	Tujuan Pembangunan Daerah	Sasaran Strategis Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2022	Tahun 2024			Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Target	Realisasi	Capaian	
			Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3,32	3,50	4,57	130,57%	Bappeda Sekretariat Daerah RSD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Sosial PPPA Kecamatan
		Meningkatkan Transformasi Digital Pemerintahan Daerah	Indeks SPBE	Indeks	2,18	2,50	3,84	153,6%	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Meningkatkan Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	46,43	55	78,30	142,36%	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4	**NGANJUK HARMONIS**								
	Meningkatnya Kondisi Sosial Masyarakat yang Harmonis dan Berbudaya		Indeks Kesalehan Sosial	Indeks	89,649	89,803	91,03	101,37%	
		Meningkatkan Penanganan Konflik Sosial, Serta Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Konflik Sosial	%	80	82	100	121,95%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Masyarakat	%	100	85	98,15	115,47%	Satuan Polisi Pamong Praja
		Meningkatkan Pelestarian Warisan Kebudayaan Lokal	Persentase Warisan Seni Budaya dan Tradisi Lokal yang Dilestarikan	%	27,03	29,73	30,07	101,14%	Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata
		Meningkatkan Ketangguhan Dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Risiko Bencana	Indeks	110,96	109,04	86,23	126,45%	Badan Penanggulanagan Bencana Daerah Dinas Damkarmat

b. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 2.8

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun 2024

No	Tujuan Pembangunan Daerah	Sasaran Strategis Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024		
					Target RPJMD	Realisasi	Capaian	Target RPD	Realisasi	Capaian
1	**NGANJUK TUMBUH**									
	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemerataan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Hidup		Pertumbuhan Ekonomi Daerah	%	4,00 - 5,00	5,40	108%	4,92	4,93	100,20%
			Indeks Gini	Indeks	0,324	0,32	98,76%	≤ 0,30	0,289	103,80%
			Tingkat Kemiskinan Daerah	%	11,75	10,89	92,68%	10,50	10,17	103,24%
			Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,65	4,68	100,64%	4,6	3,87	118,86%
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	65,05	66,33	101,97%	67,38	69,07	102,51%
		Meningkatkan Produktifitas Ekonomi Lokal	Pertumbuhan PDRB ADHK Lapangan Usaha Industri Pengolahan	%	10,69	5,20	48,64%	11,80	6,67	56,53%
			Pertumbuhan PDRB ADHK Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, serta Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	10,01	5,77	57,64%	5,4	4,90	90,74%
			Nilai Investasi Daerah	Rp	3.450.000.000.000	2.908.371.628.507	84,30%	1.050.000.000.000	1.359.191.202.844	129,45%
		Meningkatkan Kesejahteraan Petani dan Pemenuhan Kebutuhan Konsumsi Pangan	Nilai Tukar Petani (NTP)	Nilai	107,5	116,05	107,95%	102,5	111,51	108,79%
			Skor Pola Pangan Harapan	Skor	96,8	90	92,97%	88	93,39	106,12%
		Meningkatkan Daya Saing Produk Unggulan Daerah	Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan	Hari	0,2	-	-	0,25	0,224	89,6%
			Pertumbuhan Koperasi Sehat	%	6,25	23,87	381,92%	0,95	1,15	121,05%
			Rata-rata Peningkatan Volume Usaha Mikro	%	6,00	114	1.900%	15	12,99	86,6%
		Mengurangi Penduduk Miskin Melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Angka Kemiskinan Ekstrim	%	11,75	10,89	107,89%	0,5	0,47	106,38%
			Indeks Desa Membangun (IDM)	Indeks	0,7695	0,7591	98,65%	0,7795	0,78191	100,31%
		Meningkatkan Penyerapan	Tingkat Partisipasi Angkatan	%	66,89	66,89	100%	67,5	69,79	103,39%

No	Tujuan Pembangunan Daerah	Sasaran Strategis Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024		
					Target RPJMD	Realisasi	Capaian	Target RPD	Realisasi	Capaian
		Tenaga Kerja	Kerja							
		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Indeks	-	-	-	59,51	56,25	94,52%
			Indeks Kualitas Udara	Indeks	-	-	-	80,85	88,18	109,07%
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	-	-	-	55,99	55,74	99,55%
		Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Akses Hunian Layak, serta Keselamatan Transportasi	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	Indeks	-	-	-	85	84,23	99,09%
			Persentase Rumah Layak Huni	%	93,21	85,91	92,17%	96,94	96,97	100,03%
			Rasio Kecelakaan Per 10.000 Kendaraan	Nilai	-	-	-	22,5	22,09	101,86%
2	**NGANJUK SEHAT DAN CERDAS**									
	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing		Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	71,96	74,70	103,81%	73,49	75,24	102,38%
		Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	Indeks	0,796	0,84	105,53%	0,8	0.84	105%
		Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Prestasi Kepemudaan	Indeks Pendidikan	Indeks	0,633	0,64	101,11%	0,64	0,64	100%
			Jumlah Pemuda Berprestasi	Orang	45	46	102,22%	70	72	102,86%
		Meningkatkan Keadilan dan Kesetaraan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	93,56	94,75	101,27%	93,97	94,75 (Data BPS 2023)	100.83%
3	**NGANJUK AKUNTABEL**									
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	66	66,65	100,98%	63,79	82,92	129,99%
		Meningkatkan Birokrasi yang Akuntabel dan Efektif, Serta Pelayanan Publik yang Prima	Nilai SAKIP	Nilai	80,01	67,45	84,30%	69,25	70,07	101,18%
			Opini BPK Terhadap LKPD	Opini	WTP	WTP	100%	WTP	WTP	100%
			Nilai Maturitas SPIP	Nilai	3	3,169	105,63%	3,150	3,862	122,60%
			Indeks Pelayanan Publik	Indeks	-	-	-	3,50	4,57	130,57%
		Meningkatkan Transformasi Digital Pemerintahan Daerah	Indeks SPBE	Indeks	3,5 - < 4,2	3,62	103,41%	2,50	3,84	153,6%
		Meningkatkan Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	73	70,23	96,21%	55	78,30	142,36%

No	Tujuan Pembangunan Daerah	Sasaran Strategis Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024		
					Target RPJMD	Realisasi	Capaian	Target RPD	Realisasi	Capaian
4	**NGANJUK HARMONIS**									
	Meningkatnya Kondisi Sosial Masyarakat yang Harmonis dan Berbudaya		Indeks Kesalehan Sosial	Indeks	80	89,6	112%	89,803	91,03	101,37%
		Meningkatkan Penanganan Konflik Sosial, Serta Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Konflik Sosial	%	85	100	117,65%	82	100	121,95%
			Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Masyarakat	%	100	96	96%	85	98,15	115,47%
		Meningkatkan Pelestarian Warisan Kebudayaan Lokal	Persentase Warisan Seni Budaya dan Tradisi Lokal yang Dilestarikan	%	35,14	36,22	103,07%	29,73	30,07	101,14%
		Meningkatkan Ketangguhan Dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Risiko Bencana	Indeks	65,47	91,75	140,14%	109,04	86,23	126,45%

c. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024 Dibandingkan Dengan Target Akhir RPD

Tabel 2.8

Capaian Kinerja Tahun 2024 Dibandingkan Dengan Target Akhir RPD

No	Tujuan Pembangunan Daerah	Sasaran Strategis Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja 2026	Realisasi Kinerja 2024	Capaian
1	**NGANJUK TUMBUH**						
	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemerataan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Hidup		Pertumbuhan Ekonomi Daerah	%	5,02	4,93	98,21%
			Indeks Gini	Indeks	≤ 0,30	0,289	103,81%
			Tingkat Kemiskinan Daerah	%	10,15	10,17	99,80%
			Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,5	3,87	116,28%
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	67,44	69,07	102,42%
		Meningkatkan Produktifitas Ekonomi Lokal	Pertumbuhan PDRB ADHK Lapangan Usaha Industri Pengolahan	%	12	6,67	55,83%
			Pertumbuhan PDRB ADHK Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, serta Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	5,6	4,90	87,5%

No	Tujuan Pembangunan Daerah	Sasaran Strategis Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja 2026	Realisasi Kinerja 2024	Capaian
			Nilai Investasi Daerah	Rp	1.774.500.000.000	1.359.191.202.844	76,59%
		Meningkatkan Kesejahteraan Petani dan Pemenuhan Kebutuhan Konsumsi Pangan	Nilai Tukar Petani (NTP)	Nilai	103,5	111,51	107,74%
			Skor Pola Pangan Harapan	Skor	90	93,39	103,77%
		Meningkatkan Daya Saing Produk Unggulan Daerah	Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan	Hari	0,33	0,224	67,88%
			Pertumbuhan Koperasi Sehat	%	1,25	1,15	92%
			Rata-rata Peningkatan Volume Usaha Mikro	%	25	12.99	51,96%
		Mengurangi Penduduk Miskin Melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Angka Kemiskinan Ekstrim	%	0,1	0,47	21,28%
			Indeks Desa Membangun (IDM)	Indeks	0,7969	0,78191	98,19%
		Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	68,5	69,79%	101,88%
		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Indeks	59,58	56,25	94,41%
			Indeks Kualitas Udara	Indeks	80,87	88,18	109,04%
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	56,10	55,74	99,36%
		Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Akses Hunian Layak, serta Keselamatan Transportasi	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	Indeks	87	84,23	96,82%
			Persentase Rumah Layak Huni	%	97,94	96,97	99,01%
			Rasio Kecelakaan Per 10.000 Kendaraan	Nilai	21,5	22,09	102,74%
2	**NGANJUK SEHAT DAN CERDAS**						
	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing		Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	74,25	75,24	101,33%
		Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	Indeks	0,8	0.84 (Data BPS 2023)	105%
		Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Prestasi Kepemudaan	Indeks Pendidikan	Indeks	0,66	0,64 (Data BPS 2023)	96,97%
			Jumlah Pemuda Berprestasi	Orang	74	72	97,3%
		Meningkatkan Keadilan dan Kesetaraan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	94,11	94,75 (Data BPS 2023)	100.68%
3	**NGANJUK AKUNTABEL**						
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	71,01	82,92	116,77%

No	Tujuan Pembangunan Daerah	Sasaran Strategis Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja 2026	Realisasi Kinerja 2024	Capaian
		Meningkatkan Birokrasi yang Akuntabel dan Efektif, Serta Pelayanan Publik yang Prima	Nilai SAKIP	Nilai	74,90	70,07	93,55%
			Opini BPK Terhadap LKPD	Opini	WTP	WTP	100%
			Nilai Maturitas SPIP	Nilai	3,250	3,862	118,83%
			Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3,70	4,57	123,51%
		Meningkatkan Transformasi Digital Pemerintahan Daerah	Indeks SPBE	Indeks	3,00	3,84	128%
		Meningkatkan Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	71	78,30	110,28%
4	**NGANJUK HARMONIS**						
	Meningkatnya Kondisi Sosial Masyarakat yang Harmonis dan Berbudaya		Indeks Kesalehan Sosial	Indeks	89,871	91,03	101,28%
		Meningkatkan Penanganan Konflik Sosial, Serta Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Konflik Sosial	%	84	100	119,05%
			Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Masyarakat	%	100	98,15	98,15%
		Meningkatkan Pelestarian Warisan Kebudayaan Lokal	Persentase Warisan Seni Budaya dan Tradisi Lokal yang Dilestarikan	%	35,14	30,07	85,57%
		Meningkatkan Ketangguhan Dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Risiko Bencana	Indeks	99,50	86,23	86,66%

d. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Sasaran Strategis Yang Telah Dicapai

Tabel 2.9

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2024

No	Tujuan Pembangunan Daerah	Sasaran Strategis Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024	Penyerapan Anggaran 2024	Efisiensi
1	**NGANJUK TUMBUH**								
	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemerataan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Hidup		Pertumbuhan Ekonomi Daerah	%	4,92	4,93	100,20%		
			Indeks Gini	Indeks	≤ 0,30	0,289	103,80%		
			Tingkat Kemiskinan Daerah	%	10,50	10,17	103,24%		
			Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,6	3,87	118,86%		

No	Tujuan Pembangunan Daerah	Sasaran Strategis Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024	Penyerapan Anggaran 2024	Efisiensi
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	67,38	69,07	102,51%		
		Meningkatkan Produktifitas Ekonomi Lokal	Pertumbuhan PDRB ADHK Lapangan Usaha Industri Pengolahan	%	11,80	6,67	56,53%	96,14%	- 39,61%
			Pertumbuhan PDRB ADHK Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, serta Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	5,4	4,90	90,74%	89,54%	1,2%
			Nilai Investasi Daerah	Rp	1.050.000.000.000	1.359.191.202.844	129,45%	94,18%	35,27%
		Meningkatkan Kesejahteraan Petani dan Pemenuhan Kebutuhan Konsumsi Pangan	Nilai Tukar Petani (NTP)	Nilai	102,5	111,51	108,79%	92,13%	16,66%
			Skor Pola Pangan Harapan	Skor	88	93,39	106,12%	96,10%	10,02%
		Meningkatkan Daya Saing Produk Unggulan Daerah	Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan	Hari	0,25	0,224	89,6%	83,92%	5,68%
			Pertumbuhan Koperasi Sehat	%	0,95	1,15	121,05%	93,34%	27,71%
			Rata-rata Peningkatan Volume Usaha Mikro	%	15	12,99	86,6%	93,34%	- 6,74%
		Mengurangi Penduduk Miskin Melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Angka Kemiskinan Ekstrim	%	0,5	0,47	106,38%	92,91%	13,47%
			Indeks Desa Membangun (IDM)	Indeks	0,7795	0,78191	100,31%	97,69%	2,62%
		Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	67,5	69,79%	103,39%	92,12%	11,27%
		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Indeks	59,51	56,25	94,52%	95,99%	- 1,47%
			Indeks Kualitas Udara	Indeks	80,85	88,18	109,07%	95,99%	13,08%
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	55,99	55,74	99,55%	95,99%	3,56%
		Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Akses Hunian Layak, serta Keselamatan Transportasi	Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	Indeks	85	84,23	99,09%	95,12%	3,97%
			Persentase Rumah Layak Huni	%	96,94	96,97	100,03%	94,33%	5,7%
			Rasio Kecelakaan Per 10.000 Kendaraan	Nilai	22,5	22,09	101,86%	95,58%	6,28%
2	**NGANJUK SEHAT DAN CERDAS**								
	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing		Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	73,49	75,24	102,38%		

No	Tujuan Pembangunan Daerah	Sasaran Strategis Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024	Penyerapan Anggaran 2024	Efisiensi
		Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	Indeks	0,8	0.84	105%	84,77%	20,23%
		Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Prestasi Kepemudaan	Indeks Pendidikan	Indeks	0,64	0,64	100%	94,52%	5,48%
			Jumlah Pemuda Berprestasi	Orang	70	72	102,86%	94,37%	8,49%
		Meningkatkan Keadilan dan Kesetaraan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	93,97	94,75 (Data BPS 2023)	100.83%	47,31%	53,52%
3	**NGANJUK AKUNTABEL**								
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	63,79	82,92	129,99%		
		Meningkatkan Birokrasi yang Akuntabel dan Efektif, Serta Pelayanan Publik yang Prima	Nilai SAKIP	Nilai	69,25	70,07	101,18%	93,15%	8,03%
			Opini BPK Terhadap LKPD	Opini	WTP	WTP	100%	74,88%	25,12%
			Nilai Maturitas SPIP	Nilai	3,150	3,862	122,60%	95,40%	27,2%
			Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3,50	4,57	130,57%	93,15%	37,42%
		Meningkatkan Transformasi Digital Pemerintahan Daerah	Indeks SPBE	Indeks	2,50	3,84	153,6%	95,57%	58,03%
		Meningkatkan Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	55	78,30	142,36%	86,87%	55,49%
4	**NGANJUK HARMONIS**								
	Meningkatnya Kondisi Sosial Masyarakat yang Harmonis dan Berbudaya		Indeks Kesalehan Sosial	Indeks	89,803	91,03	101,37%		
		Meningkatkan Penanganan Konflik Sosial, Serta Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Konflik Sosial	%	82	100	121,95%	92,11%	29,84%
			Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Masyarakat	%	85	98,15	115,47%	94,06%	21,41%
		Meningkatkan Pelestarian Warisan Kebudayaan Lokal	Persentase Warisan Seni Budaya dan Tradisi Lokal yang Dilestarikan	%	29,73	30,07	101,14%	49,66%	51,48%
		Meningkatkan Ketangguhan Dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Risiko Bencana	Indeks	109,04	86,23	126,45%	94,06%	32,39%

2.3.1 Analisis Program Dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

Untuk menilai sampai sejauh mana keberhasilan dan ketidakberhasilan pencapaian sasaran daerah berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026, dapat diukur dari rata-rata capaian kinerja sasaran Tahun 2024 dengan menggunakan skala ordinal sebagai berikut :

Nilai Capaian (%)	Kategori Pencapaian Sasaran
≥ 80	Tercapai
60 – 79	Kurang Tercapai
< 60	Tidak Tercapai

Skala ini digunakan dengan asumsi bahwa setiap rupiah penggunaan anggaran/dana ditujukan untuk menghasilkan/mencapai sasaran strategis tertentu. Capaian kinerja 80% atau lebih masuk kategori "tercapai", 60 sampai 79% kategori "kurang tercapai" dan kurang dari 60% kategori “tidak tercapai”.

Selanjutnya analisa dan evaluasi kinerja diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan kinerja yang pada akhirnya dapat disimpulkan adanya masalah kinerja sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen untuk meningkatkan kinerja melalui alokasi, distribusi dan regulasi. Oleh karena pemerintah memiliki struktur organisasi sebagai pelaksana kegiatan maka segala pencapaian komponen Rencana Strategis tidak terlepas dari bidang-bidang yang menangani pelaksanaannya sesuai dengan tingkat kewenangan yang diberikan.

Tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 - 2026 adalah sebagai berikut :

1) **“Nganjuk Tumbuh”**

Tujuan : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan penanggulangan kemiskinan melalui pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup

Indikator Tujuan :
1. Pertumbuhan Ekonomi Daerah
2. Indeks Gini
3. Tingkat Kemiskinan Daerah
4. Tingkat Pengangguran Terbuka
5. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

1.1) Sasaran 1 : Meningkatkan produktifitas ekonomi lokal

Pencapaian sasaran ini didukung dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan Urusan Perdagangan, Urusan Perindustrian, dan Urusan Penanaman Modal untuk mewujudkan tercapainya target indikator yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai berikut :

Sasaran RPD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	2024			Kategori Pencapaian	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Capaian		
Meningkatkan Produktifitas Ekonomi Lokal	a. Pertumbuhan PDRB ADHK Lapangan Usaha Industri Pengolahan	%	11.80	6.67	56.53%	Tidak Tercapai	Dinas Indag (Urusan Perindustrian)
	b. Pertumbuhan PDRB ADHK Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, serta Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	5.4	4.90	90.74%	Tercapai	Dinas Indag (Urusan Perdagangan)
	c. Nilai Investasi	Rp	1,050,000,000,000	1.359.191.202.844	129,45%	Tercapai	Dinas PMPTSP (Urusan Penanaman Modal)
Rata-rata capaian kinerja					**92,24%**	**Tercapai**	

Sumber data : LKPJ Kab Nganjuk TA 2024

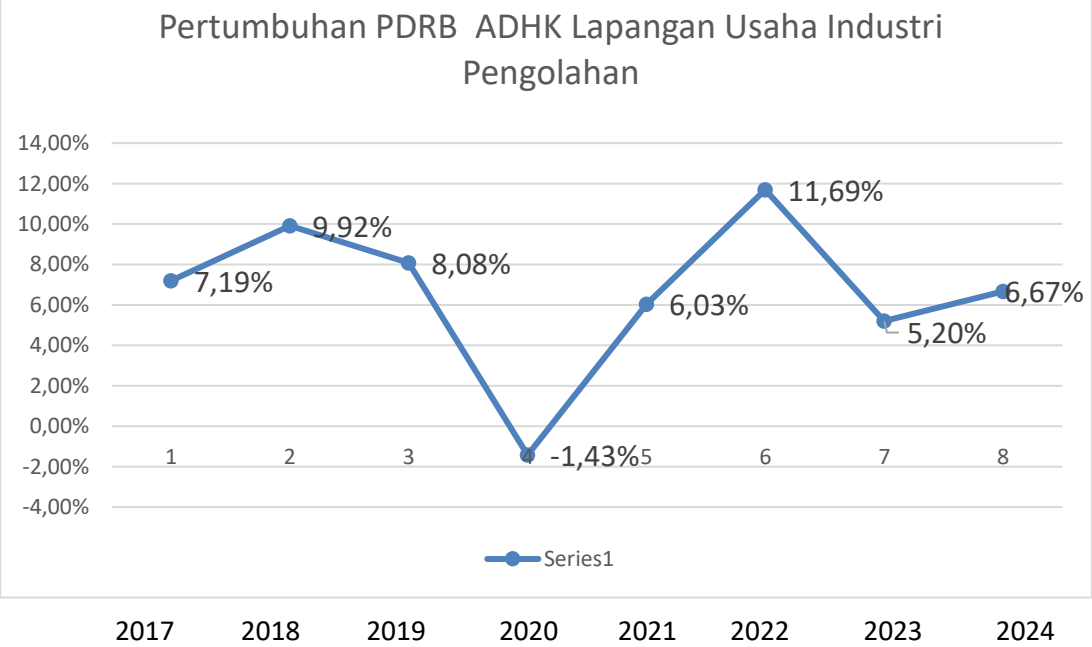
a. Pertumbuhan PDRB ADHK Lapangan Usaha Industri Pengolahan

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran ini menggunakan perhitungan sebagai berikut :

- PDRB Usaha Industri Pengolahan Tahun 2024 : 3.423,41
- PDRB Usaha Industri Pengolahan Tahun 2023 : 3.209,25
- PDRB Usaha Industri Pengolahan Tahun 2022 : 3.050,73
- Target Pertumbuhan PDRB Usaha Industri Pengolahan Tahun 2024 : 11,8%
- Realisasi Pertumbuhan PDRB Usaha Industri Pengolahan Tahun 2024 : 6,67%
- Capaian Kinerja Tahun 2024 : 56,53%

Perkembangan Pertumbuhan PDRB ADHK Lapangan Usaha Industri Pengolahan Tahun 2018 – 2024 sebagai berikut :

Diagram 3.1
Pertumbuhan PDRB ADHK Lapangan Usaha Industri Pengolahan



Persentase Pertumbuhan PDRB ADHK Lapangan Usaha Industri Pengolahan dalam 7 tahun terakhir mengalami perkembangan yang fluktuatif. Berdasarkan pertumbuhan yang tercatat pada tahun 2018 sebesar 9,92% dan menurun di tahun 2019 sebesar 8,08%. Hal ini jauh berbeda pada tahun 2020 yang berada di titik terendah sebesar -1,43% kemudian pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 6,03% dan puncaknya di tahun 2022 tercatat 11,69%. Sedangkan di tahun 2024 tercatat sebesar 6,67% mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2023 sebesar 5,20%. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian masyarakat Kabupaten Nganjuk tahun 2024 di sektor Usaha Industri Pengolahan menunjukkan peningkatan sebesar 1,47 point dibandingkan tahun 2023.

Indikator sasaran Pertumbuhan PDRB ADHK Lapangan Usaha Industri Pengolahan pada tahun 2024 sebesar 3.423,41 sedangkan pada tahun 2023 sebesar 3.209,25 sehingga realisasi pertumbuhan mencapai 6,67%. Bila dibandingkan dengan target kinerja tahun 2024 yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 sebesar 11,8% maka capaian kinerjanya sebesar 56,53%. Capaian kinerja tersebut termasuk dalam kategori “tidak tercapai”. Hal ini disebabkan karena adanya kesalahan dalam penghitungan target di tahun dasar sehingga telah dilaksankan perubahan target. Adapun analisa ketercapaian program

dan kegiatan sebagaimana tabel dibawah ini:

Tujuan / Sasaran Strategis	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Daya Saing Industri dan Perdagangan		Pertumbuhan PDRB (ADHK) sektor Industri	5,76	5,20	90,28%
Meningkatnya Nilai Produktivitas Industri		Persentase Peningkatan Nilai Produksi sector Industri	2,1	2,15	102,38%
	Program perencanaan dan pembangunan industri	Persentase jumlah dokumen perencanaan dan pembangunan	50	83,34	166,68%
	Penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri kabupaten/kota	Jumlah dokumen Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	5	6	120%
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1	1	100%
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	2	2	100%
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	3	3	100%
	Program pengendalian progam izin usaha industri	Presentase pemantauan dan pengawasan izin usaha Industri di SIINAS	77	77,76	100,99%

Tujuan / Sasaran Strategis	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	Penerbitan izin usaha industri (IUI), izin perluasan usaha indsutri (IPUI), izin usaha kawasan indsutri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	6	7	117%
	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan /standar kegiatan usaha sector perindustrian dalam rangkapenerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui system informasi industry nasional (SIInas) yang terintegrasi dengan system online single submission risk base approach (OSS RBA)	Jumah dokumen laporan verifikasi pemenuhan persyaratan /standar kegiatan usaha sector perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sector perindustrian dengan tingkat risiko usaha menengah-tinggi dan tinggi melalui system informasi industry nasional (SIInas) yang terintegrasi dengan system online single submission risk base approach (OSS RBA) bagi penanaman modal dalam negeri (PMDN) dengan skala usaha industry kecil dan industry menengah selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	6	7	117%
	Progam pengelola sistem informasi industri nasional	Persentase Pengelolaan data yang digunakan untuk pengawasan	25%	25,12%	100,48%

Tujuan / Sasaran Strategis	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	Penyediaan informasi industri untuk informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI kewenangan kabupaten/kota	Jumlah dokumen Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	5	3	60%
	Fasilitasi Pengumpulan Pengolahan dan Analisis Data Industri, data Kawasan Industri serta data lain lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan Pengolahan dan Analisis Data Industri, data Kawasan Industri serta data lain lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	1	1	100%
	Pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan industry dan perusahaan kawasan industry lingkup Kabupaten/Kota dalam penyampaian data ke SIINas	Jumlah dokumen hasil Pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan industry dan perusahaan kawasan industry lingkup Kabupaten/Kota dalam penyampaian data ke SIINas	2	2	100%
	Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan	85,2	83,25	97,71%
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17	19	112%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	9	225%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8	8	50%

Tujuan / Sasaran Strategis	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7	7	100%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan	104	140	135%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	71	65	92%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	50	63	126%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	36	36	100%
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	1	1	100%
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1	100%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	2	200%
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	85	85	100%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	4	4	100%
	Penyediaan Komponen instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen instalasi listrik/	15	30	200%

Tujuan / Sasaran Strategis	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4	4	100%
	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12	12	100%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	5	8	120%
	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	2	2	100%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	12	100%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	1	100%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	127	152	120%
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah unit kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang disediakan	5	2	40%
	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	101	101	100%
	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	37	49	132%
	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	4	100%
	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Surat	1	1	100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik yang disediakan	1	1	100%

Tujuan / Sasaran Strategis	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	1	100%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	41	40	97,56%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1	1	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan biaya Pemeliharaan pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan Perizinannya	17	21	124%
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	2	84	2381%
	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	41	53	129%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya yang dipelihar/ Direhabilitasi	2	2	100%

b. Pertumbuhan PDRB ADHK Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, serta Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran ini menggunakan perhitungan sebagai berikut :

- PDRB Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, serta Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Tahun 2024 : 4.437,79
- PDRB Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, serta Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Tahun 2023 : 4.230,39
- PDRB Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, serta Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Tahun 2022 : 3.999,52

- Target Pertumbuhan Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, serta Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Tahun 2024 : 5,4%
- Realisasi Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, serta Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Tahun 2024 : 4,90%
- Capaian Kinerja Tahun 2024 : 90,74

PDRB ADHK sektor perdagangan pada tahun 2024 sebesar 4.437,79 sedangkan pada tahun 2023 sebesar 4.230,39 sehingga realisasi pertumbuhan mencapai 4,90%. Bila dibandingkan dengan target kinerja tahun 2024 yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 sebesar 5,4% maka capaian kinerjanya sebesar 90,74%. Capaian kinerja tersebut termasuk dalam kategori "tercapai". Hal ini disebabkan karena adanya pendampingan dan fasilitasi dari pemerintah dalam meningkatkan daya saing pelaku usaha perdagangan dengan adanya fasilitasi promosi dan pembinaan bagi pelaku usaha perdagangan. Adapun analisa pencapaian program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam tabel dibawah ini :

Tujuan / Sasaran Strategis	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Daya Saing Industri dan Perdagangan		Pertumbuhan PDRB (ADHK) sektor Perdagangan	6,27	5,77	92,03%
Meningkatnya Pertumbuhan nilai Perdagangan		Persentase Peningkatan Omzet Perdagangan	1,68	2,05	122,02%
	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	0mzet perdagangan	1026	1026	100%
	Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Jumlah Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	7	7	100%
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	6	7	117%
	Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya	Jumlah Dokumen Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya	35	35	100%

Tujuan / Sasaran Strategis	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1	1	100%
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Pengawasan Harga Pokok	95,84%	100%	104%
	Pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/ kota	Jumlah Laporan Pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/ kota	4	4	100%
	Pemantauan Harga dan stok Barang Kebutuhan Pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan stok Barang Kebutuhan Pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	4	4	100%
	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 Kabupaten/Kota	2	2	100%
	Pengawasan pupuk dan Pestisida Bersubsidi di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pengawasan pupuk dan Pestisida Bersubsidi di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	4	4	100%

Tujuan / Sasaran Strategis	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida bersubsidi Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	4	4	100%
	Program Pengembangan Ekspor	Presentase Fasilitasi pelaku usaha ekspor	60	16,67	27,78%
	Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 daerah kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha ekspor yang difasiitasi	12	2	16,67%
	Misi Dagang bagi produk ekspor unggulan	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam misi dagang produk ekspor unggulan	2	2	100%
	Peningkatan citra produk ekspor	Jumlah produk unggulan ekspor daerah yang di susun menjadi materi promosi	2	2	100%
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Fasilitasi Promosi dan Pemasaran Produk	51,94	252,5	486,14%
	Pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Jumlah UMKM yang difasilitasi promosi, pemasaran dan peningkatan pengguaan produk dalam negri	40	101	252,50%

Tujuan / Sasaran Strategis	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	Pelaksanaan promosi penggunaan produk dalam negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasiitasi promosi penggunaan produk dalam negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	40	101	252,50%
	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Fasilitasi Ijin Usaha Perdagangan	90%	100	111,1%
	Penerbitan izin Pengelolaan Pasar rakyat pusat Perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan	Persentase Penerbitan izin Pengelolaan Pasar rakyat pusat Perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan	100%	100	100%
	Fasilitasi Pemenuhan komitmen perolehan perizinan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan melalui system Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1	1	100%
	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase Penerbitan tanda daftar gudang	90%	19,24	21,38%
	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	26	5	19,24%
	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Presentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah yang berlaku	85	103,06	121,25%
	Pelaksanaan Metrologi legal berupa tera/tera ulang dan Pengawasan	Jumlah Unit Pelaksanaan Metrologi legal berupa Tera / Tera Ulang dan Pengawasan	8.500	8.760	103,06%
	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa tera, tera ulang	Jumlah Alat Ukur, alat Takar, Alat Timbang dan alat Perlengkapan Ditera Ulang	8.500	8.760	103,06%

Tujuan / Sasaran Strategis	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang dibina	120	850	708%

c. Nilai Investasi

Nilai investasi daerah pada tahun 2024 telah memperoleh Rp1.359.191.202.844,00 atau 129,45% dari target kinerja tahun 2024 yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 sebesar Rp1.050.000.000.000,00 sehingga predikat pencapaian sasaran berdasarkan skala ordinal termasuk dalam kategori “tercapai”.

DPMPTSP Kabupaten Nganjuk mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Nilai Realisasi Investasi pada tahun 2024 menunjukan peningkatan yang signifikan sebesar 129,45% atau sebesar Rp1.359.191.202.844,00. Capaian ini merupakan formulasi dari Nilai Investasi yang tercatat pada Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Tahun 2024.

Target Nilai realisasi Investasi Propinsi Jawa Timur untuk Kabupaten Nganjuk sebesar Rp493.347.000.000,00 sementara nilai realisasi investasi tahun 2024 perhitungan secara total di Kabupaten Nganjuk sebesar Rp1.359.191.202.844,00 atau mengalami peningkatan sebesar 137,58%. Perhitungan per sektor tahun 2024 meliputi kontribusi PMDN sebesar Rp1.234.600.619.802,00 dan PMA sebesar Rp65.327.558.965,00 serta UMK sebesar Rp59.263.024.077,00.

Adapun terkait analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan dalam pencapaian pernyataan kinerja disajikan dalam tabel berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)
1	Meningkatnya iklim investasi	Presentase Pertumbuhan Nilai Investasi Daerah	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Prosentase Dokumen potensi Investasi yang tersusun	100
			Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi	Jumlah Dokumen potensi Investasi yang tersusun	100
			Program Promosi PM	Prosentase kegiatan Promosi PM	100
			Kegiatan Penyelenggaraan	Jumlah kegiatan Promosi PM	100

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)
			Promosi PM yang menjadi kewenangan Kabupaten kota		
			Program Pengendalian pelaksanaan PM	Prosentase kegiatan pengendalian pelaksanaan PM	100
			Kegiatan Pengendalian pelaksanaan PM yang menjadi kewenangan kabupaten / kota	Jumlah kegiatan pengendalian pelaksanaan PM	100
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indek Pelayanan Publik (IPP)	Program Pelayanan PM	Prosentase terpenuhinya komitmen perizinan dan Non Perizinan PM	100 %
			Kegiatan perizinan dan Non perizinan secara terpadu satu pintu dibidang PM yang menjadi kewenangan daerah Kab / Kota	terpenuhinya komitmen perizinan dan Non Perizinan PM	100
			Program Pengelolaan Data dan SIPM	Prosentase terlaksananya pengelolaan dan dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada Tingkat daerah kab / kota	100
			Kegiatan pengelolaan dan dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada Tingkat daerah kab / kota	terlaksananya pengelolaan dan dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada Tingkat daerah kab / kota	100
			Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota	Prosentase kegiatan Penunjang urusan pemerintahan yang terlaksana	Nilai 72,90
			Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD	Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersedia	100
			Kegiatan Administrasi keuangan PD	Presentase administrasi keuangan PD yang terlaksana	100
			Kegiatan Administrasi Umum PD	Fasilitasi dan koordinasi bagian umum yang dilaksanakan	100
			Pengadaan BMD Penunjang urusan PD	Jumlah BMD Penunjang urusan PD yang tersedia	100
			Peyediaan Jasa Penunjang urusan PD	Tersedianya Jasa Penunjang urusan PD	100

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)
			Pemeliharaan BMD Peunjang urusan PD	Terlaksanya pemeliharaan BMD Penujang urusan PD	100

Pada tabel diatas terlihat bahwa capaian indikator kinerja Program dan Kegiatan seluruhnya telah mencapai target dan sangat menunjang dalam rangka pencapaian indikator tujuan dan sasaran kinerja DPMPTSP Kabupaten Nganjuk di tahun 2024. Capaian kinerja program tersebut tidak lepas dari dukungan kegiatan yang dilaksanakan.

1.2) Sasaran 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Petani dan Pemenuhan Kebutuhan Konsumsi Pangan

Pencapaian sasaran ini didukung dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan Urusan Pertanian, Urusan Pangan, dan Urusan Kelautan dan Perikanan untuk mewujudkan tercapainya target indikator yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai berikut:

Sasaran RPD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	2024			Kategori Pencapaian	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Capaian		
Meningkatkan kesejahteraan petani dan pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan	a. Nilai Tukar Petani (NTP)	Nilai	102,5	111.51	108,79%	Tercapai	Dinas Pertanian dan Dinas KPP
	b. Skor Pola Pangan Harapan	Skor	88	93,39	106%	Tercapai	Dinas Pertanian dan Dinas KPP
Rata-rata capaian kinerja					**107,39%**	**Tercapai**	

Sumber data : LKPJ Kab Nganjuk TA 2024

a. Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai Tukar Petani adalah perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani. NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di pedesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Target kinerja Nilai Tukar Petani Kabupaten Nganjuk pada tahun 2024 adalah 102,5. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, realisasi NTP tahun 2024 adalah 111,51, di mana untuk tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Nganjuk belum melakukan penghitungan NTP secara mandiri sehingga NTP yang dipakai adalah NTP

Provinsi Jawa Timur. Indikator sasaran NTP dengan capaian pada tahun 2024 sebesar 111,51 atau 108,79% dari target tahun 2024 yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 sebesar 102,5 sehingga predikat pencapaian sasaran berdasarkan skala ordinal termasuk dalam kategori "tercapai".

Nilai Tukar Petani dihitung dengan membandingkan indeks harga yang diterima petani (harga hasil pertanian yang dijual) dengan indeks harga yang dibayar petani untuk barang dan jasa (seperti kebutuhan produksi pertanian, pangan, dan barang lainnya). Rumus perhitungan NTP adalah :

$$\text{NTP} = \frac{\text{Indeks Harga Yang Diterima Petani (IT)}}{\text{Indeks Harga Yang Dibayar Petani (IB)}} \text{ x } 100\%$$

Keterangan:

IT = Indeks Harga yang Diterima Petani (harga yang diterima petani atas hasil pertanian mereka).

IB = Indeks Harga yang Dibayar Petani (harga barang dan jasa yang dibeli oleh petani untuk proses

Jika NTP lebih besar dari 100, maka daya beli petani meningkat, sedangkan jika NTP kurang dari 100, daya beli petani menurun. NTP lebih dari 100, maka petani mengalami surplus. Artinya, harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya.

Nilai Tukar Petani Kabupaten Nganjuk pada Tahun 2024 adalah 111,51. Capaian Nilai Tukar Petani (NTP) lebih dari 100 menunjukkan bahwa daya beli petani terhadap barang dan jasa yang dibutuhkan dalam proses produksi pertanian lebih tinggi dibandingkan dengan pengeluaran yang mereka terima dari hasil jualan produk pertanian mereka. Dengan kata lain, NTP Kabupaten Nganjuk lebih dari 100 menunjukkan kondisi yang menguntungkan bagi petani karena mereka mendapatkan lebih banyak barang dan jasa untuk setiap satuan hasil pertanian yang mereka jual.

Analisis terhadap capaian NTP yang lebih dari 100 dapat melibatkan beberapa aspek, di antaranya menandakan bahwa petani berada dalam posisi yang lebih baik secara ekonomi. Artinya, pendapatan yang diperoleh dari hasil pertanian mereka cukup untuk memenuhi kebutuhan produksi dan bahkan dapat memberikan surplus untuk kebutuhan lainnya. Ini bisa menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan di kalangan petani. Harga produk pertanian di pasaran lebih baik dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan oleh petani untuk memproduksi hasil pertanian tersebut. Harga jual produk pertanian yang tinggi akan berkontribusi pada capaian NTP yang lebih dari

100. Kebijakan pemerintah seperti subsidi pupuk, subsidi bahan bakar, atau bantuan langsung tunai bisa menurunkan biaya produksi atau meningkatkan pendapatan petani. Adanya peningkatan hasil produksi, petani bisa memperoleh lebih banyak hasil dari jumlah input yang sama atau lebih sedikit, yang berujung pada NTP yang lebih tinggi.

Secara keseluruhan, capaian NTP Kabupaten Nganjuk yang lebih dari 100 dapat menjadi indikator bahwa petani sedang berada dalam kondisi yang menguntungkan, tetapi penting untuk tetap memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar tersebut agar tidak terjadi ketidakseimbangan atau masalah di masa depan.

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
			Nilai	102,5	111,51	108,79
1.			Persen	0,175	0,163	93,23
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Dinas Pertanian	Nilai	81,5	80,05	98,22
	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	43	43	100
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	20	20	100
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen	2	2	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	12	12	100
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	9	9	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	81	81	100
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	237 / 14	218 / 14	100
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	50 Dokumen	50	100

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1 Laporan	1	100
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	2 Dokumen	2	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	12	12	100
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	2	2	100
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang disusun	Laporan	1	1	100
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Brang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	100
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah	Dokumen	1	1	100
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Orang	138	130	94
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen	7	7	100
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	25	25	100
	Penyediaan Bahan logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	8	8	100
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	2	2	100
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan	Dokumen	2	2	100

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
		Perundang-Undangan yang Disediakan				
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	12	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	60	60	100
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeritah Daerah	Jumlah Barang Milik Perangkat Daerah yang diadakan	Unit	17	17	100
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	17	17	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemeliharaan daerah yang tersedia	Jenis	3	3	100
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Jasa Surat Menyurat	Laporan	10	8	80
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Unit	168	168	100
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	100
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	99	99	100
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	59	59	100
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	9	9	100
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Sarana yang digunakan	Persen	100	77,01	77,01
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah kelompok tani yang diawasi dan didampingi terkait penggunaan sarana pendukung pertanian	kelompok tani	1.275	1.275	100

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
	Pengawasan Penggunaan Saranan Pendukung Pertanian Sesyau dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan	12	12	100
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	12	12	100
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, Dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengelolaan sumber genetik tanaman berkualitas	Kegiatan	3	3	100
	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	2	2	100
	Pemanfaatan SDG Hewan/tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	3	3	100
	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	VUB	3	3	100
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Presentase Prasarana Pertanian yang digunakan	Persen	100	100	100
	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah pembangunan, rhabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian	Laporan	5	5	100
	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan	15	15	100
	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian	unit	66	66	100
	Pembangunan, rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	jumlah jalan usaha tani yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	Unit	1	1	100
	Pembangunan, rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah Dam Parit yang di bangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	unit	2	2	100
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukung yang Dibangun, Direhabilitasi dan dipelihara	Unit	1	1	100
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang dibangun, direhanilitasi dan dipelihara	Unit	9	9	100
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	unit	53	53	100
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Pengendalian dan Penanganan bencana Pertanian	Persen	100	100	100

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
	Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luas lahan pertanian yang dilakukan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Ha	1.157	1.157	100
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha	1.025	1.025	100
	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	Ha	100	100	100
	Pencegahan, penanganan kebakaran lahan dan gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Ha	32	32	100
	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase pemberian rekomendasi isin usaha pertanian	Persen	100	100	100
	Penerbitan Izin Usaha Pertanian Yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendai usulan izin usaha yang diterbitkan	Dokumen	6	6	100
	Penyusunan Standart Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Standart Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Dokumen	3	3	100
	Penilaian Kelayakan dan pemberian pertimbangan teknis izin usaha pertanian	jumlah penilaian kelayakan dan pemberian teknis isin usaha pertanian	Dokumen	2	2	100
	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	Laporan	1	1	100
	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak Dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah usaha peternakan yang dilakukan pengawasan	Usaha Peternakan	50	50	100
	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan	Jumlah Izin Usaha Produksi BenihBibit Ternak dan Pakan	Laporan	1	1	100
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya	Persen	0,94	0,94	100
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah kelompok tani yang mendapatkan pelatihan	Kelompok Tani	32	32	100
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	20	20	100

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	25	25	100
	Penyediaan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian	jumlah sarana dan prasarana penyuluhan pertanian	unit	20	20	100
	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat kabupaten/Kota	jumlah sekolah lapang kelompok tani yang terbentuk dan beroperasi	Unit	2	2	100
	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian	jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	orang	150	150	100
	Penguatan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di tingkat kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya	unit	20	20	100%
2.			Persen	1,8	1,45	80,37
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Sarana yang digunakan	Persen	Persen	100	77,01
	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan	2	2	100
	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan Ternak	Jumlah pengawasan produksi benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan/pakan	Laporan	4	4	100
	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar	laporan	12	12	100
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persen	10	56	560
	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ternak yang ditangani	Ekor	80.000	125.841	157,30
	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	Laporan	4	4	100
	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular darn Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonoziz dalam	Laporan	16	16	100

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
		1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				
	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan dalam daerah	Laporan	8	8	100
	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	8 Laporan	8	8	100
	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten.Kota	Jumlah Laporan Pelayanan Jasa Laboratorium dan jasa Medik Veteriner	Laporan	1	1	100
	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah pelayanan jasa laboratorium	Laporan	1	1	100
	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah layanan jasa medik veteriner	Laporan	12	12	100
	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah laporan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	Laporan	2	2	100
	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	Laporan	2	2	100
	Pengenbangan kompetens Petugas Teknis Kesehatan Hewan, kesehatan Masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan	Jumlah petugas teknis kesehatan hewan, keehatan masyarakat veteriner, dan kesejahteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi	orang	22	22	100

Analisis faktor penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan dalam tabel berikut :

No.	Tujuan/ Sasaran Perangkat Daerah	Analisis Keberhasilan	Analisis Kegagalan
1.	Tujuan: Meningkatnya kesejahteraan petani		
2.	Sasaran 1: Meningkatkan produksi pertanian		
	Indikator Sasaran: Persentase peningkatan produksi pertanian	1. Adanya dukungan yang kuat terhadap Dinas Pertanian	1. Lahan Pertanian semakin berkurang karena meningkatnya alih fungsi

No.	Tujuan/ Sasaran Perangkat Daerah	Analisis Keberhasilan	Analisis Kegagalan
		2. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi tentang pembangunan pertanian berkelanjutan 3. Peran stake holder mendukung koordinasi lintas sector yang berjalan dengan optimal 4. Berkembangnya kegiatan investasi pertanian 5. Tingginya permintaan hasil-hasil pertanian Kabupaten Nganjuk di pasar lokal, nasional dan global 6. Terbentuk dan berkembangnya lembaga keuangan mikro di tengah masyarakat/kawasan pengembangan agribisnis 7. Adanya kerjasama antara pemerintah, swasta dengan petani 8. Adanya perhatian dari pemerintah tentang pemberian bantuan sarana pertanian dan Pembangunan dan rehabilitasi prasarana pertanian 9. Adanya modernisasi pertanian (pengendalian hama penyakit tanaman dengan menggunakan drown) 10. Adanya permintaan kerjasama pengiriman benih pertanian dari provinsi lain	lahan pertanian ke penggunaan non pertanian 2. Regenerasi tenaga kerja pertanian kurang berjalan karena menurunnya minat generasi muda yang bekerja di sektor pertanian, perkebunan dan peternakan (Kelangkaan SDM) 3. Menurunnya daya dukung sumber daya alam akibat anomali iklim dan degradasi lahan 4. Fluktuasi harga komoditi pertanian perkebunan dan peternakan 5. Kualitas, kuantitas dan kontinuitas produksi komoditi unggulan belum maksimal 6. Sumberdaya alam pertanian sulit diperbaharui 7. Peranan institusi dan Lembaga pemasaran perlu ditingkatkan 8. Teknologi pertanian belum sepenuhnya diterapkan 9. Belum terbitnya perda tentang LP2B 10. Harga jual produk hasil pertanian yang cenderung lebih rendah, tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan untuk produksi pertanian 11. Perubahan iklim global yang tidak menentu menyebabkan perubahan pola tanam dan jadwal tanam serta menurunkan produktivitas pertanian
2.	Sasaran 2: Meningkatkan produksi peternakan Indikator Sasaran: Persentase Peningkatan Produksi peternakan	1. Tata kelola penanganan wabah penyakit hewan yang maksimal 2. Respon cepat dan baiknya pelayanan dari fasilitas Kesehatan 3. Satgas penanganan wabah PMK yang siaga 4. Ketersediaan bibit unggul hewan ternak	1. Minimnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya vaksin 2. Keterbatasan sumber daya tenaga Kesehatan 3. Kurangnya fasilitas alat kesehatan ternak 4. Rendahnya daya beli akan produk asal hewan menyebabkan produksi hasil peternakan menurun

b. Skor Pola Pangan Harapan

Realisasi indikator kinerja **"**Skor Pola Pangan Harapan **"** pada tahun 2024 sebesar 93,39 atau 106,13% dari target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah

(RPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 sebesar 88 sehingga predikat pencapaian sasaran berdasarkan skala ordinal termasuk dalam kategori “tercapai”. Analisa terhadap keberhasilan program dalam mendukung skor pola pangan harapan daerah adalah sebagaimana berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/ Kegiatan	Indikator KinerjaProgram/ Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan (%)	Penyebab dan Upaya Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan
1	TUJUAN: Pemenuhan Kebutuhan Konsumsi Pangan Daerah			Nilai Skor PPH	104,2	Peningkatan capaian kinerja banyak dipengaruhi oleh pelaksanaan program kegatan yang bersifat himbauan, melalui promosi, pembinaan, percontohan dan fasilitasi kepada masyarakat untuk meningkatkan pola konsumsi yang sehat dan ideal sesuai kebutuhan dalam tubuh.
	1. Mewujudkan Pemenuhan Pangan Masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA)	Nilai SAKIP Dinas KPP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai SAKIP Dinas KPP	90,56%	Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan tahun 2024 tidak tercapai karena beberapa kondisi yang belum ideal dan belum sepenuhnya memenuhi standar yang baik
2	SASARAN :					
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja SKPD yang tersusun	100%	Data dukung dokumen perencanaan sudah sesuai dengan target kebutuhan untuk menyusun perencanaan.
			Penyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	Dokumen perencanaan sudah tersusun sesuai target dan standar yang diperlukan.
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	100%	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja sudah sesuai dengan target dan standar yang diperlukan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/ Kegiatan	Indikator KinerjaProgram/ Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan (%)	Penyebab dan Upaya Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan
				Realisasi Kinerja SKPD		
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	100%	Dokumen administrasi keuangan sudah tersusun sesuai target dengan standar yang diperlukan
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	Gaji dan tunjangan yang diterimakan sudah terpenuhi dengan target penyediaan dan penyaluran sesuai ketentuan yang berlaku
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	144%	Dokumen penatausahaan dan verifikasi sudah sesuai dengan target jumlah dokumen bahkan ada tambahan dokumen lainnya yang mendukung tertib penatausahaan
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan SKPD	100%	Dokumen yang disusun sudah sesuai dengan target dan standar yang diperlukan
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%	Penyusunan laporan keuangan yang disusun sudah sesuai dengan target dan standar yang diperlukan
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	100%	Penyusunan laporan keuangan yang disusun sudah sesuai dengan target dan standar yang diperlukan
			Penyusunan Pelaporan dan Analisi Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	100%	Dokumen yang disusun sudah sesuai dengan target dan standar yang diperlukan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/ Kegiatan	Indikator KinerjaProgram/ Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan (%)	Penyebab dan Upaya Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Disusun	100%	Dokumen yang disusun sudah sesuai dengan target dan standar yang diperlukan
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	100%	Penyusunan laporan barang milik daerah yang disusun sudah sesuai dengan target dan standar yang diperlukan
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Disusun	92%	Dokumen yang disusun sudah sesuai dengan target dan standar yang diperlukan
			Monitoring Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	100%	Dokumen yang disusun sudah sesuai dengan target dan standar yang diperlukan
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan pelatihan	100%	Pelaksanaan pelatihan dilaksanakan sesuai dengan target dan jumlah peserta yang diperlukan
			Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	100%	Pelaksanaan sosialisasi dilaksanakan sesuai dengan target dan jumlah peserta yang mengikuti
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitas dan Koordinasi bagian umum yang dilaksanakan	100%	Pelaksanaan koordinasi sesuai dengan laporan koordinasi yang tersusun
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100%	Jumlah paket komponen Listrik sudah sesuai dengan paket yang diadakan.
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%	Jumlah paket peralatan kelengkapan kantor sudah sesuai dengan paket yang diadakan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/ Kegiatan	Indikator KinerjaProgram/ Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan (%)	Penyebab dan Upaya Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100%	Jumlah paket peralatan kelengkapan kantor sudah sesuai dengan paket yang diadakan
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100%	Jumlah paket bahan logistik kantor sudah sesuai dengan paket yang diadakan
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100%	Jumlah paket barang cetakan kantor sudah sesuai dengan paket yang diadakan
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	100%	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sudah sesuai dengan dokumen yang diadakan
			Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	100%	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu sudah sesuai dengan laporan yang diadakan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat sudah sesuai dengan laporan yang diadakan
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100%	Jumlah dokumen penatausahaan arsip sudah sesuai dengan dokumen yang di laporkan
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah sudah sesuai dengan yang diadakan
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100%	Jumlah unit pengadaan mebel sudah sesuai dengan yang diadakan
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100%	Jumlah peralatan dan mesin yang disediakan sudah sesuai dengan yang diadakan
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100%	Jumlah laporan penunjang urusan pemerintahan pengadaan barang milik daerah sudah sesuai dengan yang diadakan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/ Kegiatan	Indikator KinerjaProgram/ Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan (%)	Penyebab dan Upaya Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat sudah sesuai dengan yang di laporkan
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan dan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	100%	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan Listrik sudah sesuai dengan yang dilaporkan
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	100%	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor sudah sesuai dengan yang disediakan
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Barang milik Daerah SKPD yang dipelihara Daerah	107,14%	Jumlah barang yang dipelihara sudah sesuai dengan jumlah unit yang tersedia bahkan melebihi karena optimalisasi penggunaan anggaran
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	100%	Jumlah barang yang dipelihara sudah sesuai dengan jumlah unit yang tersedia
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100%	Jumlah kendaraan yang dipelihara sudah sesuai dengan jumlah unit kendaraan yang tersedia
			Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang Dipelihara	100%	Jumlah mebel yang dipelihara sudah sesuai dengan jumlah unit mebel yang tersedia

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/ Kegiatan	Indikator KinerjaProgram/ Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan (%)	Penyebab dan Upaya Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100%	Jumlah peralatan dan mesin lainnya sudah sesuai dengan jumlah unit kendaraan yang tersedia
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	200%	Jumlah Gedung dan bangunan lainnya yang dipelihara sudah sesuai dengan jumlah unit kendaraan yang tersedia bahkan melebihi karena optimalisasi anggaran
		Persentase Ketersediaan Pangan Utama (%)	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Diversifikasi Pangan Lokal	100%	Capaian kinerja banyak dipengaruhi oleh pelaksanaan kegiatan yang bersifat himbauan, melalui promosi, pembinaan, percontohan dan fasilitasi kepada masyarakat
			Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten /Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah ketersediaan pangan yang tersedia	100%	Penyusunan laporan penyaluran pangan pokok dari target 4 laporan sampai dengan akhir tahun 2024 terealisasi 4 laporan
			Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	100%	Penyusunan laporan penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal dari target 4 laporan sampai dengan akhir tahun 2024 terealisasi 4 laporan
			Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	100%	Pengembangan kelembagaan dari target 4 unit sampai dengan akhir tahun 2024 terealisasi 4 unit
			Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	100%	Pengelolaan cadangan pangan dari target 40 ton di akhir tahun 2024 terealisasi 40 ton

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/ Kegiatan	Indikator KinerjaProgram/ Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan (%)	Penyebab dan Upaya Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan
			Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	100%	Pengelolaan cadangan pangan dari target 40 ton sampai dengan akhir tahun 2024 terealisasi 40 ton
			Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuaidengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Angka Kecukupan Gizi	100%	Penyusunan laporan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi dari target 4 laporan sampai dengan akhir tahun 2024 terealisasi 4 laporan
			Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Perkapita Pertahun	Target Konsumsi Pangan Perkapita Pertahun	100%	Dokumen penyusunan dan petetapan target konsumsi pangan perkapita pertahun dari target 2 dokumen sampai dengan akhir tahun 2024 terealisasi 2 dokumen
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok masyarakat dalam penganekaragam konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	100%	Penyusunan laporan pemberdayaan kelompok masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal dari target 3 laporan sampai dengan akhir tahun 2024 terealisasi 3 laporan
		Ketersediaan Energi (kkal/kapita/hari	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Desa Rawan Pangan	133%	Capaian kinerja di pengaruhi oleh tersusunnya peta wilayah tahan pangan dan rentan pangan
			Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan	Jumlah Desa Rawan Pangan	133%	Peta desa rawan pangan dari target 3 desa sampai dengan akhir tahun 2024 terealisasi 2 desa
			Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Tersusunnya Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/ Tersusunnya Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi/RADPG	100%	Penyusunan laporan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan dari target penyusunan 2 laporan sampai dengan akhir tahun 2024 terealisasi 2 laporan
		Ketersediaan Protein (gram/kapita/hari)	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Sampel Pangan Aman yang Dikonsumsi	100%	Capaian kinerja banyak dipengaruhi oleh pelaksanaan kegiatan yang bersifat himbauan, melalui

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/ Kegiatan	Indikator KinerjaProgram/ Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan (%)	Penyebab dan Upaya Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan
						pembinaan, pengawasan dan fasilitasi kepada masyarakat pelaku usaha pangan segar.
			Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sampel Aman Pangan	100%	Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan dari target 30 sampel sampai dengan akhir tahun 2024 terealisasi 30 sampel
			Rekomendasi Perizinan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	116%	Rekomendasi perizinan keamanan pangan segar dari target 50 dokumen sampai dengan akhir tahun 2024 terealisasi 58 dokumen hal ini disebabkan karena keinginan masyarakat untuk melegalkan hasil produksinya sangat tinggi
	2. Terwujudnya Produksi Perikanan Budidaya dan Non Budidaya serta Pemenuhan Konsumsi Ikan	Produksi Perikanan Tangkap/Non Budidaya (Ton)	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Produksi Perikanan Non Budidaya	110,95%	Peningkatan capaian kinerja banyak dipengaruhi oleh pelaksanaan kegiatan yang bersifat himbauan, melalui promosi, pembinaan, percontohan dan fasilitasi kepada masyarakat sekitar perairan umum.
			Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawadan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi Perikanan Non Budidaya	100%	Penyusunan laporan produksi perikanan non budidaya dari target 4 laporan sampai dengan akhir tahun 2024 terealisasi 4 laporan
			Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan informasi sumber daya ikan di perairan darat dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	100%	Penyediaan data dan informasi sumber daya ikan dari target 4 dokumen sampai dengan akhir tahun 2024 terealisasi 4 dokumen

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/ Kegiatan	Indikator KinerjaProgram/ Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan (%)	Penyebab dan Upaya Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan
			Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	100%	Penyediaan dokumen prasarana usaha perikanan tangkap dari target 2 dokumen sampai dengan akhir tahun 2024 terealisasi 2 dokumen
		Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Produksi Perikanan Budidaya	111,49%	Peningkatan capaian kinerja banyak dipengaruhi oleh pelaksanaan kegiatan yang bersifat himbauan, melalui promosi, pembinaan, percontohan dan fasilitasi kepada masyarakat pembudidaya untuk meningkatkan produksi perikanannya.
			Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	100%	Penyediaan laporan jumlah produksi perikanan budidaya
			Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang meng-ikuti Pengembangan Kapasitas	100%	Peningkatan kapasitas pembudidaya ikan kecil dari target 2 kelompok sampai dengan akhir tahun 2024 terealisasi 2 kelompok
			Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	100%	Penyediaan laporan jumlah produksi perikanan budidaya
			Penyediaan Data dan Informasi Pem-budidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidaya Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	100%	Penyediaan data dan informasi pembudidaya ikan dari target 4 dokumen sampai dengan akhir tahun 2024 terealisasi 4 dokumen
			Penyediaan Prasarana Pembudi dayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Prasarana Pembudidaya Ikan dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	100%	Penyediaan prasarana pembudidaya ikan dari target 30 unit sampai dengan akhir tahun 2024 terealisasi 30 unit
			Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang teruji melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	100%	Pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya dari target 1 dokumen sampai dengan akhir tahun 2024 terealisasi 1 dokumen

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/ Kegiatan	Indikator KinerjaProgram/ Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan (%)	Penyebab dan Upaya Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan
			Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidayaan yang memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	83,33%	Pembudidaya yang memperoleh pembinaan dari target 60 orang sampai dengan akhir tahun 2024 terealisasi 50 orang, hal ini terjadi karena penyesuaian biaya pelaksanaan pembinaan
		Perikanan Non Budidaya (Ton)	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Pelanggaran yang ditangani	100%	Pengawasan sumber daya perikanan dari target penyelesaian pelanggaran yang ditangani 100% sampai dengan akhir tahun 2024 terealisasi 100 %, hal ini terjadi karena dalam tahun 2024 tidak terjadi pelanggaran
			Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok yang sudah menerima sosialisasi pengawasan Sumber Daya Perikanan	50%	Pengawasan sumber daya perikanan dari target kelompok yang menerima sosialisasi pengawasan sebanyak 4 dokumen sampai dengan akhir tahun 2024 terealisasi 2 dokumen, hal ini terjadi karena dalam tahun 2024 ketersediaan anggaran hanya dapat digunakan untuk pelaksanaan sosialisasi di 2 kelompok
			Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pangawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	200%	Pengawasan usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan di perairan umum dari target 1 dokumen sampai dengan akhir tahun 2024 terealisasi 2 dokumen
		Jumlah Ikan dikonsumsi oleh masyarakat (Kg/Kapita/ Tahun)	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Konsumsi Ikan	121,27%	Capaian jumlah konsumsi ikan dari target 31,50 kg/kap/tahun sampai dengan akhir tahun 2024 tercapai 38,20 kg/kap/tahun, hal ini disebabkan karena

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/ Kegiatan	Indikator KinerjaProgram/ Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan (%)	Penyebab dan Upaya Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan
						pengaruh dari pelaksanaan kegiatan gemarikan yang mempromosikan masyarakat makan ikan sebagai sumber protein.
			Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Mikro dan Kecil	Jumlah Tanda Daftar Usaha (TDU) Pengolahan Hasil Perikanan	100%	Penyediaan laporan jumlah Tanda Daftar Usaha (TDU) dari target 2 laporan sampai dengan akhir tahun 2024 terealisasi 2 laporan
			Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Berdasarkan Skala Usaha dan Resiko	100%	Penyediaan data dan informasi usaha permasaran dan pengolahan hasil perikanan dari target 4 dokumen sampai dengan akhir tahun 2024 terealisasi 4 dokumen
			Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Data Angka Konsumsi Ikan	100%	Penyusunan data angka konsumsi ikan dari target 2 laporan sampai dengan akhir tahun 2024 terealisasi 2 laporan
			Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	162,85%	Peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dari target 2 ton sampai dengan akhir tahun 2024 terealisasi 3,257 ton, hal ini didukung dengan kegiatan sosialisasi dan informasi cara pembudidayaan ikan yang baik (CPIB)

1.3) Sasaran 3 : Meningkatkan Daya Saing Produk Unggulan Daerah

Pencapaian sasaran ini didukung dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan Urusan Pariwisata dan Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah untuk mewujudkan tercapainya target indikator yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai berikut:

Sasaran RPD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	2024			Kategori Pencapaian	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Capaian		
Meningkatkan daya saing produk unggulan daerah	a. Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan	Hari	0,25	0,224	89,6%	Tercapai	Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
	b. Pertumbuhan Koperasi Sehat	%	0,95	1,15	121,05%	Tercapai	Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
	c. Rata-rata Peningkatan Volume Usaha Mikro	%	15	12,99	86,6%	Tercapai	Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
Rata-rata capaian kinerja					**99,08%**	**Tercapai**	

Sumber data : LKPJ Kab Nganjuk TA 2024

a. Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran ini menggunakan perhitungan sebagai berikut :

Perhitungan persentase rata-rata lama tinggal wisatawan adalah jumlah wisatawan yang menginap (kamar terjual) dikalikan RTLM ditambah jumlah wisatawan yang tinggal (rata-rata 4 jam) dikalikan 0,166 hari dibagi jumlah kunjungan wisatawan.

- Jumlah kunjungan wisatawan tahun 2022 : 204.873
- Jumlah kunjungan wisatawan tahun 2023 : 350.550
- Jumlah kunjungan wisatawan tahun 2024 : 367.522
- Jumlah wisatawan yang menginap (kamar yang terjual) 2023 : 24.123
- Jumlah wisatawan yang menginap (kamar yang terjual) 2024 : 22.660
- Rata-rata Tinggal Tamu di Hotel/Penginapan (RTLM) : 1,105
- Jumlah wisatawan yang tinggal rata-rata 4 jam 2024 : 344.862
- Target rata-rata lama tinggal wisatawan 2024 : 0,25
- Realisasi rata-rata lama tinggal wisatawan 2024 : 0,224
- Capaian Kinerja Tahun 2024 : 89,6%

Realisasi indikator kinerja "Rata-rata lama tinggal wisatawan" pada tahun 2024 sebesar 0,224 atau 89,6% dari target tahun 2024 yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 sebesar 0,25

sehingga predikat pencapaian sasaran berdasarkan skala ordinal termasuk dalam kategori "tercapai". Terkait dengan program dan kegiatan yang mendukung capaian rata-rata lama tinggal wisatawan adalah sebagai berikut :

No	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Sub Kegiatan	Target 2024	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Capaian %
1	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**					
1.1	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Prosentase peningkatan jumlah wisatawan**	**5**	**%**	**4.84**	**96,80**
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	**Jumlah destinasi wisata yang terkelola**	**5**	**lokasi**	**5**	**100**
	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kotayang Dikembangkan Sesuai dengan TahapanPengembangan (Rintisan, Berkembang,Pemantapan, Revitalisasi)	5	lokasi	5	**100**
	Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	5	unit	5	**100**
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	5	laporan	6	**120**
1.2	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Prosentase peningkatan jumlah wisatawan**	**5**	**%**	**4.84**	**96,80**
	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	**Jumlah dokumen pemasaran pariwisata**	**12**	**Dokumen**	**12**	**100**
	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak,	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan	12	Dokumen	12	**100**

No	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Sub Kegiatan	Target 2024	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Capaian %
	Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				
	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	12	laporan	12	**100**
	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	12	Dokumen	12	**100**
1.3	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Persentase jenis usaha pariwisata yang berdaya saing**	**41,5**	**%**	**28.85**	**69,52**
	Pelaksanaan Peningkatan KapasitasSumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	**Jumlah SDM Pariwisata dan ekraf yang terfasilitasi**	**50**	**orang**	**50**	**100**
	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi,Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	10	laporan	10	**100**
	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	40	orang	40	**100**
	Pengembangan KapasitasSDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang dikembangkan kapasitasnya	30	orang	50	**166,67**

Analisis faktor pendorong dan faktor penghambat pencapaian program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Porabudpar Kab. Nganjuk disajikan dalam tabel berikut :

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan	Faktor Pendorong Keberhasilan	Faktor Penghambat
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA		
1	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**		
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		
	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Adanya potensi wisata desa yang layak untuk dikembangkan	Proses pengembangan potensi wisata memerlu-kan waktu dan berbagai kajian terlebih dahulu
	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Adanya perhatian dan kebijakan dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan di objek wisata	Terdapat fasilitas umum di objek wisata yang memerlukan pambaharuan atau rehabilitasi
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Adanya dukungan masyarakat desa yang membutuhkan pendampingan dan pembinaan dalam rangka pengembangan potensi wisata desa	Kurangnya kesadaran dari masyarakat bahwa pengembangan potensi wisata membutuhkan proses dan waktu yang bertahap.
2	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**		
	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		
	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Berkembangnya Teknologi Informasi untuk media Online sebagai sarana promosi	Media Online banyak belum berijin resmi dan kurangnya media baliho sebagai media promosi dan website promosi pariwisata
	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Banyaknya potensi wisata, kuliner, UMKM dan hotel	Kurang terfasilitasinya kegiatan pameran (terbatasnya event)
	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Pengelolaan kerjasama yang telah dituangkan dalam PKS sehingga jelas dasar hukumnya	Berakhirnya PKS yaitu Tahun 2024 sehingga harus memperpanjang lagi
3	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**		
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		
	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi,Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Berkembanganya teknologi untuk menunjang kreatifitas produksi dan kreasi para pelaku ekraf	Belum banyak pelaku ekraf yang berkolaborasi dan berjejaring untuk peningkatan produktifitas bersama

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan	Faktor Pendorong Keberhasilan	Faktor Penghambat
	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Tumbuhnya industri kreatif mendorong pertumbuhan jumlah pelaku ekraf yang memerlukan peningkatan kompetensi	Masih rendahnya minat pelaku ekraf untuk mengembangkan kompetensinya
	Pengembangan KapasitasSDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Pesatnya pertumbuhan Industri Pariwisata di daerah mendorong pesatnya aktifitas di sektor usaha pariwisata	Masih rendahnya kualitas SDM sehingga tingkat standar kompetensinya juga masih rendah

b. Pertumbuhan Koperasi Sehat

Pencapaian sasaran pertumbuhan koperasi sehat dilaksanakan melalui pemeriksaan dan pengawasan koperasi terhadap koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang wilayah keanggotaannya dalam daerah Kabupaten Nganjuk dan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang wilayah keanggotaannya dalam daerah Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut :

- Jumlah koperasi tahun 2024 : 931
- Jumlah koperasi tahun 2023 : 913
- Jumlah koperasi sehat tahun 2024 : 264
- Jumlah koperasi sehat tahun 2023 : 261
- Target pertumbuhan koperasi sehat tahun 2024 : 0,95%
- Realisasi pertumbuhan koperasi sehat tahun 2024 : 1,15%
- Persentase Capaian Kinerja : 121,05%

Realisasi indikator kinerja "Pertumbuhan koperasi sehat" pada tahun 2024 sebesar 1,15 atau 121,05 dari target tahun 2024 yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 sebesar 0,95 sehingga predikat pencapaian sasaran berdasarkan skala ordinal termasuk dalam kategori "tercapai". Hal ini didukung dengan adanya penambahan jumlah koperasi yang masih melaksanakan Rapat Anggota Tahunan selama periode triwulan IV yang mana terjadi peningkatan jumlah koperasi sehat (melaksanakan RAT) dibandingkan dengan periode triwulan sebelumnya. Peningkatan jumlah koperasi sehat ini juga diikuti oleh jumlah koperasi yang dibina mengalami peningkatan pada triwulan ke IV. Analisa program dan kegiatan sebagaimana tabel dibawah ini :

No	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja %
1	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang diawasi	273,90
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	jumlah koperasi yang telah dilakukan pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan serta akuntabilitas koperasi kewenangan kabupaten/kota	100
2	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi yang Dinilai	109,95
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah unit usaha koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan	197,25
3	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Kopera si yang Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	501,2
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian	466,67
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang Difasilitasi	102,29
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang memenuhi syarat untuk difasilitasi	142,86

c. Rata rata Peningkatan Volume Usaha Mikro

Pencapaian sasaran "Rata-rata peningkatan volume usaha mikro" telah dilaksanakan sesuai target waktu yang ditetapkan dengan hasil yang sudah nampak yaitu peningkatan jumlah pelaku usaha mikro yang memiliki legalitas dan jumlah pelaku usaha mikro yang masuk pasar modern tahun 2024. Capaian realisasi pertumbuhan usaha mikro sebagai berikut :

- Jumlah volume usaha mikro tahun 2023 : 5.328.377
- Jumlah volume usaha mikro tahun 2024 : 6.021.066
- Target rata-rata peningkatan volume UM tahun 2024 : 15%
- Realisasi rata-rata peningkatan volume UM tahun 2024 : 12,99%
- Persentase capaian kinerja : 86,6%

Realisasi indikator kinerja "Rata rata Peningkatan Volume Usaha Mikro" pada tahun 2024 sebesar 12,99% atau 86,6% dari target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 sebesar 15% sehingga predikat pencapaian sasaran berdasarkan skala ordinal termasuk dalam kategori "tercapai". Analisa program dan kegiatan sebagaimana tabel dibawah ini :

No	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja%
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO	Prosentase Usaha Mikro yang mendapatkan fasilitasi	512,80
	1. Pendataan Potensi danPengembangan UsahaMikro	Jumlah Produk Unggulan di Kabupaten Nganjuk pada Kegiatan Pendataan dan Pemetaan Pelaku Usaha Mikro Terkait Produk Unggulan dan IUM	100
	2. Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang di Fasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi Pelaku Usaha Mikro	100
	3. Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan UM	Jumlah Usaha Mikro yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan	100
	4. Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan UM	Jumlah kegiatan Monitoring Usaha Mikro yang mempunyai Tunggakan Kredit pada Penyelesaian Dana Bergulir	230
2	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro yang mendapatkan fasilitasi pengembangan	168
	1. Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan , Pemasaran, SDM serta desain dan teknologi	Jumlah Usaha Mikro yang mendapatkan Pelatihan dan Fasilitasi Pengembangan	168

1.4) Sasaran 4 : Mengurangi Penduduk Miskin Melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pencapaian sasaran ini didukung dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan Urusan Sosial dan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk mewujudkan tercapainya target indikator yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai berikut:

Sasaran RPD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	2024			Kategori Pencapaian	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Capaian		
Mengurangi Penduduk Miskin Melalui Pemberdayaan	Angka Kemiskinan Ekstrim	%	0.5	0,46	108.70%	Tercapai	Dinas Sosial PPPA Bappeda

Masyarakat dan Desa	Indeks Desa Membangun (IDM)	Indeks	0,7795	0,78191	100,31%	Tercapai	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Rata-rata capaian kinerja					**104,50%**	**Tercapai**	

Sumber data : LKPJ Kab Nganjuk TA 2024

a. Angka Kemiskinan Ekstrim

Pencapaian sasaran "Mengurangi penduduk miskin melalui pemberdayaan masyarakat dan desa" telah dilaksanakan sesuai target waktu yang ditetapkan dengan hasil yang sudah nampak yaitu Angka Kemiskinan Ekstrim. Capaian realisasi Angka Kemiskinan Ekstrim sebagai berikut :

- Jumlah kemiskinan ekstrim tahun 2023 : 12.734 Jiwa
- Jumlah kemiskinan ekstrim tahun 2024 : 5.347 Jiwa
- Jumlah penduduk tahun 2023 : 1.139.617 Jiwa
- Jumlah penduduk tahun 2024 : 1.152.575 Jiwa
- Angka kemiskinan ekstrim tahun 2023 : 1,12%
- Angka kemiskinan ekstrim tahun 2024 : 0,46%
- Target angka kemiskinan ekstrim tahun 2023 : 0,5%
- Persentase capaian kinerja : 108.70%

Realisasi indikator sasaran "Angka Kemiskinan Ekstrim" pada tahun 2024 sebesar 0,46% atau 108,70% dari target tahun 2024 yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 sebesar 0,5% sehingga predikat pencapaian sasaran berdasarkan skala ordinal termasuk dalam kategori "tercapai".

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Program/ Kegiatan	Realisasi Program/ Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang mendapat pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	85%	49,87%	59%
	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Izin Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	85%	0%	0%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	4 Dokumen	0 Dokumen	0%

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Program/ Kegiatan	Realisasi Program/ Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	85%	99.73%	117%
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	80 Orang	80%
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	20 Orang	100%
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	80 Lembaga	72 Lembaga	90%
2	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Rehabilitasi Sosial bagi PPKS/ PMKS	85 %	70.05 %	82%
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, dan Gepeng yang Mendapatkan Layanan Sosial di Luar Panti	85 %	58.06 %	68%
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	125 Orang	66 Orang	53%
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	420 Orang	351 Orang	84%
	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	325 Orang	48 Orang	15%

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Program/ Kegiatan	Realisasi Program/ Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah PPKS/ PMKS yang Mendapatkan Layanan Sosial Dasar di Luar Panti	85%	82.03%	97%
	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	1330 Orang	730 Orang	55%
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	95 Orang	103 Orang	108%
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	24 Orang	18 Orang	75%
	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	22 Dokumen	22 Dokumen	100%
3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS/ PMKS Penerima Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	85%	99.87%	117%
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Fakir Miskin yang Telah di Verval	85%	99.87%	117%
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	214.620 Keluarga	214.620 Keluarga	100000%
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	8.123 Keluarga	7.891 Keluarga	97%
4	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase PPKS/ PMKS Korban Bencana yang Ditangani	85%	93.19%	110%
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	85%	86.37%	102%
	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1	550 Orang	375 Orang	68%

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Program/ Kegiatan	Realisasi Program/ Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan
		Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota			
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kampung yang Mendapatkan Pemberdayaan Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota	85%	100.00%	118%
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	68 Orang	72 Orang	106%
5	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Pengelolaan TMP	85%	100.00%	118%
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan TMP	85%	100.00%	118%
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	560 Makam	560 Makam	100%

b. Indeks Desa Membangun (IDM)

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan indeks komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Pengambilan data dilakukan di seluruh desa dengan harapan mendapatkan data dan informasi sesuai fakta yang ada di desa. Dalam penentuan status IDM, klasifikasi status desa ditetapkan dengan ambang batas sebagai berikut:

- Desa Sangat Tertinggal : IDM $\leq$ 0,4907
- Desa Tertinggal : 0,4907 < IDM $\leq$ 0,5989
- Desa Berkembang : 0,5989 < IDM $\leq$ 0,70724
- Desa Maju : 0,7072 < IDM $\leq$ 0,8155
- Desa Mandiri : IDM > 0,8155

Dalam pencapaian IDM Desa beberapa program yang berpengaruh :

1. Program Penataan Desa dengan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Persentase Desa dengan penataan sesuai standart ketentuan. Capaian Program/Kegiatan mencapai 115,17 % dengan formula

   $$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

   dikarenakan ketepatan dan komitmen dari seluruh elemen masyarakat, aparat desa dan pemerintah daerah dalam menjalankan program penataan desa. Dukungan kebijakan dan regulasi peraturan perundang-undangan dan pedoman teknis yang jelas memberikan landasan hukum dan arah pelaksanaan kegiatan.
2. Program Peningkatan Dan Kerjasama Desa Dengan Indikator Kinerja Program/Kegiatan yaitu Persentase Desa Yang Mendapatkan Fasilitasi Kerjasama dan Pembangunan mencapai 100%. Dimana untuk target dan Realisasi 230 Desa Sudah terealisasi untuk tahun 2024. Akses terhadap sumber daya (financial, manusia, infrastruktur) mendukung kegiatan program peningkatan dan Kerjasama desa. Pendampingan teknis dan pelatihan dapat meningkatkan kapasitas desa dalam menjalankan program peningkatan dan kerjasama desa. Komitmen dan koordinasi yang efektif mendukung pelaksanaan program peningkatan dan kerjasama desa.
3. Program Administrasi Pemerintahan Desa Dengan Indikator Program / Kegiatan Persentase Desa Yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Tata Kelola pemerintahan Desa Dengan Capaian Program /Kegiatan Mencapai 99,99 % dimana target 264 Desa Sudah Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa, Fasilitasi penyusunan RKP, Fasilitasi Penggelolaan Keuangan Desa, Pembinaan dan Pemberdayaan Bum Desa dan Lembaga Kerja Sama Desa, Fasilitasi Penyusunan Profil Desa, Fasilitasi Pengelolaan aset Desa). Pada tahap III ada 1 Desa Yang Tidak Melengkapi laporan realisasi anggaran dan laporan kinerja anggaran, sehingga Tidak Bisa mencairkan Anggaran secara Maksimal.
4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat Dengan Indikator Kinerja Persentase desa Yang Kapasitas Kelembagaanya diberdayakan mencapai 100% Dikarenakan Tepat dalam Perencanaan Target program. Dimana Pada saat Penyusunan Renstra Target Capaiannya 80 Desa dan Sudah Terpenuhi. Dengan pendukung Permendes 23/2017 tentang Pengembangan dan Penerapan TTG dalam pengelolaan sumber daya alam dan Perpres 99/2017 dan Permendagri 36/2020 yang mengatur PKK, anggaran fasilitasi pembinaan dan APBD dan APBDesa, dukungan pengurus TP PKK Kabupaten yang aktif.

Tabel 3.9
Klasifikasi Status Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri Tahun 2024

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA	MANDIRI					MAJU					BERKEMBANG					TERTINGGAL					SANGAT TERTINGGAL				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	SAWAHAN	**9**	0	0	0	2	5	7	7	8	7	4	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	NGETOS	**9**	0	**1**	**1**	**1**	**1**	2	6	7	7	7	7	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	BERBEK	**19**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	5	5	5	8	14	13	13	13	10	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	LOCERET	**22**	0	**3**	**4**	**6**	**8**	13	13	12	12	14	9	6	6	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	PACE	**18**	0	0	1	1	2	5	5	4	13	16	13	13	13	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	PRAMBON	**14**	0	**1**	**2**	**3**	**8**	6	12	12	11	6	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	NGRONGGOT	**13**	0	0	0	3	5	2	4	7	8	7	11	9	6	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	KERTOSONO	**13**	**1**	**3**	**3**	**4**	**6**	4	2	2	2	7	8	8	8	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	PATIANROWO	**11**	0	0	0	0	4	11	11	11	11	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	BARON	**11**	0	0	2	2	8	1	8	6	6	3	10	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	TANJUNGANOM	**14**	0	0	0	0	1	4	8	11	13	13	10	6	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	SUKOMORO	**10**	0	0	0	1	1	3	3	3	6	9	7	7	7	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	NGANJUK	**2**	0	0	0	0	1	1	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	BAGOR	**19**	0	**2**	**2**	**5**	**7**	4	10	14	14	12	15	7	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	WILANGAN	**6**	0	0	0	2	5	5	6	6	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	REJOSO	**2**	**3**	**4**	**4**	**7**	2	4	10	10	15	21	18	11	10	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**
17	GONDANG	**1**	**1**	**1**	**1**	**2**	4	4	4	6	14	12	12	12	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
18	NGLUYU	0	0	0	0	2	0	5	6	6	4	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	LENGKONG	0	0	1	1	4	3	4	8	6	11	13	12	8	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	JATIKALEN	0	**1**	**1**	**1**	**1**	2	2	6	6	10	9	9	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		**264**	7	18	23	47	74	92	136	144	178	181	167	112	97	39	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2024 terdapat peningkatan status desa mandiri yang semula 47 desa pada tahun 2023 menjadi 74 desa, desa maju yang semula 178 desa menjadi 181 desa, dan desa berkembang berkurang yang semula 39 desa menjadi 6 desa.

Klasifikasi terhadap status desa tersebut bertujuan untuk penetapan status perkembangan dan rekomendasi terhadap intervensi kebijakan yang perlu dilakukan pada Tahun 2024 sehingga pendekatan dan intervensi yang diterapkan pada Status Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri akan berbeda sesuai hasil updating data.

Realisasi indikator sasaran "Indeks Desa Membangun (IDM)" pada tahun 2024 sebesar 0,78191 atau 100,31% dari target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 sebesar 0,7795 sehingga predikat pencapaian sasaran berdasarkan skala ordinal termasuk dalam kategori "tercapai".

1.5) Sasaran 5 : Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja

Pencapaian sasaran ini didukung dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan Urusan Tenaga Kerja untuk mewujudkan tercapainya target indikator yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai berikut :

Sasaran RPD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	2024			Kategori Pencapaian	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Capaian		
Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja	a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	67,5	69,79	103,39%	Tercapai	Dinas Tenaga Kerja

Sumber data : LKPJ Kab Nganjuk TA 2024

a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Pencapaian sasaran "Meningkatkan penyerapan tenaga kerja" telah dilaksanakan sesuai target waktu yang ditetapkan dengan hasil yang sudah nampak yaitu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja. Capaian realisasi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja sebagai berikut :



Sumber data: Badan Pusat Statisik

Dari grafik di atas dapat dijelaskan bahwa dari total penduduk usia kerja (15 tahun ke atas), lebih dari dua per tiga penduduk Kabupaten Nganjuk termasuk dalam angkatan kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 2,9% dibanding tahun 2023 menjadi 69,79%. Sempat mengalami penurunan tajam pada tahun 2020-2021 akibat pandemi Covid-19 yang memukul sektor tenaga kerja di Kabupaten Nganjuk. Di awal pandemi Covid-19 pada tahun 2020, TPAK turun sebanyak 1,03% menjadi 65,75% bila dibandingkan dengan tahun 2019 dan pada tahun 2021 kembali turun menjadi 64,24%, turun tajam dibanding tahun 2019 sebesar - 2,54%.

Realisasi indikator sasaran "Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)" pada tahun 2024 sebesar 69,79% atau 103,39% dari target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 sebesar 67,5% sehingga predikat pencapaian sasaran berdasarkan skala ordinal termasuk dalam kategori "tercapai".

Dalam pencapaian target indikator TPAK Tahun 2024 didukung oleh program dan kegiatan sebagaimana tabel berikut :

No.	Sasaran Stragegis	Indikator Kinerja	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Program / Kegiatan	Keterangan	Faktor Penghambat	Upaya Yang Akan Dilakukan
1	Tujuan : Meningkatnya penyerapan angkatan kerja	Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)			67,50 %	69,79%	103,39%	Hasil perhitungan dari BPS Kab. Nganjuk	Masih terdapat pengangguran Ketidak cocokan antara keterampilan pencari kerja dengan kebutuhan industri Akses terbatas ke pendidikan dan pelatihan	Pengembangan program pelatihan kerja yang lebih relevandengan kebutuhan pasar kerja Peningkatan akses ke pendidikan dan pelatihan Pengembangan infrastruktur yang lebih baik
2	Sasaran 1 : Meningkatnya jumlah penduduk yang bekerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan			83%	73,21%	88,20%	Data pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	Keterampilan pencari kerja yang tidak sesuai dengan kebutuhan industri Kurangnya informasi tentang lowongan kerja	Pengembangan program pelatihan kerja yang relevan dengan kebutuhan industri Peningkatan akses digitalisasi informasi lowongan kerja
3	Sasaran 2 : Meningkatnya hubungan industrial	Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang			90%	100%	111,11%	Data penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang selesai dengan Perjanjian Bersama	Tidak ada kendala tetapi ada beberapa tantangan antara lain :	Peningkatan kesadaran dan partisipasi para pihak dalam

No.	Sasaran Stragegis	Indikator Kinerja	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Program / Kegiatan	Keterangan	Faktor Penghambat	Upaya Yang Akan Dilakukan
	yang harmonis	Diselesaikan di Luar Pengadilan							- Perlu adanya peningkatan kesadaran dan komitmen dari semua pihak - Keterbatasan sumber daya dan infrastruktur untuk mendukung penyelesaian perselisihan di luar Pengadilan	penyelesaian perselisihan Pengembangan kebijakan dan peraturan yang mendukung penyelesaian perselisihan di luar Pengadilan
4			Program Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Dinas Tenaga Kerja	80,50 nilai	75,65 nilai	93,98%	Hasil dari LHE SAKIP dari Inspektorat	Kurangnya kepedulian, komitmen dan keterlibatan yang lebih intensif dari bidang-bidang teknis terkait penyediaan data	Lebih meningkatkan komunikasi dan kepedulian dari bidang-bidang teknis terkait penyediaan data
5			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	14 laporan	14 laporan	100%	1. LKPJ 2. LPPD 3. LKjIP 4. Renstra 5. Renja 6. Perubahan Renja	Kurangnya kepedulian, komitmen dan keterlibatan bidang-bidang teknis terkait penyediaan data	Kegiatan akan dilaksanakan rutin setiap triwulan maupun setiap tahun terkait penyediaan data

No.	Sasaran Stragegis	Indikator Kinerja	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Program / Kegiatan	Keterangan	Faktor Penghambat	Upaya Yang Akan Dilakukan
								7. RKA 8. RKA Perubahan 9. DPA 10. DPA Perubahan 11. Reviu Renstra 12. Proses Bisnis 13. SIPPN 14. PUG	sehingga data masih cenderung lemah dan kurang responsif	yang responsif dan konsisten
6			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 laporan	7 laporan	100%	1. Laporan Triwulan 1 2. Laporan triwulan 2 3. Laporan triwulan 3 4. Laporan triwulan 4 5. Dialog kinerja 6. Dokumen manajemen resiko 7. Perjanjian kinerja	Kurangnya kepedulian, komitmen dan keterlibatan bidang-bidang teknis terkait penyediaan data sehingga data masih cenderung lemah dan kurang responsif	Kegiatan akan dilaksanakan rutin setiap triwulan maupun setiap tahun terkait penyediaan data yang responsif dan konsisten
7			Administrasi Keuangan Dinas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen administrasi keuangan Dinas Tenaga Kerja yang disusun	48 dokumen	48 dokumen	100%	SPM Gaji Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November,	Tidak ada hambatan	-

No.	Sasaran Stragegis	Indikator Kinerja	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Program / Kegiatan	Keterangan	Faktor Penghambat	Upaya Yang Akan Dilakukan
								Desember, SPM Gaji PPPK Mei, September, Oktober, November, Desember, SPM THR, SPM Gaji 13, SPM Rapel, SPM TPP Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, GU1,GU2,GU3,GU4,GU5,GU6,GU7,GU8,GU9,GU10,GU11,GU12,GU13,GU14,GU15,LS pengadaan barang dan jasa		
8			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	18 orang	14 orang	77,77%	Daftar gaji sebanyak 14 orang	Terdapat jabatan administrasi yang kosong yaitu Kepala Dinas dan Sekretaris	Menunggu pengisian jabatan yang kosong dari BKPSDM
9			Koordinasi Penyusunan	Jumlah laporan keuangan	20 laporan	1 laporan	5%	LKPD	Terdapat kesalahan	Untuk tahun yang akan

No.	Sasaran Stragegis	Indikator Kinerja	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Program / Kegiatan	Keterangan	Faktor Penghambat	Upaya Yang Akan Dilakukan
			Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	bulanan/triwulan/ semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan keuangan Bulanan/triwulan/ semesteran					perencanaan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan /semesteran	datang supaya lebih memperhatikan dan teliti dalam perencanaan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran
10			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	1 dokumen	0 dokumen	0%	-	Kegiatan tidak dilaksanakan	Karena pada kegiatan ini berisi belanja pakaian dinas maka Disnaker tidak menganggarkan
11			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi Umum Perangkat Daerah	7 dokumen	7 dokumen	100%	Buku Agenda Surat Masuk, Surat Keluar, Nomor SK, Ekspedisi, Pinjam Gedung, Data PKL, Buku Pinjam Arsip	Tidak ada kendala	Untuk tahun yang akan datang melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan
12			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	100%	Laporan kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tidak ada kendala	Untuk tahun yang akan datang melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan

No.	Sasaran Stragegis	Indikator Kinerja	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Program / Kegiatan	Keterangan	Faktor Penghambat	Upaya Yang Akan Dilakukan
13			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	100%	Laporan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tidak ada kendala	Untuk tahun yang akan datang melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan
14			Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	100%	Laporan Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Tidak ada kendala	Untuk tahun yang akan datang melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan
15			Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	1 dokumen	100%	Laporan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Tidak ada kendala	Untuk tahun yang akan datang melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan
16			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	1 laporan	100%	Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tidak ada kendala	Untuk tahun yang akan datang melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan
17			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	1 laporan	100%	Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tidak ada kendala	Untuk tahun yang akan datang melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan

No.	Sasaran Stragegis	Indikator Kinerja	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Program / Kegiatan	Keterangan	Faktor Penghambat	Upaya Yang Akan Dilakukan
18			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100%	Laporan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tidak ada kendala	Untuk tahun yang akan datang melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan
19			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan	97 unit	97 unit	100%	BAST Pengadaan mebel, Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pengadaan sarana prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya sebanyak 97 unit	Tidak ada kendala	Untuk tahun yang akan datang melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan
20			Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	150 unit	150 unit	100%	BAST pengadaan mebel 150 unit	Tidak ada kendala	Untuk tahun yang akan datang melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan
21			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	35 unit	35 unit	100%	BAST pengadaan peralatan dan mesin lainnya sebanyak 35 unit	Tidak ada kendala	Untuk tahun yang akan datang melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan
22			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	12 unit	12 unit	100%	BAST pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau	Tidak ada kendala	Untuk tahun yang akan datang melaksanakan

No.	Sasaran Stragegis	Indikator Kinerja	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Program / Kegiatan	Keterangan	Faktor Penghambat	Upaya Yang Akan Dilakukan
								bangunan lainnya 12 unit		kegiatan sesuai perencanaan
23			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	14 laporan	14 laporan	100%	Laporan penyediaan jasa surat menyurat, jasa komunikasi sumber daya air dan listrik, jasa pelayanan umum kantor 14 laporan	Tidak ada kendala	Untuk tahun yang akan datang melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan
24			Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 dokumen	1 dokumen	100%	Laporan tentang Penyediaan jasa surat menyurat	Tidak ada kendala	Untuk tahun yang akan datang melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan
25			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	100%	Laporan tentang Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tidak ada kendala	Untuk tahun yang akan datang melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan
26			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	100%	Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 12 laporan	Tidak ada kendala	Untuk tahun yang akan datang melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan
27			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Jumlah barang milik daerah SKPD yang terawat dipelihara	28 unit	28 unit	100%	Laporan penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan pajak dan perizinan	Tidak ada kendala	Untuk tahun yang akan datang melaksanakan

No.	Sasaran Stragegis	Indikator Kinerja	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Program / Kegiatan	Keterangan	Faktor Penghambat	Upaya Yang Akan Dilakukan
			Urusan Pemerintah Daerah					kendaraan dinas operasional atau lapangan, biaya pemeliharaan pajak dan perizimam kemdaraan dinas jabatan, pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya, rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya, rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya sebanyak 28 unit		kegiatan sesuai perencanaan
28			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	1 unit	100%	Laporan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Dinas Jabatan	Tidak ada kendala	Untuk tahun yang akan datang melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan
29			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	10 unit	100%	Laporan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Tidak ada kendala	Untuk tahun yang akan datang melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan

No.	Sasaran Stragegis	Indikator Kinerja	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Program / Kegiatan	Keterangan	Faktor Penghambat	Upaya Yang Akan Dilakukan
			Operasional atau Lapangan					Operasional atau Lapangan 10 unit		
30			Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 unit	5 unit	100%	Berita acara pemeriksaan dan penerimaan hasil pekerjaan 5 unit	Tidak ada kendala	Untuk tahun yang akan datang melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan
31			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	5 unit	3 unit	100%	BAST Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 3 unit	Tidak ada kendala	Untuk tahun yang akan datang melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan
32			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	5 unit	100%	Berita acara pemeriksaan dan penerimaan hasil pekerjaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya 5 unit	Tidak ada kendala	Untuk tahun yang akan datang melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan
33			Program Perencanaan Tenaga Kerja	Prosentase dokumen yang terselesaikan tepat waktu	1 dokumen	1 dokumen	100%	Buku RTKD Kab. Nganjuk Tahun 2025 -2029	Tidak ada kendala	Untuk tahun yang akan datang melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan

No.	Sasaran Stragegis	Indikator Kinerja	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Program / Kegiatan	Keterangan	Faktor Penghambat	Upaya Yang Akan Dilakukan
34			Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah dokumen Perencanaan tenaga kerja	1 dokumen	1 dokumen	100%	Buku RTKD Kab. Nganjuk Tahun 2025 -2029	Tidak ada kendala	Untuk tahun yang akan datang melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan
35			Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah dokumen rencana tenaga kerja makro (RTK) yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	100%	Laporan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Tidak ada kendala	Untuk tahun yang akan datang melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan
36			Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Prosentase penerapan program pelatihan berbasis kompetensi dengan kualifikasi klaster	100%	100%	100%	Jenis pelatihan : 1. Pelatihan barbershop 2. Pelatihan menjahit 3. Pelatihan memasak 4. Pelatihan rias wajah 5. Pelatihan berbasis kompetensi 6. Pelatihan las 7. Pelatihan barista	Tidak ada kendala	Untuk tahun yang akan datang melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan
37			Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase peserta pelatihan yang telah mandiri secara ekonomi	71%	60,20%	84,79%	- Daftar nama peserta pelatihan - Daftar nama peserta pelatihan	Tidak semua pencari kerja terdaftar tercover pelatihan	Mengupayakan pencari kerja terdaftar tercover

No.	Sasaran Stragegis	Indikator Kinerja	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Program / Kegiatan	Keterangan	Faktor Penghambat	Upaya Yang Akan Dilakukan
								yang telah mandiri	berdasarkan klaster kompetensi	pelatihan berdasarkan klaster kompetensi
38			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	180 orang	490 orang	272 %	Laporan kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi sebanyak 490 orang	Terdapat peserta pelatihan yang tidak menyelesaikan kegiatan pelatihan	Mengupayakan peserta pelatihan menyelesaikan kegiatan pelatihan
39			Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase LPK Swasta yang dibina	80%	50%	62,50%	Daftar LPK Swasta yang terdaftar	Masih banyaknya LPK yang beranggapan bahwa pemenuhan standar akreditasi prosesnya rumit dan memakan biaya yang tinggi	Memberikan bimtek tentang standar akreditasi serta memberikan pendampingan dalam pemenuhan akreditasi
40			Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina	35 lembaga	50 lembaga	142,85%	Laporan kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 50 lembaga	Masih banyaknya LPK yang beranggapan bahwa pemenuhan standar	Melaksanakan bimtek tentang standar akreditasi serta memberikan pendampingan dalam

No.	Sasaran Stragegis	Indikator Kinerja	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Program / Kegiatan	Keterangan	Faktor Penghambat	Upaya Yang Akan Dilakukan
									akreditasi prosesnya rumit dan memakan biaya yang tinggi	pemenuhan akreditasi
41			Perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja	Persentase LPK yang memiliki perizinan	60%	0 %	0 %	-	Kegiatan tidak dilaksanakan	Untuk tahun yang akan datang supaya melaksanakan kegiatan tersebut
42			Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Persentase perusahaan kecil yang mendapatkan konsuktansi peningkatan produktivitas	7%	30%	428,57%	Daftar perusahaan kecil	Keterbatasan pengetahuan perusahaan kecil terkait pengukuran produktivitas	Melaksanakan bimtek peningkatan produktivitas kepada perusahaan kecil
43			Pelaksanaan Konsultansi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah perusahaan kecil yang mendapat konsuktansi peningkatan produktivitas	15 perusahaan	50 perusahaan	333%	Laporan kegiatan Pelaksanaan Konsultansi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil sebanyak 50 perusahaan	Tidak semua peserta bimtek memahami materi yang disampaikan	Melaksanakan pendampingan pasca bimtek
44			Pengukuran produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pertumbuhan produktivitas tenaga kerja tingkat daerah	2%	0%	0%	-	Kegiatan tidak dilaksanakan	Untuk tahun yang akan datang supaya melaksanakan kegiatan tersebut

No.	Sasaran Stragegis	Indikator Kinerja	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Program / Kegiatan	Keterangan	Faktor Penghambat	Upaya Yang Akan Dilakukan
45			Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	83%	73,21%	88,20%	- Daftar pencari kerja yang terdaftar - Daftar pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	Kompetensi pencari kerja belum sesuai dengan kebutuhan pasar kerja	Melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi menyesuaikan kebutuhan pasar kerja
46			Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pencari kerja terdaftar yang mendapatkan fasilitasi pelayanan antar kerja	86%	57,79%	67,20%	- Daftar pencari kerja yang terdaftar - Daftar pencari kerja terdaftar yang terfasilitasi	Kurangnya kompetensi petugas antar kerja dalam memfasilitasi pencaker untuk mendapatkan pekerjaan baik disektor formal maupun informal	- Melaksanakan kegiatan bimtek peningkatan kompetensi bagi petugas antar kerja
47			Penyediaan sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Jumlah sdm pelayanan antar kerja yang mendapatkan pelatiahan melalui bimtek dan lain-lain untuk peningkatan kompetensi	500 orang	60 orang	12 %	Laporan kegiatan Penyediaan sumber Daya Pelayanan Antar Kerja sebanyak 60 orang	Tidak semua peserta bimtek hadir dalam kegiatan yang dilaksanakan	Sebelum pelaksanaan kegiatan, peserta diwajibkan melakukan konfirmasi kehadiran
48			Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitasi layanan ULD	20 orang	50 orang	250%	Laporan kegiatan Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas	Tidak semua peserta pasca pelatihan mampu mandiri secara ekonomi	Melaksanakan monitoring dan pendampingan kepada peserta pasca pelatihan

No.	Sasaran Stragegis	Indikator Kinerja	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Program / Kegiatan	Keterangan	Faktor Penghambat	Upaya Yang Akan Dilakukan
								Ketenagakerjaan sebanyak 50 orang		
49			Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja	800 orang	401 orang	50,12%	Laporan kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja sebanyak 401 orang	Pencari kerja cenderung masuk didunia kerja bukan menciptakan kesempatan kerja baru dengan menjadi tenaga kerja mandiri	Memperluas cakupan kepesertaan pelatihan keterampilan kerja yang mendorong terciptanya tenaga kerja mandiri
50			Penerbitan Izin lembaga penempatan tenaga kerja swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase LPTKS yang memiliki perizinan	6%	0%	0%	-	Kegiatan tidak dilaksanakan	Untuk tahun yang akan datang supaya melaksanakan kegiatan tersebut
51			Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase penempatan tenaga kerja melalui sistem informasi pasar kerja (IPK) online	80%	58,60%	73,25%	- Pencari kerja terdaftar - Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan melalui IPK online	Tidak maksimalnya pemanfaatan platform baik pencari kerja maupun pemberi kerja	Melakukan sosialisasi kepada pencari kerja maupun pemberi kerja tentang manfaat platform yang telah tersedia
52			Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendaatkan	2700 orang	2.432 orang	90,07%	Laporan kegiatan Job Fair/Bursa Kerja sebanyak 2.432 orang	Terdapat perusahaan peserta job fair yang tidak	Melakukan monitoring ke perusahaan peserta job fair

No.	Sasaran Stragegis	Indikator Kinerja	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Program / Kegiatan	Keterangan	Faktor Penghambat	Upaya Yang Akan Dilakukan
				pekerjaan melalui job fair/ bursa kerja					menyampaikan laporan penempatan tenaga kerja	
53			Perlindungan PMI (pra dan purna penempatan yang terfasilitasi) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PMI (pra dan purna penempatan yang terfasilitasi) yang terfasilitasi	75%	0%	0%	-	Kegiatan tidak dilaksanakan	Untuk tahun yang akan datang supaya melaksanakan kegiatan tersebut
54			Program Hubungan Industrial	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan diluar Pengadilan	90%	100%	111,11%	Data Penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang selesai dengan Perjanjian Bersama	Tidak ada kendala	Untuk tahun yang akan datang supaya menambah target capaian
55			Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang telah menyelenggarakan jaminan sosial tenaga kerja diatas 50%	100 perusahaan	177 perusahaan	177%	Jumlah perusahaan yang telah menyelenggarakan jaminan sosial tenaga kerja diatas 50% sebanyak 177 perusahaan	Tidak ada kendala	Untuk tahun yang akan datang supaya menambah target capaian
56			Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan	Jumlah data informasi sarana hubungan industrial (PP/PKB struktur	30 laporan	1 laporan	3,33%	Laporan data sarana hubungan industrial	Terdapat Perusahaan yang belum dilakukan pendataan	Telah tersedianya Aplikasi Berbasis Web

No.	Sasaran Stragegis	Indikator Kinerja	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Program / Kegiatan	Keterangan	Faktor Penghambat	Upaya Yang Akan Dilakukan
			Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	skala upah dan LKS Bipartit) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta jamsostek serta pengupahan					Sarana Hubungan Industrial	Peta Sarana Hubungan Industrial (PENA HI)
57			Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase angka sengketa perusahaan per tahun	2%	0,45%	22,5%	Persentase jumlah perselisihan hubungan industrial yang selesai diluar pengadilan dengan jumlah perusahaan yang ada, kemuadian dikalikan 100%	Masih adanya perselisihan hubungan industrial yang tidak selesai dengan perundingan bipartite di Perusahaan	Diupayakan Perusahaan dapat menyelesaikan perselisihan hubungan industrial dengan perundingan bipartit
58			Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perselisihan yang dicegah	15 perkara	0 perkara	0%	Laporan kegiatan sosialisasi pembinaan norma dan syarat kerja, kegiatan jalan sehat peringatan May Day, kegiatan Sarasehan peringatan May Day, dan Usualan UMK	Masih adanya Perusahaan yang tidak melaporkan perselisihan hubungan industrial	Diupayakan Perusahaan dapat menyelesaikan perselisihan hubungan industrial dengan perundingan bipartit
59			Penyelesaian Perselisihan Hubungan	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	2 perkara	1 perkara	50%	Data Penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Masih adanya Perusahaan yang berselisih	Diupayakan penyelesaian perselisihan

No.	Sasaran Stragegis	Indikator Kinerja	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Program / Kegiatan	Keterangan	Faktor Penghambat	Upaya Yang Akan Dilakukan
			Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					yang selesai dengan Perjanjian Bersama		hubungan industrial diselesaikan dengan Perjanjian Bersama
60			Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	30 lembaga	1 lembaga	3,33%	Keputusan Bupati Nomor 188/139/K/411.013/2022 tentang pembentukan lembaga kerja sama Tripartit Kabupaten Nganjuk	Masih adanya Perusahaan yang belum menerapkan norma dan syarat kerja sesuai dengan Undang – Undang Ketenagakerjaan	Melakukan monitoring ke Perusahaan yang belum menerapkan norma dan syarat kerja sesuai dengan Undang – Undang Ketenagakerjaan
61			Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	80 orang	15.568 orang	194,6%	Laporan terlaksananya program jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitasi kesejahteraan pekerja sebanyak 15.568	Masih adanya Perusahaan yang mendaftarkan pekerjanya hanya sebagian	Perlunya pembinaan kepada Perusahaan terkait pentingnya mendaftarkan seluruh pekerjanya

No.	Sasaran Stragegis	Indikator Kinerja	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Program / Kegiatan	Keterangan	Faktor Penghambat	Upaya Yang Akan Dilakukan
										kepesertaan BPJS
62			Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase tingkat keberhasilan transmigran yang diberangkatkan	40%	6,67%	16,68%	- Daftar calon transmigran yang terdaftar - SK Calon Transmigran Kabupaten Nganjuk Tahun 2024	Penentuan lokasi dan kuota calon transmigran dilakukan oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal	Melakukan koordinasi ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur terkait lokasi penempatan dan kuota calon transmigran
63			Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase calon transmigran yang diberangkatkan	40%	6,67%	16,68%	- Daftar calon transmigran yang terdaftar - SK Calon Transmigran Kabupaten Nganjuk Tahun 2024	Jumlah kuota penempatan dan pemberangkatan transmigrasi terbatas	Melakukan koordinasi ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur untuk penambahan kuota
64			Penjajakan ke Calon Lokasi Penempatan Transmigrasi	Jumlah Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang dilaksanakan Penjajakan	4 lokasi	1 lokasi	25%	Laporan kegiatan Penjajakan ke Calon Lokasi Penempatan Transmigrasi di satuan permukiman Saluandeang Kawasan Transmigrasi Tobadak Kec.	Tidak terlaksananya penjajakan calon lokasi transmigran	Menyediakan anggaran kegiatan penjajakan calon lokasi transmigran

No.	Sasaran Stragegis	Indikator Kinerja	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Program / Kegiatan	Keterangan	Faktor Penghambat	Upaya Yang Akan Dilakukan
								Tobadak Kab. Mamuju Tengah Prov. Sulawesi Barat		
65			Pendampingan dari Kabupaten/Kota sampai ke Lokasi	Jumlah Transmigran yang diberikan pendampingan dari penampungan Kabupaten/Kota sampai ke lokasi	10 kk	1 KK	10%	Perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dan Pemerintah Kabupaten Nganjuk tentang pelaksanaan penyelenggaraan transmigrasi tobadak, Kecamatan Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat	Tidak terlaksananya pendampingan calon transmigrasi	Menyediakan anggaran kegiatan pendampingan calon transmigrasi
66			Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah lokasi transmigran yang dilaksanakan monitoring dan evaluasi	4 lokasi	1 lokasi	25%	Kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Muna dan Pemerintah Kabupaten Nganjuk tentang Penyelenggaraan Transmigrasi di Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara	Tidak terlaksananya monitoring dan evaluasi ke lokasi transmigrasi	Menyediakan anggaran kegiatan monitoring dan evaluasi ke lokasi transmigrasi

1.6) Sasaran 6 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

Pencapaian sasaran ini didukung dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup untuk mewujudkan tercapainya target indikator yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai berikut :

Sasaran RPD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	2024			Kategori Pencapaian	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Capaian		
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	a. Indeks Kualitas Air	Indeks	59.51	56.25	94.52%	Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup
	b. Indeks Kualitas Udara	Indeks	80.85	88.18	109.07%	Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup
	c. Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	55.99	55.74	99.55%	Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup
Rata-rata capaian kinerja					**101,05%**	**Tercapai**	

Sumber data : LKPJ Kab Nganjuk TA 2024

a. Indeks Kualitas Air

Realisasi indikator sasaran "Indeks Kualitas Air" pada tahun 2024 sebesar 56,25 atau 94,52% dari target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 sebesar 59,51 sehingga predikat pencapaian sasaran berdasarkan skala ordinal termasuk dalam kategori "tercapai".

b. Indeks Kualitasi Udara

Realisasi indikator sasaran "Indeks Kualitas Udara" pada tahun 2024 sebesar 88,18 atau 109.07% dari target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 sebesar 80.85 sehingga predikat pencapaian sasaran berdasarkan skala ordinal termasuk dalam kategori "tercapai".

c. Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Realisasi indikator sasaran "Indeks Kualitas Tutupan Lahan" pada tahun 2024 sebesar 55,74 atau 99.55% dari target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 sebesar 55.99 sehingga predikat pencapaian sasaran berdasarkan skala ordinal termasuk dalam kategori "tercapai".

Analisa terkait keberhasilan dan kegagalan program dalam mencapai nilai indeks kualitas air, kualitas udara dan indeks kualitas penutupan lahan adalah sebagaimana berikut :

No.	Sasaran strategi	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Hasil Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan				Faktor Penghambat	Upaya Yang Akan Dilakukan
					Target	Realisasi	Capaian	Keterangan		
1	**Tujuan:** Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		**PROGRAM** PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup	80,5		0	Hasil dari LHE SAKIP dari Inspektorat	Kurangnya kepedulian,komitmen dan keterlibatan yang lebih intensif dari bidang-bidang teknis terkait penyediaan data	Lebih meningkatkan komunikasi dan kepedulian dari bidang-bidang teknis terkait penyediaan data
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 dok	9	112,5	LKPJ, LPPD, LKjIP, Renja, Perubahan Renja, RKA, RKA Perubahan,DPA, DPA Perubahan	Kurangnya kepedulian, komitmen dan keterlibatan bidang-bidang teknis terkait penyediaan data sehingga data masih cenderung lemah dan kurang responsif	Kegiatan akan dilaksanakan rutin setiap triwulan maupun setiap tahun terkait penyediaan data yang responsif dan konsisten
			Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dok	4	200	RKA, DPA, RKA Perub,DPA Perubahan	Terkendala pada sistem yang sering bermasalah dalam jadwal penginputan	Koordinasi lebih baik antar bidang teknis dalam menyusun perencanaan anggaran
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian	5 Laporan	5	100	Laporan Triwulan 1, Laporan triwulan 2, Laporan triwulan 3, Laporan triwulan 4, Dialog kinerja, Dokumen manajemen resiko	Kurangnya kepedulian, komitmen dan keterlibatan bidang-bidang teknis terkait penyediaan data sehingga data masih cenderung lemah dan kurang responsif	Kegiatan akan dilaksanakan rutin setiap triwulan maupun setiap tahun terkait penyediaan data yang responsif dan konsisten

No.	Sasaran strategi	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Hasil Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan				Faktor Penghambat	Upaya Yang Akan Dilakukan
					Target	Realisasi	Capaian	Keterangan		
				Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				Perjanjian kinerja		
			Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 laporan	12	100	12 Laporan Monev	Tidak ada hambatan	
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan administrasi keuangan Dinas Lingkungan Hidup	8 laporan	8	100	SPM Gaji, SPM THR,SPM Rapel, SPM TPP, SPM GU, SPM LS	Tidak ada hambatan	
			Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan ASN	94 ASN	84	89	Jumlah PNS yang Menerima Gaji	Tidak ada hambatan	
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1	100	Laporan Keuangan	Tidak ada hambatan	

No.	Sasaran strategi	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Hasil Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan				Faktor Penghambat	Upaya Yang Akan Dilakukan
					Target	Realisasi	Capaian	Keterangan		
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	6 Laporan	6	100	Laporan Tribulan 1,2,3,4, Laporan DUDB	Tidak ada hambatan	
				Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan penunjang kepegawaian	94 Pegawai/org	84	89			
			Sub Keg Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 org	20	100	Jumlah pegawai yang mengikuti kegiatan senam	Tidak ada hambatan	Untuk tahun yang akan datang melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup	8 lap	8	100	Buku Agenda Surat Masuk, Surat Keluar, Nomor SK, Ekspedisi, Pinjam Gedung, Data PKL, Buku Pinjam Arsip	Tidak ada hambatan	Untuk tahun yang akan datang melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan

No.	Sasaran strategi	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Hasil Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan				Faktor Penghambat	Upaya Yang Akan Dilakukan
					Target	Realisasi	Capaian	Keterangan		
			Sub Keg Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan	25 pkt	25	100	Laporan kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi	Tidak ada hambatan	Untuk tahun yang akan datang melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan
			Sub Keg Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 pkt	5	100	Dokumen pengadaan	Tidak ada hambatan	Untuk tahun yang akan datang melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan
			Sub Keg Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	43 pkt	43	100	Laporan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tidak ada hambatan	Untuk tahun yang akan datang melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan
			Sub Keg Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 pkt	4	100	Laporan Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Tidak ada hambatan	Untuk tahun yang akan datang melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan
			Sub Keg Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 dok	24	100	Laporan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan PerundangUnd angan	Tidak ada hambatan	Untuk tahun yang akan datang melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan
			Sub Keg Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 lapora n	12	100	Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tidak ada hambatan	Untuk tahun yang akan datang melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan

No.	Sasaran strategi	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Hasil Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan				Faktor Penghambat	Upaya Yang Akan Dilakukan
					Target	Realisasi	Capaian	Keterangan		
			Sub Keg Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12	100	Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tidak ada hambatan	Untuk tahun yang akan datang melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan
			Sub Keg Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 dokumen	5	100	Laporan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tidak ada hambatan	Untuk tahun yang akan datang melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan LH Terpenuhi	14 unit	14	100	Laporan Dokumen pengadaan	Tidak ada hambatan	Melakukan pengadaan melalui ekatalok
			Sub Keg Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 unit	2	100	Laporan / Dokumen pengadaan	Tidak ada hambatan	Untuk tahun yang akan datang melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan
			Sub Keg Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 unit	5	250	Laporan Dokumen pengadaan	Tidak ada hambatan	Untuk tahun yang akan datang melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan

No.	Sasaran strategi	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Hasil Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan				Faktor Penghambat	Upaya Yang Akan Dilakukan
					Target	Realisasi	Capaian	Keterangan		
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Urusan Dinas Sesuai Tujuan Organisasi	3 dok	3	100	Laporan penyediaan jasa surat menyurat, jasa komunikasi sumber daya air dan listrik, jasa pelayanan umum kantor	Tidak ada hambatan	Melakukan pengadaan melalui ekatalok
			Sub Keg Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	550 lap	550	100	Laporan tentang Penyediaan jasa surat menyurat	Tidak ada hambatan	Untuk tahun yang akan datang melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan
			Sub Keg Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 lap	4	100	Laporan tagihan Sumber Daya Air dan Listrik	Tidak ada hambatan	
			Sub Keg Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12	100	Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tidak ada hambatan	

No.	Sasaran strategi	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Hasil Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan				Faktor Penghambat	Upaya Yang Akan Dilakukan
					Target	Realisasi	Capaian	Keterangan		
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan LH	50 unit	50	100	Laporan pemeliharaan Barang Milik Daerah	Tidak ada hambatan	Untuk tahun yang akan datang melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan
			Sub Keg Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 unit	5	100	Laporan pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tidak ada hambatan	Untuk tahun yang akan datang melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan
			Sub Keg Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 unit	30	100	Laporan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara	Tidak ada hambatan	Untuk tahun yang akan datang melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan
			Sub Keg Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	5 unit	5	100	Laporan pemeliharaan alat berat	Tidak ada hambatan	Untuk tahun yang akan datang melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan
			Sub Keg Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 uniit	25	100	Laporan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Tidak ada hambatan	Untuk tahun yang akan datang melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan

No.	Sasaran strategi	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Hasil Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan				Faktor Penghambat	Upaya Yang Akan Dilakukan
					Target	Realisasi	Capaian	Keterangan		
			Sub Keg Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	2	100	Laporan pemeliharaan Gedung Kantor	Tidak ada hambatan	Untuk tahun yang akan datang melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan
2			**PROGRAM** PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun	80%	80	100	Perencanaan penyusunan Dokumen Lingkungan		
			Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Lingkungan Hidup yang disusun	2 dok	2	100	D3TLH,IKPLH D		
			Sub Keg Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	1 dok	1	100	dok D3TLH	Tidak ada hambatan	
			Sub Keg Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	1 dok	1	100	dok IKPLHD	Pemenuhan data dari opd tidak sesuai jadwal / tepat waktu	Peningkatan sosialisasi, menggandeng OPD dan masyarakat dalam pemenuhan data dukung, diperlukanya dukungan dari kepala daerah dan DPRD

No.	Sasaran strategi	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Hasil Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan				Faktor Penghambat	Upaya Yang Akan Dilakukan
					Target	Realisasi	Capaian	Keterangan		
3		Indeks kualitas air, Indeks kualitas udara, Indeks kualitas lahan	**PROGRAM** PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase sample pengujian berkualitas baik	60%	60	100	20 sampel berkualitas baik		
			Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah sample pengujian kualitas lingkungan	19 sampel	20	105	20 uji lab		
			Sub Keg Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap	1 dokumen	1	100	15 sampel air sungai, 1 sampel air lindi, 2 sampel air bersih / sumur	Faktor cuaca atau musim yang tidak menentu, saat pengambilan sample uji sungai kering dan jadwal dengan penguji lab yang tidak sesuai yang ditentukan	Penambilan sample uji dilakukan dengan memperhatikan musim, diperlukanya komunikasi lebih dengan pihak jasa penguji
			Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				pantau,2 sampel udara		

No.	Sasaran strategi	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Hasil Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan				Faktor Penghambat	Upaya Yang Akan Dilakukan
					Target	Realisasi	Capaian	Keterangan		
			Sub Keg Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 dokumen	1	100	Laporan akhir Inventarisasi sumber pencemar gad rumah kaca Kab.Nganjuk tahun 2024	Kebutuhan data yang dibutuhkan dari pihak terkait/instansi terkait diberikan tidak sesuai jadwal yang ditentukan	Diperlukan komunikasi dan kolaborasi dengan pihak- pihak terkait dalam pemenuhan kebutuhan data
			Sub Keg Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	40 dokumen	40	100	Hasil uji Lab (air Limbah)	Masih kurangnya tenaga labolatorium lingkungan, sarana prasaran abelum memadai	Perlunya penambahan tenaga labolatorium lingkungan, pemenuhan sasrana prasarana
4	**Sasaran** Meningkat nya pemenuha n RTH perkotaan	Persent ase peningk atan RTH perkotaan	**PROGRAM** PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase pemenuhan target RTH	1,08%	1,21	112,04	Persentase peningkatan RTH		
			Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas RTH yang dibangun dan dikelola	15,481 Ha	15,48	100	RTH yang terkelola		
			Sub Keg Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Ko	10,3 Ha	10,3	100	Laporan pengelolaan RTH baron, TPW,Nyawiji, Alun - alun		

No.	Sasaran strategi	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Hasil Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan				Faktor Penghambat	Upaya Yang Akan Dilakukan
					Target	Realisasi	Capaian	Keterangan		
				ta				berbek, alun-		
								alun nganjuk, Taman pintar		
			Sub Keg Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Luas Taman KEHATI Lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	5,181 Ha	5,181	100	Laporan Pengelolaan Hutan Kota kartoharjo,jatir ejo,anjuk ladang, mastrip,tanjung, gatot subroto		
			Sub Keg Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragam an Hayati yang Dikelola	15unit	15	100	5 Bast pemeliharaan dan penataan taman, 15 unit mesin dan peralaatan kerja		
5			**PROGRAM** PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase rincian teknis yang di verifikasi	75%	0,75	100	Dok laporan B3		
			Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah usulan rincian teknis yang sesuai standart	1 dok	2	200	Dok laporan B3		

No.	Sasaran strategi	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Hasil Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan				Faktor Penghambat	Upaya Yang Akan Dilakukan
					Target	Realisasi	Capaian	Keterangan		
			Sub Keg Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 dok	1	100	Dok laporan B3 kegiatan yang di laksanakan melalui pelayanan berbasis elektronik	Pak Jun Limbah b3	Pak Jun Limbah b3
			Sub Keg Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	10 laporan	10	100	10 Dok laporan verifikasi lapangan pemenuhan dan persetujuan komitmen Limbah B3		

No.	Sasaran strategi	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Hasil Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan				Faktor Penghambat	Upaya Yang Akan Dilakukan
					Target	Realisasi	Capaian	Keterangan		
			Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 satu daerah kabupaten /kota	1 dok	1	100	Dokumen pengumpulan limbah B3		
			Sub Keg Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	1 dok	1	100	Dokumen pengumpulan limbah B3		

No.	Sasaran strategi	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Hasil Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan				Faktor Penghambat	Upaya Yang Akan Dilakukan
					Target	Realisasi	Capaian	Keterangan		
				yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya						
6			**PROGRAM** PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase ketaatan pelaku usaha terhadap pelaksanaan rekomendasi dalam dokumen persetujuan lingkungan	63%	63	3150			
			Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan dari usaha dan / atau kegiatan yang di di awasi dan dibina	2 laporan	2	100			

No.	Sasaran strategi	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Hasil Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan				Faktor Penghambat	Upaya Yang Akan Dilakukan
					Target	Realisasi	Capaian	Keterangan		
			Sub Keg Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan,	2 laporan	2	100	1 dok Laporan pengawasan, 1 dok laporan pengaduan	Sistem pengawasan satu pintu sehingga butuh waktu penyesuaian untuk koordinasi lebih lanjut	Koordinasi lebih lanjut dengan pihak terkait
			Daerah Kabupaten/Kota	Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						
7			**PROGRAM** PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase lembaga/kelompok masyarakat/institusi yang menjalankan pelestarian LH	100%	100	100			
			Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan lingkungan hidup	5 lembaga/2 dok	5	100			

No.	Sasaran strategi	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Hasil Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan				Faktor Penghambat	Upaya Yang Akan Dilakukan
					Target	Realisasi	Capaian	Keterangan		
			Sub Keg Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkat Kapasitas dan Kompetensiny a Terkait PPLH	2 lembaga	3	150	lembaga pondok modern AL barokah, Podok pesantren hamalatul Quran AL ijabah, Pondok Pesanatren ANNur AL Ghozali	Pemenuhan kreteria yang sesuai dengan ecopesantren tidak semuanya memenuhi (mayoritas pondok pesantren kurang dalam administrasi)	Melakukan penmbinaan dan pendampingan, memberikan bantuan sarpras pendukung
			Sub Keg Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen yang disusun thd Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	2 dok	3	150	Dokumen lapotran ADIWIYAT A Tk.Propinsi 3 sekolah, ADIYATA Nasional 1 sekolah, ADIYATA Mandiri 1 sekolah	Tim adiwiyata di sekolah kurang responsif, sehingga dokumen usulan kurang maksimal	Lebih sering melakukan pembinaan ke sekolah, mendatangkan narasumber adiwita kesekolah
			Sub Keg Penyelenggaraan penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	50 org	50	100	Laporan Usulan kalpataru tingkat Nasional Dan Tk. Jawa timur	Keterbatasan calon yang bisa di usulkan dalam penilaian KALPATARU / PFLH	Bekerjasama dengan CDK dan perhutani, melakukan aksi dengan masyarakat agar mewujudkan rasa peduli lingkungan
8			**PROGRAM** PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	persentase lembaga yang mendapatkan penghargaan	70%	70	100			

No.	Sasaran strategi	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Hasil Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan				Faktor Penghambat	Upaya Yang Akan Dilakukan
					Target	Realisasi	Capaian	Keterangan		
			Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah lembaga yang mendapatkan penghargaan	1 dok	1	100			
			Sub Keg Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Duni a Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	5entititas	10	200	10 sekolah yang ditetapkan sebagai Sekolah ASDIWIYATA kab.Nganjuk Tahun 2024	Pembinaan kepada sekolah intetitasnya masih kurang	Lebih sering melakukan pem,binaan kepada sekolah
9			**PROGRAM** PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100%	100	100	Persentase pengaduan yang telah tertangani / terselesaikan		
			Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti	1 dok	1	100	Dokumen laporan pengaduan	Penagan pengaduan dengan cepat	Koordinasi dengan pihak terkait dalam penyelesaian pengaduan

No.	Sasaran strategi	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Hasil Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan				Faktor Penghambat	Upaya Yang Akan Dilakukan
					Target	Realisasi	Capaian	Keterangan		
			Sub Keg Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti /Ditangani	1 dok	1	100	Dok Laporan Pengaduan (7 laporan pengaduan)	Identitas pengadu kurang jelas/ kurang lengkap sehingga kesulitan untuk koordinasi dalam upaya menindaklanjuti	Untuk lebih selektif dan hati- hati dalam menindaklanjuti pengaduan, dan selalu koordinasi dengan pihak terkait
10	**Sasaran** Meningkat nya pengelolaan persampahan	Persentase penang anan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di perkotaan	**PROGRAM** PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase volume sampah yang terkelola	70%	70	100	Persentase sampah yang terkelola	Kondisi sarana penampungan sampah yang sudah overload	Upaya untuk mengurangi sampah yang masuk ke TPA melalui kegiatan pengurangan sampah pada TPS dan sumbernya Akan Dilakukan
		Persentase pengur angan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga melalui 3R di perkotaan	**Kegiatan** Pengelolaan Sampah	Volume sampah yang terkelola	500 ton	500	100	Laporan tentang pengelolaan sampah	Keterbatasan sarana prasarana	koordinasi dengan pihak terkait dalam pemenuhan sarana prasarana persampahan

No.	Sasaran strategi	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Hasil Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan				Faktor Penghambat	Upaya Yang Akan Dilakukan
					Target	Realisasi	Capaian	Keterangan		
			Sub Keg Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan,	1 Laporan	1	100	Dokumen Laporan kegiatan pengurangan sampah Tahun 2024	Kurangnya tertib administrasi dalam kegiatan pengurangan sampah	Pendampingan kepada kelompok masyarakat dalam kegiatan pengurangan sampah
			dan Pemanfaatan Kembali	Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali						
			Sub Keg Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan,pengumpulan,pengangkutan,pengangkuta n pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	500 ton	500	100	Laporan penanganan sampah	Kurangnya sarana prasarana dalam penanganan sampah	Usulan penambahan sarana baru
			Sub Keg Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	6 Kelompok	6	100	Laporan kegiatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah(BSI, Kelurahan ganung, Jatirejo, Kartoharjo, Werungotok,Kauman)	Kurangnya tertibnya administrasi dalam pengelolaan sampah (BSI)	Pelaksanaan pendampingan pada kelompok /BSI

No.	Sasaran strategi	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Hasil Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan				Faktor Penghambat	Upaya Yang Akan Dilakukan
					Target	Realisasi	Capaian	Keterangan		
			Sub Keg Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	2 unit	5	250	BAST Laporan pengadaan sarana prasarana persampahan	Tidak ada kendala	Pengadaan dengan Ekatalok

1.7) Sasaran 7 : Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Akses Hunian Layak, Serta Keselamatan Transportasi

Pencapaian sasaran ini didukung dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan Urusan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Urusan Perhubungan untuk mewujudkan tercapainya target indikator yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai berikut :

Sasaran RPD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	2024			Kategori Pencapaian	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Capaian		
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Akses Hunian Layak, Serta Keselamatan Transportasi	a. Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	Indeks	85	84,23	99,09%	Tercapai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	b. Persentase Rumah Layak Huni	%	96,94	96,97	100,03%	Tercapai	Dinas PRKPP
	c. Rasio Kecelakaan Per 10.000	Nilai	22,5	22,09	101,86%	Tercapai	Dinas Perhubungan
Rata-rata capaian kinerja					**100,33%**	**Tercapai**	

Sumber data : LKPJ Kab Nganjuk TA 2024

a. Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum

Analisis dan evaluasi atas pencapaian sasaran Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut :

No	Komponen indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	Nilai Maksimal	Bobot tiap Komponen	Skor Perolehan	Bobot Perolehan
1	Realisasi Persentase Kondisi Mantap Jalan	100	25	68,214	17,05
2	Realisasi Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	100	25	99,53	24,88
3	Realisasi Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik layak dan aman	100	25	96,95	24,24
4	Realisasi IKSI Kewenangan Kabupaten	100	25	72,25	18,06
JUMLAH					**84,23**

1. **Persentase kondisi mantap jalan kabupaten**

Persentase kondisi mantap jalan kabupaten adalah panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang di banding dengan panjang total jalan kabupaten. Kemantapan jalan adalah kualitas fisik dan pelayanan jalan yang dianggap cukup untuk memenuhi persyaratan minimum agar jalan dapat beroperasi secara optimal. Jalan yang dikategorikan mantap adalah jalan yang kondisinya baik dan sedang, sedangkan jalan yang tidak mantap adalah jalan yang kondisinya rusak ringan atau rusak berat. Adapun formulasi perhitungan Persentase Kondisi Mantap Jalan adalah sebagai berikut:

$$\frac{Panjang\ jalan\ kewenangan\ kabupaten\ \ dalam\ kondisi\ baik\ dan\ sedang\ (km)}{Total\ panjang\ jalan\ kewenangan\ kabupaten\ (km)}\ x\ 100\ \%$$

Berdasarkan rumus di atas, maka realisasi dan capaian Persentase Kondisi Mantap Jalan Kabupaten Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Keterangan	2024
Panjang jalan kewenangan kabupaten	1.481,997 km
Target jalan kondisi baik dan sedang	1.072,82 km (72,39%)
Realisasi jalan kondisi baik dan sedang	1.010,931 km (68,214%)
Capaian kinerja	94,23%

Berdasarkan tabel di atas, meskipun realisasi kinerja Persentase Kondisi Mantap Jalan Kabupaten belum dapat mencapai target namun secara capaian kinerja telah mencapai nilai ≥ 90, sehingga capaian kinerjanya termasuk sangat tinggi.

2. **Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi**

Formulasi perhitungan Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses terhadap Air Minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi sebagai berikut:

$$\frac{Jumlah\ Rumah\ Tangga\ Yang\ Mendapat\ Akses\ Air\ Minum\ Melalui\ SPAM\ Jaringan\ Perpipaan\ dan\ Non\ Perpipaan\ terlindungi}{Jumlah\ Rumah\ Tangga\ di\ Kabupaten\ Nganjuk}\ x\ 100\ \%$$

Berdasarkan rumus di atas, maka capaian Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses terhadap Air Minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Keterangan	2024
Jumlah Rumah Tangga di Kabupaten Nganjuk	334.245 Rumah Tangga
Target Rumah Tangga yang mendapat akses	321.644 Rumah Tangga (96,23%)
Realisasi Rumah Tangga yang mendapat akses	332.673 Rumah Tangga (99,53%)
Capaian kinerja	103,43 %

Berdasarkan tabel diatas realisasi kinerja Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses terhadap Air Minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi telah melampaui target.

3. Persentase rumah tangga yang mendapat akses air minum aman

Akses aman adalah rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak, lokasi sumber air berada di dalam atau di halaman rumah (on-premises), tersedia setiap saat dibutuhkan, dan kualitas air minum yang dipergunakan memenuhi syarat kualitas air minum. Persentase rumah tangga yang mendapat akses air minum aman merupakan persentase jumlah rumah tangga yang mendapat akses air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dibanding jumlah rumah tangga di kabupaten Nganjuk, dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{Jumlah\ rumah\ tangga\ yang\ mendapat\ akses\ air\ minum\ aman}{Jumlah\ Rumah\ Tangga\ di\ Kabupaten\ Nganjuk}\ x\ 100\ \%$$

Berdasarkan rumus di atas, maka capaian Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum Aman Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Keterangan	2024
Jumlah Rumah Tangga di Kabupaten Nganjuk	334.245 Rumah Tangga
Target Rumah Tangga yang mendapat akses	52.811 Rumah Tangga (15,8%)
Realisasi Rumah Tangga yang mendapat akses	59.446 Rumah Tangga (17,79%)
Capaian kinerja	112,59%

Berdasarkan tabel diatas realisasi kinerja Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum Aman telah melampaui target.

4. Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik layak dan aman

Perhitungan persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik layak dan aman mengikuti formulasi berikut:

$$\frac{Jumlah\ rumah\ tangga\ yang\ memperoleh\ layanan\ pengolahan\ air\ limbah\ domestik\ layak\ dan\ aman}{Jumlah\ Rumah\ Tangga\ di\ Kabupaten\ Nganjuk}\ x\ 100\ \%$$

Sampai dengan saat ini Kabupaten nganjuk belum memiliki IPLT, sehingga kinerja pada indikator ini dihitung berdasarkan jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik layak saja. Berdasarkan rumus di atas, maka capaian persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik layak dan aman Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Keterangan	2024
Jumlah Rumah Tangga di Kabupaten Nganjuk	334.245 Rumah Tangga
Target Rumah Tangga yang mendapat layanan	317.533 Rumah Tangga (95%)
Realisasi Rumah Tangga yang mendapat layanan	324.057 Rumah Tangga (96,95%)
Capaian kinerja	102,05%

Berdasarkan tabel diatas realisasi kinerja persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik layak dan aman telah melampaui target.

5. Indeks Kinerja Saluran Irigasi (IKSI) Kewenangan Kabupaten

IKSI merupakan penilaian untuk mengetahui kondisi kinerja irigasi pada Daerah Irigasi (DI) yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka mendukung produktivitas pertanian. Pengukuran IKSI berdasarkan petunjuk Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi, meliputi 6 indikator dengan dengan bobot masing-masing sebagai berikut:

1. Prasarana Fisik (45%);
2. Produktivitas tanam (15%);
3. Sarana Penunjang (10%);
4. Organisasi personalia (15%);
5. Dokumentasi (5%);
6. Kondisi Kelembagaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) (10%).

Adapun IKSI Kabupaten Nganjuk didapatkan dari rata rata nilai IKSI pada 210 DI yang menjadi kewenangan Kabupaten Nganjuk sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status daerah Irigasi, dengan rumus:

$$\sum_{DI=n}^{DI=1} \frac{IKSI\ DI}{n}$$

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas PUPR Kabupaten Nganjuk, diketahui bahwa rata-rata nilai IKSI pada 210 DI Kewenangan Kabupaten hingga akhir tahun 2024 sebesar 72,25%. Sehingga capaian IKSI Kewenangan Kabupaten Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Keterangan	2024
Target	77
Realisasi	72,25
Capaian	93,83 %

Berdasarkan tabel diatas meskipun realisasi kinerja IKSI Kewenangan Kabupaten belum dapat mencapai target namun demikian secara capaian kinerja telah mencapai nilai ≥ 90, sehingga capaian kinerjanya termasuk sangat tinggi.

6. Persentase Pemanfaatan Lahan Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang

Persentase Pemanfaatan Lahan Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang merupakan persentase luas pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang dibanding dengan luas total lahan yang diajukan. Perhitungan Persentase Pemanfaatan Lahan Sesuai dengan Rencana Tata Ruang berdasarkan formulasi berikut:

$$\frac{Luas\ Pemanfaatan\ Lahan\ Sesuai\ Dengan\ Rencana\ Tata\ Ruang\ (M2)}{Luas\ total\ lahan\ yang\ diajukan\ (M2)}\ x\ 100\ \%$$

Berdasarkan rumus di atas, maka capaian Persentase Pemanfaatan Lahan Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Keterangan	2024
Target Luas pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang (m^2)	100% (395.884 m^2)
Realisasi Luas total lahan yang diajukan (m^2)	100% (395.884 m^2)
Capaian	100%

Berdasarkan tabel diatas realisasi kinerja Persentase Pemanfaatan Lahan Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang telah mencapai target yang ditetapkan.

Pencapaian target kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana tersebut diatas didukung dengan hasil-hasil program kegiatan Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, Bidang Pengairan, Bidang Tata Ruang dan Bina Jasa Konstruksi dan Peralatan. Hasil-hasil pembangunan s/d akhir tahun 2024 sebagaimana tabel dibawah ini :

URAIAN	REALISASI	SATUAN
Normalisasi/Restorasi Sungai	15,54	Km
Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	28	unit
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	6,15	Km
Rehabilitasi Bendung Irigasi	3	Bendung
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	404,401	Km
Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	3	Bendung
Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	5	Lembaga
Penyusunan Rencana Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	5	Dokumen
Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum / SPAM Jaringan Perpipaan	9	Liter/Detik
Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air minum / SPAM Desa	9	Desa

URAIAN	REALISASI	SATUAN
Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum / SPAM Jaringan Perpipaan	4	Liter/Detik
Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum / SPAM Jaringan Perpipaan	186	SR
Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	2,02	Ton/hari
Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	25	Rumah Tangga
Penyediaan Sub Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik / SPALD setempat	1187	Rumah Tangga
Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik / SPALD	150	Orang
Penyusunan Rencana , Kebijakan, Strategi dan Teknik Sistem Drainase Perkotaan	35	Dokumen
Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	18	Sistem Drainase Perkotaan
Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	2	Sistem Drainase Perkotaan
Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	11	Sistem Drainase Perkotaan
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	15	Sistem Drainase Perkotaan
Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	3.381	Meter
Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	97	Bangunan Gedung
Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	18	Dokumen
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	11	Dokumen
Pengelolaan Leger Jalan	2	Dokumen
Survei Kondisi Jalan/Jembatan	1482	Km
Pembangunan Jalan	35	Km
Pelebaran Jalan Menambah Lajur	2,97	Km
Rekonstruksi Jalan	48	Km
Rehabilitasi Jalan	37,09	Km
Pemeliharaan Berkala Jalan	16,05	Km
Pemeliharaan Rutin Jalan	39	Km

URAIAN	REALISASI	SATUAN
Pembangunan Jembatan	4	Jembatan
Pelebaran Jembatan	2	Jembatan
Rehabilitasi Jembatan	1	Jembatan
Pemeliharaan Rutin Jembatan	6	Jembatan
Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	167	orang
Pelaksanaan Fasilitasi RDTR Kabupaten/Kota	3	Dokumen
Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	65	Dokumen
Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	3	Dokumen

Indikator sasaran "Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum" pada tahun 2024 telah tercapai sebesar 84,23% atau 99,094% dari target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 sebesar 85% sehingga predikat pencapaian sasaran berdasarkan skala ordinal termasuk dalam kategori "tercapai".

Dalam pencapaian indeks infrastruktur pekerjaan umum didukung oleh program dan kegiatan seabgaimana tabel dibawah ini :

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Capaian Kinerja/Program Kegiatan
1	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik	97,59
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan dalam Kondisi Mantap Fungsional	145,76
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase tenaga Konstruksi yang bersertifikat	100
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Terampil Yang Bersertifikat	278,33
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	100
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Capaian Kinerja/Program Kegiatan
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	92,44
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	179,07
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	87,18
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara	93,29
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	93,33
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten Yang di kelola dan dikembangkan tahun N	99,34
	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase pemenuhan infastruktur pengelolaan sampah	100
	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Sarana Persampahan di Daerah Kabupaten Yang dibangun dan direhabilitasi	83,33
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase kewenangan kabupaten dalam kondisi baik	85,71
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Sistem Drainase dalam Kondisi Baik	63,57
	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Gedung Bangunan Daerah yang Handal	111,49

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Capaian Kinerja/Program Kegiatan
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten dalam Kondisi Baik	111,49
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase peningkatan rumah tangga yang mendapatkan akses ALD	1.907,69
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Sistem Air Limbah Domestik di Daerah Kabupaten Yang di kelola dan dikembangkan tahun N	1.695,71
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Panjang Pengelolaan SDA	104,99
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Sungai yang dibangun, di rehab, di normalisasi dan direstorasi	388,5
2	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase KKPR yang diterbitkan	121,29
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten yang disusun	300
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen KKPR yang diterbitkan	108,33
	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	108,33

Faktor keberhasilan realisasi kinerja di atas disebabkan oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal yaitu :

1. Ketepatan pelaksanaan kegiatan yang mengacu kepada dokumen perencanaan dan *time schedule* yang telah ditetapkan.
2. Terdapat konsistensi dalam implementasi program kegiatan sesuai dengan jadwal yangtelah ditetapkan.

3. Adanya komitmen yang kuat dari pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan di dalam merealisasikan setiap tahapan pelaksanaan DPA dan DPPA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2024.

Selain itu beberapa program sub kegiatan telah melampaui target, hal ini disebabkan oleh adanya dana tambahan seperti kegiatan DAK dan PAMSIMAS pada program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah. Pada Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional juga mengalami pencapaian realisasi kinerja yang tinggi dikarenakan penyesuaian target yang terlalu kecil pada awal penentuan target kinerja. Hal ini akan menjadikan pertimbangan pada penenyesuaian target dengan perubahan anggaran pada tahun anggaran selanjutnya. Selain dari faktor pendorong keberhasilan belum terdapat kekurangan di dalam pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk.

b. Persentase Rumah Layak Huni

Indikator sasaran Persentase Rumah Layak Huni terealisasi sebesar 96,97% dari target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 sebesar 96,94% dengan tingkat capaian sebesar 100,03%. Dengan rumus perhitungan yang didapat yaitu jumlah seluruh rumah layak huni disuatu wilayah (unit) dibagi dengan jumlah total rumah di suatu wilayah (unit) di kali dengan 100%. Realisasi Capaian kinerja selama tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- Jumlah rumah s.d.akhir tahun 2024 316.157 unit
- Persentase target rumah layak huni tahun 2024 96,94 %
- Realisasi penanganan rumah layak huni pada tahun 2024 1.060 unit
- Jumlah rumah layak Huni tahun 2024 306.582 unit

– Jumlah rumah tidak layak huni tahun 2024 9.575 unit

– Persentase capaian kinerja tahun 2024 100,03 %

Rekapitulasi Data Rumah berdasarkan Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2044 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk sebagai berikut :

No	Kecamatan	Jumlah Rumah (unit)	Jumlah RTLH	Jumlah RLH
1	Sawahan	10.280	549	9.731
2	Ngetos	10.529	257	10.272
3	Berbek	15.824	294	15.530
4	Loceret	20.536	504	20.032
5	Pace	18.405	320	18.085
6	Tanjunganom	33.644	328	33.316
7	Prambon	20.460	181	20.279
8	Ngronggot	24.695	119	24.576
9	Kertosono	14.985	143	14.842
10	Patianrowo	11.681	434	11.247
11	Baron	14.792	206	14.586
12	Gondang	16.624	2.085	14.539
13	Sukomoro	13.475	341	13.134
14	Nganjuk	17.639	77	17.562
15	Bagor	18.752	276	18.476
16	Wilangan	9.673	255	9.418
17	Rejoso	22.072	662	21.410
18	Ngluyu	5.675	469	5.206
19	Lengkong	9.822	1.023	8.799
20	Jatikalen	6.594	1.052	5.542
	Nganjuk	**316.157**	**9.575**	**306.582**

Sumber : Data Dinas PRKPP Kab Nganjuk, 2024

Program kegiatan yang dilaksanakan tahun 2024 untuk mencapai indikator sasaran Persentase rumah layak huni adalah :

- Program BSPS (Pemerintah Pusat) sebanyak 770 unit

No.	Nama Kecamatan	Nama Desa / Kelurahan	Alokasi	
			SK ALOKASI (Rumah)	REALISASI PENYALURAN (Rumah)
BSPS Tahap XIV				
1	Loceret	Tekenglagahan	20	20
2	Ngetos	Ngetos	26	26
3	Pace	Jatigreges	20	20
4	Rejoso	Gempol	15	15
5	Rejoso	Kedungpadang	15	15
6	Rejoso	Puhkerep	18	18
7	Rejoso	Sidokare	20	20
8	Sawahan	Ngliman	20	20
9	Tanjunganom	Getas	15	15
	SUB TOTAL XIV		**169**	**169**
BSPS Tahap XV				
1	Nganjuk	Kartoharjo	16	16
2	Nganjuk	Werungotok	16	16
3	Nganjuk	Kramat	24	24
4	Nganjuk	Payaman	16	16
5	Nganjuk	Bogo	13	13
6	Wilangan	Sukoharjo	15	15
7	Bagor	Banaran Kulon	16	16
8	Bagor	Selorejo	30	30
	SUB TOTAL XV		**146**	**146**
BSPS Tahap XIX				
1	Sukomoro	Bagorwetan	20	20
2	Berbek	Berbek	13	13
3	Sawahan	Ngliman	27	27
4	Berbek	Tiripan	20	20
5	Rejoso	Kedungpadang	20	20
6	Rejoso	Puhkerep	20	20
7	Rejoso	Klagen	20	20
8	Bagor	Kendalrejo	20	20
9	Bagor	Kutorejo	20	20
10	Wilangan	Ngadipiro	22	22
11	Jatikalen	Ngasem	32	32
12	Ngetos	Ngetos	26	26
13	Prambon	Nglawak	20	20
14	Sawahan	Sidorejo	11	11

No.	Nama Kecamatan	Nama Desa / Kelurahan	Alokasi	
			SK ALOKASI (Rumah)	REALISASI PENYALURAN (Rumah)
15	Pace	Plosoharjo	20	20
16	Jatikalen	Pulowetan	20	20
17	Prambon	Rowoharjo	20	20
18	Lengkong	Sawahan	21	21
19	Nganjuk	Cangkringan	20	20
20	Nganjuk	Kartoharjo	20	20
21	Ngronggot	Banjarsari	9	9
22	Loceret	Nglaban	12	12
23	Loceret	Ngepeh	2	2
24	Rejoso	Sidokare	20	20
	SUB TOTAL XIX		**455**	**455**
JUMLAH TOTAL			**770**	**770**

Sumber : Data Dinas PRKPP Kab Nganjuk, 2024

- Pemugaran Rumah Tidak Layak huni (RTLH) di luar kawasan Kumuh sebanyak 229 unit

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA/ KELURAHAN	ALOKASI	
			SK ALOKASI (Rumah)	REALISASI PENYALURAN (Rumah)
REGULER 2024				
1	Lengkong	Balongasem	10	9
2	Bagor	Buduran	15	10
3	Gondang	Campur	19	14
4	Jatikalen	Dawuhan	15	14
5	Loceret	Genjeng	19	8
6	Rejoso	Jatirejo	13	13
7	Bagor	Karangtengah	6	6
8	Loceret	Kenep	10	6
9	Ngluyu	Lengkonglor	10	9
10	Ngluyu	Ngluyu	13	11
11	Baron	Sambiroto	8	7
12	Gondang	Senjayan	15	13
13	Loceret	Sombron	7	1
14	Ngluyu	Sugihwaras	18	16
15	Tanjunganom	Sumberkepuh	7	5
16	Lengkong	Sumbermiri	5	3
17	Ngetos	Suru	17	14
18	Loceret	Tempelwetan	9	5
19	Tanjunganom	Warujayeng	10	3

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA/ KELURAHAN	ALOKASI	
			SK ALOKASI (Rumah)	REALISASI PENYALURAN (Rumah)
	Jumlah		**226**	**167**
P-APBD 2024				
1	Bagor	Buduran	13	13
2	Gondang	Campur	5	5
3	Loceret	Genjeng	5	5
4	Rejoso	Jatirejo	9	9
5	Loceret	Kenep	1	1
6	Ngluyu	Lengkonglor	6	6
7	Ngluyu	Ngluyu	6	6
8	Gondang	Senjayan	5	5
9	Ngluyu	Sugihwaras	9	9
10	Loceret	Tempelwetan	3	3
	JUMLAH		**62**	**62**
TOTAL PENCEGAHAN			**288**	**229**

Sumber : Data Dinas PRKPP Kab Nganjuk, 2024

- Pemugaran Rumah Tidak Layak huni (RTLH) di dalam kawasan Kumuh sebanyak 47 unit

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA/ KELURAHAN	ALOKASI	
			SK ALOKASI (Rumah)	REALISASI PENYALURAN (Rumah)
REGULER 2024				
1	Bagor	Balongrejo	8	8
2	Berbek	Berbek	14	12
3	Nganjuk	Begadung	14	13
4	Nganjuk	Mangundikaran	14	14
	JUMLAH		**50**	**47**

Sumber : Data Dinas PRKPP Kab Nganjuk, 2024

- Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh sebanyak 14 unit

No.	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA/ KELURAHAN	ALOKASI	
			SK ALOKASI (Rumah)	REALISASI PENYALURAN (Rumah)
REGULER 2024				
1	Bagor	Balongrejo	2	2
2	Berbek	Berbek	6	5
3	Nganjuk	Begadung	2	2
	Nganjuk	Mangundikaran	5	5
	JUMLAH		**15**	**14**

Sumber : Data Dinas PRKPP Kab Nganjuk, 2024

Indikator sasaran "Persentase Rumah Layak Huni" pada tahun 2024 telah tercapai sebesar 96,97 atau 100,03% dari yang ditetapkan sebesar 96,94 sehingga predikat pencapaian sasaran berdasarkan skala ordinal termasuk dalam kategori "tercapai".

c. *Rasio Kecelakaan Per 10.000 Kendaraan*

Indikator sasaran "Rasio Kecelakaan Per 10.000 Kendaraan" pada tahun 2024 telah tercapai sebesar 22,09 atau 101,86% dari target yang ditetapkan sebesar 22,5 sehingga predikat pencapaian sasaran berdasarkan skala ordinal termasuk dalam kategori "tercapai". Analisis faktor pendorong dan faktor penghambat pencapaian program/kegiatan Dinas Perhubungan disajikan dalam tabel berikut:

No	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Progran/ Kegiatan (%)
1	Rasio Kecelakaan Per 10.000 Kendaraan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Dinas Perhubungan	91	81,2	89,23
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	8 dokumen	8 dokumen	100
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	100
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi kepegawaian perangkat daerah	2 dokumen	2 dokumen	100
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi	12 dokumen	12 dokumen	100

No	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Progran/ Kegiatan (%)
			Umum Perangkat Daerah			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang Disediakan	13 unit	13 unit	100
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28 laporan	28 laporan	100
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang terpelihara	129 unit	129 unit	100
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	V/C Rasio Jalan Perkotaan	0,3	0,3	100
			Persentase Jumlah Kendaraan Angkutan yang Lulus Uji Kir	99%	99,14%	100,14
			Load Faktor Angkutan Sekolah Gratis	100%	102,33%	102,33
			Persentase Pemasangan Perlengkapan Jalan	86,5%	84,67%	97,88
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan dan Perlengkapan Jalan yang tersedia dan dipelihara	11.487 unit	11.487 unit	100
		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Tipe C yang dibangun dan Dikelola	5 unit	5 unit	100
		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan	Jumlah Laporan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan	12 laporan	12 laporan	100

No	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Progran/ Kegiatan (%)
		Pembangunan Fasilitas Parkir	pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten/kota dilaksanakan			
		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan bermotor yang wajib diuji secara berkala	5000 unit	5030 unit	100
		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	18 laporan	18 laporan	100
		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Permohonan Andalalin yang Ditindaklanjuti	8 laporan	8 laporan	100
		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Laporan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Yang Dilaksanakan	6 laporan	6 laporan	100
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	21 unit	21 unit	100

Analisis terhadap keberhasilan/kegagalan dalam mencapai target baik internal maupun eksternal diperlukan guna mengetahui sasaran prioritas apa yang direncanakan dalam menanggulangi masalah transportasi dan mengembangkan

kualitas pelayanan transportasi di Kabupaten Nganjuk. Adapun yang berpengaruh dan yang menunjang keberhasilan sebagai berikut:

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Capaian Kinerja Progran/ Kegiatan (%)	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Dinas Perhubungan	89,23	Peningkatan pengawasan terhadap pengelolaan Anggaran maupun kinerja Dinas Perhubungan
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	V/C Rasio Jalan Perkotaan	100	Terlaksananya semua kegiatan yang menunjang nilai V/C terutama kegiatan rekayasa lalulintas
	Persentase Jumlah Kendaraan Angkutan yang Lulus Uji Kir	100,14	Kesadaran pemilik kendaraan untuk memperbaiki kendaraan yang mengalami kerusakan cukup tinggi
	Load Faktor Angkutan Sekolah Gratis	102,33	Minat siswa untuk menggunakan angkutan sekolah sangat tinggi
	Persentase Pemasangan Perlengkapan Jalan	97,88	Belum tercapai sesuai target yang diajukan karena pagu anggaran yang diajukan tidak terpenuhi namun pemasangan perlengkapan jalan dilakukan dengan selektif
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan dan Perlengkapan Jalan yang tersedia dan dipelihara	100	Terlaksananya Pembangunan, Pemeliharaan & Rehabilitasi Perlengkapan Jalan sesuai dengan target yang ditentukan
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Tipe C yang dibangun dan Dikelola	100	Terlaksananya Pemeliharaan & Rehabilitasi Terminal sehingga terminal tipe C berjalan sesuai dengan target yang tentukan
Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Laporan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten/kota dilaksanakan	100	Terlaksananya penataan dan terkelolanya parkir ditepi jalan sesuai kewenangan

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Capaian Kinerja Progran/ Kegiatan (%)	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan bermotor yang wajib diuji secara berkala	100	Kinerja sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor yang optimal
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	100	Terlaksananya Penataan Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Permohonan Andalalin yang Ditindaklanjuti	100	Terlaksananya Koordinasi Sinkronisasi dan pengawasan terhadap Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Laporan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Yang Dilaksanakan	100	Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	100	Tersedianya pelayanan angkutan sekolah gratis yang menjangkau semua wilayah kabupaten Nganjuk

2) "Nganjuk Sehat dan Cerdas"

Tujuan : Meningkatnya kualitas pembangunan manusia yang unggul dan berdaya saing

Indikator Tujuan : Indeks Pembangunan Manusia

2.1) Sasaran 1 : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat

Pencapaian sasaran ini didukung dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan Urusan Kesehatan dan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk mewujudkan tercapainya target indikator yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai berikut :

Sasaran RPD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	2024			Kategori Pencapaian	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Capaian		
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	a. Indeks Kesehatan	Indeks	0.8	0.84	105%	Tercapai	Dinas Kesehatan Dinas PPKB

Sumber data : LKPJ Kab Nganjuk TA 2024

a. Indeks Kesehatan

Realisasi indikator sasaran "Indeks Kesehatan" pada tahun 2024 telah tercapai sebesar 0,84 atau 105% dari target yang ditetapkan sebesar 0,8 sehingga predikat pencapaian sasaran berdasarkan skala ordinal termasuk dalam kategori "tercapai".

Dinas Kesehatan menetapkan tujuan sebagaimana dalam Dokumen Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 yang disusun dengan memperhatikan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan tahun 2024-2026. Sebagai komitmen Dinas Kesehatan dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD yaitu Indeks Kesehatan dengan sasaran Meningkatnya Kesehatan Masyarakat, berikut beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan :

Sasaran	Indikator Kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan
Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Umur Harapan Hidup (UHH)	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorengan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	**1. Prosentase SPM yang memenuhi target**	**96,12%**
	Universal Health Coverage (UHC)		**2. Prosentase Fasyankes terakreditasi**	**90%**
			3. Prosentase penduduk terdaftar jaminan kesehatan nasional	**96,76%**
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota*	**167%**

Sasaran	Indikator Kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan
		Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	100%
		Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alkes dan SDM agar Sesuai Standar	100%
		Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar sesuai standar	100%
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alkes yg telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeiharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	100%
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	100%
		Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Faskes	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Faskes yang Disediakan	100%
		Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Faskes	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Faskes	100%
		Pemeliharaan Rutin dan berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terpelihara sesuai standar	100%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi Masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas	40%
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	Prosentase SPM yang memenuhi target	96,12%

Sasaran	Indikator Kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan
		Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
			Prosentase penduduk terdaftar jaminan kesehatan nasional	96,76%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	100%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendaptkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	100%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	100%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	100%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	100%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes militus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	100%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Gangguan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	100%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan sesuai Standar	100%

Sasaran	Indikator Kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan sesuai Standar	100%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) sesuai Standar	100%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	100%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	100%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	100%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	100%
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	100%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	100%
		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	100%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	40%
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	100%

Sasaran	Indikator Kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	96,76%
		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah spesimen penyakit potensial kejadian luar biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan /Nasional yang didistribusikan	100%
		Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan kabupaten/kota sehat	100%
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	100%
		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	100%
		Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	100%
		Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	100%
		Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah	100%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	*Jumlah orang* dengan masalah kesehatan jiwa yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%
		Pelayanan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi di Kabupaten/Kota	90%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	57%
		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%

Sasaran	Indikator Kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan
		Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	100%
		Pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	100%
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	*Jumlah Dokumen Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi*	100%
		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	100%
		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	100%
		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang DilakukanPengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	98%
		Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	100%
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	**Persentase tenakes yang memenuhi standar**	90%
		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota*	**98%**
		Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktek Tenaga Kesehatan	100%
		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Kebutuhan dan Pendayagunaann Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota*	**70%**

Sasaran	Indikator Kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan
		Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah dokumen hasil perencanaan dan distribusi serta pemerataan sumber daya manusia kesehatan	50%
		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	90%
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan*	50%
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kab/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	50%
		Program Sediaan Farmasi,Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	**Persentase sediaan makanan dan minuman yang dinyatakan laik konsumsi**	**50%**
		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	*Jumlah Pemberian Izin Apotek,Toko Obat,Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional*	55%
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	100%
		Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	*Jumlah Pengendalian dan Pengawasan Penerbitan Sertifikast Produksi Pangan Indutri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yan Dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga*	77%

Sasaran	Indikator Kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	100%
		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	*Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)*	100%
		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	100%
		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	*Jumlah Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Sarana Produksi Makanan Minuman Industri Rumah Tangga Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan*	**97%**
		Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan dan Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan	100%

Sasaran	Indikator Kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan
			Post Market dalam Rangka Tindak Lanjut Pengawasan	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	**Persentase masyarakat memiliki tingkat pengetahuan baik tentang perilaku kesehatan**	**50%**
		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi*	67%
		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	100%
		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat*	75%
		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	75%
		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat	53%
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM*	75%
		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	25%

Sasaran	Indikator Kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**92.30%**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun**	**100%**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Laporan barang milik daerah pada perangkat daerah	**100%**
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	**100%**
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100%

Sasaran	Indikator Kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**95%**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	71%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	79%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan**	**80%**
	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	63%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100%

Sasaran	Indikator Kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpelihara**	**90%**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	67%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100%

2.2) Sasaran 2 : Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Prestasi Kepemudaan

Pencapaian sasaran ini didukung dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan Urusan Pendidikan, Urusan Perpustakaan dan Urusan Kepemudaan dan Olahraga untuk mewujudkan tercapainya target indikator yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai berikut :

Sasaran RPD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	2024			Kategori Pencapaian	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Capaian		
Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Prestasi Kepemudaan	a. Indeks Pendidikan	Indeks	0,64	0,64	100%	Tercapai	Dinas Pendidikan Dinas Arsipus
	b. Jumlah Pemuda Berprestasi	Orang	70	72	102,86%	Tercapai	Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata

Sasaran RPD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	2024			Kategori Pencapaian	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Capaian		
Rata-rata capaian kinerja					**101,43%**	**Tercapai**	

Sumber data : LKPJ Kab Nganjuk TA 2024

a. Indeks Pendidikan

Realisasi indikator sasaran "Indeks Pendidikan" pada tahun 2024 sebesar 0,64 atau 100% dari target yang ditetapkan sebesar 0,64 sehingga predikat pencapaian sasaran berdasarkan skala ordinal termasuk dalam kategori "tercapai". Dalam proses pengendalian dan evaluasi, Dinas Pendidikan melakukan perbaikan capaian tujuan final kepada Bappeda dikarenakan indeks pendidikan tidak dapat dinilai dari prespektif perangkat daerah sehingga diperbaiki sebagaimana berikut :

No	Tujuan	Indikator	Data Capaian Tahun Awal	Target Akhir Periode Renstra	Sasaran	Indikator	Data Capaian Tahun Awal	Target		
			2022	2026			2022	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatkan kualitas pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	13,07 Tahun	13,10 Tahun	Pemerataan Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	1. Angka Partisipasi Sekolah				
						✓ PAUD	97,73	99,00	99,50	99,75
						✓ SD/Sederajat	98,48	99,00	99,25	99,75
		Rata-rata Lama Sekolah	8,12 Tahun	8,15 Tahun		✓ SMP/Sederajat	99,97	99,99	99,99	99,99
						2. Nilai Literasi				
						✓ SD	1,84	1,87	1,88	1,89
						✓ SMP	1,87	1,90	1,91	1,92
						3. Nilai Numerasi				
						✓ SD	1,63	1,66	1,67	1,68
						✓ SMP	1,73	1,76	1,77	1,78
						4. Angka Kelulusan :				
						✓ SD/Sederajat	100,00	100,00	100,00	100,00
						✓ SMP/Sederajat	99,87	99,75	100,00	100,00
						5. Angka Putus Sekolah				
						✓ SD/Sederajat	0,00	0,00	0,00	0,00
						✓ SMP/Sederajat	0,00	0,00	0,00	0,00

Berdasarkan pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa dalam mencapai tujuan bidang pendidikan di Kabupaten Nganjuk, dibutuhkan sebuah indikator pengukuran tujuan yaitu angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Keduanya merupakan indikator kinerja yang diperuntukkan untuk mengukur indeks pendidikan di Kabupaten Nganjuk. Secara mekanisme analisa data, Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk tidak mengukur secara langsung indikator tersebut. Namun demi mewujudkan capaian indikator tersebut, dibutuhkan kontribusi perhitungan indikator-indikator kinerja utama Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk melalui indikator-indikator kinerja sasaran Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk. Realisasi kinerja adalah sebagaimana berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Capaian (%)
1.	Tujuan : Meningkatkan kualitas pendidikan	1. Angka Harapan Lama Sekolah		13,18	
		2. Rata-rata Lama Sekolah		8,25	
2.	Sasaran : Pemerataan Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	1. Angka Partisipasi Sekolah			
		✓ PAUD	99,00	91,67	92,60
		✓ SD/Sederajat	99,00	92,28	93,22
		✓ SMP/Sederajat	99,99	93,70	93,71
		2. Nilai Literasi			
		✓ SD	1,87 (Mencapai Kompetensi Minimum)	81,87 (Mencapai Kompetensi Minimum)	100,00
		✓ SMP	1,90 (Mencapai Kompetensi Minimum)	84,94% (Mencapai Kompetensi Minimum)	100,00
		3. Nilai Numerasi			
		✓ SD	1,66 (Dibawah Kompetensi Minimum)	73,88% (Mencapai Kompetensi Minimum)	100,00
		✓ SMP	1,76 (Dibawah Kompetensi Minimum)	81,79% (Mencapai Kempetensi Minimum)	100,00
		4. Angka Kelulusan			
		✓ SD/Sederajat	100,00	100,00	100,00
		✓ SMP/Sederajat	99,75	100,00	100,25
		5. Angka Putus Sekolah			
		✓ SD/Sederajat	0,00	0,20	99,80
		✓ SMP/Sederajat	0,00	1,41	98,59

Sedangkan penjabaran dalam pencapaian keberhasilan program pada indeks pendidikan adalah sebagaimana tabel berikut :

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Keterangan	Faktor Penghambat	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Dinas Pendidikan								
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Dinas Pendidikan	Nilai	83,85	81,65	97,38	Berita Acara Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Secara Tepat Waktu	Dokumen	7	7	100,00	1. Renja Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 2. Perubahan Renja Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 4. Rencana Aksi Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 5. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas		

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Keterangan	Faktor Penghambat	Upaya Mengatasi Permasalahan
							Pendidikan Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 6. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Nganjuk Tahun 2024 7. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk Tahun 2024		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	3	100,00	1. Renja Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 2. Perubahan Renja Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	Penyusunan Target kinerja disebabkan karena perbedaan meta data pada rapor pendidikan pada tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya	Menyusun Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	10	10	100,00	Dokumen RKA Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024	Penyesuaian anggaran dengan output kinerja pada Renja Dinas Pendidikan Kab. Nganjuk dengan KUA-PPAS	Melaksanakan refocussing terhadap Rancangan Awal Renja Dinas Pendidikan Kab.Nganjuk

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Keterangan	Faktor Penghambat	Upaya Mengatasi Permasalahan
								Terdapat kesalahan Kode rekening belanja pada sub kegiatan	Melaksanakan verifikasi dan validasi secara berkala terhadap dokumen penganggaran yang diusulkan
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	10	10	100,00	Dokumen Perubahan RKA Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024	Penyesuaian anggaran dengan output kinerja pada Renja Dinas Pendidikan Kab. Nganjuk dengan KUA-PPAS	Melaksanakan refocussing terhadap Rancangan Awal Renja Dinas Pendidikan Kab.Nganjuk
								Terdapat kesalahan Kode rekening belanja pada sub kegiatan	Melaksanakan verifikasi dan validasi secara berkala terhadap dokumen penganggaran yang diusulkan
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3	3	100,00	1. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 2. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Nganjuk Tahun 2024 3. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	Terdapat Rekomendasi dai Menpan RB terkait implementasi SAKIP bahwa terdapat perubahan yang cukup signifikan terhadap penetapan sasaran dan	Menyusun Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Keterangan	Faktor Penghambat	Upaya Mengatasi Permasalahan
							(LKjIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk Tahun 2024	IKU. Sehingga berpengaruh pada penyusunan dokumen evaluasi dan pelaporan	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan yang Disusun Secara Tepat Waktu	Dokumen	100	100	100,00	Screenshot Rekapitulasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Aplikasi SIPD		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	8228	8228	100,00	Daftar Rekapitulasi Gaji dan Tunjangan ASN		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2	2	100,00	1. Laporan Keuangan Perangkat Daerah (LKPD) 2. Laporan Ikhtisar Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2024		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	2	2	100,00	1. Buku Kas Umum SKPD Tahun 2024 2. Laporan Pertanggungjawaban SKPD (SPJ Fungsional)		

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Keterangan	Faktor Penghambat	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah yang Disusun Secara Tepat Waktu	Dokumen	5	5	100,00	1. Laporan Verifikasi Persediaan Tahun 2024 2. Laporan Rekonsiliasi Aset per Triwulan 3. Laporan Aset Belanja Modal dan Persediaan 4. Buku Inventaris Tahun 2024 5. Laporan Stock Opname Tahun 2024		
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	2	100,00	1. Laporan Verifikasi Persediaan Tahun 2024 2. Laporan Rekonsiliasi Aset per Triwulan	Keterlambatan pelaksanaan rekonsilisasi dengan lembaga dikarenakan menunggu data dari Dana BOS.	Rekonsiliasi dilaksanakan per semester
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Disusun Secara Tepat Waktu	Dokumen	80	80	100,00			
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	10	10	100,00	Dokumen SPJ Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi		

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Keterangan	Faktor Penghambat	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	200	200	100,00	Dokumen SPJ Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kurangnya pengetahuan pegawai terkait kedisiplinan pegawaian, leadership, pengetahuan pengadaan barang jasa.	Melaksanakan Bimtek terkait kedisiplinan pegawaian, leadership, pengetahuan pengadaan barang jasa.
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dan Jenis Barang Administrasi Umum yang Tersedia	Jenis Barang	5000	5000	100,00			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6	6	100,00	Dokumen SPJ Pengadaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tidak terjadi permasalahan	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	86	86	100,00	Dokumen SPJ Pengadaan Peralataan Rumah Tangga	Tidak terjadi permasalahan	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	27	27	100,00	Dokumen SPJ Pengadaan Bahan Logistik Kantor	Tidak terjadi permasalahan	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	500	500	100,00	Dokumen SPJ Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tidak terjadi permasalahan	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	15	25	166,67	Dokumen SPJ Pengadaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Banykanya kegiatan yang perlu	Penambahan Anggaran di PAK

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Keterangan	Faktor Penghambat	Upaya Mengatasi Permasalahan
								dipublikasikan ke masyarakat	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	226	226	100,00	Laporan Perjalanan Dinas	Banyaknya udangan ke luar daerah	Menyeleksi unangan yang urgent atao dengan penambahan Anggaran di PAK
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	5000	0	0,00	-	-	-
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dan Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan	Jenis Barang	42	42	100,00			
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	18	18	100,00	Dokumen SPJ Pengadaan Mebel	Tidak terjadi permasalahan	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	126	126	100,00	Dokumen SPJ Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tidak terjadi permasalahan	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Pemerintah Daerah yang Dibayarkan dengan Tepat Waktu	Jasa	6	6	100,00			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	100,00	Dokumen SPJ Pengadaan Jasa Surat Menyurat	Tidak terjadi permasalahan	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100,00	Dokumen SPJ Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tidak terjadi permasalahan	

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Keterangan	Faktor Penghambat	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	2	2	100,00	Dokumen SPJ Pengadaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tidak terjadi permasalahan	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dan Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam Kondisi Baik	Jenis Barang	100	100	100,00			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	5	5	100,00	Dokumen SPJ Pengadaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tidak terjadi permasalahan	
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	20	20	100,00	Dokumen SPJ Pemeliharaan Mebel	Tidak terjadi permasalahan	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	379	356	93,93	Dokumen SPJ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Beberapa peralatam dan mesin kondisnya masih baik	Efisiensi dana
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	2	100,00	Dokumen SPJ Pengadaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tidak terjadi permasalahan	

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Keterangan	Faktor Penghambat	Upaya Mengatasi Permasalahan
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Murni PAUD (Anak Usia 5-6 Tahun)	%	87	83,23	95,67	Rapor Pendidikan Kabupaten Nganjuk Tahun 2024		
		Proporsi Peserta Didik dengan Kemampuan Numerasi Cakap pada SD	%	34,47	57,21	165,97			
		Nilai Karakter Peserta Didik dengan Kemampuan Karakter Berkembang pada SD	%	2,14	60,66	2834,58			
		Prosentase Satuan Pendidikan PAUD Minimal Akreditasi ≥B	%	37,8	63,89	169,02			
		Proporsi Peserta Didik dengan Kemampuan Literasi Cakap pada SMP	%	52,75	50,57	95,87			
		Angka Partisipasi Murni Kesetaraan (Anak 7-18 Tahun)	%	94,08	12,41	13,19			
		Proporsi Peserta Didik dengan Kemampuan Numerasi Cakap pada SMP	%	36,53	32,89	90,04			
		Proporsi Peserta Didik dengan Kemampuan Literasi Cakap pada SD	%	59,87	61,75	103,14			
		Proporsi Peserta Didik dengan Kemampuan Karakter Berkembang pada SMP	Nilai	2,15	55,19	2566,98			
		Angka Partisipasi Murni Pendidikan Dasar (Anak Usia 7-15 Tahun)	%	87,58	92,08	105,14			
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Prosentase Peserta Didik dengan Kemampuan Numerasi Perlu Intervensi Khusus Jenjang SD	%	12,8	4,89	38,20	Rapor Pendidikan Kabupaten Nganjuk Tahun 2024		

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Keterangan	Faktor Penghambat	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Prosentase Peserta Didik dengan Kemampuan Literasi Perlu Intervensi Khusus Jenjang SD	%	8,65	4,09	47,28			
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	18	18	100,00	Berita Acara Serah Terima Kegiatan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Tidak terjadi permasalahan	
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	37	37	100,00	Berita Acara Serah Terima Kegiatan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Tidak terjadi permasalahan	
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	30	30	100,00	Berita Acara Serah Terima Kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Tidak terjadi permasalahan	
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	10	10	100,00	Berita Acara Serah Terima Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Tidak terjadi permasalahan	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	28	28	100,00	Berita Acara Serah Terima Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Tidak terjadi permasalahan	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	2	2	100,00	Berita Acara Serah Terima Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang	Tidak terjadi permasalahan	

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Keterangan	Faktor Penghambat	Upaya Mengatasi Permasalahan
							Unit Kesehatan Sekolah		
	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	8	8	100,00	Berita Acara Serah Terima Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Tidak terjadi permasalahan	
	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	Paket	291	291	100,00	Berita Acara Serah Terima Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah	Tidak terjadi permasalahan	
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	66	66	100,00	Berita Acara Serah Terima Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Tidak terjadi permasalahan	
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	1120	1120	100,00	Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik		
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	605	605	100,00	Berita Acara Serah Terima Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	574	574	100,00	Berita Acara Serah Terima Kegiatan Pembinaan		

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Keterangan	Faktor Penghambat	Upaya Mengatasi Permasalahan
							Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	574	574	100,00	SPB (Surat Pengesahan Belanja) Dana BOSP SD		
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Orang	585	585	100,00	Dokumen SPJ Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		
	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	Ruang	40	40	100,00	Berita Acara Serah Terima Kegiatan Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Tidak terjadi permasalahan	
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket	66350	66350	100,00	Berita Acara Serah Terima Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik		
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	7	7	100,00	Berita Acara Serah Terima Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru	Tidak terjadi permasalahan	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	30	30	100,00	Berita Acara Serah Terima Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Tidak terjadi permasalahan	
	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Satuan Pendidikan	605	605	100,00	Berita Acara Serah Terima Kegiatan Penyelenggaraan		

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Keterangan	Faktor Penghambat	Upaya Mengatasi Permasalahan
							Proses Belajar Bagi Peserta Didik		
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	245	245	100,00	Berita Acara Serah Terima Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Pengesahan DPPA (PAK) waktunya terlalu mepet sehingga berdampak pada jangka waktu pelaksanaan pekerjaan menjadi lebih pendek	Menambah tenaga kerja untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan dan lembur
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Prosentase Peserta Didik dengan Kemampuan Literasi Perlu Intervensi Khusus Jenjang SMP	%	9,50	3,47	36,53	Rapor Pendidikan Kabupaten Nganjuk Tahun 2024		
		Prosentase Peserta Didik dengan Kemampuan Numerasi Perlu Intervensi Khusus Jenjang SMP	%	5,76	3,82	66,32			
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	1	1	100,00	Berita Acara Serah Terima Kegiatan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Tidak terjadi permasalahan	
	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Ruang	3	3	100,00	Berita Acara Serah Terima Kegiatan Pembangunan Laboratorium	Tidak terjadi permasalahan	

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Keterangan	Faktor Penghambat	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	48	48	100,00	Berita Acara Serah Terima Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Tidak terjadi permasalahan	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	2	2	100,00	Berita Acara Serah Terima Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Tidak terjadi permasalahan	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	6	6	100,00	Berita Acara Serah Terima Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Tidak terjadi permasalahan	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Ruang	2	2	100,00	Berita Acara Serah Terima Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Tidak terjadi permasalahan	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	7	7	100,00	Berita Acara Serah Terima Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Tidak terjadi permasalahan	
	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	20	20	100,00	Berita Acara Serah Terima Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah	Tidak terjadi permasalahan	
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	4	4	100,00	Berita Acara Serah Terima Kegiatan	Tidak terjadi permasalahan	

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Keterangan	Faktor Penghambat	Upaya Mengatasi Permasalahan
							Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	1268	1078	85,02	Berita Acara Serah Terima Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	35179	29199	83,00	Berita Acara Serah Terima Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Satuan Pendidikan	90	90	100,00	Berita Acara Serah Terima Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Beberapa lembaga belum memahami tindak lanjut dari Rapor Pendidikan untuk dianggarkan pada RKAS BOSP	Melaksanakan Bimtek Perencanaan Berbasis Data
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	89	89	100,00	SPB (Surat Pengesahan Belanja) Dana BOSP SMP	Ada beberapa lembaga yang terlambat dalam pelaporan BOSP	Melaksanakan pembinaan/pendampingan secara intensif

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Keterangan	Faktor Penghambat	Upaya Mengatasi Permasalahan
								dikarenakan adanya pergantian Tim BOSP	
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Orang	90	90	100,00	Berita Acara Serah Terima Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	4	4	100,00	Berita Acara Serah Terima Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Tidak terjadi permasalahan	
	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Satuan Pendidikan	35179	29902	85,00	Berita Acara Serah Terima Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik		
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	2	2	100,00	Berita Acara Serah Terima Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru	Tidak terjadi permasalahan	
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket	27021	27021	100,00	Berita Acara Serah Terima Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik		
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	8	8	100,00	Berita Acara Serah Terima Kegiatan Rehabilitasi	Tidak terjadi permasalahan	

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Keterangan	Faktor Penghambat	Upaya Mengatasi Permasalahan
							Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Prosentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang Memiliki Akreditasi Minimal ≥ B	Lembaga	605	715	118,18	Jumlah Satuan Pendidikan Akreditasi Minimal B	Adanya penambahan kuota lembaga terakreditasi dari kemendikbud dalam katagori akreditasi sampling acak	Memotivasi dan melakukan pendampingan pada lembaga yang terdaftar sebagai lembaga akreditasi sampling acak karena lembaga siap tidak siap harus dilakukan proses akreditasi karena sudah ditentukan secara acak oleh pusat
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	Unit	4	4	100,00	Berita Acara Serah Terima Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Keterlambatan proses pencairan namun pelaksanaan rehab gedung sudah selesai dilaksanakan	Penerbitan SK penerima hibah disiapkan lebih awal
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	1	1	100,00	Berita Acara Serah Terima Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Keterlambatan proses pencairan namun pelaksanaan rehab gedung sudah selesai dilaksanakan	Penerbitan SK penerima hibah disiapkan lebih awal
	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	Paket	3	3	100,00	Berita Acara Serah Terima Kegiatan		

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Keterangan	Faktor Penghambat	Upaya Mengatasi Permasalahan
							Pengadaan Mebel PAUD		
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	Paket	5	5	100,00	Berita Acara Serah Terima Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Tidak terjadi permasalahan	
	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	Peserta Didik	2308	3092	133,97	Berita Acara Serah Terima Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Melebihi target karena ada tambahan anggaran dana PAK	
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	1136	1137	100,09	Berita Acara Serah Terima Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD		
	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	1136	1108	97,54	SPB (Surat Pengesahan Belanja) Dana BOP PAUD	Ada lembaga yang menyatakan penolakan Dana BOP di Aplikasi Dapodik, dan ada Lembaga yang mengembalikan dana BOP ditengah layanan kegiatan pembelajaran,	Menindaklanjuti dengan membuat STS pengembalian dana BOP, serta melakukan reviu ke Inspektorat dan laporan ke BPKAD Nganjuk

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Keterangan	Faktor Penghambat	Upaya Mengatasi Permasalahan
								karena mengalami penutupan lembaga oleh yayasan, sebab siswanya keluar	
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	Orang	400	400	100,00	Berita Acara Serah Terima Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD		
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	20	20	100,00	Berita Acara Serah Terima Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	1	1	100,00	Berita Acara Serah Terima Kegiatan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	2	2	100,00	Berita Acara Serah Terima Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru		
	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	1	1	100,00	Berita Acara Serah Terima Kegiatan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)		

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Keterangan	Faktor Penghambat	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket	1630	1630	100,00	Berita Acara Serah Terima Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik		
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Prosentase Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Memiliki Akreditasi Minimal ≥ B	Lembaga	8	8	100,00	Jumlah Satuan Pendidikan Akreditasi Minimal B	Adanya penambahan kuota lembaga terakreditasi dari kemendikbud dalam kategori akreditasi sampling acak	Melakukan pendampingan yang terkena kategori sapiling acak
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	35	35	100,00	Sertifikat Bimbingan Teknis Pengarusutamaan Gender (PUG)	Ada LKP yang masuk dalam Ditjen Vokasi dan Kemenaker kenyataannya masih dalam naungan Disdik Kabupaten yang akhirnya memicu kerancuan dalam penerbitan Ijin Operasional lembaga	Koordinasi dengan seksi yang menangani perijinan

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Keterangan	Faktor Penghambat	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	31	31	100,00	SPB (Surat Pengesahan Belanja) Dana BOP Kesetaraan		
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Orang	11	11	100,00	Berita Acara Serah Terima Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan		
	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Peserta Didik	35	35	100,00	Berita Acara Serah Terima Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Kurangnya sarana dan prasarana TIK di satuan pendidikan yang menyebabkan tujuan proses pembelajaran kurang maksimal	Selalu koordinasi dan pendampingan ke lembaga dan memotivasi lembaga
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio Ideal Pendidik dan Tenaga Kependidikan terhadap Peserta Didik pada Jenjang PAUD	Guru : Peserta Didik	1:10	1:9	98,57	Jumlah Guru dan Peserta Didik		
		Rasio Ideal Pendidik dan Tenaga Kependidikan terhadap Peserta Didik pada Jenjang Sekolah Dasar	Guru : Peserta Didik	1:14	1:12	97,30			
		Rasio Ideal Pendidik dan Tenaga Kependidikan terhadap	Guru : Peserta Didik	1:14	1 : 14	100,00			

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Keterangan	Faktor Penghambat	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Peserta Didik pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama							
		Rasio Ideal Pendidik dan Tenaga Kependidikan terhadap Peserta Didik pada Jenjang Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Guru : Peserta Didik	1:14	1 : 11	95,95			
	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Prosentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Memiliki Kualifikasi Linier pada Jenjang Pendidikan Dasar	%	85,00	85,00	100,00			
		Prosentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Memiliki Kualifikasi Linier pada Jenjang Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	%	93,00	93,00	100,00			
		Prosentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Memiliki Kualifikasi S-1 Linier pada Jenjang PAUD	%	96,00	96,00	100,00			
	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dokumen	420	420	100,00	Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Satuan Pendidikan	Keterlambatan dalam penyusunan SK Penetapan Hibah Tambahan Kesejahteraan Guru PAUD	Melaksanakan verifikasi dan validasi data pada awal tahun

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Keterangan	Faktor Penghambat	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Laporan	5300	5300	100,00	Jumlah SK PPPK Tahun 2024		
	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Prosentase Izin Operasional Satuan Pendidikan yang Masih Aktif	%	80 %	80 %	100,00			
	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Izin Operasional Satuan Pendidikan Dasar Swasta yang Masih Aktif	Lembaga	87	87	100,00			
	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	4	4	100,00	Dokumen Perizinan Satuan Pendidikan Swasta	Dengan diterapkannya Pelayanan Perizinan melalui Si-Pentol, lembaga mengalami kesulitan dalam proses pengajuan perpanjangan izin operasional	Melaksanakan sosialisasi prosedur perizinan melalui Si-Pentol dan menghimbau lembaga swasta untuk segera mengajukan perpanjangan Izin operasional
	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan	Jumlah Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan	Lembaga	1123	1123	100,00			

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Keterangan	Faktor Penghambat	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Nonformal Swasta yang Masih Aktif							
	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	600	917	152,83	Dokumen Perizinan Satuan Pendidikan Swasta		

b. Jumlah Pemuda Berprestasi

Realisasi indikator sasaran "Jumlah Pemuda Berprestasi" pada tahun 2024 sebesar 72 atau 102,86% dari target yang ditetapkan sebesar 70 sehingga predikat pencapaian sasaran berdasarkan skala ordinal termasuk dalam kategori "tercapai". Terkait dengan analisa program dan kegiatan yang mendukung capaian jumlah pemuda yang berprestasi adalah sebagai berikut :

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Subkegiatan (output)	Target 2024	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Capaian %
1.	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**					
1.1	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Presentase organisasi kepemudaan yang aktif**	**83,50**	**%**	**88.24**	**105,68**
	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	**Jumlah pemuda yang ditingkatkan kapasitasnya**	**195**	**orang**	**280**	**143,59**
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	20	orang	20	**100**
	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan	140	orang	83	**59,29**
	Pemberdayaan dan pengembangan Organisasi Kepemudaan Kab/Kota	**Jumlah organisasi kepemudaan yang diberdayakan dan dikembangkan**	100	orang	41	**41**
	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kab/Kota	Jumlah pemuda dan organisasi kepemudaan yang	100	orang	100	**100**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Subkegiatan (output)	Target 2024	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Capaian %
		ditingkatkan kapasitasnya				
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	**Presentase anggota pramuka yang terlatih**	**76,25**	**%**	**0.048**	**0.063**
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	**Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya**	**1**	**organisasi**	1	**100**
	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	1	Organisasi	1	**100**
1.2	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Jumlah cabang olahraga yang berprestasi**	**21**	**cabor**	**21**	**100**
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kab/Kota	**Jumlah event olahraga**	**5**	**event**	**5**	100
	Penyelenggaraan kejuaraan olahraga multi event dan single event tingkat Kab/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan	5	Dokumen	5	100
	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	35	orang	84	240
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	**Jumlah pengembangan organisasi keolahragaan**	**1**	**organisasi**	3	300
	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	1	Dokumen	1	100

Analisis faktor pendorong dan faktor penghambat pencapaian program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Porabudpar Kab. Nganjuk disajikan dalam tabel berikut :

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan	Faktor Pendorong Keberhasilan	Faktor Penghambat
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
1	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**		
	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota		
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	1. Tingginya tingkat parti-sipasi /keikutsertaan pemuda dalam mengi kuti Seleksi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten ; 2. Kualitas SDM yang mumpuni; 3. Peran Serta Masyara kat dalam mendukung Program Kepeloporan; 4. Dukungan Pemerintah baik di tingkat Desa, Kec, dan Kabupaten.	
	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	1. Banyaknya Prestasi Pemuda dan Organi-sasi Kepemudaan; 2. Adanya Event Kejuaraan di tingkat Daerah, Provinsi, dan Nasional; 3. Tingginya tingkat parti-sipasi/keikutsertaan pemuda dalam mengikuti Kegiatan Kejuaraan di tingkat Daerah, Provinsi, dan Nasional.	
2	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**		
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kab/Kota		
	Penyelenggaraan kejuaraan olahraga multi event dan single event tingkat Kab/Kota	1. Terlaksananya Koordinasi yang baik dengan Cabang Olahraga; 2. Tingginya tingkat Partisipasi peserta dalam	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan	Faktor Pendorong Keberhasilan	Faktor Penghambat
		mengikuti kejuaraan olahraga multi event dan single event tingkat Kab/Kota.	
	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	1. Adanya event atau Kejuaraan Olahraga ditingkat Provinsi; 2. Aktifnya Komunikasi antara Cabang Olahraga tingkat Daerah dengan Cabang Olahraga tingkat Provinsi; 3. Kabupaten Nganjuk memiliki Atlet yang berkompeten.	
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga		
	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	1. Ketepatan waktu Administrasi dari Lembaga atau Organisasi Penerima Hibah; 2. Terlaksananya Koordinasi dan Komunikasi yang baik antara Pengampu Hibah dan Penerima Hibah.	
3	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**		
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan		
	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	1. Ketepatan waktu Administrasi dari Lembaga atau Organisasi Penerima Hibah; 2. Terlaksananya Koordinasi dan Komunikasi yang abaik antara Pengampu Hibah dan Penerima Hibah.	

2.3) Sasaran 3 : Meningkatkan Keadilan dan Kesetaraan Gender

Pencapaian sasaran ini didukung dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mewujudkan tercapainya target indikator yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai berikut :

Sasaran RPD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	2024			Kategori Pencapaian	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Capaian		
Meningkatkan Keadilan dan Kesetaraan Gender	a. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	93.97	94.75 (BPS 2023)	100.83%	Tercapai	Dinas Sosial PPPA

Sumber data : LKPJ Kab Nganjuk TA 2024

a. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Realisasi indikator sasaran "Indeks Pembangunan Gender (IPG)" pada tahun 2023 sebesar 94,75 atau 100,83% dari target yang ditetapkan sebesar 93,97 sehingga predikat pencapaian sasaran berdasarkan skala ordinal termasuk dalam kategori "tercapai". Per tanggal 31 Maret 2025, Indeks Pembangunan Gender Tahun 2024 belum dirilis oleh BPS.

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran "Meningkatkan Kesetaraan dan Keadilan Gender" sebagai berikut :

Persentase Lembaga Pemerintah yang Telah Melaksanakan Pengarusutamaan Gender

- Jumlah Lembaga Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 — 52 Lembaga
- Jumlah Lembaga Pemerintah yang Telah Melaksanakan Pengarusutamaan Gender Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 — 52 Lembaga
- Target Renstra Tahun 2024 — 33,33 %
- Persentase Lembaga Pemerintah yang Telah Melaksanakan Pengarusutamaan Gender Tahun 2024 — 100 %

(∑ Lembaga Pemerintah Kabupaten Nganjuk / ∑ Lembaga Pemerintah yang Telah Melaksanakan Pengarusutamaan Gender x 100%)

- Capaian kinerja indikator Tahun 2024 — 300,03 %

Capaian Kinerja indikator ini sebesar 300,03% masuk dalam katagori tercapai dari target yang ditentukan sebesar 33,33%. Sedangkan Indikator Tahun 2023 "Persentase ASN Perempuan yang Menduduki Jabatan Struktural Meningkat", diuraikan sebagai berikut:

- Jumlah ASN se Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 — 7.550 orang
- Jumlah ASN Perempuan se Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 — 4.341 orang
- Jumlah ASN Laki-Laki se Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 — 3.209 orang
- Jumlah Jabatan Struktural yang ada Tahun 2023 — 369 jabatan

- Jumlah ASN perempuan se Kabupaten Nganjuk yang menduduki jabatan struktural Tahun 2023 — 130 orang
- Target Renstra Tahun 2023 — 45 %
- Persentase ASN perempuan yang menduduki jabatan struktural Tahun 2023 — 35 %

(∑ ASN Perempuan yang menduduki jabatan struktural / ∑ Jabatan Struktural yang ada x 100%)

- Capaian kinerja indikator Tahun 2023 — 77,77 %

Capaian Kinerja indikator ini sebesar 77,77% masuk dalam katagori tercapai dari target yang ditentukan sebesar 45%.

Kode Rekening	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		21,746,324,150	20,440,814,459	1,305,509,691	94.00%
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1,273,496,900	1,204,961,417	68,535,483	94.62%
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	340,860,000	308,574,000	32,286,000	90.53%
2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	63,500,000	53,910,000	9,590,000	84.90%
2.08.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	7,200,000	3,732,000	3,468,000	51.83%
2.08.02.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	15,650,000	15,233,000	417,000	97.34%

Kode Rekening	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
2.08.02.2.01.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	34,650,000	29,162,000	5,488,000	84.16%
2.08.02.2.01.0004	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	6,000,000	5,783,000	217,000	96.38%
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	18,200,000	18,078,000	122,000	99.33%
2.08.02.2.02.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	8,200,000	8,160,000	40,000	99.51%
2.08.02.2.02.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	10,000,000	9,918,000	82,000	99.18%
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	259,160,000	236,586,000	22,574,000	91.29%
2.08.02.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	9,500,000	9,433,000	67,000	99.29%
2.08.02.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga	241,660,000	219,153,000	22,507,000	90.69%

Kode Rekening	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
	Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				
2.08.02.2.03.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	8,000,000	8,000,000	-	100.00%
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	222,826,800	209,186,000	13,640,800	93.88%
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	150,000,000	150,000,000	-	100.00%
2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	150,000,000	150,000,000	-	100.00%
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	72,826,800	59,186,000	13,640,800	81.27%
2.08.03.2.03.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	72,826,800	59,186,000	13,640,800	81.27%
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN	145,971,050	144,329,238	1,641,812	98.88%

Kode Rekening	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
	KUALITAS KELUARGA				
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	55,899,700	55,246,094	653,606	98.83%
2.08.04.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	9,857,500	9,592,000	265,500	97.31%
2.08.04.2.01.0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	36,041,700	35,966,094	75,606	99.79%
2.08.04.2.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10,000,500	9,688,000	312,500	96.88%
2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	29,931,500	29,144,000	787,500	97.37%
2.08.04.2.02.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas	9,986,500	9,674,000	312,500	96.87%

Kode Rekening	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
	Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
2.08.04.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	9,972,500	9,510,000	462,500	95.36%
2.08.04.2.02.0003	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	9,972,500	9,960,000	12,500	99.87%
2.08.04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	60,139,850	59,939,144	200,706	99.67%
2.08.04.2.03.0001	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	60,139,850	59,939,144	200,706	99.67%
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	18,530,000	17,684,394	845,606	95.44%
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	18,530,000	17,684,394	845,606	95.44%

Kode Rekening	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	11,000,000	10,943,394	56,606	99.49%
2.08.05.2.01.0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	7,530,000	6,741,000	789,000	89.52%
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	372,324,650	356,207,194	16,117,456	95.67%
2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	372,324,650	356,207,194	16,117,456	95.67%
2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	110,729,800	101,062,000	9,667,800	91.27%
2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	261,594,850	255,145,194	6,449,656	97.53%
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	172,984,400	168,980,591	4,003,809	97.69%
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak	6,715,700	6,166,000	549,700	91.81%

Kode Rekening	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
	Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				
2.08.07.2.01.0005	Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota	6,715,700	6,166,000	549,700	91.81%
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	73,467,500	70,369,591	3,097,909	95.78%
2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	68,731,400	66,569,591	2,161,809	96.85%
2.08.07.2.02.0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	4,736,100	3,800,000	936,100	80.23%
2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	92,801,200	92,445,000	356,200	99.62%
2.08.07.2.03.0005	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	92,801,200	92,445,000	356,200	99.62%
Jumlah		**21,746,324,150**	**20,440,814,459**	**1,305,509,691**	**94.00%**

3) "Nganjuk Akuntabel"

Tujuan : Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik

Indikator Tujuan : Indeks Reformasi Birokrasi

3.1) Sasaran 1 : Meningkatkan birokrasi yang akuntabel dan efektif, serta pelayanan publik yang prima

Sasaran RPD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	2024			Kategori Pencapaian	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Capaian		
Meningkatkan Birokrasi yang Akuntabel dan Efektif, Serta Pelayanan Publik yang Prima	a. Nilai SAKIP	Nilai	69,25	70,07	101,18%	Tercapai	Sekretariat Daerah Bappeda
	b. Opini BPK Terhadap LKPD	Opini	WTP	WTP (Data 20223)	100%	Tercapai	BPKAD
	c. Nilai Maturitas APIP	Nilai	3,150	3,862	122,60%	Tercapai	Inspektorat Daerah
	d. Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3,50	4,57	130,57%	Tercapai	Sekretariat Daerah Bappeda RSD Dinas Dukcapil Dinas Sosial PPPA Kecamatan

Sumber data : LKPJ Kab Nganjuk TA 2024

a. Nilai SAKIP

Realisasi indikator sasaran "Nilai SAKIP" pada tahun 2024 sebesar 70,07 atau 101.18% dari target yang ditetapkan sebesar 69,25 sehingga predikat pencapaian sasaran berdasarkan skala ordinal termasuk dalam kategori "tercapai".

Pada tahun 2024, kinerja Sekretariat Daerah diwujudkan melalui pencapaian 2 (dua) sasaran strategis, yang disinergikan dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung masing-masing sasaran. Keberhasilan program/kegiatan tersebut, selanjutnya akan dianalisis dengan membandingkan capaian kinerja tiap sasaran dengan capaian kinerja program/kegiatan yang mendukung, sebagaimana tabel di bawah ini :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama				Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan			
		Uraian	T	R	%		Uraian	T	R	%
	Tujuan :									
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	69,25	70,07	101,84%					
	Sasaran :									
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	3,5	4,57	130,57%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah	85,8	82,75	96,44%
						Penataan Organisasi	Persentase Perangkat Daerah yang tepat ukuran dan tepat fungsi (right sizing)	100%	100%	100%
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Bobot Aspek Perencanaan SAKIP	26%	24%	92,30%
						Administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13 laporan	13 laporan	100%
						Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Pegawai Dengan Tingkat Disiplin Kategori Baik	145 orang	145 Orang	100%
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase BMD Sekretariat Daerah yang dikelola dengan baik	100%	100%	100%
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	207 Unit	206 Unit	99,51%
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	48 Laporan	48 Laporan	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama				Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan			
		Uraian	T	R	%		Uraian	T	R	%
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	303 Unit	303 Unit	85,47%
						Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Laporan	9 Laporan	75%
						Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Dokumen Laporan Keprotokolan, Komunikasi Pimpinan dan Pendokumentasian Tugas Pimpinan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Nilai EKPPD	100%	100%	100%	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Rumusan Kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Kesra yang terimplementasi	100%	100%	100%
						Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase laporan SPM, LPPD, LKPJ, AMJ yang tepat waktu dan subtansi sesuai ketentuan	100%	100%	100%
						Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase rumusan kebijakan bidang kesra yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
						Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Rancangan Produk Hukum yang diharmonisasi dan difasilitasi	100%	100%	100%
						Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase rumusan kebijakan di bidang perekonomian dan pembangunan yang terimplementasi	100%	100%	100%
						Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	persentase BUMD yang sehat dan persentase BLUD mandiri	69%	-	0%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama				Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan			
		Uraian	T	R	%		Uraian	T	R	%
						Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase rekomendasi hasil evaluasi program pembangunan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
						Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Level maturitas UKPBJ	Level 3	Level 3	100%
						Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase rekomendasi kebijakan bidang SDA yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

b. Opini BPK Terhadap LKPD

Realisasi indikator sasaran "Opini BPK terhadap LKPD" pada tahun 2023 adalah **WTP atau 100,00%** dari target yang ditetapkan yaitu WTP sehingga predikat pencapaian sasaran berdasarkan skala ordinal termasuk dalam kategori "**tercapai".** Per tanggal 31 Maret 2025, Opini BPK terhadap LKPD Tahun 2024 belum dirilis oleh BPK.

1) Program Penyelenggaraan Pengawasan

a) Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Kegiatan pemantauan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan merupakan upaya untuk menyelesaikan tindak lanjut atas rekomendasi yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan, baik pemeriksaan aparat pengawasan internal (Inspektorat Daerah Kabupaten, Inspektorat Provinsi, BPKP, Itjen Kemendagri maupun Itjen Kementerian teknis lainnya) maupun pemeriksaan eksternal (BPK) melalui aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Data Hasil Pengawasan (SIP-WAS) dan Portal BPK https://eauditee.bpk.go.id.

Dari proses penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan tersebut maka bisa dilihat komitmen pimpinan Perangkat Daerah terhadap hasil pemeriksaan dan arti pentingnya kegiatan pemeriksaan bagi peningkatan kinerja Perangkat Daerah. Disamping itu, dengan adanya batasan waktu penyelesaian temuan hasil pemeriksaan BPK yaitu 60 hari kerja setelah LHP diterima, maka perlu dilakukan koordinasi intensif dalam rangka penanganan dan penyelesaian tindak lanjut tersebut sehingga bisa diselesaikan sebelum batas waktu yang ditentukan.

Kegiatan pemantauan tindak lanjut internal APIP dilaksanakan setiap triwulan sedangkan pemantauan tindak lanjut eksternal oleh BPK dilaksanakan setiap semester. Hasil Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Internal APIP tertuang dalam Laporan Evaluasi Berkala Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan APIP Inspekotrat Daerah Kabupaten Nganjuk Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2024 yang terbit setiap triwulan setelah selesainya pelaksanaan kegiatan evaluasi berkala tindak lanjut internal APIP. Sedangkan Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang diterbitkan oleh BPK diterima pemerintah daerah setiap semester setelah kegiatan pembahasan

tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dilaksanakan.

2) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Inspektorat mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan didukung 2 kegiatan dan 6 Sub Kegiatan. Kegiatan/Sub Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan antara lain :

a) Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

- Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan

  Perumusan Teknis di Bidang Pengawasan Tahun 2024 merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk menyusun Program Kerja Tahunan Pengawasan (PKPT) Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 dan 2024. Penyusunan PKPT berbasis risiko bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan APIP berfokus pada program atau kegiatan yang berpotensi memiliki risiko tinggi dan dapat mengidentifikasi risiko apa yang akan terjadi, sehingga program strategis pemerintah daerah dapat terlaksana dengan efektif dan efisien, dan tepat guna. Hasil Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk (PKPT) Tahun 2024 ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/4/K/411.013/2024.

- Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan

  ✓ Klinik Konsultasi Pengawasan

  Klinik Konsultasi merupakan salah satu layanan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk yang berfungsi sebagai media konsultasi antara Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan Objek Pengawasan, meliputi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Perangkat Desa di wilayah Kabupaten Nganjuk, terkait urusan penyelenggaraan Pemerintah Daerah apabila terjadi keragu-raguan, ketidaktahuan dan mengalami permasalahan pelaksanaan. Melalui deteksi dini terjadinya penyimpangan pada pelaksanaan urusan OPD maupun Lembaga Masyarakat dapat diminimalisir. Klinik Konsultasi Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk dilaksanakan

dengan offline maupun online (https://sisultan.nganjukkab.go.id/). Klinik Konsultasi online yang diselenggarakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk tidak hanya menghadirkan Auditor dan PPUPD sebagai narasumber, namun juga menghadirkan narasumber dari dinas terkait dan APH.

c. Nilai Maturitas APIP

Realisasi indikator sasaran "Nilai Maturitas SPIP" pada tahun 2024 sebesar 3,862 atau 122,60% dari target yang ditetapkan sebesar 3,150 sehingga predikat pencapaian sasaran berdasarkan skala ordinal termasuk dalam kategori "tercapai".

Untuk mendukung capaian kinerja tujuan ''Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik Melalui Kualitas Pengawasan'' dengan indikator ''Nilai Maturitas SPIP'', Tahun 2024 Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk menyelenggarakan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.

Bimbingan Teknis / Sosialisasi / Workshop bekerjasama dengan BPKP Perwakilan Jawa Timur kepada APIP dan Perangkat Daerah antara lain :

1. Bimbingan Teknis Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2024 kepada Asesor Pemda dan admin Pemda di BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur di Surabaya Tanggal 5 dan 6 Juni 2024
2. Bimbingan Teknis Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi untuk 50 Asesor Perangkat Daerah dan Asesor Penjamin Kualitas oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur di Ruang Candi Lor Kabupaten Nganjuk Tanggal 12 dan 13 Juni 2024

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
1.	Tujuan : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik Melalui Kualitas Pengawasan	Nilai Maturitas SPIP	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab./Kota	Nilai SAKIP Inspektorat	96,11%
			Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun	89,09%
			Sub Kegiatan :		

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	89,08%

e. Indeks Pelayanan Publik

Realisasi indikator sasaran "Indeks Pelayanan Publik" pada tahun 2024 sebesar 4,57 atau 130,57% dari target yang ditetapkan sebesar 3,50 sehingga predikat pencapaian sasaran berdasarkan skala ordinal termasuk dalam kategori "tercapai".

Pada tahun 2024, kinerja Sekretariat Daerah diwujudkan melalui pencapaian 2 (dua) sasaran strategis, yang disinergikan dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung masing-masing sasaran. Keberhasilan program/kegiatan tersebut, selanjutnya akan dianalisis dengan membandingkan capaian kinerja tiap sasaran dengan capaian kinerja program/kegiatan yang mendukung, sebagaimana tabel di bawah ini :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama				Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan			
		Uraian	T	R	%		Uraian	T	R	%
	Tujuan :									
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	69,25	70,07	101,84%					
	Sasaran :									
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	3,5	4,57	130,57%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah	85,8	82,75	96,44%
						Penataan Organisasi	Persentase Perangkat Daerah yang tepat ukuran dan tepat fungsi (right sizing)	100%	100%	100%
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Bobot Aspek Perencanaan SAKIP	26%	24%	92,30%
						Administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13 laporan	13 laporan	100%
						Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Pegawai Dengan Tingkat Disiplin Kategori Baik	145 orang	145 Orang	100%
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase BMD Sekretariat Daerah yang dikelola dengan baik	100%	100%	100%
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	207 Unit	206 Unit	99,51%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama				Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan			
		Uraian	T	R	%		Uraian	T	R	%
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	48 Laporan	48 Laporan	100%
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	303 Unit	303 Unit	85,47%
						Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Laporan	9 Laporan	75%
						Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Dokumen Laporan Keprotokolan, Komunikasi Pimpinan dan Pendokumentasian Tugas Pimpinan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Nilai EKPPD	100%	100%	100%	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Rumusan Kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Kesra yang terimplementasi	100%	100%	100%
						Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase laporan SPM, LPPD, LKPJ, AMJ yang tepat waktu dan subtansi sesuai ketentuan	100%	100%	100%
						Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase rumusan kebijakan bidang kesra yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama				Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan			
		Uraian	T	R	%		Uraian	T	R	%
						Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Rancangan Produk Hukum yang diharmonisasi dan difasilitasi	100%	100%	100%
						Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase rumusan kebijakan di bidang perekonomian dan pembangunan yang terimplementasi	100%	100%	100%
						Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	persentase BUMD yang sehat dan persentase BLUD mandiri	69%	-	0%
						Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase rekomendasi hasil evaluasi program pembangunan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
						Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Level maturitas UKPBJ	Level 3	Level 3	100%
						Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase rekomendasi kebijakan bidang SDA yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

3.2) Sasaran 2 : Meningkatkan Transformasi Digital Pemerintahan Daerah

Pencapaian sasaran ini didukung dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistik dan Urusan Persandian untuk mewujudkan tercapainya target indikator yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai berikut :

Sasaran RPD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	2024			Kategori Pencapaian	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Capaian		
Meningkatkan Transformasi Digital Pemerintahan Daerah	a. Indeks SPBE	Indeks	2.50	3.84	153.60%	Tercapai	Dinas Komunikasi dan Informatika

Sumber data : LKPJ Kab Nganjuk TA 2024

a. Indeks SPBE

Realisasi indikator sasaran "Indeks SPBE" pada tahun 2024 sebesar 3,84 atau 153,60% dari target yang ditetapkan sebesar 2,50 sehingga predikat pencapaian sasaran berdasarkan skala ordinal termasuk dalam kategori "tercapai".

Dari tabel tersebut di atas, dapat diketahui bahwa gambaran pencapaian program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024 tercapai, bahkan capaian indikator kinerja program ada yang melebihi target dari penetapan dalam RPJMD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk 2024-2026. Adapun indikator program dengan tingkat pencapaiannya antara lain :

1) Program untuk menunjang Persentase Penerapan Kampung Digital Anjuk Ladang

Untuk mencapai indikator kinerja sasaran tersebut Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan 5 (lima) Program yaitu:

a) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran program ini adalah terselenggaranya penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk/Kota dengan 2 indikator yaitu nilai survei kepuasan masyarakat dengan target nilai 81 terealisasi rata-rata 86,34 berdasarkan laporan SKM sehingga diperoleh capaian kinerja 106%, sedangkan nilai AKIP Perangkat Daerah dengan target nilai 81 terealiasi 80,10 berdasarkan laporan berita acara dari Inspektorat Kabupaten Nganjuk dan memperoleh capaian kinerja 99%. Untuk kegiatannya adalah:

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah indikator kegiatan ini Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah dengan target 69 dokumen terealisasi 61 dokumen berdasarkan data dokumen perencanaan sehingga capaian kinerja 88%;
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah indikator kegiatan ini Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun dengan target 63 dokumen terealisasi 76 dokumen berdasarkan data dari dokumen keuangan sehingga capaian kinerja 120%;
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah indikator kegiatan ini Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yan disusun dengan target 25 dokumen terealisasi 25 dokumen berdasarkan data dari kepegawaian diskominfo sehingga capaian kinerja 100%;
- Administrasi Umum Perangkat Daerah indikator kegiatan ini Jumlah Laporan Administrasi Umum yang dilaksanakan dengan target 12 laporan terealisasi 12 laporan berdasarkan data dari laporan administrasi umum sehingga capaian kinerja 100%;
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah indikator kegiatan ini Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan dengan target 26 buah terealisasi 48 buah berdasarkan data pengadaan BMD sehingga capaian kinerja 184%;
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah indikator kegiatan ini Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia dengan target 4 jasa terealisasi 4 jasa berdasarkan laporan dari jasa penunjang urusan pemerintah daerah sehingga capaian kinerja 100%;
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah indikator kegiatan ini Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara dengan target 42 unit terealisasi 42 unit berdasarkan data dari rekapitulasi aset sehingga capaian kinerja 100%.

Faktor Keberhasilan :

- Terdapat rekomendasi dari Menpan RB terkait implementasi SAKIP bahwa kinerja program/kegiatan/sub kegiatan yang dituangkan benar-benar memiliki keterkaitan secara langsung untuk mempengaruhi pencapaian sasaran strategi/kinerja perangkat daerah;

- Penetapan target kinerja pada level perangkat daerah ditetapkan secara realistis;
- Melakukan revieu pada sebagian IKU perangkat daerah agar memiliki definisi operasional yang andal, khususnya pada beberapa indikator yang bersifat kualitatif dengan cara memberikan formulasi mengenai syarat yang menggambarkan ketercapaian indikator kinerja;
- Kinerja tim yang solid dalam melakukan penyusunan dokumen perencanaan, laporan keuangan serta percepatan dalam penyusunan laporan kegiatan;
- Meningkatnya disiplin aparatur Dinas Kominfo dalam berpakaian dinas
- Meningkatnya layanan administrasi umum internal Dinas Kominfo
- Kebutuhan peralatan dan mesin lainnya yang meningkat
- Pembayaran jasa penunjang yang tepat waktu, kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan serta tersedianya bahan surat menyurat ;
- Tersedianya barang milik Dinas Kominfo yang layak pakai untuk menunjang pelaksanaan tugas pekerjaan serta terpeliharanya gedung dan bangunan kantor yang nyaman.

Upaya :

- Menetapkan target kinerja pada level perangkat daerah yang lebih realistis
- Meningkatkan kualitas rencana aksi
- Mengoptimalkan pohon kinerja
- Melakukan review IKU agar memiliki definisi operasional yang handal
- Memperkuat tim kinerja

b) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Sasaran program ini adalah terlaksananya pengelolaan aplikasi informatika dengan indikator Nilai Aspek TIK dengan target nilai 2,00 dengan realisasi 1,67 berdasarkan data evaluasi dari Menpan RB sehingga capaian kinerja 84%. Untuk Kegiatannya adalah :

(1) Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah

Indikator kegiatan ini adalah Tingkat kematangan layanan jaringan intra pemerintah daerah dengan target nilai 3 terealisasi 5 sehingga capaia kinerja 167%.

(2) Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah

Kabupaten Indikator kegiatan ini adalah Tingkat kematangan layanan pusat data dengan target nilai 2 terealisasi 5 berdasarkan data evaluasi dari Menpan RB capaian kinerja 250%, Tingkat kematangan pembangunan aplikasi SPBE dengan target nilai 2 terealisasi 5 berdasarkan data evaluasi dari Menpan RB capaian kinerja 250%, Tingkat kematangan penerapan manajemen aset TIK dengan target nilai 2 terealisasi 5 berdasarkan data evaluasi dari Menpan RB capaian kinerja 250%.

Faktor Keberhasilan :

- Meningkatnya sistem informasi manajemen pemerintah daerah;
- Meningkatnya SDM bidang komunikasi dan informatika pada OPD;
- Meningkatnya optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi;
- Pengelolaan dan penagawasan domain dan sub domain;
- Meningkatnya jumlah OPD yang menggunakan akses internet berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo;
- Pemeliharaan jaringan intra pemda yang selalu update
- Meningkatnya perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan;
- Meningkatnya layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah;
- Meningkatnya perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah
- Tersedianya layanan akses CCTV di pemerintah daerah

Upaya :

- Meningkatkan sistem informasi manajemen pemerintah daerah
- Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi
- Meningkatkan layaan publik dan layanan administrasi pemerintah yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah
- Meningkatkan jumlah titik CCTV yang ada di pemerintah daerah

c) Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Sasaran program ini adalah terselenggaranya Persandian untuk Pengamanan Informasi dengan indikator Presentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) yang ada pada Pemerintah Daerah dengan target 87% dengan realisasi 96,40% berdasarkan data dari rekapitulasi sistem elektronik sehingga capaian kinerja

110,80%.

Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di atas terdiri dari Kegiatan :

(1) Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Indikator kegiatan ini adalah Nilai Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE dengan target 12 Laporan realisasi 12 Laporan sehingga capaian kinerja 100%.

Faktor Keberhasilan :

- Meningkatnya optimaliasai pemanfaatan teknologi Informasi
- Meningkatnya sistem elektronik/ aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah
- Meningkatnya kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan
- Pelaksanaan identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan dan pemulihan serangan siber pada sistem elektronik;
- Pelaksanaan layanan keamanan informasi;
- Meningkatnya jumlah OPD yang menerapkan SMKI;
- Tersedianya dokumen tata kelola/ audit keamanan informasi.

Upaya:

- Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi;
- Menigkatkan sistem elektronik/ aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah menjadi kategori sedang atau cukup
- Lebih meningkatkan kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan
- Pelaksanaan identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan dan pemulihan serangan siber pada sistem elektronik;
- Melaksanakan layanan keamanan informasi lebih rutin;
- Menerapkan SMKI ke OPD

d) Program Informasi dan Komunikasi Publik.

Sasaran program ini adalah terlaksananya pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dengan indikator Skor Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Nganjuk dengan target 60 dengan realisasi 87,09 berdasarkan evaluasi dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur sehingga capaian kinerja

145%.

Program Informasi dan Komunikasi Publik di atas terdiri dari kegiatan :

(1) Pengelolaam Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Indikator kegiatan ini adalah:

- Jumlah PD dengan media komunikasi yang aktif dengan target 10 PD dan terealisasi 13 PD berdasarkan dari hasil pemantauan media komunikasi yang aktif dari masing-masing Perangkat Daerah sehingga capaian kinerja 130%;
- Jumlah PD berpredikat "Informatif" dengan target 3 PD dan terealisasi 46 PD berdasarkan data dari laporan keterbukaan informasi publik sehingga capaian kinerja 1533%. Adapun faktor yang mempengaruhi tingginya realisasi PD berpredikat "informatif" dari target yang ditetapkan yaitu.;
- Jumlah KIM berpredikat "Aktif" dengan target 5 KIM dan terealisasi 7 KIM berdasarkan data dari hasil pemantauan website KIM sehingga capaian kinerja 120%;
- Persentase pengaduan masyarakat yang tersepon tepat waktu dengan target 100% dan terealisasi 100% berdasarkan dari hasil pemantauan website SP4N Lapor sehingga capaian kinerja 100%.

Faktor Keberhasilan:

- Melakukan kerja sama informasi dengan media;
- Melaksanakan peliputan, reportase dan penyiaran dalam rangka penyampaian informasi pembangunan kepada masyarakat;
- Tingginya realisasi PD berpredikat "informatif" dari target yang ditetapkan dipengaruhi oleh faktor capaian keterbukan informasi publik yang merupakan salah satu kategori dan skor TPP yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk, pasal 11 ayat (4) hal Skoring Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi);
- Dokumen informasi publik yang dapat diakses oleh masyarakat;
- Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) yang aktif dalam penyebaran informasi dan kebijakan pemerintah daerah kepada masyarakat;
- Pengelolaan pengaduan publik melalui kanal aduan publik;

Upaya:

- Meningkatkan target peliputan dan penyiaran dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat;
- Mempertahankan keterbukaan informasi publik dalam salah satu perhitungan skor TPP;
- Meningkatkan jumlah dokumen yang terupdate dalam keterbukaan informasi publik;
- Meningkatkan jumlah KIM yang aktif;
- Menghimbau atau mensosialisasikan terkait layanan respon pengadauan publik yang diakses masyarakat agar terespon tepat waktu di masing-masing perangkat daerah.

e) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Sasaran program ini adalah terselenggaranya Statistik Sektoral di Kabupaten Nganjuk dengan indikator nilai tingkat kematangan layanan data terbuka dengan target nilai 2 dan realisasi 4 berdasarkan data evaluasi dari Menpan RB sehingga capaian kinerja 200%. Program Informasi dan Komunikasi Publik di atas terdiri dari kegiatan :

(1) Penyelengaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota.

Indikator dari kegiatan ini adalah Jumlah Buku Profil Daerah yang diterbitkan dengan target 1 Buku realisasi 1 Buku sehingga capaian kinerja 100%.

Output Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral adalah :

Tersedianya buku profil daerah, Data Sektoral yang tersedia dan update

Faktor Keberhasilan:

- Terdapat rekomendasi dari Menpan RB terkait implementasi SAKIP terhadap reviu pohon kinerja pada beberapa perangkat daerah terutama terkait dengan penjenjangan kinerja antar level untuk memiliki kausalitas atau hubungan sebab-akibat dan critical success factor (CFS) dalam menjawab kondisi kinerja diatasnya, khususnya pada level kinerja tektikal sampai kinerja operasional;
- Tersedianya buku profil daerah
- Meningkatnya pembaharuan datanya sesuai siklus jenis data oleh OPD
- kegiatan statistik sectoral;
- Meningkatnya kelengkapan metadata variabel statistik sectoral;
- Meningkatnya kelengkapan metadata indikator statistik sectoral.

Upaya:

- Optimalisasi data kemiskinan

- Meningkatkan kualitas buku profil daerah
- Meningkatkan kualitas data statistik sektoral

3.3) Sasaran 3 : Meningkatkan Profesionalitas ASN

Pencapaian sasaran ini didukung dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan Unsur Penunjang Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan untuk mewujudkan tercapainya target indikator yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai berikut :

Sasaran RPD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	2024			Kategori Pencapaian	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Capaian		
Meningkatkan Profesionalitas ASN	a.Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	55	78.30 (Data Oktober 2024)	142.36%	Tercapai	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sumber data : LKPJ Kab Nganjuk TA 2024

a. Indeks Profesionalitas ASN

Realisasi indikator sasaran "Indeks Profesionalitas ASN" pada tahun 2024 sebesar 78,30 atau 142,36% dari target yang ditetapkan sebesar 55 sehingga predikat pencapaian sasaran berdasarkan skala ordinal termasuk dalam kategori "tercapai". Indeks Profesionalisame ASN didukung oleh beberapa program antara lain :

1) Program Kepegawaian Daerah dilaksanakan pada 4 kegiatan dan 9 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

a) Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN dengan
   - Seleksi Pengadaan Formasi PPPK : 184 Orang
   - Seleksi Pengadaan CPNS : 24 orang
   - Pemberhentian ASN : 511 Orang

b) Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN
   - Mutasi ASN : 17 Orang
   - Mutasi ASN antar daerah : 7 orang
   - Promosi ASN : 4 Orang
   - Penyelesaian Kenaikan Pangkat : 2938 Orang

c) Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN
   - Fasilitasi tugas belajar : 6 orang
   - Permohonan Ijin Belajar yang disetujui : 177 orang
   - Assesment /Uji Kompetensi ASN : 185 orang

- Pembinaan Jabatan Fungsional : 803 Orang

d) Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
   - Penjatuhan Hukuman Pelanggaraan Disiplin : 1 Orang
   - Permohonan Ijin Perceraian : 32 Orang
   - Penghargaan Satya Lancana Karya Satya : 202 Orang
   - Pembinaan mental spiritual ESQ : 100 orang

2) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Selain Urusan Kepegawaian, BKPSDM Kabupaten Nganjuk juga melaksanakan Urusan Pendidikan dan Pelatihan melalui Program Pengembangan Sumber Daya Manusia. Dalam Pelaksanaan Urusan Pendidikan dan Pelatihan melalui Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan indikator kinerja Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi ASN dimana target kinerjanya sebesar 70% dan realisasi kinerja sebesar 84,99%, dengan capaian kinerja sebesar 121,41%, dengan kegiatan sebagai berikut:

a) Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis
   - Penyelenggaran Diklat dan Pengiriman Diklat Teknis sejumlah 211 orang

b) Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial
   - Pengiriman Sertifikasi Fungsional sejumlah 44 Orang
   - Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) sejumlah 4 Orang
   - Pelatihan Kepemimpnan Administrator (PKA) sejumlah 40 orang
   - Orientasi PPPK 400 orang

3) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota , dengan indikator Nilai SAKIP BKPSDM dengan target nilai 80,5 dan realisasi kinerja sebesar 80,5 dengan capaian kinerja sebesar 100%. Pada program ini terdiri dari (delapan) Kegiatan dan 28(Dua Puluh Delapan) Sub Kegiatan dimana rincian capaian kinerjanya seperti di bawah ini :

a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat Daerah dengan target 100% dapat tercapai 100% yaitu sebanyak 17 dokumen yaitu dokumen Renja (2 dokumen), RKA (2 dokumen) DPA (2 dokumen), Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah (7 dokumen), Laporan Evaluasi Kinerja (4 dokumen)

b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Jumlah Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu dan akuntabel

dengan tagret 100% dapat tercapai 100% yaitu melalui Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebanyak 32 orang, Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang semuanya dapat berjalan dengan baik. Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD dengan indikator Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah dengan target 1 laporan, dan dapat tercapai 100%

c) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel dengan target 100% dapat tercapai dengan baik yaitu 100% melalui Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (3 jenis), Penyediaan Bahan Logistik Kantor (170 paket), Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (122 pax), Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (365 eksemplar), Fasilitasi kunjungan tamu sejumlah 88 kali, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (42 kali) dan Penatausahaan arsip sejumlah 500 dokumen
d) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan indikator kinerja Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tepat sasaran dengan target 100% dapat tercapai 100% malalui Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (8 unit)
e) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator kinerja Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu dengan target 100% dapat tercapai 100% melalui Penyediaan Jasa Surat Menyurat (3 paket), Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (36 paket), Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (4 orang).
f) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator kinerja Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik dapat tercapai dengan baik 100% melalui Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan, Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (12 bulan), Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (29 unit) dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (2 unit).

b) "Nganjuk Harmonis"

Tujuan : Meningkatnya kondisi sosial masyarakat yang harmonis dan berbudaya

Indikator Tujuan : Indeks Kesalehan Sosial

4.1) Sasaran 1 : Meningkatkan Penanganan Konflik Sosial, Serta Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Pencapaian sasaran ini didukung dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan Unsur Pemerintahan Umum dan Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum untuk mewujudkan tercapainya target indikator yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai berikut :

Sasaran RPD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	2024			Kategori Pencapaian	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Capaian		
Meningkatkan Penanganan Konflik Sosial, Serta Ketenteraman dan Ketertiban Umum	a. Persentase Penanganan Konflik Sosial	%	82	100	121.95%	Tercapai	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	b. Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Masyarakat	%	85	98,15	115,47%	Tercapai	Satuan Polisi Pamong Praja
Rata-rata capaian kinerja					**118,71%**	**Tercapai**	

Sumber data : LKPJ Kab Nganjuk TA 2024

a. Penanganan Konflik Sosial

Realisasi indikator sasaran "Persentase Penanganan Konflik Sosial" pada tahun 2024 sebesar 100 atau 121,95% dari target yang ditetapkan sebesar 82 sehingga predikat pencapaian sasaran berdasarkan skala ordinal termasuk dalam kategori "tercapai". Dalam mewujudkan kondisi penanganan konflik sosial didukung oleh realisasi program dan kegiatan sebagaimana tabel dibawah ini :

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja Tahun 2024			Data Dokumen/Keterangan	Faktor Penyebab Ketercapaian/Ketidakterc apaian	Upaya /Solusi Untuk Meningkatkan Kinerja
						Target	Realisasi	Capaian Kinerja			
	Tujuan : Meningkatkan penanganan konflik sosial	Persentase penanganan konflik sosial di daerah									
1.	Sasaran : Peningkatan pencegahan, penanganan dan pemulihan pasca konflik	Persentase potensi gangguan/konflik yang teratasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	Nilai SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai	76	72	95%	LHE SAKIP	Keterlambatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan	meningkatkan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan
			Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun	lap	15	15	100%	Renstra, Renja, DPA, Rencana Aksi, Bahan LKPJ, LPPD, Laporan Evaluasi Renstra, LKjIP, Evaluasi Kinerja (4 dokumen), Laporan Kinerja (4 dokumen)	Partisipasi aktif dari pihak-pihak terkait dalam proses perencanaan dan evaluasi ninerja	Mengelola sumber daya yang tersedia termasuk anggaran
			Penyususnan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Dok	4	4	100%	Renstra, Renja, DPA, Rencana Aksi	Dukungan dari seluruh tim mulai dari pimpinan sampai dengan bawahan	Memastikan konsistensi dalam upaya perencanaan
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	lap	11	11	100%	Bahan LKPJ, LPPD, Laporan Evaluasi Renstra, LKjIP, Evaluasi Kinerja (4 dokumen), Laporan Kinerja (4 dokumen)	Dukungan dari seluruh tim mulai dari pimpinan sampai dengan bawahan	1. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap dokumen perencanaan 2. Memantau pelaksanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam dokumen perencanaan
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen keuangan Perangkat Daerah yang disusun	dok	39	41	105%	Dokumen Pengajuan gaji 14 dok, pengajuan TPP 14 dok,	Dukungan dari seluruh tim mulai dari pimpinan sampai dengan bawahan	meningkatkan koordinasi dengan BPKAD terkait dengan aplikasi

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja Tahun 2024			Data Dokumen/Keterangan	Faktor Penyebab Ketercapaian/Ketidaktercapaian	Upaya /Solusi Untuk Meningkatkan Kinerja
						Target	Realisasi	Capaian Kinerja			
									LKPD 1 dokumen, LRA dan SPJ Fungsional 12 dok.		SimGaji maupun BKPSDM terkait berkas persyaratan pengajuan TPP
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	org/bln	15	14	93%	Dokumen yang dihasilkan sebanyak 28 dokumen gaji dan TPP termasuk THR dan Gaji ketigabelas sedangkan jumlah orang selama satu tahun sebanyak 14 ASN	Dukungan dari seluruh tim mulai dari pimpinan sampai dengan bawahan	meningkatkan koordinasi dengan BPKAD terkait dengan aplikasi SimGaji maupun BKPSDM terkait berkas persyaratan pengajuan TPP
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	lap	1	1	100%	Laporan Keuangan Akhir tahun	Rekonsiliasi secara berkala dengan BPKAD	meningkatkan koordinasi dengan BPKAD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Lapo Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semeste SKPD	lap	12	12	100%	Laporan LRA dan SPJ Fungsional setiap bulan	Rekonsiliasi data secara rutin untuk memastikan keakuratan	meningkatkan koordinasi dengan BPKAD
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen kepegawaian yang disiapkan	dok	2	1	50%	Dok pelaksanaan Bimtek	Adanya kebijakan dari TAPD yang mengurangi anggaran pengadaan pakaian dinas.	Meningkatkan koordinasi

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja Tahun 2024			Data Dokumen/Keterangan	Faktor Penyebab Ketercapaian/Ketidaktercapaian	Upaya /Solusi Untuk Meningkatkan Kinerja
						Target	Realisasi	Capaian Kinerja			
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	org	30	30	100%	Dokumen pelaksanaan Bimtek	Persiapan logistik dan fasilitas yang memadai	meningkatkan penyediaaan ruang yang nyaman dan dilengkapi dengan peralatan yang memadai
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi umum yang disediakan	jns	4	4	100%	Terdiri dari jenis bahan logistik, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, bahan bacaan dan rapay koordinasi dan konsultasi	Kemampuan untuk memprediksi kebutuhan berdasarkan data historis dan faktor-faktor lain yang relevan	melakukan identifikasi persediaan secara berkala untuk memastikan akurasi data dan mengidentifikasi potensi masalah
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	pkt	5	5	100%	Paaket alat tulis kantor dan kertas, paket bahan komputer,perabot kantor, perlengkapan dinas, makanan dan minuman	Kemampuan untuk memprediksi kebutuhan bahan logistik berdasarkan data historis dan faktor-faktor lain yang relevan	melakukan identifikasi persediaan secara berkala untuk memastikan akurasi data dan mengidentifikasi potensi masalah
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	pkt	3	3	100%	Paket Foto copy, paket pengadaan banner, pengadaan amplod dinas	Kemampuan untuk memprediksi kebutuhan barang cetakan dan penggandaan berdasarkan data historis, tren penggunaan, dan kebutuhan operasional	melakukan analisis kebutuhan barang cetakan dan penggandaan secara berkala, berdasarkan data penggunaan historis, tren, dan kebutuhan operasional
			Penyediaan Bahan Bacaan dan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	dok	5	5	100%	5 macam bahan bacaan/koran	Anggaran yang memadai untuk pengadaan bahan bacaan	Melakukan kerjasama terkait layanan langganan

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja Tahun 2024			Data Dokumen/Keterangan	Faktor Penyebab Ketercapaian/Ketidaktercapaian	Upaya /Solusi Untuk Meningkatkan Kinerja
						Target	Realisasi	Capaian Kinerja			
			Peraturan Perundang-undangan	Undangan yang Disediakan							dengan pengiriman ke kantor
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	lap	26	38	146%	Laporan Hasil pelaksanaan perjalanan dinas sebanyak 38 laporan	Ketersediaan anggaran yang cukup untuk membiayai semua kebutuhan perjalanan dinas, termasuk transportasi, akomodasi, dan biaya lainnya	memanfaatkan waktu perjalanan untuk melakukan persiapan atau pekerjaan yang dapat dilakukan secara mobile
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Pengadaan Barang dan Jasa yang disediakan	dok	4	4	100%	1 dokumen pengadaan mebel, 1 dokumen pengadaan LCD proyektor, layar LCD Proyektor dan printer, 1 dokumen pengadaan AC, 1 dokumen pengadaan Laptop	Memastikan bahwa pihak ketiga/rekanan mampu menyediakanbarang dengan kualitas yang sesuai dengan standar yang ditetapkan	melakukan perkiraan anggaran yang realistis dan rinci, dengan mempertimbangkan harga pasar, biaya pengiriman, dan biaya instalasi
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	pkt	58	58	100%	58 unit mebel yang terdiri dari 30 kursi, 1 buah almari arsip,3 buah almari. 4 unit kursi pejabata, 1 set kursi tamu sofa, 4 unit meja kerja kayu, 12 buah meja rapat, 1 buah meja resepsionis dan 2 buah rak kayu	Memastikan bahwa pihak ketiga/rekanan mampu menyediakan mebel dengan kualitas yang sesuai dengan standar yang ditetapkan	melakukan perkiraan anggaran yang realistis dan rinci, dengan mempertimbangkan harga pasar, biaya pengiriman, dan biaya instalasi
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	13	13	100%	13 unit yang terdiri dari 1 unit layar LCD Proyektor,1 unit LCD Proyektor, 5 unit AC, 2 unit Laptp, 4 unit printer.	Anggaran yang memadai akan mencegah terjadinya kekurangan dana selama proses pengadaan	melakukan perkiraan anggaran yang realistis dan rinci, dengan mempertimbangkan harga pasar, biaya pengiriman, dan biaya instalasi

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja Tahun 2024			Data Dokumen/Keterangan	Faktor Penyebab Ketercapaian/Ketidaktercapaian	Upaya /Solusi Untuk Meningkatkan Kinerja
						Target	Realisasi	Capaian Kinerja			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Barang dan Jasa yang disediakan	Lap	4	3	75%	Laporan jasa surat menyurat, jasa telepon dan jasa penyediaan listrik	Ketersediaan anggaran yang memadai	Menerapkan sistem pengendalian persediaan yang efektif dan efisiensi listrik
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	lap	1	1	100%	Laporan belanja jasa surat menyurat	Ketersediaan anggaran yang memadai untuk membiayai pengadaan jasa surat menyurat/materi	Menerapkan sistem pengendalian persediaan yang efektif untuk menghindari kekurangan atau kelebihan stok
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	lap	3	2	67%	Jasa telepon dan jasa penyediaan listrik	Ketersediaan anggaran yang cukup	Mendorong efisiensi atas penggunaan listrik
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda yang disediakan	jns	4	4	100%	jenis kendaraan, jenis mebel, jenis peralayan dan mesin lainnya, Jenis rehab gedung	Penggunaan BMD sesuai dengan peruntukan dan kapasitasnya	Melakukan pemeliharaan secara berkala
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	8	7	88%	6 unit sepeda motor dan 1 unit kendaraan roda 4	Penggunaan kendaraan sesuai dengan peruntukan dan kapasitasnya	Melakukan pemeliharaan secara berkala
			Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	25	25	100%	25 unit mebel yang dipelihara	Anggaran yang memadai akan memastikan mebel selalu dalam kondisi prima	Meningkatkan kesadaran pengguna akan pentingnya mebel

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja Tahun 2024			Data Dokumen/Keterangan	Faktor Penyebab Ketercapaian/Ketidaktercapaian	Upaya /Solusi Untuk Meningkatkan Kinerja
						Target	Realisasi	Capaian Kinerja			
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	33	33	100%	33 unit/kali pemeliharaan	Ketersediaan anggaran yang cukup	Meningkatkan kesadaran pengguna akan pentingnya peralatan yang digunakan
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	1	100%	I unit gedung kantor yang dilakukn pemeliharaan	Ketersediaan anggaran yang cukup	Melakukan inspeksi berkala terhadap seluruh bagian gedung, termasuk atap, dinding, lantai, dan struktur penopang
2.			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase masyarakat yang berperan aktif dalam penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Persen	80%	88%	110%	Perbandingan antara jumlah masyarakat yang hadir dengan target masyarakat yang ditetapkan dikali 100%	Dukungan penuh dari pimpinan, evaluasi terhadap pelaksanaan sosialisasi	Melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama maupun tokoh pemuda agar bisa menympaikan materi yang diperoleh ke sesama masyarakat
			Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah masyarakat yang mengikuti Penguatan ideologi Pancasila dan karakter Kebangsaan	org	2400	2.106	88%	yang hadir dalam kegiatan sebanyak 2.106 orang dari target sebanyak 2400 orang	Dukungan penuh dari pimpinan, evaluasi terhadap pelaksanaan sosialisasi	Melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama maupun tokoh pemuda agar bisa menympaikan materi yang diperoleh ke sesama masyarakat

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja Tahun 2024			Data Dokumen/Keterangan	Faktor Penyebab Ketercapaian/Ketidakterc apaian	Upaya /Solusi Untuk Meningkatkan Kinerja
						Target	Realisasi	Capaian Kinerja			
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	org	2400	2.106	88%	yang hadir dalam kegiatan sebanyak 2.106 orang dari target sebanyak 2400 orang	Dukungan penuh dari pimpinan, evaluasi terhadap pelaksanaan sosialisasi	Melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama maupun tokoh pemuda agar bisa menympaikan materi yang diperoleh ke sesama masyarakat
			Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan SejarahKebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	lap	3	3	100%	Jumlah laporan yang disusun selama 1 tahun terhadap program penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Kerjasama tim yang dalam menyusun laporan	Meningkatkan koordinasi dan kerjasama tim baik dari internal maupun eksternal
			Pembinaan terhadap aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	dok	1	1	100%	Dokumen mulai dari pembentukan sampai pelaksanaan paskibraka	Dukungan dan kerjasama internal bakesbangpol maupun eksternal dalam menjalankan kegiatan paskibraka	Memberikan pelatihan intensif dan terstruktur kepada calon paskibraka
3.			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN	Persentase partai politik yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan pemerintahan	Persen	80%	100%	125%	Partai politik yang ikut berperan dalam pemerintahan	Kemampuan partai dalam mengembangkan kader-kader yang berkualitas	Partai politik harus menyelenggarakan program pendidikan politik bagi anggota mereka, terutama kader-kader muda

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja Tahun 2024			Data Dokumen/Keterangan	Faktor Penyebab Ketercapaian/Ketidaktercapaian	Upaya /Solusi Untuk Meningkatkan Kinerja
						Target	Realisasi	Capaian Kinerja			
			PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK								
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah partai politik yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan pemerintahan	parpol	10	10	100%	Partai politik yang ikut berperan dalam pemerintahan	Kemampuan partai dalam mengembangkan kader-kader yang berkualitas	Partai politik harus menyelenggarakan program pendidikan politik bagi anggota mereka, terutama kader-kader muda
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala	org	600	589	98%	Jumlah masyarkat/pemilih yang mengikuti sosialisasi pendidikan politik	Antusias dari pemilih pemula dalam mengikuti pendidikan politik	Peran aktif instansi Pendidikan dalam pelaksanaan pendidikan politik

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja Tahun 2024			Data Dokumen/Keterangan	Faktor Penyebab Ketercapaian/Ketidakterc apaian	Upaya /Solusi Untuk Meningkatkan Kinerja
						Target	Realisasi	Capaian Kinerja			
				Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah							
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	42	42	100%	Jumlah orang yang melakukan koordinasi yaitu terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara sebanyak 10 partai, KPU, Bawaslu, Polres, Kodim. Untuk masing-masing penerima hibah dihitung 3 orang yaitu ketua , sekretaris dan bendahara.	Adanya mandatory terkait pencairan dana hibah Pilkada 2024 sedangkan Penerima hibah terdiri dari 10 partai politik, KPU, Bawaslu, Polres, Kodim	Meningkatkan koordinasi kepada penerima hibah terkait penggunaan dan pertanggungjawaban dana hibah
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan	lap	3	3	100%	Jumlah laporan yang disusun selama 1 tahun terhadap program Pningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Kerjasama tim yang dalam menyusun laporan	Meningkatkan koordinasi dan kerjasama tim baik dari internal maupun eksternal

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja Tahun 2024			Data Dokumen/Keterangan	Faktor Penyebab Ketercapaian/Ketidaktercapaian	Upaya /Solusi Untuk Meningkatkan Kinerja
						Target	Realisasi	Capaian Kinerja			
			Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah							
4.			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase ormas yang aktif dalam pembangunan	Persen	80%	100%	125%	Jumlah ormas yang mendapatkan hibah	Keterlibatan antar instansi dalam pengawasan organisasi kemasyarakatan dengan membentik Tim Terpadu pengawanan organisasi kemasyarakatan	Meningkatkan peran aktif organisasi kemasyarakatan
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah ormas yang diberdayakan dalam pembangunan	ormas	21	21	100%	Jumlah ormas yang mendapatkan hibah selama tahun 2024 sebanyak 21 ormas	Keterlibatan antar instansi dalam pengawasan organisasi kemasyarakatan dengan membentik Tim Terpadu pengawanan organisasi kemasyarakatan	Meningkatkan peran aktif organisasi kemasyarakatan
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	orang	115	92	80%	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Keterlibatan antar instansi dalam pengawasan organisasi kemasyarakatan dengan membentik Tim Terpadu pengawanan organisasi kemasyarakatan	Meningkatkan peran aktif organisasi kemasyarakatan

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja Tahun 2024			Data Dokumen/Keterangan	Faktor Penyebab Ketercapaian/Ketidaktercapaian	Upaya /Solusi Untuk Meningkatkan Kinerja
						Target	Realisasi	Capaian Kinerja			
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	lap	3	3	100%	Jumlah laporan yang disusun selama 1 tahun terhadap program Pemberdayaan dan Pengawasan organisasi kemasyarakatan	Kerjasama tim yang dalam menyusun laporan	Meningkatkan koordinasi dan kerjasama tim baik dari internal maupun eksternal
5.			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase peningkatan dan pemahaman Masyarakat terhadap ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persen	80%	98%	123%	Persentase kehadiran terhadap jumlah target yang ditetapkan daikali 100%	Komunikasi yang terbuka dan transparan antar lembaga akan membangun kepercayaan diantaranya adalah Sosialisasi P4GN yang melibatkan Dinas Pendidikan/Cabang Dinas Pendidikan untuk diteruskan kepada siswa dan BNN, kerjasama dengan kejaksaan terkait Penganut aliran Kepercayaan, FKUB terkait kerukunan umat beragama	Meningkatkan peran aktif FKUB, koordinasi dengan BNN maupun kejaksaan
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan di bidang ketahanan ekonomi, Sosial dan Budaya	org	1200	1.181	98%	Jumlah masyarakat yang hadir	Komunikasi yang terbuka dan transparan antar lembaga akan membangun kepercayaan diantaranya adalah Sosialisasi P4GN yang melibatkan Dinas Pendidikan/Cabang Dinas Pendidikan untuk diteruskan kepada siswa dan BNN, kerjasama dengan kejaksaan terkait Penganut aliran Kepercayaan, FKUB	Meningkatkan peran aktif FKUB, koordinasi dengan BNN maupun kejaksaan

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja Tahun 2024			Data Dokumen/Keterangan	Faktor Penyebab Ketercapaian/Ketidaktercapaian	Upaya /Solusi Untuk Meningkatkan Kinerja
						Target	Realisasi	Capaian Kinerja			
										terkait kerukunan umat beragama	
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	org	1200	1.180	98%	Jumlah masyarakat yang hadir	Komunikasi yang terbuka dan transparan antar lembaga akan membangun kepercayaan diantaranya adalah Sosialisasi P4GN yang melibatkan Dinas Pendidikan/Cabang Dinas Pendidikan untuk diteruskan kepada siswa dan BNN, kerjasama dengan kejaksaan terkait Penganut aliran Kepercayaan, FKUB terkait kerukunan umat beragama	Meningkatkan peran aktif FKUB, koordinasi dengan BNN maupun kejaksaan
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	lap	3	3	100%	Jumlah laporan yang disusun selama 1 tahun terhadap program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Anggaran yang memadai dialokasikan untuk membiayai semua kegiatan Monev	Membangun koordinasi yang efektif antar instansi pemerintah yang terkait dengan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja Tahun 2024			Data Dokumen/Keterangan	Faktor Penyebab Ketercapaian/Ketidaktercapaian	Upaya /Solusi Untuk Meningkatkan Kinerja
						Target	Realisasi	Capaian Kinerja			
6.			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase peningkatan kewaspadaan nasional	Persen	80%	86%	108%	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi kewspadaan dibagi jumlah target yang ditetapkan dikali 100%	Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kewaspadaan dini	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengawasan dan pelaporan
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi kewaspadaan dini	Org	250	218	87%	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi kewaspadaan dini	Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kewaspadaan dini	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengawasan dan pelaporan
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Org	250	218	87%	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi kewaspadaan dini	Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kewaspadaan dini	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengawasan dan pelaporan

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kinerja Tahun 2024			Data Dokumen/Keterangan	Faktor Penyebab Ketercapaian/Ketidaktercapaian	Upaya /Solusi Untuk Meningkatkan Kinerja
						Target	Realisasi	Capaian Kinerja			
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	lap	12	12	100%	Laporan tim kewaspadaan yang disusun setip bulan sehingga selama 1 tahun sebanyak 12 laporan	pengumpulan data sesuai dengan jenis data yang dibutuhkan dan sumber daya yang tersedia	Menggunakan sumber data yang terpercaya dan relevan
			Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Dok	12	12	100%	Laporan tim kewaspadaan yang disusun setip bulan sehingga selama 1 tahun sebanyak 12 laporan	Anggaran yang memadai untuk mendukung kegiatan Forkopimda	Memanfaatkan platform komunikasi digital untuk memudahkan koordinasi

b. Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat

Realisasi indikator sasaran "Persentase Penanganan Konflik Sosial" pada tahun 2024 sebesar 98,15 atau 115,47% dari target yang ditetapkan sebesar 85 sehingga predikat pencapaian sasaran berdasarkan skala ordinal termasuk dalam kategori "tercapai". Analisis terhadap pencapaian sasaran Satuan Polisi Pamong Praja didukung oleh 2 program sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota untuk Satuan Polisi Pamong Praja pada Tahun 2024 ditargetkan 79 dan terealisasi 75, hal ini disebabkan pada terdapat beberapa catatan dari Evaluator yaitu :
   a) Perencanaan Kinerja Target dan Anggaran bisa selaras dengan dokumen yang lain
   b) Perencanaan Kinerja untuk di reviu secara berjenjang
   c) Memastikan Melakukan Penyelarasan IKU pada setiap Perencanaan Perangkat Daerah

   Pengukuran Kinerja
   a) Penyajian Pelaporan Individu
   b) DPPA selaras dengan dokumen terkait lainnya
   c) Penghitungan formula antara dokumen SK IKU bisa selaras dengan Dokumen Perencanaan

   Pelaporan Kinerja
   a) Dokumen Evaluasi Internal laporan secara berksala setiap Tribulan
   b) Mendorong agar dokumen LKJIP table 3.1.1 Realisasi Kinerja Tahun 2023 selain terdapat capain antara target dan realisasi 2023, untuk melampirkan bukti dukung.

   Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
   a) Mendorong Peningkatan SDM Tim Akuntabilitas Kinerja Internal
   b) Memastikan rekomendasi saran/atas hasil Evaliasi.

2) Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan 2 Indikator yaitu :
   - Persentase Penanganan gangguan Trantibum yang tertangani target 85% teralisasi 98% dalam tahun 2024 gangguan trantibum yang ditangani Satuan

Polisi Pamong Praja baik dari Laporan masyarakat dan hasil Patroli Wilayah dari target 330 gangguan trantibum terealisasi 325 atau 98 %.

- Persentase Pelanggaran Perda yang tertangani target 85 % teralisasi 114 % dalam tahun 2024 Penangan atas Pelanggaran Perda dan Perkada di targetkan 76 Pelanggaran teralisasi 87 atau 114 %, hal ini dikarenakan untuk ada tambahan target kegiatan DBHC HT yang dipergunakan untuk menambah Kegiatan

4.2) Sasaran 2 : Meningkatkan Pelestarian Warisan Kebudayaan Lokal

Pencapaian sasaran ini didukung dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan Urusan Kebudayaan untuk mewujudkan tercapainya target indikator yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai berikut :

Sasaran RPD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	2024			Kategori Pencapaian	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Capaian		
Meningkatkan Pelestarian Warisan Kebudayaan Lokal	a. Persentase Warisan Seni Budaya Dan Tradisi Lokal yang Dilestarikan	%	29,73	30,07	101,14%	Tercapai	Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata

Sumber data : LKPJ Kab Nganjuk TA 2024

a. Persentase Warisan Seni Budaya Dan Tradisi Lokal yang Dilestarikan

Realisasi indikator sasaran "Persentase Warisan Seni Budaya Dan Tradisi Lokal yang Dilestarikan" pada tahun 2024 sebesar 30,07 atau 101,14% dari target yang ditetapkan sebesar 29,73 sehingga predikat pencapaian sasaran berdasarkan skala ordinal termasuk dalam kategori "tercapai".

Terkait dengan program dan kegiatan yang mendukung capaian Persentase warisan seni budaya dan tradisi lokal yang dilestarikan adalah sebagai berikut :

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program / Sub Kegiatan	Target 2024	Satuan	Realisasi 2024	Capaian %
1	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**					

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan	Indikator Kinerja Program / Sub Kegiatan	Target 2024	Satuan	Realisasi 2024	Capaian %
1.1	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Presentase SDM pemaju kebudayaan yang terbina**	**36,25**	**%**	**36.36**	**100.30**
	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah kebudayaan yang mendapat pengembangan**	**15**	**Dokumen**	**15.00**	**100**
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	15	objek	15.00	100
1.2	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan**	**32,5**	**%**	**33.77**	**103.90**
	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	**Jumlah cagar budaya yang terlindungi**	**19**	**objek**	**19.00**	**100**
	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	21	objek	21.00	100
1.3	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	**Presentase peningkatan pengunjung museum**	**2**	**%**	**2.91**	**145.5**
	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	**Jumlah koleksi museum yang terpelihara**	**330**	**unit**	**305.00**	**92.42**
	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	330	unit	305.00	92.42
	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	3	unit	3.00	100
	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	19	unit	19.00	100

Analisis Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Pencapaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Porabudpar Kab. Nganjuk disajikan dalam tabel berikut :

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/SubKegiatan	Faktor Pendorong Keberhasilan	Faktor Penghambat
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN		
1	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**		
	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Seni dan Budaya yang dikelola sangat banyak yang didukung oleh jumlah seniman yang banyak pula	Masuknya budaya dari luar secara berkelanjutan dan didukung perkembangan teknologi informasi membuat kebudayaan local semakin tergerus
2	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**		
	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		
	Pelindungan Cagar Budaya	Dukungan Komunitas Pelestari Cagar Budaya dan Sejarah	Belum terbentuknya Tim Ahli Cagar Budaya
3	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**		
	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota		
	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Dukungan masyarakat terhadap pelestarian koleksi museum	Ada sebagian masyarakat yang kurang memiliki kesadaran terhadap benda Cagar Budaya (hasil temuan)
	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Kerjasama lintas Perangkat Daerah	Kurangnya informasi tentang Museum kepada Masyarakat
	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Memaksimalkan Sarana Prasarana yang dimiliki	Sarana dan Prasarana memiliki keterbatasan Pakai

4.3) Sasaran 3 : Meningkatkan Ketangguhan Dalam Penanggulangan Bencana

Pencapaian sasaran ini didukung dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan Sub Urusan Bencana dan Sub Urusan Kebakaran untuk mewujudkan tercapainya target indikator yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai berikut :

Sasaran RPD	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran	Satuan	2024			Kategori Pencapaian	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target	Realisasi	Capaian		
Meningkatkan Ketangguhan Dalam Penanggulangan Bencana	a. Indeks Risiko Bencana	Indeks	109.04	86.23	126.45%	Tercapai	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Sumber data : LKPJ Kab Nganjuk TA 2024

a. Indeks Risiko Bencana

Realisasi indikator sasaran "Indeks Risiko Bencana" pada tahun 2024 sebesar 86,23 atau 126,45% dari target yang ditetapkan sebesar 109,04 sehingga predikat pencapaian sasaran berdasarkan skala ordinal termasuk dalam kategori "tercapai". Berikut capaian urusan program dan Kegiatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk pada tahun 2024 yang menunjang keercapaian IRB adalah sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Programm/Kegiatan	Capaian Kienrja Program/ Kegiatan (%)
1	Meningkatnya ketangguhan Penanggulangan bencana yang meliputi mitigasi dan kesiapsiagaan, penanganan darurat serta penanganan pasca bencana		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah**	**80.05**
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun**	**100**
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	100
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	100

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Prograam/Kegiatan	Capaian Kienrja Program/ Kegiatan (%)
				RKA- SKPD	
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	100
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja yang selesai tepat waktu	100
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi yang disusun tepat waktu	100
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Dokumen Keuangan Perangkat Daerah yang disusun**	**100**
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	70
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang selesai tepat waktu	100
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan yang selesai tepat waktu	100
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD**	**100**
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Dokumen Umum Perangkat Daerah yang disusun**	**100**
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	100

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Programm/Kegiatan	Capaian Kienrja Program/ Kegiatan (%)
				Undangan yang Disediakan	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	86
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	89
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah sub kegiatan pengadaan barang milik daerah SKPD yang dilaksanakan**	**100**
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	100
			Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	100
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia**	**100**
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang diproses	108
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kebutuhan listrik	100
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah sub kegiatan pemeliharaan barang milik daerah SKPD yang dilaksanakan**	**100**
			Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara	100
			Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeleur yang dipelihara	100
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	67
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	100
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	83

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Programm/Kegiatan	Capaian Kienrja Program/ Kegiatan (%)
			Lainnya	yang Dipelihara/Direhabilitasi	
			Program Penanggulangan Bencana	**Persentase Penanggulangan Bencana (mitigasi dan kesiapsiagaan, penanganan darurat serta penanganan pasca bencana)**	**83**
			Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	**Jumlah sub kegiatan layanan informasi rawan bencana yang dilaksanakan**	**100**
			Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kajian risiko bencana yang dilegalisasi	100
			Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah peserta Sosialisasi pencegahan dan Pengurangan Risiko Bencana Jumlah kecamatan yang difasilitasi pemasangan rambu-rambu kebencanaan	100
		Persentase desa tangguh bencana	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**Jumlah sub kegiatan layanan pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana yang dilaksanakan**	**100**
			Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan	Jumlah kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	100
			Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah THL kebencanaan yang terpenuhi gaji/HR nya	100
			Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah gelar apel kesiapsiagaan yang dilaksanakan	100
			Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah desa rawan bencana tempat dilakukan mitigasi struktural	100
			Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan	Jumlah peralatan penyelamatan diri bagi individu warga	100

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Programm/Kegiatan	Capaian Kienrja Program/ Kegiatan (%)
			Terhadap Bencana	negara, keluarga, maupun petugas	
			Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	100
		Rata-rata kejadian bencana yang direspon Dan ditangani	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**Persentase penanganan tanggap darurat**	**100**
			Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	100
			Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah korban yang berhasil ditemukan, ditolong, dan dievakuasi per jenis kejadian bencana	120
			Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	**85**
			Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota	100
		Persentase bantuan pasca bencana yang diberikan/direalisasikan berdasarkan JITUPASNA	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**Jumlah sub kegiatan sistem dasar PB yang dilaksanakan**	**100**
			Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen tata kelola kelembagaan	100

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Programm/Kegiatan	Capaian Kienrja Program/ Kegiatan (%)
				bencana daerah	
			Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana	100
			Koordinasi penanganan pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	100
			Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabiltasi dan Rekontruksi Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	100

Berdasarkan tabel di atas, faktor yang menunjang keberhasilan kegiatan ini adalah adanya antusiasme masyarakat untuk peran serta dalam penanggulangan bencana. Rasa kebersamaan dan gotong royong masyarakat yang tinggi sehingga kegiatan ini dapat diterima oleh masyarakat. Faktor yang menghambat kegiatan ini adalah padatnya permukiman penduduk sehingga mengurangi akses jalur evakuasi dan ruang terbuka publik yang akan dijadikan tempat evakuasi pada saat bencana.

BAB III
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Sesuai amanat Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 5 ayat (4) menyebutkan bahwa urusan Pemerintahan di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Penyelenggaraan tugas pembantuan merupakan penugasan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemberi tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat kepada daerah dan/atau desa, dengan alokasi dana berasal dari pemberi tugas, yang dilaksanakan oleh daerah dan ataupun desa.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Nganjuk, di samping didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga terdapat kegiatan-kegiatan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana tersebut dialokasikan melalui penyelenggaraan Tugas Pembantuan. Alokasi Dana Tugas Pembantuan di Kabupaten Nganjuk pada Tahun Anggaran 2024 terdapat pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan Dinas Pertanian.

Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan di Kabupaten Nganjuk pada Tahun 2024 meliputi :

3.1 Tugas Pembantuan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk

a. Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pembantuan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1) Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya dan RUK Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Timur Nomor: 5844/KPTS/Rb9.4.3/2024 Tentang Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2024 Desa Gempol Kecamatan Rejoso dan Kabupaten Nganjuk.
2) Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya dan RUK Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Timur Nomor: 5846/KPTS/Rb9.4.3/2024 Tentang Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2024 Desa Puhkerep Kecamatan Rejoso dan Kabupaten Nganjuk.
3) Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya dan RUK Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Timur Nomor: 5848/KPTS/Rb9.4.3/2024 Tentang Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2024 Desa Sidokare Kecamatan Rejoso dan Kabupaten Nganjuk.

4) Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya dan RUK Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Timur Nomor: 5850/KPTS/Rb9.4.3/2024 Tentang Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2024 Desa Kedungpandang Kecamatan Rejoso dan Kabupaten Nganjuk.
5) Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya dan RUK Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Timur Nomor: 5855/KPTS/Rb9.4.3/2024 Tentang Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2024 Desa Getas Kecamatan Tajunganom dan Kabupaten Nganjuk.
6) Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya dan RUK Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Timur Nomor: 5857/KPTS/Rb9.4.3/2024 Tentang Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2024 Desa Jatigreges Kecamatan Pace dan Kabupaten Nganjuk.
7) Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya dan RUK Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Timur Nomor: 5859/KPTS/Rb9.4.3/2024 Tentang Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2024 Desa Ngetos Kecamatan Ngetos dan Kabupaten Nganjuk.
8) Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya dan RUK Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Timur Nomor: 5861/KPTS/Rb9.4.3/2024 Tentang Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2024 Desa Ngliman Kecamatan Sawahan dan Kabupaten Nganjuk.
9) Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya dan RUK Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Timur Nomor: 5863/KPTS/Rb9.4.3/2024 Tentang Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2024 Desa Tekenglagahan Kecamatan Loceret dan Kabupaten Nganjuk.
10) Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya dan RUK Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Timur Nomor: 5827/KPTS/Rb9.4.3/2024 Tentang Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2024 Desa Banaran Kulon Kecamatan Bagor dan Kabupaten Nganjuk.
11) Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya dan RUK Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Timur Nomor: 5829/KPTS/Rb9.4.3/2024 Tentang Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2024 Desa Selorejo Kecamatan Bagor dan Kabupaten Nganjuk.
12) Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya dan RUK Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Timur Nomor: 5830/KPTS/Rb9.4.3/2024 Tentang

Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2024 Desa Sukoharjo Kecamatan Wilangan dan Kabupaten Nganjuk.

13) Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya dan RUK Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Timur Nomor: 5832/KPTS/Rb9.4.3/2024 Tentang Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2024 Desa Bogo Kecamatan Nganjuk dan Kabupaten Nganjuk.
14) Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya dan RUK Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Timur Nomor: 5834/KPTS/Rb9.4.3/2024 Tentang Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2024 Desa Kartoharjo Kecamatan Nganjuk dan Kabupaten Nganjuk.
15) Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya dan RUK Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Timur Nomor: 5836/KPTS/Rb9.4.3/2024 Tentang Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2024 Desa Kramat Kecamatan Nganjuk dan Kabupaten Nganjuk.
16) Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya dan RUK Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Timur Nomor: 5838/KPTS/Rb9.4.3/2024 Tentang Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2024 Desa Payaman Kecamatan Nganjuk dan Kabupaten Nganjuk.
17) Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya dan RUK Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Timur Nomor: 5840/KPTS/Rb9.4.3/2024 Tentang Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2024 Desa Werungotok Kecamatan Nganjuk dan Kabupaten Nganjuk.
18) Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya dan RUK Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Timur Nomor: 6942/KPTS/Rb9.4.3/2024 Tentang Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2024 Desa Bagor Wetan Kecamatan Sukomoro dan Kabupaten Nganjuk.
19) Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya dan RUK Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Timur Nomor: 6943/KPTS/Rb9.4.3/2024 Tentang Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2024 Desa Berbek Kecamatan Berbek dan Kabupaten Nganjuk.
20) Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya dan RUK Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Timur Nomor: 6944/KPTS/Rb9.4.3/2024 Tentang Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2024 Desa Tiripan Kecamatan Berbek dan Kabupaten Nganjuk.

21) Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya dan RUK Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Timur Nomor: 6945/KPTS/Rb9.4.3/2024 Tentang Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2024 Desa Kedungpadang Kecamatan Rejoso dan Kabupaten Nganjuk.
22) Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya dan RUK Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Timur Nomor: 6946/KPTS/Rb9.4.3/2024 Tentang Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2024 Desa Puhkerep Kecamatan Rejoso dan Kabupaten Nganjuk.
23) Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya dan RUK Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Timur Nomor: 6947/KPTS/Rb9.4.3/2024 Tentang Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2024 Desa Klagen Kecamatan Rejoso dan Kabupaten Nganjuk.
24) Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya dan RUK Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Timur Nomor: 6948/KPTS/Rb9.4.3/2024 Tentang Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2024 Desa Sidokare Kecamatan Rejoso dan Kabupaten Nganjuk.
25) Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya dan RUK Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Timur Nomor: 6949/KPTS/Rb9.4.3/2024 Tentang Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2024 Desa Kendalrejo Kecamatan Bagor dan Kabupaten Nganjuk.
26) Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya dan RUK Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Timur Nomor: 6950/KPTS/Rb9.4.3/2024 Tentang Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2024 Desa Kutorejo Kecamatan Bagor dan Kabupaten Nganjuk.
27) Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya dan RUK Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Timur Nomor: 6951/KPTS/Rb9.4.3/2024 Tentang Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2024 Desa Ngadipiro Kecamatan Wilangan dan Kabupaten Nganjuk.
28) Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya dan RUK Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Timur Nomor: 6952/KPTS/Rb9.4.3/2024 Tentang Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2024 Desa Ngasem Kecamatan Jatikalen dan Kabupaten Nganjuk.
29) Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya dan RUK Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Timur Nomor: 6953/KPTS/Rb9.4.3/2024 Tentang

Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2024 Desa Pulowetan Kecamatan Jatikalen dan Kabupaten Nganjuk.

30) Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya dan RUK Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Timur Nomor: 6954/KPTS/Rb9.4.3/2024 Tentang Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2024 Desa Ngetos Kecamatan Ngetos dan Kabupaten Nganjuk.
31) Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya dan RUK Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Timur Nomor: 6955/KPTS/Rb9.4.3/2024 Tentang Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2024 Desa Nglawak Kecamatan Prambon dan Kabupaten Nganjuk.
32) Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya dan RUK Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Timur Nomor: 6956/KPTS/Rb9.4.3/2024 Tentang Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2024 Desa Rowoharjo Kecamatan Prambon dan Kabupaten Nganjuk.
33) Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya dan RUK Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Timur Nomor: 6957/KPTS/Rb9.4.3/2024 Tentang Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2024 Desa Ngliman Kecamatan Sawahan dan Kabupaten Nganjuk.
34) Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya dan RUK Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Timur Nomor: 6958/KPTS/Rb9.4.3/2024 Tentang Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2024 Desa Sidorejo Kecamatan Sawahan dan Kabupaten Nganjuk.
35) Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya dan RUK Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Timur Nomor: 6959/KPTS/Rb9.4.3/2024 Tentang Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2024 Desa Plosoharjo Kecamatan Pace dan Kabupaten Nganjuk.
36) Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya dan RUK Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Timur Nomor: 6960/KPTS/Rb9.4.3/2024 Tentang Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2024 Desa Ngepeh Kecamatan Loceret dan Kabupaten Nganjuk.
37) Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya dan RUK Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Timur Nomor: 6961/KPTS/Rb9.4.3/2024 Tentang Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2024 Desa Ngelaban Kecamatan Loceret dan Kabupaten Nganjuk.

38) Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya dan RUK Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Timur Nomor: 6962/KPTS/Rb9.4.3/2024 Tentang Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2024 Desa Sawahan Kecamatan Lengkong dan Kabupaten Nganjuk.
39) Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya dan RUK Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Timur Nomor: 6963/KPTS/Rb9.4.3/2024 Tentang Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2024 Desa Cangkringan Kecamatan Nganjuk dan Kabupaten Nganjuk.
40) Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya dan RUK Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Timur Nomor: 6964/KPTS/Rb9.4.3/2024 Tentang Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2024 Desa Kartoharjo Kecamatan Nganjuk dan Kabupaten Nganjuk.
41) Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya dan RUK Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Timur Nomor: 6965/KPTS/Rb9.4.3/2024 Tentang Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2024 Desa Banjarsari Kecamatan Ngronggot dan Kabupaten Nganjuk.

b. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Dalam rangka peningkatan kualitas rumah tidak layak huni yang ada di Kabupaten Nganjuk, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Balai Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Timur mengalokasikan anggaran untuk Kabupaten Nganjuk sebesar Rp. 15.400.000.000,- (lima belas milyar empat ratus juta rupiah). Anggaran tersebut untuk peningkatan kualitas rumah tidak layak huni sebanyak 770 unit yang tersebar di 41 desa/kelurahan. Masing-masing kepala keluarga (KK) menerima bantuan sebesar Rp. 20.000.000,- sedangkan peruntukan penggunaannya adalah untuk pembelian bahan bangunan sebesar Rp. 17.500.000,- dan upah tukang sebesar Rp. 2.500.000,-.

c. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk adalah Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni dari Kementrian PUPR melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Sasaran bantuan dimaksud adalah untuk warga masyarakat Kabupaten Nganjuk yang masuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang tinggal dalam rumah tidak layak huni.

1) Target Kinerja

No.	Nama Kecamatan	Nama Desa / Kelurahan	SK Alokasi (Rumah)	Jumlah (Rp)
BSPS Tahap XIV				
1	Loceret	Tekenglagahan	20	400.000.000
2	Ngetos	Ngetos	26	520.000.000
3	Pace	Jatigreges	20	400.000.000
4	Rejoso	Gempol	15	300.000.000
5	Rejoso	Kedungpadang	15	300.000.000
6	Rejoso	Puhkerep	18	360.000.000
7	Rejoso	Sidokare	20	400.000.000
8	Sawahan	Ngliman	20	400.000.000
9	Tanjunganom	Getas	15	300.000.000
	SUB TOTAL XIV		**169**	**3.380.000.000**
BSPS Tahap XV				
1	Nganjuk	Kartoharjo	16	320.000.000
2	Nganjuk	Werungotok	16	320.000.000
3	Nganjuk	Kramat	24	480.000.000
4	Nganjuk	Payaman	16	320.000.000
5	Nganjuk	Bogo	13	260.000.000
6	Wilangan	Sukoharjo	15	300.000.000
7	Bagor	Banaran Kulon	16	320.000.000
8	Bagor	Selorejo	30	600.000.000
	SUB TOTAL XV		**146**	**2.920.000.000**
BSPS Tahap XIX				
1	Sukomoro	Bagorwetan	20	400.000.000
2	Berbek	Berbek	13	260.000.000
3	Sawahan	Ngliman	27	540.000.000
4	Berbek	Tiripan	20	400.000.000
5	Rejoso	Kedungpadang	20	400.000.000
6	Rejoso	Puhkerep	20	400.000.000
7	Rejoso	Klagen	20	400.000.000
8	Bagor	Kendalrejo	20	400.000.000
9	Bagor	Kutorejo	20	400.000.000
10	Wilangan	Ngadipiro	22	440.000.000
11	Jatikalen	Ngasem	32	640.000.000
12	Ngetos	Ngetos	26	520.000.000
13	Prambon	Nglawak	20	400.000.000
14	Sawahan	Sidorejo	11	220.000.000
15	Pace	Plosoharjo	20	400.000.000
16	Jatikalen	Pulowetan	20	400.000.000
17	Prambon	Rowoharjo	20	400.000.000
18	Lengkong	Sawahan	21	420.000.000

No.	Nama Kecamatan	Nama Desa / Kelurahan	SK Alokasi (Rumah)	Jumlah (Rp)
19	Nganjuk	Cangkringan	20	400.000.000
20	Nganjuk	Kartoharjo	20	400.000.000
21	Ngronggot	Banjarsari	9	180.000.000
22	Loceret	Nglaban	12	240.000.000
23	Loceret	Ngepeh	2	40.000.000
24	Rejoso	Sidokare	20	400.000.000
	SUB TOTAL XIX		**455**	**9.100.000.000**
	JUMLAH TOTAL		**770**	**15.400.000.000**

2) Realisasi

No.	Nama Kecamatan	Nama Desa / Kelurahan	Realisasi Pembangunan (Rumah)	Realisasi Penyaluran (Rp.)
BSPS Tahap XIV				
1	Loceret	Tekenglagahan	20	400.000.000
2	Ngetos	Ngetos	26	520.000.000
3	Pace	Jatigreges	20	400.000.000
4	Rejoso	Gempol	15	300.000.000
5	Rejoso	Kedungpadang	15	300.000.000
6	Rejoso	Puhkerep	18	360.000.000
7	Rejoso	Sidokare	20	400.000.000
8	Sawahan	Ngliman	20	400.000.000
9	Tanjunganom	Getas	15	300.000.000
	SUB TOTAL XIV		**169**	**3.380.000.000**
BSPS Tahap XV				
1	Nganjuk	Kartoharjo	16	320.000.000
2	Nganjuk	Werungotok	16	320.000.000
3	Nganjuk	Kramat	24	480.000.000
4	Nganjuk	Payaman	16	320.000.000
5	Nganjuk	Bogo	13	260.000.000
6	Wilangan	Sukoharjo	15	300.000.000
7	Bagor	Banaran Kulon	16	320.000.000
8	Bagor	Selorejo	30	600.000.000
	SUB TOTAL XV		**146**	**2.920.000.000**
BSPS Tahap XIX				
1	Sukomoro	Bagorwetan	20	400.000.000
2	Berbek	Berbek	13	260.000.000
3	Sawahan	Ngliman	27	540.000.000
4	Berbek	Tiripan	20	400.000.000
5	Rejoso	Kedungpadang	20	400.000.000

No.	Nama Kecamatan	Nama Desa / Kelurahan	Realisasi Pembangunan (Rumah)	Realisasi Penyaluran (Rp.)
6	Rejoso	Puhkerep	20	400.000.000
7	Rejoso	Klagen	20	400.000.000
8	Bagor	Kendalrejo	20	400.000.000
9	Bagor	Kutorejo	20	400.000.000
10	Wilangan	Ngadipiro	22	440.000.000
11	Jatikalen	Ngasem	32	640.000.000
12	Ngetos	Ngetos	26	520.000.000
13	Prambon	Nglawak	20	400.000.000
14	Sawahan	Sidorejo	11	220.000.000
15	Pace	Plosoharjo	20	400.000.000
16	Jatikalen	Pulowetan	20	400.000.000
17	Prambon	Rowoharjo	20	400.000.000
18	Lengkong	Sawahan	21	420.000.000
19	Nganjuk	Cangkringan	20	400.000.000
20	Nganjuk	Kartoharjo	20	400.000.000
21	Ngronggot	Banjarsari	9	180.000.000
22	Loceret	Nglaban	12	240.000.000
23	Loceret	Ngepeh	2	40.000.000
24	Rejoso	Sidokare	20	400.000.000
	SUB TOTAL XIX		**455**	**9.100.000.000**
	JUMLAH TOTAL		**770**	**15.400.000.000**

Tabel. 3.1

Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Dinas PRKPP Kabupaten Nganjuk

No	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan TP	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Rincian Kegiatan				Lokasi	PD Pelaksanaan TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket
1	Kementrian PUPR	Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya dan RUK Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Timur Nomor: 5844/KPTS/Rb9.4.3/2024					Desa Gempol Kecamatan Rejoso	Dinas PRKPP	300.000.000	300.000.000	100%	15	100%	
2	Kementrian PUPR	Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya dan RUK Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Timur Nomor: 5846/KPTS/Rb9.4.3/2024					Desa Puhkerep Kecamatan Rejoso	Dinas PRKPP	360.000.000	360.000.000	100%	18	100%	
3	Kementrian PUPR	Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya dan RUK Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Timur Nomor: 5848/KPTS/Rb9.4.3/2024					Desa Sidokare Kecamatan Rejoso	Dinas PRKPP	400.000.000	400.000.000	100%	20	100%	

No	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan TP	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Rincian Kegiatan				Lokasi	PD Pelaksanaan TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket
4	Kementrian PUPR	Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya dan RUK Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Timur Nomor: 5850/KPTS/Rb9.4.3/2024					Desa Kedungpandang Kecamatan Rejoso	Dinas PRKPP	300.000.000	300.000.000	100%	15	100%	
5	Kementrian PUPR	Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya dan RUK Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Timur Nomor: 5855/KPTS/Rb9.4.3/2024					Desa Getas Kecamatan Tajunganom	Dinas PRKPP	300.000.000	300.000.000	100%	15	100%	
6	Kementrian PUPR	Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya dan RUK Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Timur Nomor: 5857/KPTS/Rb9.4.3/2024					Desa Jatigreges Kecamatan Pace	Dinas PRKPP	400.000.000	400.000.000	100%	20	100%	

No	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan TP	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Rincian Kegiatan				Lokasi	PD Pelaksanaan TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket
7	Kementrian PUPR	Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya dan RUK Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Timur Nomor: 5859/KPTS/Rb9.4.3/2024					Desa Ngetos Kecamatan Ngetos	Dinas PRKPP	520.000.000	520.000.000	100%	26	100%	
8	Kementrian PUPR	Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya dan RUK Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Timur Nomor: 5861/KPTS/Rb9.4.3/2024					Desa Ngliman Kecamatan Sawahan	Dinas PRKPP	400.000.000	400.000.000	100%	20	100%	
9	Kementrian PUPR	Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya dan RUK Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Timur Nomor: 5863/KPTS/Rb9.4.3/2024					Desa Tekenglagahan Kecamatan Loceret	Dinas PRKPP	400.000.000	400.000.000	100%	20	100%	

No	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan TP	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Rincian Kegiatan				Lokasi	PD Pelaksanaan TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket
10	Kementrian PUPR	Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya dan RUK Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Timur Nomor: 5827/KPTS/Rb9.4.3/2024					Desa Banaran Kulon Kecamatan Bagor	Dinas PRKPP	320.000.000	320.000.000	100%	16	100%	
11	Kementrian PUPR	Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya dan RUK Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Timur Nomor: 5829/KPTS/Rb9.4.3/2024					Desa Selorejo Kecamatan Bagor	Dinas PRKPP	600.000.000	600.000.000	100%	30	100%	
12	Kementrian PUPR	Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya dan RUK Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Timur Nomor: 5830/KPTS/Rb9.4.3/2024					Desa Sukoharjo Kecamatan Wilangan	Dinas PRKPP	300.000.000	300.000.000	100%	15	100%	

No	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan TP	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Rincian Kegiatan				Lokasi	PD Pelaksanaan TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket
13	Kementrian PUPR	Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya dan RUK Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Timur Nomor: 5832/KPTS/Rb9.4.3/2024					Desa Bogo Kecamatan Nganjuk	Dinas PRKPP	260.000.000	260.000.000	100%	13	100%	
14	Kementrian PUPR	Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya dan RUK Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Timur Nomor: 5834/KPTS/Rb9.4.3/2024					Desa Kartoharjo Kecamatan Nganjuk	Dinas PRKPP	320.000.000	320.000.000	100%	16	100%	
15	Kementrian PUPR	Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya dan RUK Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Timur Nomor: 5836/KPTS/Rb9.4.3/2024					Desa Kramat Kecamatan Nganjuk	Dinas PRKPP	480.000.000	480.000.000	100%	24	100%	

No	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan TP	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Rincian Kegiatan				Lokasi	PD Pelaksanaan TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket
16	Kementrian PUPR	Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya dan RUK Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Timur Nomor: 5838/KPTS/Rb9.4.3/2024					Desa Payaman Kecamatan Nganjuk	Dinas PRKPP	320.000.000	320.000.000	100%	16	100%	
17	Kementrian PUPR	Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya dan RUK Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Timur Nomor: 5840/KPTS/Rb9.4.3/2024					Desa Werungotok Kecamatan Nganjuk	Dinas PRKPP	320.000.000	320.000.000	100%	16	100%	
18	Kementrian PUPR	Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya dan RUK Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Timur Nomor: 6942/KPTS/Rb9.4.3/2024					Desa Bagor Wetan Kecamatan Sukomoro	Dinas PRKPP	400.000.000	400.000.000	100%	20	100%	

No	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan TP	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Rincian Kegiatan				Lokasi	PD Pelaksanaan TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket
19	Kementrian PUPR	Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya dan RUK Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Timur Nomor: 6943/KPTS/Rb9.4.3/2024					Desa Berbek Kecamatan Berbek	Dinas PRKPP	260.000.000	260.000.000	100%	13	100%	
20	Kementrian PUPR	Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya dan RUK Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Timur Nomor: 6944/KPTS/Rb9.4.3/2024					Desa Tiripan Kecamatan Berbek	Dinas PRKPP	400.000.000	400.000.000	100%	20	100%	
21	Kementrian PUPR	Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya dan RUK Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Timur Nomor: 6945/KPTS/Rb9.4.3/2024					Desa Kedungpadang Kecamatan Rejoso	Dinas PRKPP	400.000.000	400.000.000	100%	20	100%	

No	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan TP	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Rincian Kegiatan				Lokasi	PD Pelaksanaan TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket
22	Kementrian PUPR	Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya dan RUK Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Timur Nomor: 6946/KPTS/Rb9.4.3/2024					Desa Puhkerep Kecamatan Rejoso	Dinas PRKPP	400.000.000	400.000.000	100%	20	100%	
23	Kementrian PUPR	Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya dan RUK Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Timur Nomor: 6947/KPTS/Rb9.4.3/2024					Desa Klagen Kecamatan Rejoso	Dinas PRKPP	400.000.000	400.000.000	100%	20	100%	
24	Kementrian PUPR	Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya dan RUK Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Timur Nomor: 6948/KPTS/Rb9.4.3/2024					Desa Sidokare Kecamatan Rejoso	Dinas PRKPP	400.000.000	400.000.000	100%	20	100%	

No	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan TP	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Rincian Kegiatan				Lokasi	PD Pelaksanaan TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket
25	Kementrian PUPR	Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya dan RUK Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Timur Nomor: 6949/KPTS/Rb9.4.3/2024					Desa Kendalrejo Kecamatan Bagor	Dinas PRKPP	400.000.000	400.000.000	100%	20	100%	
26	Kementrian PUPR	Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya dan RUK Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Timur Nomor: 6950/KPTS/Rb9.4.3/2024					Desa Kutorejo Kecamatan Bagor	Dinas PRKPP	400.000.000	400.000.000	100%	20	100%	
27	Kementrian PUPR	Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya dan RUK Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Timur Nomor: 6951/KPTS/Rb9.4.3/2024					Desa Ngadipiro Kecamatan Wilangan	Dinas PRKPP	440.000.000	440.000.000	100%	22	100%	

No	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan TP	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Rincian Kegiatan				Lokasi	PD Pelaksanaan TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket
28	Kementrian PUPR	Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya dan RUK Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Timur Nomor: 6952/KPTS/Rb9.4.3/2024					Desa Ngasem Kecamatan Jatikalen	Dinas PRKPP	640.000.000	640.000.000	100%	32	100%	
29	Kementrian PUPR	Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya dan RUK Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Timur Nomor: 6953/KPTS/Rb9.4.3/2024					Desa Pulowetan Kecamatan Jatikalen	Dinas PRKPP	400.000.000	400.000.000	100%	20	100%	
30	Kementrian PUPR	Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya dan RUK Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Timur Nomor: 6954/KPTS/Rb9.4.3/2024					Desa Ngetos Kecamatan Ngetos	Dinas PRKPP	520.000.000	520.000.000	100%	26	100%	

No	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan TP	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Rincian Kegiatan				Lokasi	PD Pelaksanaan TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket
31	Kementrian PUPR	Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya dan RUK Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Timur Nomor: 6955/KPTS/Rb9.4.3/2024					Desa Nglawak Kecamatan Prambon	Dinas PRKPP	400.000.000	400.000.000	100%	20	100%	
32	Kementrian PUPR	Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya dan RUK Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Timur Nomor: 6956/KPTS/Rb9.4.3/2024					Desa Rowoharjo Kecamatan Prambon	Dinas PRKPP	400.000.000	400.000.000	100%	20	100%	
33	Kementrian PUPR	Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya dan RUK Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Timur Nomor: 6957/KPTS/Rb9.4.3/2024					Desa Ngliman Kecamatan Sawahan	Dinas PRKPP	540.000.000	540.000.000	100%	27	100%	

No	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan TP	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Rincian Kegiatan				Lokasi	PD Pelaksanaan TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket
34	Kementrian PUPR	Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya dan RUK Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Timur Nomor: 6958/KPTS/Rb9.4.3/2024					Desa Sidorejo Kecamatan Sawahan	Dinas PRKPP	220.000.000	220.000.000	100%	11	100%	
35	Kementrian PUPR	Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya dan RUK Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Timur Nomor: 6959/KPTS/Rb9.4.3/2024					Desa Plosoharjo Kecamatan Pace	Dinas PRKPP	400.000.000	400.000.000	100%	20	100%	
36	Kementrian PUPR	Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya dan RUK Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Timur Nomor: 6960/KPTS/Rb9.4.3/2024					Desa Ngepeh Kecamatan Loceret	Dinas PRKPP	40.000.000	40.000.000	100%	2	100%	

No	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan TP	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Rincian Kegiatan				Lokasi	PD Pelaksanaan TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket
37	Kementrian PUPR	Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya dan RUK Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Timur Nomor: 6961/KPTS/Rb9.4.3/2024					Desa Ngelaban Kecamatan Loceret	Dinas PRKPP	240.000.000	240.000.000	100%	12	100%	
38	Kementrian PUPR	Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya dan RUK Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Timur Nomor: 6962/KPTS/Rb9.4.3/2024					Desa Sawahan Kecamatan Lengkong	Dinas PRKPP	420.000.000	420.000.000	100%	21	100%	
39	Kementrian PUPR	Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya dan RUK Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Timur Nomor: 6963/KPTS/Rb9.4.3/2024					Desa Cangkringan Kecamatan Nganjuk	Dinas PRKPP	400.000.000	400.000.000	100%	20	100%	

No	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan TP	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Rincian Kegiatan				Lokasi	PD Pelaksanaan TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket
40	Kementrian PUPR	Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya dan RUK Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Timur Nomor: 6964/KPTS/Rb9.4.3/2024					Desa Kartoharjo Kecamatan Nganjuk	Dinas PRKPP	400.000.000	400.000.000	100%	20	100%	
41	Kementrian PUPR	Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya dan RUK Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Timur Nomor: 6965/KPTS/Rb9.4.3/2024					Desa Banjarsari Kecamatan Ngronggot	Dinas PRKPP	180.000.000	180.000.000	100%	9	100%	

d. Permasalahan dan Kendala

Dalam melaksanakan tugas pembantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk, antara lain:

1. Sasaran penerima bantuan sudah ditentukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan usulan dari pokir anggota DPR-RI, tanpa berkoordinasi dengan Dinas Perumahan Raakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan selaku Perangkat Daerah Pengampu urusan perumahan, sehingga terkadang kurang tepat sasaran.
2. Keterbatasan kewenangan perangkat daerah Kabupaten Nganjuk sehingga apabila ada hambatan/kendala dalam proses pembangunan rumah, tidak bisa melakukan intervensi pemecahan masalahnya.
3. Rendahnya partisipasi aparat desa dalam proses pendampingan kepada penerima bantuan.

e. Saran dan Tindak Lanjut

1. Dalam penentuan penerima bantuan *by name by address*, hendaknya pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah/Perangkat Daerah sehingga bantuan bisa lebih tepat sasaran.
2. Memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah/Perangkat Daerah yang lebih besar sehingga bisa membantu menyelesaikan permasalahan/hambatan yang ada.
3. Aparat desa lebih proaktif dalam proses pendampingan kepada penerima bantuan.

3.2 Tugas Pembantuan Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk

a. Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pembantuan Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 adalah Surat Pengesahan DIPA-018.08.4.059185/2024 tanggal 19 November 2024 (Revisi ke – 13).

b. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk pada tahun 2024 diberikan oleh Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian melalui Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur.

Terdapat tiga sektor yang dilimpahkan menjadi tugas pembantuan, yaitu Pengolahan Sistem Penyediaan dan Penyediaan Pengawasan Alat Mesin Pertanian, Fasilitasi Pupuk dan Pestisida, serta Fasilitasi Pembiayaan Pertanian. Untuk melaksanakan tugas pembantuan,

anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 14.633.800.000,- (empat belas milyar enam ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan pada akhir tahun 2024 telah terealisasi sebesar Rp. 14.500.180.000,- (empat belas milyar lima ratus juta seratus delapan puluh ribu rupiah) atau 99,08 persen.

c. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Tabel. 3.2

Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk

No	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	SKPD Pelaksanaan TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket
1	Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian	Nomor : DIPA-018.08.4.059185/ 2024 tanggal 19 November 2024 (Revisi ke – 13)	**1. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas**	Kab. Nganjuk	Dinas Pertanian Kab. Nganjuk	**14.633.800.000**	**14.500.180.000**	**99,08**	**1 paket**	**100**	
			a. Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian			14.588.800.000	14.455.380.000	99,08	142 Unit	100	
			b. Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Peranian giatan Fasilitasi Pembiayaan Pertanian			15.000.000	15.000.000	100	1 Paket	100	
			c. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian			30.000.000	29.800.000	94,09	1 Paket	100	

d. Permasalahan dan Kendala

Dalam melaksanakan tugas pembantuan dari Kementerian Pertanian, tidak ada permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk selama kegiatan berlangsung.

e. Saran dan Tindak Lanjut

Sebagai bahan perbaikan dalam tugas pembantuan di masa mendatang, sudah ada Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan TNI AD terkait dukungan pelaksanaan kegiatan dalam mempercepat peningkatan produksi dan swasembada pangan.

BAB IV
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 18 bahwa penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. SPM disusun sebagai alat Pemerintah dan Pemerintahan Daerah untuk menjamin ketersediaan akses dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara merata. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa SPM adalah jenis pelayanan dasar yang merupakan hak konstitusional rakyat untuk memperolehnya.

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan. Oleh karena itu, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran wajib memperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Penerapan SPM menjadi suatu hal yang sangat penting dan mendasar karena dengan melaksanakan SPM, maka basis untuk kesejahteraan masyarakat dapat terbangun setidaknya bila semua sasaran minimal dapat terwujud.

Pelayanan dasar yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah terdiri dari 6 (enam) jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh 8 (delapan) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk, yaitu :

Tabel 4.1
Perangkat Daerah Pengampu SPM di Pemerintahan Kabupaten Nganjuk

No.	Perangkat Daerah	Bidang SPM	Jenis Pelayanan Dasar
1.	Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk	Urusan Pendidikan	1. Pendidikan anak usia dini 2. Pendidikan dasar 3. Pendidikan kesetaraan

No.	Perangkat Daerah	Bidang SPM	Jenis Pelayanan Dasar
2.	Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk	Urusan Kesehatan	1. Pelayanan kesehatan ibu hamil 2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin 3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir 4. Pelayanan kesehatan balita 5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar 6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif 7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut 8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi 9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus 10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat 11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis 12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*)
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk	Urusan Pekerjaan Umum	1. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari 2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik
4.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk	Urusan Perumahan Rakyat	1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah Kabupaten 2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah Kabupaten
5.	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk	Urusan Trantibumlinmas (Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban)	1. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum

No.	Perangkat Daerah	Bidang SPM	Jenis Pelayanan Dasar
6.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk	Urusan Trantibumlinmas (Sub Urusan Bencana Daerah)	1. Pelayanan informasi rawan bencana 2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
7.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nganjuk	Urusan Trantibumlinmas (Sub Urusan Kebakaran)	1. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
8.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk	Urusan Sosial	1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti 2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti 3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti 4. Gelandangan dan pengemis di luar panti 5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kabupaten

Masing-masing urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar tersebut di atas, dinilai berdasarkan kategori indeks pencapaian SPM terhadap capaian mutu minimal dan penerima layanan dasar sebagai berikut :

Tabel 4.2
Kategori Indeks Pencapaian SPM

No	Nilai	Kategori	Deskripsi
1	100	Tuntas Paripurna	Pencapaian SPM dengan mutu minimal layanan dasar, nilainya sama dengan 100
2	90-99	Tuntas Utama	Pencapaian SPM dengan mutu minimal layanan dasar, nilainya sama dengan 90 sampai dengan 99
3	80-89	Tuntas Madya	Pencapaian SPM dengan mutu minimal layanan dasar, nilainya sama dengan 80 sampai dengan 89
4	70-79	Tuntas Pratama	Pencapaian SPM dengan mutu minimal layanan dasar, nilainya sama dengan 70 sampai dengan 79
5	60-69	Tuntas Muda	Pencapaian SPM dengan mutu minimal layanan dasar, nilainya sama dengan 60 sampai dengan 69

No	Nilai	Kategori	Deskripsi
6	< 60	Belum Tuntas	Pencapaian SPM dengan mutu minimal layanan dasar, nilainya lebih kecil dari 60

Adapun capaian kinerja penerapan SPM Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 dapat diuraikan sebagaimana berikut :

4.1 URUSAN PENDIDIKAN

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, menyebutkan bahwa jenjang pendidikan yang diwajibkan untuk difasilitasi pelayanan dasarnya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota meliputi 3 (tiga) jenis, yakni :

a. Pendidikan Anak Usia Dini

   Penerima pelayanan dasar SPM pada jenjang pendidikan anak usia dini merupakan peserta didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

b. Pendidikan Dasar

   Penerima pelayanan dasar SPM pada jenjang pendidikan dasar (SD/MI-SMP/MTS) merupakan peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun.

c. Pendidikan Kesetaraan

   Penerima pelayanan dasar SPM pada jenjang pendidikan kesetaraan merupakan peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.

Pemerintah Kabupaten Nganjuk secara berkala terus melaksanakan upaya pemenuhan standar pelayanan minimal dengan merencanakan, menganggarkan, melaksanakan serta mengevaluasi implementasi program, kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan SPM bidang pendidikan. Ketiga jenjang pendidikan tersebut memiliki pengukuran capaian yang sama yaitu didasarkan pada pengukuran angka partisipasi murni pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Kesetaraan.

Pencapaian angka partisipasi murni pada jenjang pendidikan tertentu diasumsikan sebagai tolok ukur yang diyakini mampu menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten

Nganjuk telah memberikan fasilitas layanan pendidikan bagi penduduknya. Namun perlu dipahami bahwa pemenuhan standar pelayanan minimal bidang pendidikan diprioritaskan pada pemenuhan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu. Pemenuhan tersebut belum mampu dilaksanakan secara menyeluruh karena adanya beberapa hambatan yang diantaranya dukungan anggaran dan validitas data peserta didik yang tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya di satuan pendidikan.

4.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, menjelaskan bahwa dalam rangka pemenuhan capaian SPM Bidang Pendidikan dalam rangka mengukur tingkat partisipasi penduduk usia untuk bersekolah pada jenjang PAUD, Dasar dan Kesetaraan serta mengukur Rata-Rata Kemampuan Literasi dan Numerasi siswa Berdasarkan Hasil Asesmen Nasional diperlukan penetapan target pada awal perencanaan Tahun 2024. Adapun penetapan target SPM sesuai dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3
Target Pencapaian SPM Bidang Pendidikan

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	100%	Setiap Tahun
2.	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	100%	Setiap Tahun
		Rata-rata kemampuan literasi dan Numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen Nasional	100%	Setiap Tahun
3.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	Setiap Tahun

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
		Rata-rata kemampuan literasi dan Numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen Nasional	100%	Setiap Tahun

Dalam penetapan target pencapaian sebagaimana yang disebutkan di atas, perlu didukung oleh beberapa instrumen dan indikator pengukuran yang spesifik dan terukur. Oleh sebab itu, diperlukan aturan teknis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mengiringi regulasi tersebut. Dalam rangka mewujudkan pencapaian target SPM bidang pendidikan yang optimal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Mininal Pendidikan yang menjelaskan bahwa terdapat beberapa standarisasi yang perlu diterapkan oleh satuan pendidikan dalam memenuhi kriteria standar pelayanan minimal. Standarisasi tersebut terdiri dari standar satuan pendidikan dan standar biaya pribadi bagi peserta didik. Ketika seluruh pencapaian 8 standar nasional pendidikan, perlengkapan dasar serta pembiayaan pendidikan telah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk, maka optimalisasi terhadap capaian angka partisipasi murni pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan kesetaraan di Kabupaten Nganjuk dapat diwujudkan.

4.1.3 Realisasi

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan menjadi salah satu bagian terpenting dalam mewujudkan *good governance* dan *good government* di Kabupaten Nganjuk. Menciptakan sebuah tatanan pemerintahan yang transparan, akuntabel, adil dan merata dapat terwujud secara komprehensif dengan berupaya mencapai keberhasilan atas kinerja dari setiap urusan penyelenggara pemerintahan termasuk urusan bidang pendidikan. Oleh sebab itu, standar pelayanan minimal bidang pendidikan hadir sebagai tolok ukur perwujudan sinergitas atas layanan pemerintah kepada masyarakat di bidang pendidikan. Secara keseluruhan, capaian SPM Pendidikan di Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1) Pendidikan Anak Usia Dini

Pada tahun 2024, angka partisipasi murni pada jenjang pendidikan anak usia dini dapat tercapai dengan baik. Hal ini didasarkan pada perhitungan prosentase antara jumlah anak usia 5-6 tahun yang menempuh jenjang pendidikan anak usia dini (TK dan RA) dibandingkan dengan jumlah seluruh anak usia 5-6 tahun di Kabupaten

Nganjuk yang menjadi sasaran penerima layanan. Adapun rumus dan rincian perhitungan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

$$\text{APM PAUD} = \frac{\text{Jumlah anak usia 5-6 tahun pada jenjang PAUD}}{\text{Jumlah sasaran anak usia 5-6 tahun di Kabupaten}} \text{ x } 100\%$$

$$= \frac{27.481}{27.481} \text{ x } 100\%$$

$$= 100\%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa tingkat partisipasi anak usia 5-6 tahun pada satuan Pendidikan TK dan RA terealisasi sebesar 100%. Pencapaian tersebut menjelaskan bahwa penduduk usia 5-6 tahun yang menjadi sasaran penerima layanan telah bersekolah secara tepat waktu pada pendidikan anak usia dini.

2) Pendidikan Dasar

Pada Tahun 2024, angka partisipasi sekolah pada pendidikan dasar tercapai sangat tinggi. Hal tersebut didasarkan pada perhitungan prosentase antara anak pada usia 7-15 tahun pada jenjang SD/MI/SMP/MTs/Sederajat dibandingkan dengan anak usia 7-15 tahun di Kabupaten Nganjuk yang menjadi sasaran penerima layanan. Adapun rumus dan rincian perhitungan sebagaimana pencapaian tersebut diatas adalah sebagai berikut :

a. Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar yaitu:

$$\text{APM Pend. Dasar} = \frac{\text{Jumlah anak usia 7-15 tahun pada jenjang Pendidikan Dasar}}{\text{Jumlah sasaran anak usia 7-15 tahun di Kabupaten}} \text{ x } 100\%$$

$$= \frac{137.110}{137.110} \text{ x } 100\%$$

$$= 100\%$$

Berdasarkan pada perhitungan tersebut, dapat disampaikan bahwa tingkat partisipasi anak rentang usia 7-15 tahun pada jenjang pendidikan dasar sebesar 100%. Pencapaian tersebut menjelaskan bahwa penduduk usia 7-15 tahun yang menjadi sasaran penerima layanan telah bersekolah formal secara tepat waktu sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Pemerintah.

b. Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan Hasil Asesmen Nasional yaitu :

Berdasarkan hasil asesmen nasional pada tahun 2024 rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa terealisasi sebesar 80,62%. Dibandingkan realisasi pada tahun sebelumnya telah meningkat sebesar 16,95% dari hasil asesmen pada tahun 2023. Hal ini menjelaskan bahwa peserta didik telah memahami teks dan informasi, kemampuan membaca, kemampuan analisa menggunakan alat perhitungan bilangan yang dapat diterapkan pada kehidupan sehari-hari.

3) Pendidikan Kesetaraan

Pendidikan kesetaraan menjadi salah satu jenjang pendidikan non formal yang dimanfaatkan beberapa anak usia sekolah pada rentang usia 7-18 tahun sebagai alternatif jalur pendidikan non formal ketika terdapat peserta didik yang belum mampu untuk menyelesaikan dan menuntaskan pendidikan formal. Jalur pendidikan kesetaraan menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam mewujudkan capaian angka partisipasi murni di Kabupaten Nganjuk. Untuk mengetahui realisasi standar pelayanan minimal pendidikan kesetaraan di Kabupaten Nganjuk, dapat diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut :

a. Jumlah warga negara usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan yaitu:

$$\text{APM Kesetaraan} = \frac{\begin{array}{c}\text{Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan Dasar dan Menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di Pendidikan Kesetaraan}\end{array}}{\begin{array}{c}\text{Jumlah sasaran anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah}\end{array}} \text{ x } 100\%$$

$$= \frac{553}{553} \text{ x } 100\%$$

$$= 100\%$$

Berdasarkan pada perhitungan tersebut, dapat disampaikan bahwa tingkat partisipasi penduduk rentang usia 7-18 tahun pada jenjang pendidikan kesetaraan adalah sebesar 100%. Pencapaian tersebut menjelaskan bahwa penduduk usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan formal telah tuntas bersekolah formal secara tepat waktu sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Pemerintah.

b. Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan Hasil Asesmen Nasional yaitu :

Berdasarkan hasil asesmen nasional pada tahun 2024 rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa terealisasi sebesar 63,52%. Dibandingkan realisasi pada tahun sebelumnya telah meningkat sebesar 12,46% dari hasil asesmen pada tahun 2023. Hal ini menjelaskan bahwa warga belajar telah memahami teks dan informasi, kemampuan membaca, kemampuan Analisa menggunakan alat perhitungan bilangan yang dapat diterapkan pada kehidupan sehari-hari.

Pencapaian terhadap pengukuran standar pelayanan minimal bidang pendidikan secara umum telah menunjukkan capaian keberhasilan yang sangat tinggi bagi Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Namun hal tersebut masih menyisakan beberapa hal yang memerlukan pemecahan permasalahan, antara lain berkaitan dengan realisasi atas standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

Berikut hasil capaian standar pelayanan minimal atas standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa pada masing-masing jenjang pendidikan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 :

Tabel 4.4
Capaian SPM Urusan Pendidikan Atas Standar Jumlah dan Kualitas Barang/Jasa

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM	**TUNTAS UTAMA**			**99.64%**
1 .	***Pendidikan Dasar Usia Dini***				***99.63%***
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (Bobot 80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00%**
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	27.481	27.481	0	100.00%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (Bobot 20%)				**19.63%**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	**98.15%**
	1. Angka partisipasi sekolah	29.977	27.481	2.496	91.67%
	2. Angka partisipasi murni	29.977	27.481	2.496	91.67%
	3. Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang	609	609	0	100.00%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	mendapatkan minimal akreditasi B				
	4. Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	2.717	2.717	0	100.00%
	5. Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	17	17	0	100.00%
	6. Kecukupan formasi guru ASN	253	253	0	100.00%
	7. Indeks distribusi guru	0.65	0.65	0	100.00%
	8. Proporsi PTK bersertifikat	64.3	64.3	0	100.00%
	9. Proporsi PTK penggerak	0.62	0.62	0	100.00%
2 .	***Pendidikan Dasar***				***99.78%***
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (Bobot 80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00%**
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	137.110	137.110	0	100.00%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (Bobot 20%)				**19.78%**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	**98.92%**
	SD				98.81 %
	1. Angka partisipasi kasar	95.513	88.144	7.369	92.28%
	2. Angka partisipasi sekolah	95.513	88.144	7.369	92.28%
	3. Kemampuan literasi	81.87	81.87	0	100.00%
	4. Kemampuan numerasi	73.88	73.88	0	100.00%
	5. Perbedaan Skor Literasi	3.18	3.18	0	100.00%
	6. Perbedaan Skor numerasi	1.26	1.26	0	100.00%
	7. Indeks iklim keamanan	75.31	75.31	0	100.00%
	8. Indeks iklim kebinekaan	75.46	75.46	0	100.00%
	9. Indeks iklim inklusivitas	58.29	58.29	0	100.00%
	10. Kecukupan formasi guru ASN	4.610	4.610	0	100.00%
	11. Indeks distribusi guru	0.75	0.75	0	100.00%
	12. Proporsi PTK bersertifikat	18.28	18.28	0	100.00%
	13, Proporsi PTK penggerak	214	214	0	100.00%
	SMP				99.03%
	1. Angka partisipasi kasar	52.257	48.966	3.291	93.70%
	2. Angka partisipasi sekolah	52.257	48.966	3.291	93.70%
	4. Kemampuan literasi	84.94	84.94	0	100.00%
	5. Kemampuan numerasi	81.79	81.79	0	100.00%
	6. Perbedaan Skor Literasi	3.62	3.62	0	100.00%
	7. Perbedaan Skor numerasi	1.5	1.5	0	100.00%
	8. Indeks iklim keamanan	69.67	69.67	0	100.00%
	9. Indeks iklim kebinekaan	73.82	73.82	0	100.00%
	Indeks iklim inklusivitas	55.9	55.9	0	100.00%
	10. Kecukupan formasi guru ASN	1.706	1.706	0	100.00%
	11. Indeks distribusi guru	0.67	0.67	0	100.00%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	12. Proporsi PTK bersertifikat	18.26	18.26	0	100.00%
	13. Proporsi PTK penggerak	47	47	0	100.00%
3 .	***Pendidikan Kesetaraan***				***99.51%***
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (Bobot 80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00%**
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani	553	553	0	100%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (Bobot 20%)				**19.51%**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	97.53%
	1. Angka partisipasi kasar	658	553	105	84.04%
	2. Angka partisipasi sekolah	658	553	105	84.04%
	3. Kemampuan literasi	46.36	59.1	-12.74	100.00%
	4. Kemampuan numerasi	47	67.93	-20.93	100.00%
	5. Perbedaan Skor Literasi	9.18	9.18	0	100.00%
	6. Perbedaan Skor numerasi	7.27	7.27	0	100.00%
	7. Indeks iklim keamanan	67.37	67.28	0.090000000000003	99.87%
	8. Indeks iklim kebinekaan	60.52	61.53	-1.01	100.00%
	9. Indeks iklim inklusivitas	52.24	55.94	-3.7	100.00 %
	10. Kecukupan formasi guru ASN	9	9	0	100.00%
	11. Indeks distribusi guru	0.9	0.9	0	100.00%
	12. Proporsi PTK bersertifikat	1	1	0	100.00%
	13. Proporsi PTK penggerak	5	5	0	100.00%

Sumber data : e-SPM Kementerian Dalam Negeri

Berdasarkan pada tabel pencapaian di masing-masing jenjang pendidikan tersebut dapat disimpulkan bahwa pada seluruh jenjang pendidikan yaitu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan yang merupakan komponen pada standar pelayanan minimal bidang pendidikan telah secara keseluruhan terpenuhi dan terfasilitasi secara memadai dan optimal. Hal ini menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Nganjuk berhasil dalam mengimplementasikan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.

4.1.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja yang ditetapkan dalam APBD untuk penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pendidikan oleh Pemerintah Daerah. Adapun besaran anggaran yang dialokasikan pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5
Alokasi Anggaran SPM Bidang Pendidikan

No	Pendanaan	Pagu Anggaran
1	Alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kab. Nganjuk Tahun 2024	3,132,415,645,374
2	Alokasi Anggaran Dinas Pendidikan	962.570.853.096
3	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Pada Dinas Pendidikan	269,575,928,184
4	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Sumber Lainnya Yang Sah Dan Tidak Mengikat (Contoh : Dana Desa, Kerjasama, Dana Bagi Hasil dan Lain-Lain)	269,575,928,184
	a. APBD DAU	79.514.287.400
	b. APBD DAK FISIK	56.534.916.000
	c. APBD DAK NON FISIK	133.526.724.784

Sumber data : e-SPM Kementerian Dalam Negeri

Berikut rincian alokasi anggaran dan realisasi pada setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan yang ditujukan untuk menunjang pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Tahun 2024 seperti yang tersaji pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.6
Alokasi Anggaran Penerapan SPM Bidang Pendidikan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE REKENING			ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	KAB. NGANJUK							254,219,251,431	246,303,914,840	96.89 %
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				1.01.02			254,219,251,431	246,303,914,840	96.89 %
	1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				1.01.02.2.01		163,322,246,800	157,605,148,203	96.50 %
		1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit				0	0	0%
		2	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang			1.01.02.2.01.0003	4,382,582,500	4,369,337,066	99.70 %
		3	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang			1.01.02.2.01.0004	5,466,827,500	5,456,353,096	99.81 %
		4	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Ruang			1.01.02.2.01.0005	7,744,241,850	7,722,056,598	99.71 %
		5	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit			1.01.02.2.01.0006	1,380,709,000	1,298,823,554	94.07 %
		6	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Unit				0	0	0%
		7	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang			1.01.02.2.01.0009	2,508,600,000	2,478,615,000	98.80 %
		8	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang			1.01.02.2.01.0010	186,440,000	186,440,000	100.00 %
		9	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Ruang			1.01.02.2.01.0011	820,250,000	804,408,643	98.07 %
		10	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Unit				0	0	0%
		11	Pengadaan Mebel Sekolah	Paket			1.01.02.2.01.0014	4,165,321,000	3,611,926,000	86.71 %
		12	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Paket				0	0	0%
		13	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Paket				0	0	0%
		14	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit				0	0	0%
		15	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Peserta didik				0	0	0%
		16	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Paket			1.01.02.2.01.0022	4,818,590,000	4,617,405,000	95.82 %
		17	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Peserta didik			1.01.02.2.01.0025	5,460,000,000	4,350,021,800	79.67 %
		18	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang				0	0	0%

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE REKENING			ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		19	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang			1.01.02.2.01.0027	1,380,000,000	1,244,057,600	90.15 %
		20	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan			1.01.02.2.01.0028	315,994,870	266,501,850	84.34 %
		21	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Satuan Pendidikan			1.01.02.2.01.0029	67,281,863,230	66,990,434,210	99.57 %
		22	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Orang			1.01.02.2.01.0030	8,472,060,000	8,472,060,000	100.00 %
		23	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Ruang			1.01.02.2.01.0031	11,362,675,000	11,334,160,000	99.75 %
		24	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Ruang				0	0	0%
		25	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Unit				0	0	0%
		26	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Dasar	Orang				0	0	0%
		27	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang				0	0	0%
		28	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital				0	0	0%
		29	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang				0	0	0%
		30	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen				0	0	0%
		31	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen				0	0	0%
		32	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Unit komunitas				0	0	0%
		33	Penyediaan infrastruktur TIK	Paket				0	0	0%
		34	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan				0	0	0%
		35	Penataan Ruang/Sudut Baca	Ruang				0	0	0%
		36	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku				0	0	0%
		37	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket			1.01.02.2.01.0046	3,848,550,000	3,636,645,000	94.49 %
		38	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang			1.01.02.2.01.0047	2,457,920,000	2,401,663,095	97.71 %
		39	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit			1.01.02.2.01.0048	1,917,720,950	1,669,332,999	87.05 %
		40	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang				0	0	0%
		41	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan			1.01.02.2.01.0050	640,000,000	552,646,100	86.35 %
		42	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang			1.01.02.2.01.0051	28,711,900,900	26,142,260,592	91.05 %
	JUMLAH INDIKATOR							163,322,246,800	157,605,148,203	96.50 %
	2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				1.01.02.2.02		65,558,037,631	63,893,520,568	97.46 %
		1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit				0	0	0%
		2	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang			1.01.02.2.02.0003	538,831,750	526,525,611	97.72 %
		3	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang				0	0	0%
		4	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Ruang				0	0	0%
		5	Pembangunan Laboratorium	Ruang			1.01.02.2.02.0006	1,105,540,000	1,090,061,211	98.60 %
		6	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Ruang				0	0	0%
		7	Pembangunan Asrama Sekolah	Unit				0	0	0%
		8	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Unit				0	0	0%
		9	Pembangunan Fasilitas Parkir	Unit				0	0	0%
		10	Pembangunan Kantin Sekolah	Unit				0	0	0%
		11	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit				0	0	0%
		12	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang			1.01.02.2.02.0014	6,190,378,500	5,811,133,837	93.87 %
		13	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang				0	0	0%
		14	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Ruang			1.01.02.2.02.0017	308,800,000	306,006,112	99.10 %
		15	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Ruang			1.01.02.2.02.0018	820,688,000	820,688,000	100.00 %

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE REKENING			ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Ruang			1.01.02.2.02.0019	496,600,000	485,429,133	97.75 %
		17	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Unit				0	0	0%
		18	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir	Unit				0	0	0%
		19	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	Unit				0	0	0%
		20	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit			1.01.02.2.02.0024	1,198,027,500	1,160,546,890	96.87 %
		21	Pengadaan Mebel Sekolah	Paket			1.01.02.2.02.0025	909,850,000	895,165,000	98.39 %
		22	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Paket				0	0	0%
		23	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Paket				0	0	0%
		24	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit				0	0	0%
		25	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Peserta didik				0	0	0%
		26	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Paket				0	0	0%
		27	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Paket			1.01.02.2.02.0035	272,425,000	251,395,000	92.28 %
		28	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Peserta didik			1.01.02.2.02.0038	1,935,500,000	1,656,247,400	85.57 %
		29	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang				0	0	0%
		30	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang			1.01.02.2.02.0040	856,626,381	713,765,450	83.32 %
		31	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan			1.01.02.2.02.0041	881,000,000	866,949,800	98.41 %
		32	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Satuan Pendidikan			1.01.02.2.02.0042	41,221,623,283	41,026,681,672	99.53 %
		33	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Orang			1.01.02.2.02.0043	2,364,876,717	2,247,891,300	95.05 %
		34	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Ruang			1.01.02.2.02.0044	978,550,500	954,133,000	97.50 %
		35	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	Ruang				0	0	0%
		36	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Unit				0	0	0%
		37	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Pertama	Orang				0	0	0%
		38	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang				0	0	0%
		39	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital				0	0	0%
		40	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang				0	0	0%
		41	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen				0	0	0%
		42	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen				0	0	0%
		43	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Unit komunitas				0	0	0%
		44	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan				0	0	0%
		45	Penataan Ruang/Sudut Baca	Ruang				0	0	0%
		46	Penyediaan infrastruktur TIK	Paket				0	0	0%
		47	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan			1.01.02.2.02.0058	1,174,922,000	1,000,876,350	85.19 %
		48	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang			1.01.02.2.02.0059	1,093,800,000	1,093,800,000	100.00 %
		49	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang				0	0	0%
		50	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku				0	0	0%
		51	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket			1.01.02.2.02.0062	1,567,458,000	1,562,212,620	99.67 %
		52	Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah	Unit				0	0	0%
		53	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang			1.01.02.2.02.0064	1,642,540,000	1,424,012,182	86.70 %
	JUMLAH INDIKATOR							65,558,037,631	63,893,520,568	97.46 %
	3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) K20240327112412				1.01.02.2.03		23,438,907,000	22,997,707,469	98.12 %
		1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Unit			1.01.02.2.03.0002	772,670,000	711,517,296	92.09 %

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE REKENING			ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Unit			1.01.02.2.03.0003	50,000,000	50,000,000	100.00 %
		3	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Unit				0	0	0%
		4	Pengadaan Mebel PAUD	Paket			1.01.02.2.03.0007	34,800,000	34,275,000	98.49 %
		5	Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	Paket				0	0	0%
		6	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Paket				0	0	0%
		7	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Peserta didik				0	0	0%
		8	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Paket			1.01.02.2.03.0012	523,040,000	519,160,000	99.26 %
		9	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Peserta didik			1.01.02.2.03.0013	647,850,000	452,960,950	69.92 %
		10	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Orang				0	0	0%
		11	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Orang				0	0	0%
		12	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Satuan Pendidikan			1.01.02.2.03.0017	498,000,000	434,089,300	87.17 %
		13	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Satuan Pendidikan			1.01.02.2.03.0018	19,616,700,000	19,580,570,000	99.82 %
		14	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Orang			1.01.02.2.03.0019	120,000,000	116,512,000	97.09 %
		15	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Unit				0	0	0%
		16	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Orang				0	0	0%
		17	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang				0	0	0%
		18	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital				0	0	0%
		19	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang				0	0	0%
		20	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen			1.01.02.2.03.0025	428,000,000	356,473,450	83.29 %
		21	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen				0	0	0%
		22	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang			1.01.02.2.03.0028	209,047,000	207,022,000	99.03 %
		23	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Unit komunitas				0	0	0%
		24	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang			1.01.02.2.03.0030	371,800,000	368,881,473	99.22 %
		25	Penyediaan infrastruktur TIK	Paket				0	0	0%
		26	Penataan Ruang/Sudut Baca	Ruang				0	0	0%
		27	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Ruang				0	0	0%
		28	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Peserta didik				0	0	0%
		29	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku				0	0	0%
		30	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Ruang				0	0	0%
		31	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan				0	0	0%
		32	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Ruang				0	0	0%
		33	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang				0	0	0%
		34	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit				0	0	0%
		35	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket			1.01.02.2.03.0041	167,000,000	166,246,000	99.55 %
		36	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit				0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR							23,438,907,000	22,997,707,469	98.12 %
	4	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan K20240327112444				1.01.02.2.04		1,900,060,000	1,807,538,600	95.13 %
		1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Unit				0	0	0%
		2	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Peserta didik				0	0	0%
		3	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	Paket				0	0	0%
		4	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Orang				0	0	0%

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	KODE REKENING			ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
					PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		5	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Orang				0	0	0%
		6	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Satuan Pendidikan			1.01.02.2.04.0016	110,000,000	95,485,100	86.80 %
		7	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Satuan Pendidikan			1.01.02.2.04.001	1,570,060,000	1,521,389,200	96.90 %
		8	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Orang			1.01.02.2.04.0018	50,000,000	41,115,250	82.23 %
		9	Pemeliharaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Unit				0	0	0%
		10	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Orang				0	0	0%
		11	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang				0	0	0%
		12	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital				0	0	0%
		13	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang				0	0	0%
		14	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen				0	0	0%
		15	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen				0	0	0%
		16	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Unit komunitas				0	0	0%
		17	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan				0	0	0%
		18	Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Orang				0	0	0%
		19	Penyediaan infrastruktur TIK	Paket				0	0	0%
		20	Penataan Ruang/Sudut Baca	Ruang				0	0	0%
		21	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Peserta didik				0	0	0%
		22	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket				0	0	0%
		23	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku				0	0	0%
		24	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang				0	0	0%
		25	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang				0	0	0%
		26	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Paket				0	0	0%
		27	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit				0	0	0%
		28	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang				0	0	0%
		29	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium	Ruang				0	0	0%
		30	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit				0	0	0%
		31	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Paket				0	0	0%
		32	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Peserta didik			1.01.02.2.04.0046	170,000,000	149,549,050	87.97 %
		33	Pembangunan Ruang Laboratorium	Ruang				0	0	0%
		34	Pengadaan Mebel Sekolah	Paket				0	0	0%
		35	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit				0	0	0%
		36	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Unit				0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR							1,900,060,000	1,807,538,600	95.13 %
	JUMLAH PROGRAM							254,219,251,431	246,303,914,840	96.89 %

Sumber data : e-SPM Kementerian Dalam Negeri

4.1.5 Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pendidikan. Berikut ini jumlah pegawai pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk :

Tabel 4.7
Jumlah ASN Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk

No.	JABATAN DINAS	Jumlah Pegawai (Orang)
1	Kepala Dinas	1
2	Sekretaris Dinas	0
3	Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama (SMP)	1
4	Widyaprada Ahli Muda	2
5	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda (Penyetaraan)	1
6	Pengadministrasian Kurikulum	1
7	Pengadministrasian Umum	2
8	Pengelola Data	1
9	Pengelola Data Sarana Dan Prasarana Pendidikan	1
10	Pengolah Data Dan Informasi	1
11	Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dan Pendidikan Non Formal	1
12	Widyaprada Ahli Muda	1
13	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda (Penyetaraan)	2
14	Pengadministrasian Perkantoran	1
15	Pengadministrasian Umum	1
16	Pengelola Data	1
17	Pengelola Kelembagaan Kursus Dan Pelatihan	1
18	Penyusun Program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Nonformal	1
19	Kepala Bidang Sekolah Dasar (SD)	1
20	Widyaprada Ahli Muda	1
21	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda (Penyetaraan)	1
22	Pengadministrasian Perkantoran	2
23	Pengadministrasian Umum	1
24	Pengelola Data Sarana Dan Prasarana Pendidikan	1
25	Penyusun Bahan Pembinaan Minat Dan Bakat	1
26	Pengolah Data Dan Informasi	4
27	Kepala Bidang Guru Dan Tenaga Kependidikan	1
28	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda (Penyetaraan)	1
29	Pengadministrasi Kependidikan	2
30	Pengadministrasian Umum	4
31	Pengelola Data	1
32	Pengelola Kepegawaian	1
33	Pengolah Data Dan Informasi	3
34	Pengelola Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	1
35	Perencana Ahli Muda (Penyetaraan)	1
36	Analis Perencanaan Evaluasi Dan Pelaporan	1
37	Pengelola Keuangan	1

No.	JABATAN DINAS	Jumlah Pegawai (Orang)
38	Bendahara	1
39	Pengadministrasian Keuangan	2
40	Pengelola Gaji	1
41	Verifikator Keuangan	1
42	Pengadministrasian Perkantoran	5
43	Pengelola Barang Milik Negara	1
44	Pengadministrasian Sarana Dan Prasarana	1
45	Pengolah Data Dan Informasi	2
46	Pengawas TK	17
47	Pengawas SD	53
48	Pengawas SMP	2
	Jumlah Keseluruhan	**136**

Adapun jumlah pegawai guru yang terlibat dalam penerapan SPM Bidang Pendidikan di satuan pendidikan Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut :

Tabel 4.8
Jumlah Guru di Satuan Pendidikan Per Kecamatan di Kabupaten Nganjuk

NO	KECAMATAN	TPA	SPS	KB	TK	SD	SMP	PKBM	SKB
1	BAGOR	0	11	50	131	294	58	1	0
2	BARON	8	2	67	82	261	103	13	0
3	BERBEK	0	0	33	91	303	80	0	0
4	GONDANG	0	5	50	111	264	112	0	0
5	JATIKALEN	0	2	31	29	131	36	5	0
6	KERTOSONO	0	0	73	135	294	216	0	0
7	LENGKONG	0	0	42	57	169	74	23	0
8	LOCERET	0	2	81	141	397	138	1	0
9	NGANJUK	17	0	87	190	418	355	1	10
10	NGETOS	0	0	37	86	198	53	1	0
11	NGLUYU	0	0	9	25	91	19	0	0
12	NGRONGGOT	0	0	66	98	279	100	10	0
13	PACE	0	9	59	100	313	93	0	0
14	PATIANROWO	0	2	50	90	217	75	0	0
15	PRAMBON	0	11	57	117	328	115	0	0
16	REJOSO	2	3	78	108	336	113	0	0
17	SAWAHAN	0	0	48	70	211	83	0	0
18	SUKOMORO	0	4	37	85	218	59	0	0
19	TANJUNGANOM	0	5	97	160	523	212	5	0
20	WILANGAN	0	0	37	49	155	42	0	0
	JUMLAH	**27**	**56**	**1089**	**1955**	**5400**	**2136**	**60**	**10**

Sumber data : Dinas Pendidikan Kab. Nganjuk

4.1.6 Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang pendidikan di Kabupaten Nganjuk masih terdapat beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi, antara lain:

1. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan belum memadai;
2. Kuantitas dan Kualitas pendidik belum merata;
3. Digitalisasi Bidang Pendidikan belum optimal;
4. Perencanaan berbasis data belum dilaksanakan secara optimal; dan
5. Pengelolaan dan Pembiayaan pendidikan belum optimal.

Berdasarkan pada permasalahan tersebut, maka dapat diberikan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan pemenuhan standar pelayanan minimal sebagai berikut :

1. Melaksanakan Bimbingan Teknis bagi guru terkait literasi dan numerasi kepada seluruuh satuan pendidikan;
2. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pendidikan;
3. Pemerataan Kuantitas dan Kualitas pendidik melalui program guru penggerak dan pengangkatan PPPK;
4. Melaksanakan upgrade aplikasi pendidikan; dan
5. Pengelolaan dan Pembiayaan pendidikan yang memadai.

4.2 URUSAN KESEHATAN

4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Seseorang tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya jika berada dalam kondisi tidak sehat sehingga kesehatan merupakan modal setiap individu untuk meneruskan kehidupannya secara layak. Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menjamin setiap warga negara memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan. Sebagai suatu kebutuhan dasar, setiap individu bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga pada dasarnya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap kesehatan adalah tanggung jawab setiap warga negara.

Meskipun upaya untuk memenuhi kebutuhan bidang kesehatan melekat pada setiap warga negara, namun mengingat karakteristik barang/jasa kesehatan tidak dapat diusahakan/diproduksi sendiri secara langsung oleh masing-masing warga negara, melainkan harus ada pihak lain yang secara khusus memproduksi dan menyediakan,

maka penyediaan barang/jasa bidang kesehatan mutlak memerlukan keterlibatan pemerintah untuk :

1) Menjamin ketersediaan barang/jasa kesehatan yang dapat diperoleh warga negara yang memerlukan sesuai dengan kebutuhan; dan
2) Menyediakan barang/jasa kesehatan bagi warga negara yang tidak mampu memenuhi kebutuhan di bidang kesehatan.

Sebagaimana yang telah diamanatkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal, bahwa kesehatan menjadi salah satu urusan wajib yang diberikan standarisasi pelayanan minimal dalam rangka penyelenggaraan kesehatan. Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan menjadi hal yang mutlak untuk diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah sehingga diharapkan mampu meningkatkan kualitas kesehatan pada seluruh penduduk di Kabupaten Nganjuk. Hal tersebut cukup bersinergi dengan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk yang tertuang di dalam Tricita Bhakti dan salah satu arah capaian pembangunan pada unsur Peningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat. Pelaksanaan tersebut bukan hal yang mudah, namun memerlukan perumusan secara lebih terstruktur dari aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pada setiap hasil program dan kegiatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk.

Pelayanan dasar bidang kesehatan yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan. Terdapat 12 jenis pelayanan dasar bidang kesehatan yang diampu oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, antara lain :

1) Pelayanan kesehatan ibu hamil;
2) Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
3) Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
4) Pelayanan kesehatan balita;
5) Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
6) Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
7) Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
8) Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
9) Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus;
10) Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
11) Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan

12) Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus)*.

4.2.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu. Adapun penetapan target SPM Bidang Kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut :

Tabel 4.9
Target Pencapaian SPM Bidang Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
4.	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah warga negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah warga negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human*	Jumlah warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human*	100%	Setiap Tahun

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
	Immunodeficiency Virus)	*Immunodeficiency Virus)*yang mendapatkan layanan kesehatan		

4.2.3 Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang telah ditetapkan sebelumnya. Berikut kami tampilkan pengukuran pencapaian kinerja standar pelayanan minimal bidang kesehatan :

a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan menyebutkan bahwa setiap ibu hamil harus mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten wajib memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai dengan standar yang ditetapkan kepada semua ibu hamil di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Untuk mengetahui capaian standar pelayanan minimal pada ibu hamil di Kabupaten Nganjuk, dapat diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil} = \frac{\text{Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di Kabupaten}}{\text{Jumlah sasaran ibu hamil di Kabupaten}} \times 100\%$$

$$= \frac{9.813}{9.813} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Pada tahun 2024, jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar adalah sebanyak 9.813 orang, sedangkan jumlah sasaran ibu hamil di Kabupaten Nganjuk sebanyak 9.813 orang. Dengan demikian, cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil di Kabupaten Nganjuk adalah sebesar 100%.

b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Pemerintah Daerah wajib memberikan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar kepada semua ibu bersalin yang ada di wilayah Kabupaten dalam kurun waktu satu tahun. Untuk mengetahui capaian standar pelayanan minimal pada ibu hamil di Kabupaten Nganjuk, dapat diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan} = \frac{\text{Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten}}{\text{Jumlah sasaran ibu bersalin di Kabupaten}} \times 100\%$$

$$= \frac{10.825}{10.825} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Pada tahun 2024, jumlah ibu bersalin yang mendapat pelayanan kesehatan sebanyak 10.825 orang sedangkan jumlah sasaran ibu bersalin di Kabupaten Nganjuk sebanyak 10.825 orang. Dengan demikian, cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin di Kabupaten Nganjuk adalah sebesar 100%.

c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Pemerintah Daerah berkewajiban dalam memberikan fasilitas pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar kepada bayi usia 0-28 hari di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Untuk mengetahui hasil capaian standar pelayanan minimal pada bayi baru lahir di Kabupaten Nganjuk, dapat diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir} = \frac{\text{Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar}}{\text{Jumlah sasaran bayi baru lahir di Kabupaten}} \times 100\%$$

$$= \frac{10.814}{10.814} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Pada tahun 2024, jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar adalah sebanyak 10.814 bayi sedangkan jumlah sasaran bayi baru lahir di Kabupaten Nganjuk sebanyak 10.814 bayi. Dengan demikian, cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir di Kabupaten Nganjuk adalah sebesar 100%.

d. Pelayanan Kesehatan Balita

Capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan balita usia 0-59 bulan dinilai dari cakupan balita yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Untuk mengetahui hasil capaian standar pelayanan minimal pada balita di Kabupaten Nganjuk, dapat diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar} = \frac{\text{Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah sasaran balita di Kabupaten}} \times 100\%$$

$$= \frac{53{,}783}{53{,}783} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Pada tahun 2024, jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar adalah sebanyak 53.783 balita sedangkan jumlah sasaran balita di Kabupaten Nganjuk sebanyak 53.783 balita. Dengan demikian, cakupan pelayanan kesehatan anak balita di Kabupaten Nganjuk mencapai 100%.

e. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar

Capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan pada anak usia pendidikan dasar dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan anak setingkat pendidikan dasar sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun ajaran. Untuk mengetahui hasil capaian standar pelayanan minimal pada anak usia pendidikan dasar di Kabupaten Nganjuk, dapat diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar} = \frac{\text{Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah sasaran anak usia pendidikan dasar di Kabupaten}} \times 100\%$$

$$= \frac{143.827}{143.827} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Pada tahun 2024, jumlah anak usia pendididkan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar adalah sebanyak 143.827 anak sedangkan jumlah sasaran anak usia pendidikan dasar di Kabupaten Nganjuk sebanyak 143.827

anak. Dengan demikian, cakupan pelayanan kesehatan pada anak usia pendidikan dasar di Kabupaten Nganjuk mencapai 100%.

f. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan kesehatan dalam bentuk edukasi dan skrining kesehatan sesuai standar kepada penduduk yang berusia 15-59 tahun di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar dilaksanakan melalui edukasi kesehatan termasuk keluarga berencana dan skrining faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular. Untuk mengetahui hasil capaian standar pelayanan minimal pada penduduk usia produktif di Kabupaten Nganjuk, dapat diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar} = \frac{\text{Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah sasaran orang usia 15-59 tahun di Kabupaten}} \times 100\%$$

$$= \frac{694{,}131}{694{,}131} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Untuk capaian tahun 2024, jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai standar adalah sebanyak 694.131 jiwa, sedangkan jumlah sasaran orang usia 15-59 tahun di Kabupaten Nganjuk sebanyak 694.131 jiwa. Dengan demikian, capaian kinerja pelayanan kesehatan yang diberikan kepada penduduk usia produktif mencapai 100%.

g. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut

Capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar pada warga negara usia 60 tahun atau lebih dinilai dari cakupan warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Untuk mengetahui hasil capaian standar pelayanan minimal pada penduduk usia lanjut di Kabupaten Nganjuk, dapat diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase warga usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar} = \frac{\text{Jumlah warga berusia 60 tahun atau lebih yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah sasaran warga berusia 60 tahun atau lebih yang ada di Kabupaten}} \times 100\%$$

$$= \frac{147{,}739}{147{,}739} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Pada tahun 2024, jumlah penduduk lansia yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar adalah sebanyak 147.739 jiwa sedangkan jumlah sasaran warga lansia di Kabupaten Nganjuk sebanyak 147.739 jiwa. Dengan demikian, capaian pelayanan kesehatan pada usia lanjut di Kabupaten Nganjuk mencapai 100%.

h. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita hipertensi, dinilai dari persentase jumlah penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Untuk mengetahui hasil capaian standar pelayanan minimal pada penderita hipertensi di Kabupaten Nganjuk, dapat diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar} = \frac{\text{Jumlah penderita hipertensi usia} \geq 15 \text{ tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah estimasi penderita hipertensi usia} \geq 15 \text{ tahun di Kabupaten}} \times 100\%$$

$$= \frac{214{,}542}{214{,}542} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Pada tahun 2024, jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar tercatat sebanyak 214.542 jiwa, sedangkan jumlah estimasi penderita hipertensi di Kabupaten Nganjuk sebanyak 214.542 jiwa. Dengan demikian, capaian pelayanan kesehatan yang diberikan kepada penderita hipertensi mencapai 100%.

i. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus

Capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita diabetes mellitus dinilai dari persentase penderita DM usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Untuk mengetahui hasil capaian standar pelayanan minimal pada penderita diabetes mellitus di Kabupaten Nganjuk, dapat diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar} = \frac{\text{Jumlah penderita diabetes mellitus usia} \geq 15 \text{ tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah estimasi penderita diabetes mellitus usia} \geq 15 \text{ tahun di Kabupaten}} \times 100\%$$

$$= \frac{22.841}{22.841} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Pada tahun 2024, jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar adalah sebanyak 22.841 jiwa, sedangkan jumlah estimasi penderita DM di Kabupaten Nganjuk sebanyak 22.841 jiwa. Dengan demikian, capaian kinerja pelayanan kesehatan yang diberikan kepada penderita diabetes mellitus mencapai 100%.

j. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat

Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Capaian kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi ODGJ Berat, dinilai dari jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan sesuai standar. Untuk mengetahui hasil capaian standar pelayanan minimal kepada orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat di Kabupaten Nganjuk, dapat diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar} = \frac{\text{Jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar}}{\text{Jumlah ODGJ berat di Kabupaten}} \times 100\%$$

$$= \frac{2.197}{2.197} \text{ x } 100\%$$

$$= 100\%$$

Pada tahun 2024, jumlah penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar adalah sebanyak 2.197 orang, sedangkan jumlah penderita ODGJ di Kabupaten sebanyak 2.197 orang. Dengan demikian, capaian kinerja pelayanan kesehatan jiwa yang diberikan kepada ODGJ berat mencapai 100%.

k. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

Kasus tuberkulosis paru terkonfirmasi bakteriologis adalah pasien tuberkulosis yang terbukti positif pada hasil pemeriksaan contoh uji biologinya (sputum dan jaringan) melalui pemeriksaan mikroskopis langsung, Tes Cepat Molekuler (TCM) tuberkulosis, atau biakan. Seluruh orang terduga penderita TBC dilakukan pemeriksaan/test lebih lanjut untuk memastikan gejala yang diderita adalah benar-benar TBC. Untuk mengetahui hasil capaian standar pelayanan minimal kepada orang terduga penderita tuberkulosis di Kabupaten Nganjuk, maka dapat diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar} = \frac{\text{Jumlah orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah orang terduga TBC di Kabupaten}} \text{ x } 100\%$$

$$= \frac{10.164}{10.164} \text{ x } 100\%$$

$$= 100\%$$

Pada tahun 2024, jumlah orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar adalah sebanyak 10.164 orang, sedangkan jumlah orang terduga TBC di Kabupaten sebanyak 10.164 orang. Dengan demikian, capaian kinerja pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis mencapai 100%.

l. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus*)

Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus HIV adalah pelayanan kesehatan sesuai standar kepada setiap orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus* =

HIV) yang meliputi: (1) edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan, dan (2) skrining dilakukan dengan pemeriksaan tes cepat HIV minimal 1 kali dalam setahun. Orang yang memiliki risiko terinfeksi virus HIV adalah ibu hamil, pasien TBC, pasien Infeksi Menular Seksual (IMS), penjaja seks, lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki (LSL), transgender/waria, pengguna napza suntik (penasun), dan warga Binaan Pemasyarakatan. Untuk mengetahui hasil capaian standar pelayanan minimal kepada orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) di Kabupaten Nganjuk, maka dapat diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar} = \frac{\text{Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV di Kabupaten}} \times 100\%$$

$$= \frac{25{,}234}{25{,}234} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Dari 25.234 orang yang beresiko terinfeksi HIV, sebanyak 25.234 orang telah mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar sehingga capaian kinerja sebesar 100%.

Berikut hasil capaian standar pelayanan minimal atas standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa pada masing-masing jenis pelayanan kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan sebagai berikut :

Tabel 4.10
Capaian SPM Urusan Kesehatan Atas Standar Jumlah dan Kualitas Barang/Jasa

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM	**TUNTAS UTAMA**			**96.12 %**
1.	***Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil***				***97.44 %***
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (Bobot 80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00 %**
	Jumlah yang Harus Dilayani	9.813	9.813	0	100.00 %
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (Bobot 20%)				**17.44 %**
	Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	**Jumlah yang harus dilayani**	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang**	**87.20 %**

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
				belum terlayani	
	1. Vaksin Tetanus Difteri (Td)	11.256	11.256	0	100.00%
	2. Tablet tambah darah	1.766.340	1.766.340	0	100.00%
	3. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	9.813	9.813	0	100.00%
	4. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	9.813	9.813	0	100.00%
	5. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	9.813	9.813	0	100.00%
	6. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin	9.813	9.813	0	100.00%
	7. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	9.813	9.813	0	100.00%
	8. Kartu ibu/rekam medis ibu	9.813	9.813	0	100.00%
	9. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	9.813	9.813	0	100.00%
	10. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	9.813	9.813	0	100.00%
	11. Gel USG	721	721	0	100.00%
	12. Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi;	524	293	231	55.92%
	13. Tenaga kesehatan : Perawat	1.341	1.341	0	100.00%
	14. Tenaga kesehatan : Bidan	1.132	781	351	68.99%
	15. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	1.132	414	718	36.57%
	16. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	396	83	313	20.96%
	17. Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6)	9.813	9.813	0	100.00%
2.	***Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin***				***95.17%***
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (Bobot 80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00%**
	Jumlah yang Harus Dilayani	10.825	10.825	0	100.00%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (Bobot 20%)				**15.17%**
	Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	**Jumlah yang harus dilayani**	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**75.83%**
	1. Formulir Partograf	10.825	10.825	0	100.00%
	2. Kartu ibu (rekam medis)	10.825	10.825	0	100.00%
	3. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	9.813	9.813	0	100.00%
	4. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	9.813	9.813	0	100.00%
	5. Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi	524	293	231	55.92%
	6. Tenaga kesehatan : Bidan	1.132	781	351	68.99 %
	7. Tenaga kesehatan : Perawat	1.341	1.341	0	100.00%
	8. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	1.132	414	718	36.57%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	9. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	396	83	313	20.96%
3.	***Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir***				***95.53%***
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (Bobot 80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00%**
	Jumlah yang Harus Dilayani :	10.814	10.814	0	100.00%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (Bobot 20%)				**20.00%**
	Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	**Jumlah yang harus dilayani**	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**77.67%**
	1. Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)	11.321	11.321	0	100.00%
	2. Vitamin K1 injeksi	10.814	10.814	0	100.00%
	3. Salep/tetes mata antibiotik	10.814	10.814	0	100.00%
	4. Formulir bayi baru lahir	10.814	10.814	0	100.00%
	5. Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	32.442	32.442	0	100.00%
	6. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	9.813	9.813	0	100.00%
	7. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	9.813	9.813	0	100.00%
	8. Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis Anak	524	289	235	55.15%
	9. Tenaga kesehatan : Bidan	1.132	781	351	68.99%
	10. Tenaga kesehatan : Perawat	1.341	1.341	0	100.00%
	11. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	1.132	414	718	36.57%
	12. Tenaga kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	1.132	65	1067	5.74%
	13. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	396	83	3131	20.96%
	14. Kader Kesehatan	284	284	0	100.00%
4.	***Pelayanan Kesehatan Balita***				***98.58%***
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (Bobot 80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00 %**
	Jumlah yang Harus Dilayani	53.783	53.783	0	100.00%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (Bobot 20%)				**18.58%**
	Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	**Jumlah yang harus dilayani**	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**92.90%**
	1. Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	53.783	53.783	0	100.00%
	2. Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	53.783	53.783	0	100.00%
	3. Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	9.813	9.813	0	100.00%
	4. Vitamin A Biru	11.751	11.751	0	100.00%
	5. Vitamin A Merah	49.027	49.027	0	100.00%
	6. Vaksin imunisasi dasar: BCG	11.074	11.074	0	100.00%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	7. Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	11.557	11.557	0	100.00%
	8. Vaksin imunisasi dasar: IPV	11.262	11.262	0	100.00%
	9. Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib	11.240	11.240	0	100.00%
	10. Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella	11.887	11.887	0	100.00%
	11. Vaksin imunisasi lanjutan: DPT -HB - Hib	12.736	12.736	0	100.00%
	12. Vaksin imunisasi lanjutan: Campak - Rubella	12.728	12.728	0	100.00%
	13. Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	53.783	53.783	0	100.00%
	14. Peralatan Anafilaktik	284	284	0	100.00%
	15. Formula Terapi Gizi Buruk	353	353	0	100.00%
	16. Tenaga medis : Dokter	453	276	177	100.00%
	17. Tenaga kesehatan : Bidan	1.132	781	351	100.00%
	18. Tenaga kesehatan : Perawat	1.341	1.341	0	100.00%
	19. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	396	83	313	100.00%
	20. Guru PAUD	284	284	0	100.00%
	21. Kader Kesehatan	6.625	6.625	0	100.00%
5.	***Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar***				***96.52%***
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (Bobot 80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00%**
	Jumlah yang Harus Dilayani	143.827	143.827	0	100.00%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (Bobot 20%)				**16.52%**
	Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	**Jumlah yang harus dilayani**	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**82.58%**
	1. Buku raport kesehatanku	143.827	143.827	0	100.00%
	2. Buku pemantauan kesehatan	209	209	0	100.00%
	3. Kuesioner skrining kesehatan	143.827	143.827	0	100.00%
	4. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	919	919	0	100.00%
	5. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	209	209	0	100.00%
	6. Tablet Tambah Darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah	1.866.696	1.866.696		
	7. Alat Pemeriksaan Hb	20	20	0	100.00%
	8. Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7	8.672	8.672	0	100.00%
	9. Media promosi kesehatan	919	919	0	100.00%
	10. Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)	14.754	14.754	0	100.00%
	11. Tenaga medis : Dokter/Dokter gigi	679	368	311	100.00%
	12. Tenaga kesehatan : Bidan	1.132	781	351	100.00%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	13. Tenaga kesehatan : Perawat	1.341	1.341	0	100.00%
	14. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	396	83	313	100.00%
	15. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	1.132	414	718	100.00%
	16. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	1.132	65	1.067	100.00%
	17. Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru	1.032	1.032	0	100.00%
	18. Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/peer conselor	1.032	1.032	0	100.00%
6.	***Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif***				***97.44%***
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (Bobot 80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00 %**
	Jumlah yang Harus Dilayani	694.131	694.131	0	100.00%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (Bobot 20%)				**17.44%**
	Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	**Jumlah yang harus dilayani**	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**87.19%**
	1. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	59	59	0	100.00%
	2. Alat : Alat Ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	20	20	0	100.00%
	3. Alat : Tensimeter	425	425	0	100.00%
	4. Alat : Glukometer	425	425	0	100.00%
	5. Alat: Alat Pemeriksa Hb	20	241	0	100.00%
	6. Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	694.131	258	0	100.00%
	7. Alat : KIT IVA Tes	20	30.000	0	100.00%
	8. Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	7.097	30.000	0	100.00%
	9. Kit Opthalmologi Komunitas	20	30.000	0	100.00%
	10. Kuesioner PUMA	12.531	107	0	100.00%
	11. Alat Pelayanan KB	225	78.932	0	100.00%
	12. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	694.131	122	0	100.00%
	13. Vaksin Tetanus Difteri (td)	188.410	602	0	100.00%
	14. Tenaga medis : Dokter	453	276	177	60.93%
	15. Tenaga kesehatan : Bidan	1.132	781	351	68.99%
	16. Tenaga kesehatan : Perawat	1.341	1.341	0	100.00%
	17. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	396	83	313	20.96%
	18. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	1.132	65	1.067	5.74%
	19. Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	1.420	1.420	0	100.00%
7.	**Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut**				**96.26%**

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (Bobot 80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00%**
	Jumlah yang Harus Dilayani	147.739	147.739	0	100.00%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (Bobot 20%)				**16.26%**
	Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	**Jumlah yang harus dilayani**	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**81.28%**
	1. Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	462	462	0	100.00%
	2. Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	326	326	0	100.00%
	3. Alat pemeriksaan kolesterol	123	123	0	100.00%
	4. Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	147.739	147.739	0	100.00%
	5. Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel)	147.739	147.739	0	100.00%
	6. Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	147.739	147.739	0	100.00%
	7. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	699	699	0	100.00%
	8. Tenaga medis : Dokter	453	276	177	60.93%
	9. Tenaga kesehatan : Bidan	1.132	781	351	68.99%
	10. Tenaga kesehatan : Perawat	1.341	1.341	0	100.00%
	11. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	396	83	313	20.96%
	12. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	1.132	65	1.067	5.74%
	13. Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	284	284	0	100.00%
8.	***Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi***				***93.32%***
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (Bobot 80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00%**
	Jumlah yang Harus Dilayani	214.542	214.542	0	100.00%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (Bobot 20%)				**13.32%**
	Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	**Jumlah yang harus dilayani**	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**66.58%**
	1. Pedoman pengendalian hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	118	118	0	100.00%
	2. Obat Hipertensi	212.668	212.668	0	100.00%
	3. Tensimeter	407	407	0	100.00%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	4. Dokter Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK)	9496	9496	0	100.00%
	5. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	59	59	0	100.00%
	6. Tenaga medis : Dokter	453	276	177	60.93%
	7. Tenaga kesehatan : Bidan	1.132	781	351	68.99%
	8. Tenaga kesehatan : Perawat	1.341	1.341	0	100.00%
	9. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	396	83	313	20.96%
	10. Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	1.132	65	1.067	5.74%
	11. Tenaga kesehatan : Tanaga Kefarmasian	1.132	414	718	5.74%
	12. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	1.132	65	1.067	5.74%
9.	***Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus***				***93.76%***
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (Bobot 80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00%**
	Jumlah yang Harus Dilayani	22.841	22.841	0	100.00%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (Bobot 20%)				**20.00%**
	Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	**Jumlah yang harus dilayani**	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**68.78%**
	1. Obat Diabetes Melitus	22.841	22.841	0	100.00%
	2. Fotometer atau Glukometer	406	406	0	100.00%
	3. BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	22.841	22.841	0	100.00%
	4. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	22.841	22.841	0	100.00%
	5. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	177	177	0	100.00%
	6. Tenaga medis : Dokter	453	276	177	60.93%
	7. Tenaga kesehatan : Bidan	1.132	781	351	68.99%
	8. Tenaga kesehatan : Perawat	1.341	1.341	0	100.00%
	9. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	1.132	414	718	5.74%
	10. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	1.132	65	1.067	5.74%
	11. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	396	83	313	20.96%
	12. Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	401	129	272	32.17%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
10.	***Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat***				***99.13%***
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (Bobot 80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00%**
	Jumlah yang Harus Dilayani	2.197	2.197	0	100.00%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (Bobot 20%)				**19.13%**
	Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	**Jumlah yang harus dilayani**	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**95.66%**
	1. Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia)	20	7	0	100.00%
	2. Penyediaan Psikofarmaka	5	4	0	100.00%
	3. Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/ atau penyediaan melalui aplikasi	2.197	608	0	100.00%
	4. Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan	2.197	166	0	100.00%
	5. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	20	122	0	100.00%
	6. Tenaga kesehatan : Dokter	453	276	177	60.93%
	7. Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa	17	42	0	100.00%
	8. Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa.	150	42	0	100.00%
	9. Tenaga profesional lainnya	20	42	0	100.00%
11.	***Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis***				***95.17%***
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (Bobot 80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00%**
	Jumlah yang Harus Dilayani	10.164	10.164	0	100.00%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (Bobot 20%)				**15.17%**
	Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	**Jumlah yang harus dilayani**	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**75.87%**
	1. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	59	166	0	100.00%
	2. Reagen Zn TB	1.451	188	0	100.00%
	3. Masker bedah dan Masker N95	1.451	44.650	0	100.00%
	4. Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	10.164	5.282	0	100.00%
	5. Katrid tes cepat molekuler	10.164	676	0	100.00%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	6. Formulir pencatatan dan pelaporan	10.164	1.538	0	100.00%
	7. Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	59	65	0	100.00%
	8. Tuberkulin	228	127	0	100.00%
	9. Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	595	294	201	49.41%
	10. Tenaga kesehatan : Perawat	1.341	1.341	0	100.00%
	11. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	1.132	414	718	5.74%
	12. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	1.132	65	1.067	5.74%
	13. Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	401	129	272	32.17%
	14. Tenaga kesehatan : Radiografer	204	29	175	14.22%
	15. Kader Kesehatan	43	43	0	100.00%
12.	***Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)***				***95.12%***
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (Bobot 80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00%**
	Jumlah yang Harus Dilayani	25.234	25.234	0	100.00%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (Bobot 20%)				**15.12%**
	Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	**Jumlah yang harus dilayani**	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**75.61%**
	1. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	59	59	0	100.00%
	2. Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama	25.234	25.234	0	100.00%
	3. Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	25.234	25.234	0	100.00%
	4. Alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK	25.234	25.234	0	100.00%
	5. Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	595	293	302	49.24%
	6. Tenaga kesehatan : Bidan	1.132	781	351	68.99%
	7. Tenaga kesehatan : Perawat	1.341	1.341	0	100.00%
	8. Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	401	129	272	32.17%
	9. Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	1.132	65	1.067	5.74%
	10. Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi	10	10	0	100.00%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	tertentu: pendamping dan penjangkauan				

Sumber data : e-SPM Kementerian Dalam Negeri

4.2.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja yang ditetapkan dalam APBD untuk penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesehatan oleh Pemerintahan Daerah. Adapun besaran anggaran yang dialokasikan pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.11
Alokasi Anggaran SPM Bidang Kesehatan

No	Pendanaan	Pagu Anggaran
1	Alokasi APBD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024	3,132,415,645,374
2	Alokasi Anggaran Dinas Kesehatan	265,505,077,550
3	Alokasi Anggaran Penerapan SPM pada Dinas Kesehatan	5,134,322,600
	APBD	5,134,322,600
	a. APBD MURNI	0
	b. APBD DAU	2,198,308,000
	c. APBD DAK NON FISIK	2,936,014,600

Sumber data : e-SPM Kementerian Dalam Negeri

Berikut rincian alokasi anggaran dan realisasi pada setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan yang ditujukan untuk menunjang pemenuhan SPM Bidang Kesehatan Tahun 2024 seperti yang tersaji pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.12
Alokasi Anggaran Penerapan SPM Bidang Kesehatan

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	Sisa Anggaran	Penyerapan Anggaran
DINKES	267,018,071,253	245,068,435,832	21,949,635,421	91.78%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	123,296,651,753	11,525,980,855,899	803,684,319,401	93.48%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50,000,000	38,554,950	11,445,050	77.11%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20,000,000	17,629,000	2,371,000	88.15%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20,000,000	16,085,950	3,914,050	80.43%

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	Sisa Anggaran	Penyerapan Anggaran
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10,000,000	4,840,000	5,160,000	48.40%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	119,230,279,753	112,239,641,403	6,990,638,350	94.14%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	119,230,279,753	112,239,641,403	6,990,638,350	94.14%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	150,000,000	102,469,200	47,530,800	68.31%
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	150,000,000	102,469,200	47,530,800	68.31%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	240,000,000	191,711,000	48,289,000	79.88%
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	0%
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	240,000,000	191,711,000	48,289,000	79.88%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	884,500,000	729,646,880	154,853,120	82.49%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20,000,000	19,454,820	545,180	97.27%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	65,000,000	53,519,538	11,480,462	82.34%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	45,000,000	38,219,800	6,780,200	84.93%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	275,000,000	253,926,480	21,073,520	92.34%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	75,000,000	50,063,263	24,936,737	66.75%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4,500,000	4,320,000	180,000	96.00%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400,000,000	310,142,979	89,857,021	77.54%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	633,396,000	395,705,980	237,690,020	62.47%
Pengadaan Mebel	100,000,000	72,557,000	27,443,000	72.56%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	533,396,000	323,148,980	210,247,020	60.58%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	960,476,000	765,468,925	195,007,075	79.70%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,000,000	3,592,000	408,000	89.80%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	618,000,000	474,210,917	143,789,083	76.73%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	338,476,000	287,666,008	50,809,992	84.99%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,148,000,000	796610220,99	351389779,01	69.39%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25,000,000	5,999,500	19,000,500	24.00%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	800,000,000	558,715,018	241,284,982	69.84%

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	Sisa Anggaran	Penyerapan Anggaran
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35,000,000	30,795,000	4,205,000	87.99%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	288,000,000	201100702,99	86899297,01	69.83%
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	137,743,476,000	124,824,669,128	12,918,806,872	90.62%
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	21,207,567,900	16,434,259,543	4,773,308,357	77.49%
Pembangunan Puskesmas	410,220,000	202,516,950	207,703,050	49.37%
Pengembangan Puskesmas	758,000,000	197,816,684	560,183,316	26.10%
Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3,899,737,000	1,981,923,383	1,917,813,617	50.82%
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	-	-	-	0%
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1,600,000,000	1,587,055,109	12,944,891	99.19%
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	760,000,000	633,800,000	126,200,000	83.39%
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	129,192,000	103,999,000	25,193,000	80.50%
Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	13,495,618,900	11,636,651,962	1,858,966,938	86.23%
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	134,800,000	85,906,455	48,893,545	63.73%
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	115,568,628,100	107,657,587,780	7,911,040,320	93.15%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	805,164,500	643,304,700	161,859,800	79.90%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	75,000,000	51,992,400	23,007,600	69.32%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	565,214,600	508,254,450	56,960,150	89.92%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	75,000,000	59,951,500	15,048,500	79.94%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	100,000,000	80,414,000	19,586,000	80.41%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	25,000,000	15,250,200	9,749,800	61.00%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	357,708,000	341,761,450	15,946,550	95.54%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100,000,000	96,930,000	3,070,000	96.93%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	1,549,000,000	1,495,758,900	53,241,100	96.56%

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	Sisa Anggaran	Penyerapan Anggaran
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	180,000,000	150,595,850	29,404,150	83.66%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	604,800,000	560,560,344	44,239,656	92.69%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	623,200,000	620,720,000	2,480,000	99.60%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	15,000,000	13,397,800	1,602,200	89.32%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Beotensi Bencana	20,000,000	18,446,750	1,553,250	92.23%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1,532,722,150	1,249,554,980	283,167,170	81.53%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	50,000,000	38,739,000	11,261,000	77.48%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	790,300,000	773,168,000	17,132,000	97.83%
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	214,658,750	163,972,825	50,685,925	76.39%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	75,000,000	65,482,860	9,517,140	87.31%
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	143,641,000	120,374,860	23,266,140	83.80%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	20,000,000	3,725,500	16,274,500	18.63%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	36,250,000	16,935,900	19,314,100	46.72%
Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	15,000,000	12,128,540	2,871,460	80.86%
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	3,127,334,000	2,603,900,567	523,433,433	83.26%
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	102,684,437,400	96,461,203,287	6,223,234,113	93.94%
Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	58,619,000	46,672,500	11,946,500	79.62%
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	258,000,000	210,796,567	47,203,433	81.70%
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	518,721,000	452,867,363	65,853,637	87.30%
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	50,000,000	36,404,100	13,595,900	72.81%
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	243,898,950	215,522,610	28,376,340	88.37%
Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	10,000,000	8,449,995	1,550,005	84.50%
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Teadu (SPGDT)	258,560,000	221,941,532	36,618,468	85.84%

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	Sisa Anggaran	Penyerapan Anggaran
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	131,500,000	97,831,150	33,668,850	74.40%
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	100,000,000	84,049,300	15,950,700	84.05%
Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	35,000,000	32,920,600	2,079,400	94.06%
Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	25,000,000	24,850,000	150,000	99.40%
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	94,898,750	58,757,400	36,141,350	61.92%
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	250,000,000	176,885,250	73,114,750	70.75%
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	250,000,000	176,885,250	73,114,750	70.75%
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	717,280,000	555,936,555	161,343,445	77.51%
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	500,000,000	370,724,672	129,275,328	74.14%
Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	217,280,000	185,211,883	32,068,117	85.24%
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	3,258,941,000	2,824,942,890	433,998,110	86.68%
Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	10,000,000	9,941,000	59,000	99.41%
Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	10,000,000	9,941,000	59,000	99.41%
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	167,100,000	115,745,450	51,354,550	69.27%
Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	10,000,000	8,591,500	1,408,500	85.92%
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	157,100,000	107,153,950	49,946,050	68.21%
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3,081,841,000	2,699,256,440	382,584,560	87.59%
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3,081,841,000	2,699,256,440	382,584,560	87.59%
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	1,061,236,000	869,982,145	191,253,855	81.98%
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	244,276,000	217,837,100	26,438,900	89.18%

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	Sisa Anggaran	Penyerapan Anggaran
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	244,276,000	217,837,100	26,438,900	89.18%
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	490,150,000	382,507,795	107,642,205	78.04%
Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	60,000,000	48,160,000	11,840,000	80.27%
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	60,000,000	48,160,000	11,840,000	80.27%
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	266,810,000	221,477,250	45,332,750	83.01%
Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	266,810,000	221,477,250	45,332,750	83.01%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1,657,766,500	1,289,033,110	368,733,390	77.76%
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	299,616,500	215,345,810	84,270,690	71.87%
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	299,616,500	215,345,810	84,270,690	71.87%
Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	691,000,000	438,643,300	252,356,700	63.48%
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	671,000,000	419,771,300	251,228,700	62.56%
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	20,000,000	18,872,000	1,128,000	94.36%
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber	667,150,000	635,044,000	32,106,000	95.19%

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	Sisa Anggaran	Penyerapan Anggaran
Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	667,150,000	635,044,000	32,106,000	95.19%

Sumber data : e-SPM Kementerian Dalam Negeri

4.2.5 Dukungan Personil

Untuk mendukung pelaksanan SPM Bidang Kesehatan, Pemerintah Kabupaten Nganjuk memiliki pegawai yang terdiri dari tenaga kesehatan dan tenaga administratif penunjang yang tersebar di Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Daerah Kertosono, Rumah Sakit Daerah Nganjuk, Puskesmas, dan fasilitas kesehatan lainnya. Pegawai sebagaimana dimaksud di atas berstatus sebagai ASN maupun non ASN. Rincian tenaga kesehatan dan tenaga administratif penunjang tersaji pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.13
Jumlah Pegawai dan Tenaga Kesehatan di Kabupaten Nganjuk

NO	KECAMATAN	PELAYANAN KESEHATAN		JENIS SDM KESEHATAN								
		FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN	KETERSEDIAAN (FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN)	DOKTER	DOKTER SPESIALIS	DOKTER GIGI	PERAWAT	BIDAN	KESEHATAN MASYARAKAT	KESLING	GIZI	ATLM
1	BAGOR	Puskesmas Bagor	1	3	0	0	10	30	1	1	1	2
2	BARON	Puskesmas Baron	1	5	0	1	16	13	1	1	2	2
3	BERBEK	Puskesmas Berbek	1	3	0	0	22	33	2	1	1	2
4	GONDANG	Puskesmas Gondang	1	3	0	1	13	19	1	1	1	2
5	JATIKALEN	Puskesmas Jatikalen	1	3	0	0	6	12	1	1	1	0
6	KERTOSONO	Puskesmas Kertosono	1	3	0	2	12	22	2	1	2	2
7	KERTOSONO	RSD Kertosono	1	17	26	3	181	68	1	5	5	13
8	LENGKONG	Puskesmas Lengkong	1	2	0	0	19	22	1	1	1	1
9	LOCERET	Puskesmas Loceret	1	2	0	1	20	26	0	1	1	1
10	NGANJUK	Puskesmas Nganjuk	1	2	0	1	6	19	2	1	2	2
11	NGANJUK	RSD Nganjuk	1	18	36	4	283	57	7	2	12	22
12	NGANJUK	RS Bhayangkara	1	14	20	1	136	34	0	1	13	6
13	NGANJUK	RSI Aisyiyah	1	5	4	1	63	27	2	1	2	8
14	NGETOS	Puskesmas Ngetos	1	4	0	1	16	15	1	1	1	1
15	NGLUYU	Puskesmas Ngluyu	1	4	0	1	7	13	1	1	2	2
16	NGRONGGOT	Puskesmas Ngronggot	1	6	0	1	22	21	0	1	2	0
17	PACE	Puskesmas Pace	1	1	0	1	12	25	2	1	1	1
18	PATIANROWO	Puskesmas Patianrowo	1	3	0	1	10	18	1	1	1	2
19	PRAMBON	Puskesmas Prambon	1	6	0	1	14	19	2	1	1	1
20	REJOSO	Puskesmas Rejoso	1	6	0	1	23	33	0	1	1	2
21	SAWAHAN	Puskesmas Sawahan	1	3	0	0	14	16	1	1	0	1
22	SUKOMORO	Puskesmas Sukomoro	1	3	0	1	13	19	1	1	1	1
23	TANJUNGANOM	Puskesmas Tanjunganom	1	3	0	0	24	23	1	1	0	2
24	WILANGAN	Puskesmas Wilangan	1	3	0	1	14	18	2	1	1	1
	TOTAL		24	122	86	24	956	602	33	29	55	77

4.2.6 Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang kesehatan di Kabupaten Nganjuk masih terdapat beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi, antara lain :

1. Masih kurangnya jumlah sumber daya manusia kesehatan terutama dalam mendukung capaian SPM; dan
2. Masih kurang optimal nya kinerja dari tenaga kesehatan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya dalam pelayanan kesehatan yang berhubungan dengan SPM.

Berdasarkan pada permasalahan tersebut, maka dapat diberikan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan pemenuhan standar pelayanan minimal sebagai berikut :

1. Mengirim usulan ke BKPSDM berupa telaah staf terkait pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan agar dapat meningkatkan dan mempertahankan capaian SPM terutama di bidang kesehatan; dan
2. Melaksanakan koordinasi dan evaluasi setiap triwulan dengan seluruh puskesmas se-Kabupaten Nganjuk terkait capaian SPM di masing-masing wilayah kerja Puskesmas tersebut.

4.3 URUSAN PEKERJAAN UMUM

4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Terdapat 2 (dua) jenis pelayanan dasar pada bidang urusan pekerjaan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Bidang Perumahan Rakyat, yakni:

a. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari

Nilai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Air Minum ditetapkan berdasarkan persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum. Air minum merupakan air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Adapun kebutuhan pokok air minum sehari-hari adalah air yang digunakan untuk keperluan minum, masak, mandi, cuci, peturasan, dan ibadah.

b. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik

Pelayanan pengolahan air limbah domestik adalah rangkaian layanan pengolahan air limbah domestik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, mulai dari sumbernya sampai aman untuk dilepaskan ke lingkungan. Air limbah domestik yang diolah adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.

4.3.2 Target Pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu. Adapun penetapan target SPM Bidang Pekerjaan Umum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut :

Tabel 4.14
Target Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari - hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari - hari	100 %	Setiap Tahun
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100 %	Setiap Tahun

4.3.3 Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang telah ditetapkan sebelumnya. Berikut kami tampilkan capaian kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2024 :

a. Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari

Pengukuran SPM Bidang Air Minum adalah persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten yang dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan non perpipaan terlindungi} = \frac{\text{Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan non perpipaan terlindungi}}{\text{Jumlah rumah tangga di Kabupaten}} \times 100\%$$

$$= \frac{4.203}{4.203} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Pada tahun 2024, jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan non perpipaan sebanyak 4.203 KK sedangkan jumlah rumah tangga di Kabupaten sebanyak 4.203 KK. Dengan demikian, capaian penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari telah mencapai 100%.

b. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik

Pengukuran SPM Bidang Air Limbah Domestik adalah persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik yang dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik} = \frac{\text{Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD}}{\text{Jumlah rumah di Kabupaten}} \times 100\%$$

$$= \frac{3.789}{3.789} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Hingga tahun 2024, jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan air limbah domestik adalah sebanyak 3.789 unit. Sedangkan jumlah seluruh rumah di Kabupaten Nganjuk sebanyak 3.789 unit. Dengan demikian, penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik telah mencapai 100%.

Berikut hasil capaian standar pelayanan minimal atas standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa pada masing-masing jenis pelayanan urusan pekerjaan umum sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Standar Teknis Standar

Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Bidang Perumahan Rakyat sebagai berikut :

Tabel 4.15
Capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum Atas Standar Jumlah dan Kualitas Barang/Jasa

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM	**TUNTAS PARIPURNA**			**100.00 %**
1.	***Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari***				***100.00 %***
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (Bobot 80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00 %**
	Jumlah yang Harus Dilayani	4.203	4.203	0	100.00 %
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (Bobot 20%)				**20.00%**
	Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	**Jumlah yang harus dilayani**	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**100.00%**
	JARINGAN PERPIPAAN				
	1. Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	1.401	1.401	0	100.00 %
	2. Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	1.401	1.401	0	100.00 %
	BUKAN JARINGAN PERPIPAAN				
	3. Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	0	0	0	100.00 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	4. Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	0	0	0	100.00 %
2.	***Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik***				***100.00 %***
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (Bobot 80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00 %**
	Jumlah yang Harus Dilayani	3.789	3.789	0	100.00 %
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (Bobot 20%)				**20.00 %**
	Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	**Jumlah yang harus dilayani**	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**100.00%**
	1. Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	1.186	1.186	0	100.00 %
	2. Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses aman terhadap fasilitas buang air besar individual bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala, minimal tiga tahun sekali, serta dibuang dan diolah ke IPLT; dan sambungan rumah yang terkoneksi ke SPALD-T	0	0	0	100.00 %
	3. Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses layak merupakan fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan	1.186	1.186	0	100.00 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar				

Sumber data : e-SPM Kementerian Dalam Negeri

4.3.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja yang ditetapkan dalam APBD untuk penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum oleh Pemerintah Daerah. Adapun besaran anggaran yang dialokasikan dan realisasinya pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.16
Alokasi Anggaran SPM Bidang Pekerjaan Umum

No	Pendanaan	Pagu
1	Alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kab. Nganjuk	3,132,415,645,374
2	Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah	168,153,642,189
3	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Pada Satker PD	18,081,460,100
	APBD	18,081,460,100
	a. APBD MURNI	742,218,600
	b. APBD DAU	297,000,000
	c. APBD DAK FISIK	17,042,241,500
	d. Lainya	0

Sumber data : e-SPM Kementerian Dalam Negeri

Berikut rincian alokasi anggaran dan realisasi pada setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan yang ditujukan untuk menunjang pemenuhan SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2024 seperti yang tersaji pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.17
Alokasi Anggaran Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**7,398,460,100**	**7,398,460,100**	**100**
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	**7,398,460,100**	**7,398,460,100**	**100**
	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM	0	0	0
	Supervisi pembangunan/peningkatan/perluasan/perbaikan SPAM	0	0	0

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	0	0	0
	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	1,030,177,400	1,030,177,400	100
	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	0	0	0
	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	5,114,094,300	5,114,094,300	100
	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	0	0	0
	Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	0	0	0
	Pembinaan dan pengawasan terhadap tarif Air Minum	0	0	0
	Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha untuk kebutuhan sendiri	0	0	0
	Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan kelompok masyarakat	0	0	0
	Fasilitasi penyiapan kerja sama SPAM	0	0	0
	Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama SPAM	0	0	0
	Pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan SPAM	0	0	0
	Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan Perkotaan	0	0	0
	Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan Perdesaan	0	0	0
	Pembangunan baru SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	0	0	0
	Peningkatan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	0	0	0
	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	1,254,188,400	1,254,188,400	100
	Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	0	0	0
	Perbaikan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	0	0	0
2	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**10,683,000,000**	**10,683,000,000**	**100**
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	**10,683,000,000**	**10,683,000,000**	**100**
	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam daerah Kabupaten/Kota	0	0	0
	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala Kota	0	0	0
	Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala Kota	0	0	0
	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala Kota	0	0	0
	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala permukiman	0	0	0
	Pembangunan/penyediaan sub sistem pengolahan setempat	10,683,000,000	10,683,000,000	100
	Pembinaan teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	0	0	0
	Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	0	0	0
	Pengembangan SDM dan kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	0	0	0
	Operasi dan pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	0	0	0

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala permukiman	0	0	0
	Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala permukiman	0	0	0
	Penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	0	0	0
	Penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	0	0	0
	Pembangunan/penyediaan sarana dan prasarana IPLT	0	0	0
	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan sarana dan prasarana IPLT	0	0	0
	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan sarana dan prasarana IPLT	0	0	0

Sumber data : e-SPM Kementerian Dalam Negeri

4.3.5 Dukungan Personil

Sumber daya manusia adalah aset bagi suatu organisasi dan sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan untuk terwujudnya tujuan organisasi. Untuk mendukung pelaksanan SPM Bidang Pekerjaan Umum, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk memiliki jumlah pegawai sebanyak 151 orang. Data pegawai menurut jabatan tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 4.18
Jumlah Pegawai ASN Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk

No	Uraian	Jumlah (Jiwa)
1.	Jumlah Pejabat Struktural	24
	- Eselon II	1
	- Eselon III	5
	- Eselon IV	18
2.	Jumlah Pejabat Fungsional	14
3.	Jumlah Staf PNS	89
	Jumlah	151

4.3.6 Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang pekerjaan umum di Kabupaten Nganjuk masih terdapat beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi, antara lain:

a. Permasalahan

Masih terdapat beberapa data SPM yang tidak sinkron antar OPD terkait.

b. Solusi

Mengupayakan sinkronisasi data dengan melakukan pertemuan dengan OPD terkait serta melakukan pembahasan secara efisien dan jelas.

4.4 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Terdapat 2 (dua) jenis pelayanan dasar pada Urusan Perumahan Rakyat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Bidang Perumahan Rakyat, yakni :

a. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota

   Indikator yang digunakan adalah jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni dengan target capaian sebesar 100% pada tiap tahunnya. Jenis pelayanan dasar ini dilaksanakan dengan ketentuan :

   1) Pada saat masa pasca bencana;
   2) Surat penetapan bencana dari Bupati; dan/atau
   3) Dampak bencana di daerah administrasi Kabupaten.

b. Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

   Indikatornya adalah jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah Kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni dengan target capaian sebesar 100% pada tiap tahunnya. Jenis pelayanan dasar ini dilaksanakan dalam rangka mendukung:

   1) Pengurangan kawasan kumuh 5-10 Ha; dan/atau
   2) Penataan perumahan dan kawasan permukiman yang berada di lahan bukian fungsi permukiman dan tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya.

4.4.2 Target Pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu. Adapun penetapan target SPM Bidang Perumahan Rakyat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut :

Tabel 4.19
Target Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat

No	Indikator	Target Capaian	Batas Waktu
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	100%	Setiap Tahun
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak hun bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah Kabupaten	100%	Setiap Tahun

4.4.3 Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang telah ditetapkan sebelumnya. Realisasi SPM Bidang Perumahan Rakyat dapat diuraikan sebagaimana berikut :

a. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana

Perhitungan capaian SPM dalam penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana dihitung dengan membandingkan antara jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun 2024 dibagi jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun 2024. Adapun rumus dan rincian perhitungan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

$$\text{Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana} = \frac{\text{Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun 2024}}{\text{Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun 2024}} \times 100\%$$

$$= \frac{72}{72} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Pada tahun 2024, jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani sebanyak 72 rumah, sedangkan jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun 2024 sebanyak 72 rumah. Dengan demikian, penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana telah mencapai 100%.

b. Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten

Perhitungan capaian SPM dalam fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah dihitung dengan membandingkan antara rumah tangga penerima fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan ditambah rumah tangga penerima subsidi uang sewa ditambah rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni dibagi jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan. Adapun rumus dan rincian perhitungan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

$$\text{Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah Kabupaten} = \frac{\text{Rumah tangga penerima fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan + rumah tangga penerima subsidi uang sewa + rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni}}{\text{Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan}} \times 100\%$$

$$= \frac{0}{0} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Pada tahun 2024, rumah tangga penerima fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan, rumah tangga penerima subsidi uang sewa, dan rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni sebanyak 0 rumah, sedangkan jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan pada tahun 2024 sebanyak 0 rumah. Dengan demikian, fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah Kabupaten telah mencapai 100%.

Berikut hasil capaian standar pelayanan minimal atas standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa pada masing-masing jenis pelayanan urusan perumahan rakyat sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Bidang Perumahan Rakyat sebagai berikut :

Tabel 4.20
Capaian SPM Urusan Perumahan Rakyat Atas Standar Jumlah dan Kualitas Barang/Jasa

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM	**TUNTAS PARIPURNA**			**100.00%**
1 .	***Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota***				***100.00%***
		Ya Terjadi Bencana			
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (Bobot 80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00%**
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	72	72	0	100%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (Bobot 20%)				**20.00%**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	**100.00%**
	1. Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	57	57	0	100.00%
	2. Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	0	0	0	100.00%
	3. Pemukiman kembali bagi korban bencana	0	0	0	100.00%
	4. Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencanabaru/relokasi bagi korban bencana	0	0	0	100.00%
	JUMLAH	**72**	**72**	**0**	**100.00%**
2.	***Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota***				***100.00%***
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (Bobot 80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00%**
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	0	0	0	100%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (Bobot 20%)				**20.00%**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	**100.00%**
	1. Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	0	0	0	100.00%
	2. Subsidi uang sewa	0	0	0	100.00%
	3. Penyediaan rumah layak huni	0	0	0	100.00%
	JUMLAH	**0**	**0**	**0**	**100.00%**

Sumber data : e-SPM Kementerian Dalam Negeri

4.4.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja yang ditetapkan dalam APBD untuk penerapan dan pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat oleh Pemerintahan Daerah. Adapun besaran anggaran yang dialokasikan dan realisasinya pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.21
Alokasi Anggaran SPM Bidang Perumahan Rakyat

No	Pendanaan	Pagu
1	Alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kab. Nganjuk	3.132.415.645.374
2	Alokasi Anggaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	22.703.157.180
3	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	643.310.000
	APBD	643.310.000
	A. APBD MURNI	0
	B. APBD DAU	643.310.000
	C. APBD DAK FISIK	0
	D. APBD DAK NON FISIK	0
	E. DANA BAGI HASIL	0
	F. KERJASAMA	0
	G. OTONOMI KHUSUS	0
	NON APBD	0
	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	0
	APBN	0
	B. APBN-DEKONSENTRASI	0
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	0
	DANA LAINNYA	0

Sumber data : e-SPM Kementerian Dalam Negeri

Berikut rincian alokasi anggaran dan realisasinya yang ditujukan untuk pemenuhan SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2024 seperti yang tersaji pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.22
Alokasi Anggaran Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	(%)
	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat	**719,610,000**	**695,082,180**	**96.59**
1	**Program:** Pengembangan Perumahan	**437,210,000**	**412,682,180**	**94.39**

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	(%)
1.1	**Kegiatan:** Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	**228,260,000**	**224,495,560**	**98.35**
1.1.1	Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana	28,260,000	25,314,940	89.58
1.1.2	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	100,000,000	99,900,000	99.90
1.1.3	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	100,000,000	99,280,620	99.28
1.2	**Kegiatan:** Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	**208,950,000**	**188,186,620**	**90.06**
1.2.1	Operasional dan pemeliharaan lingkungan perumahan pada relokasi program Kabupaten/Kota	208,950,000	188,186,620	90.06
2	**PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA**			
2.1	Kegiatan : Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah ; Sub Kegiatan : Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	282,400,000	282,400,000	100

Sumber data : e-SPM Kementerian Dalam Negeri

4.4.5 Dukungan Personil

Sumber daya manusia adalah aset bagi suatu organisasi dan sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan untuk terwujudnya tujuan organisasi. Untuk mendukung pelaksanan SPM Bidang Perumahan Rakyat, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk memiliki jumlah pegawai sebanyak 41 pegawai. Data pegawai menurut jenis jabatan tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 4.23
Jumlah Pegawai menurut jenis jabatan di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk

No	Perangkat Daerah	Jabatan Struktural	Jabatan Fungsional Tertentu	Jabatan Fungsional Umum	PPPK	Non ASN
1	Dinas PRKPP	5	6	19	4	7
TOTAL PEGAWAI		41				

Tabel 4.24
Jumlah Pegawai menurut jenjang pendidikan terakhir di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk

No	Perangkat Daerah	Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan Terakhir						
		SD	SMP	SMA	DIII	S1	S2	S3
1	Dinas PRKPP	2	-	10	4	22	2	1
TOTAL PEGAWAI		41						

4.4.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

- Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota.
    1. Kurang optimalnya jasa konsultansi identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana Kabupaten/Kota karena keterbatasan anggaran.
    2. Identitas warga penerima bantuan rehabilitasi rumah bagi korban bencana kurang lengkap.
    3. Sumber dana dari BTT sehingga prosedur memerlukan waktu untuk pencairan dana bantuan.
- Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota.

  Nihil

Solusi

- Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota.
    1. Membuat usulan penambahan anggaran pada saat perencanaan anggaran.
    2. Berkoordinasi dengan pihak desa/kelurahan terkait dokumen identitas warga penerima bantuan.
    3. Melakukan koordinasi yang intensif dengan instansi terkait agar bantuan dapat segera tersalurkan.
- Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota.

  Nihil

4.5 TRANTIBUMLINMAS (SUB URUSAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM)

4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

Sebagaimana amanah dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, ketenteraman dan ketertiban umum yang selanjutnya disebut trantibum merupakan situasi dan kondisi yang memungkinkan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tentram, tertib, dan teratur sesuai dengan

kewenangannya dalam rangka penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan pada sub urusan trantibum adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara yang terkena dampak penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Terdapat 4 (empat) mutu pelayanan dasar pada sub bidang trantibum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk, yakni:

a. Standar operasional prosedur Satpol PP;
b. Standar sarana prasarana Satpol PP;
c. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat; dan
d. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.

Mutu Pelayanan Dasar pada Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum tersebut memiliki pengukuran capaian yang didasarkan pada :

a. Standar operasional prosedur Satpol PP dan standar sarana prasarana Satpol PP, merupakan standar teknis terkait standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat, merupakan standar teknis terkait standar jumlah dan kualitas personil/sumber daya manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada meliputi :
    1) Pelayanan kerugian materil

       Kerugian materil adalah kerusakan atas barang atau aset pribadi yang diakibatkan dari penegakan pelanggaran Perda dan Perkada. Kerugian materil terdiri atas:

       - Rusak ringan, yaitu kerugian yang dialami dan ditaksir tidak lebih dari 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya operasional penegakan Perda dan Perkada yang sedang dilakukan; dan
       - Rusak sedang dan/atau berat, yaitu kerugian yang dialami dan ditaksir sama dan/atau lebih dari 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya operasional penegakan Perda dan Perkada yang sedang dilakukan.

2) Pelayanan pengobatan

Pelayanan pengobatan adalah tindakan pertolongan pertama bagi warga negara yang terkena cidera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke Rumah Sakit/Pusat Kesehatan Masyarakat bila terkena cidera fisik sedang dan/atau berat. Warga negara yang mengalami kerugian materil dan/atau cidera fisik akibat penegakan Perda dan Perkada adalah yang berada pada jarak antara 0 (nol) sampai dengan 50 (lima puluh) meter dari lokasi penegakan Perda dan Perkada.

4.5.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Dalam rangka pemenuhan capaian SPM Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, diperlukan penetapan target pada awal perencanaan tahun 2024. Penetapan target tersebut difungsikan sebagai langkah awal perencanaan serta pengukuran atas kemampuan Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam mewujudkan capaian SPM Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Adapun penetapan target awal Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

Tabel 4.25
Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%	Setiap Tahun

Ketika seluruh Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum telah dipenuhi oleh Pemerintah Daerah, maka optimalisasi terhadap capaian angka layanan dasar Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Nganjuk dapat diwujudkan.

4.5.3 Realisasi

Pencapaian Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum menjadi salah satu bagian terpenting dalam mewujudkan *good governance* dan *good goverment* di Kabupaten Nganjuk. Menciptakan sebuah tatanan pemerintahan yang transparan, akuntabel, adil dan merata dapat terwujud secara komprehensif dengan berupaya mencapai keberhasilan atas kinerja dari setiap urusan penyelenggara pemerintahan termasuk bidang ketentraman dan ketertiban umum. Oleh sebab itu, Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum hadir sebagai tolak ukur perwujudan sinergitas atas layanan pemerintah kepada masyarakat. Berikut kami tampilkan realisasi pencapaian kinerja Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2024 :

Tabel 4.26
Realisasi Pencapaian SPM Sub Urusan Trantibum

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM		INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
(1)	(2)		(3)			(4)
KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM						
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM			**TUNTAS PARIPURNA**			**100.00%**
1.	**Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)**					***100.00%***
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00%**
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		50	50	0	100.00%
		PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**20.00%**
	JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI		**Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Dibutuhkan**	**Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Tersedia**	**Jumlah Mutu Barang /Jasa Yang Belum Tersedia**	**100.00%**
	1. Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkada	unit	131	131	0	100.00%
	2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan perkada*	Dokumen	10	10	0	100.00%
	3. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkada/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan	orang	78	78	0	100.00%

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM		INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
(1)	(2)		(3)			(4)
	satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM***					
	4. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal	Dokumen	1	1	0	100.00%
	5. Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	orang	0	0	0	100.00%
	6. Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan	orang	0	0	0	100.00%

Sumber data : e-SPM Kementerian Dalam Negeri

4.5.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja yang ditetapkan dalam APBD untuk penerapan dan pencapaian SPM Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum oleh Pemerintahan Daerah. Adapun besaran anggaran yang dialokasikan dan realisasinya pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.27
Alokasi Anggaran Penerapan SPM Sub Urusan Trantibum

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Serapan
1	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)**	**5,791,231,500**	**5,715,405,084**	**98.69%**
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**4,203,168,400**	**4,165,025,127**	**99.09%**
	1 Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	10,899,000	9,682,500	88.84%
	2 Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	1,974,797,750	1,964,910,000	99.50%
	3 Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	1,321,055,000	1,299,000,675	98.33%

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Anggaran	Realisasi	Serapan
		4	Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	2,133,900	1,967,000	92.18%
		5	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	850,843,900	849,777,952	99.87%
		6	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	40,938,850	39,687,000	96.94%
		7	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	2,500,000	0	0%
	2	**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**		**1,586,833,100**	**1,549,559,957**	**97.65%**
		1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	606,497,900	598,560,000	98.69%
		2	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	930,202,700	910,199,957	97.85%
		3	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	50,132,500	40,800,000	81.38%
	3	**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**		**1,230,000**	**820,000**	**66.67%**
		1	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	1,230,000	820,000	66.67%

Sumber data : e-SPM Kementerian Dalam Negeri

4.5.5 Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Berikut ini tersaji data personil di Satuan Polisi Pamong Praja :

Tabel 4.28
Dukungan Personil Urusan Trantibum

No.	Kepala / Sekretariat/ Bidang / Subbag / Seksi	Jumlah Pegawai
1.	Kepala Satpol PP	1
2.	Sekretaris	1
	- Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian	9
	- Perencana Ahli Muda	1
	- Pelaksana	4
	Jumlah	**16**

No.	Kepala / Sekretariat/ Bidang / Subbag / Seksi	Jumlah Pegawai
3.	Kepala Bidang Operasional dan Perlindungan Masyarakat	0
	- Pol PP Ahli Muda	2
	- Pelaksana	47
	Jumlah	**49**
4.	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1
	- Pol PP Ahli Muda	1
	- Pelaksana	7
	Jumlah	**9**
5.	Cleaning Service	2
	Jumlah	**2**
	Jumlah Keseluruhan	**76**

Sumber data : Satpol PP Kabupaten Nganjuk

4.5.6 Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum di Kabupaten Nganjuk, masih mengalami beberapa kendala dan permasalahan. Adapun permasalahan dan kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Dukungan anggaran melalui APBD berkaitan dengan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat masih sangat minim;
2. Validitas data penerima layanan korban akibat dari penegakan hukum atas pelanggaran Perda dan Perkada belum akuntabel;
3. Standar operasional prosedur belum sesuai ketentuan yang berlaku;
4. Sarana prasarana Satpol PP belum memadai;
5. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat belum terpenuhi;
6. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada belum optimal.

Berdasarkan pada permasalahan tersebut, maka dapat diberikan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan pemenuhan standar pelayanan minimal adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan anggaran Pelayanan Minimal Urusan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat melalui APBD sehingga dapat melaksanakan Pelayanan kepada Masyarakat lebih baik;
2. Melakukan validitas data penerima layanan korban akibat dari penegakan hukum atas pelanggaran Perda dan Perkada yang akuntabel;
3. Menyusun Standar Operasional Prosedur sesuai ketentuan yang berlaku;
4. Memenuhi kebutuhan Sarana prasarana Satpol PP yang memadai;
5. Meningkatkan Standar kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat sesuai ketentuan;
6. Mengoptimalkan pelayanan bagi warga yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.

4.6 TRANTIBUMLINMAS (SUB URUSAN KEBAKARAN)

4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal. Pelayanan dasar pada sub urusan kebakaran ditujukan dalam rangka pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran. Terdapat 1 (satu) jenis pelayanan dasar pada sub urusan kebakaran yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, yakni pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera sesuai dengan tingkat waktu tanggap (*response time*) pada saat dan setelah kejadian kebakaran bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran dan yang terdampak kebakaran, yang meliputi kegiatan pemadaman, pengendalian, penyelamatan dan evakuasi.

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran paling sedikit harus memuat :

a. Layanan respon cepat (*response time*) penanggulangan kejadian kebakaran;
b. Layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran;
c. Layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi;
d. Layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran; dan
e. Layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran.

4.6.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Dalam rangka pemenuhan capaian SPM Sub Urusan Kebakaran, diperlukan penetapan target pada awal perencanaan tahun 2024. Penetapan target tersebut difungsikan sebagai langkah awal perencanaan serta pengukuran atas kemampuan Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam mewujudkan capaian SPM Sub Urusan Kebakaran. Adapun penetapan target awal berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

Tabel 4.29
Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Sub Urusan Kebakaran

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	Setiap Tahun

4.6.3 Realisasi

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran menjadi salah satu bagian terpenting dalam mewujudkan *good governance* dan *good goverment* di Kabupaten Nganjuk. Menciptakan sebuah tatanan pemerintahan yang transparan, akuntabel, adil dan merata dapat terwujud secara komprehensif dengan berupaya mencapai keberhasilan atas kinerja dari setiap urusan penyelenggara pemerintahan termasuk sub urusan kebakaran. Oleh sebab itu, standar pelayanan minimal sub urusan kebakaran hadir sebagai tolak ukur perwujudan sinergitas atas layanan pemerintah

kepada masyarakat. Berikut kami tampilkan realisasi pencapaian kinerja standar pelayanan minimal sub urusan kebakaran dengan teknis perhitungan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Kabupaten/Kota :

Tabel 4.30
Realisasi Pencapaian SPM Sub Urusan Kebakaran

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Capaian
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM DAMKAR		**TUNTAS UTAMA**			**99.64%**
1 .	***Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran***				***99.64%***
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (Bobot 80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00%**
	Jumlah Yang Harus Dilayani	180	180	0	100.00%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (Bobot 20%)				**19.64%**
	Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan**	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia**	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia**	**98.19%**
	1. Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi	180	176	4	97.78 %
	2. Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	1	1	0	100.00%
	3. Sarana prasarana pemadam kebakaran	190	190	0	100.00%
	4. Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia	81	74	7	91.36%
	5. Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran	0	0	0	100.00%
	6. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran	0	0	0	100.00%

Sumber data : e-SPM Kementerian Dalam Negeri

4.6.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja yang ditetapkan dalam APBD untuk penerapan dan pencapaian SPM Sub Urusan Kebakaran Daerah oleh Pemerintahan Daerah. Adapun besaran anggaran yang dialokasikan dan realisasinya pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.31
Alokasi Anggaran Penerapan SPM Sub Urusan Kebakaran Daerah

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Anggaran	Realisasi	%
1.	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (DAMKAR)**			**4,496,120,000**	**4,445,278,537**	**98.87 %**
	1	**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**4,341,759,900**	**4,292,172,787**	**98.86%**
		1	Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	850,284,000	842,828,462	99.12%
		2	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	27,000,000	27,000,000	100.00%
		3	Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	26,400,000	26,307,500	99.65%
		4	Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	3,000,000	3,000,000	100.00%
		5	Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	10,600,000	7,040,000	66.42%
		6	Pembinaan aparatur pemadam kebakaran	122,477,700	109,690,025	89.56%
		7	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	1,250,000	999,000	79.92%
		8	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	3,277,013,200	3,252,612,800	99.26%
		9	Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	23,735,000	22,695,000	95.62%
		10	Pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga	0	0	0%
	2	**Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**		**12,212,100**	**12,035,000**	**98.55%**
		1	Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran	10,250,000	10,195,000	99.46%
		2	Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran	1,962,100	1,840,000	93.78%
	3	**Investigasi Kejadian Kebakaran**		**1,854,000**	**1,304,000**	**70.33%**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Anggaran	Realisasi	%
		1	Investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran	1,854,000	1,304,000	70.33%
	4	**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**		**139,924,000**	**139,396,750**	**99.62%**
		1	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	63,820,000	63,749,150	99.89%
		2	Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	51,704,000	51,642,600	99.88%
		3	Dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana	24,400,000	24,005,000	98.38%
	5	**Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia**		**370,000**	**370,000**	**100.00%**
		1	Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang penimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia	370,000	370,000	100.00%
		2	Standarisasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	0	0	0%
		3	Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	0	0	0%
		4	Pembinaan aparatur pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	0	0	0%

Sumber data : e-SPM Kementerian Dalam Negeri

4.6.5 Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Sub Urusan Kebakaran Daerah. Berikut ini tersaji data personil di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nganjuk :

Tabel 4.32
Dukungan Personil Urusan Kebakaran

No	Uraian	Laki-Laki	Wanita	Jumlah
1	Pegawai Tetap (ASN) dan P3K	29	5	34
2	Pegawai Tidak Tetap	47	1	48

No	Uraian	Laki-Laki	Wanita	Jumlah
	TOTAL	76	6	82

4.6.6 Permasalahan dan Solusi

Berdasarkan identifikasi permasalahan urusan kebakaran, dengan mensinergiskan visi misi dan arah kebijakan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, mencakup keselarasan dengan sasaran yang ada pada dokumen renstra K/L dan renstra provinsi serta dengan memperhatikan isu- isu urusan kebakaran, maka terdapat beberapa isu penting Kabupaten Nganjuk yang harus mendapat perhatian lebih, yang harus segera ditindaklanjuti dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nganjuk sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya :

1. Terbatasnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
2. Kurangnya tenaga SDM yang berbasis kompetensi teknis di bidang penanggulangan kebakaran.
3. Agar pemadaman kebakaran dapat menjangkau hingga kampung sehingga perlu adanya pembangunan hidran kampung.
4. Kemampuan masyarakat masih cukup rendah dalam penggunaan APAR sehingga perlu adanya penyuluhan kebakaran sampai pada wilayah kampung.
5. Banyaknya pendirian bangunan yang tidak disertai dengan Rekomendasi Instalasi Proteksi Kebakaran sehingga perlu disosialisasikan pada semua gedung-gedung terutama pada fasilitas umum.
6. Banyak dikampung-kampung kalau membuat gapura di gang jalan terlalu kecil sehingga apabila terjadi kebakaran mobil pemadam tidak dapat masuk ke lokasi kejadian kebakaran.

4.7 TRANTIBUMLINMAS (SUB URUSAN KEBENCANAAN)

4.7.1 Jenis Pelayanan Dasar

Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Untuk melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) ada beberapa jenis pelayanan yang harus dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk, antara lain :

a. Pelayanan informasi rawan bencana

Adalah pelayanan informasi rawan bencana adalah pelayanan informasi tentang bagian wilayah kabupaten yang rawan bencana kepada Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana (dalam satu jenis bencana). Cakupan kawasan rawan bencana adalah wilayah kabupaten/kota. Pelayanan informasi rawan bencana dibagi per jenis ancaman bencana antara lain: Gempa bumi, Tsunami, Banjir, Tanah Longsor, Letusan Gunung Api, Gelombang Laut Ekstrim, Angin Topan (termasuk Siklon Tropis/Putting Beliung), Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan, dan Epidemi/Wabah Penyakit/Zoonosis. Di kabupaten Nganjuk, informasi yang diberikan kepada masyarakat mengenai kebencanaan yang ada di kabupaten nganjuk, antara lain : banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan. Penerapan SPM pada pelayanan informasi rawan bencana dilaksanakan melaui sub kegiatan di bawah ini, antara lain:

1) Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana).

Beberapa indikator yang harus dilaksanakan pada pelayanan informasi rawan bencana :

1) Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal);
2) Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana;
3) Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia);
4) Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana.

b. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana

Adalah serangkaian kegiatan pra bencana melalui pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan Warga Negara dalam menghadapi bencana. Layanan ini terkait dengan tersedianya sarana prasarana yang digunakan sebagai penunjang penanggulangan bencana dan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam menangani bencana. Penerapan

SPM pada pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dilaksanakan melaui sub kegiatan, antara lain :

1) Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan;
2) Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota;
3) Gladi Kesiapsiagaan terhadap bencana;
4) Pengelolaan risiko bencana kabupaten/kota;
5) Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana; dan
6) Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota.

Indikator yang harus dilaksanakan pada pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana yaitu :

1) Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi.
2) Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana).

c. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

Adalah layanan yang diberikan kepada masyarakat yang tertimpa bencana. Penerapan SPM pada pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dilaksanakan melaui sub kegiatan, antara lain :

1) Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota.
2) Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota.
3) Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota.
4) Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana.

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana adalah layanan yang diberikan kepada masyarakat yang tertimpa bencana. Indikator yang harus dilaksanakan pada pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana :

1) Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana).
2) Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana.

3) Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana).
4) Melakukan respon cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas.
5) Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana.

4.7.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, bahwa dalam rangka pemenuhan capaian SPM Sub Urusan Bencana Daerah diperlukan penetapan target pada awal perencanaan Tahun 2024. Penetapan target tersebut difungsikan sebagai langkah awal perencanaan serta pengukuran atas kemampuan Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam mewujudkan capaian standar pelayanan minimal bidang sub urusan kebencanaan. Berikut merupakan target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, yaitu :

Tabel 4.33
Target Pencapaian SPM Sub Urusan Kebencanaan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	Setiap Tahun
2	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	Setiap Tahun
3	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	Setiap Tahun

4.7.3 Realisasi

Realisasi kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 4.34
Realisasi Pencapaian SPM Sub Urusan Kebencanaan

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Capaian
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN	**TUNTAS PARIPURNA**			**100.00%**
1.	***Pelayanan Informasi Rawan Bencana***				***100.00%***
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (Bobot 80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00%**
	Jumlah Yang Harus Dilayani	1.144.508	1.144.508	0	100.00%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (Bobot 20%)				**20.00%**
	Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan**	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia**	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia**	**100.00%**
	1. Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana	1	1	0	100.00%
	2. Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	1.144.508	1.144.508	0	100.00%
	3. Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana	300	300	0	100.00%
	4. Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	5	5	0	100.00%
2.	***Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana***				***100.00%***
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (Bobot 80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00%**
	Jumlah Yang Harus Dilayani	1.144.508	1.144.508	0	100.00%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (Bobot 20%)				**20.00%**
	Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan**	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia**	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia**	**100.00%**
	1. Sarana prasarana penanggulangan bencana	355	355	0	100.00%
	2. Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM)	38	38	0	100.00%
3.	***Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana***				***100.00%***
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (Bobot 80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00%**
	Jumlah Yang Harus Dilayani	12	12	0	100.00%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (Bobot 20%)				**20.00%**
	Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan**	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia**	**Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia**	**100.00%**

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Capaian
	1. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	1	1	0	100.00%
	2. Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	12	12	0	100.00%
	3. Melakukan respon cepat darurat bencana	14	14	0	100.00%
	4. Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas	0	0	0	100.00%
	5. Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	12	12	0	100.00%

Sumber data : e-SPM Kementerian Dalam Negeri

4.7.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja yang ditetapkan dalam APBD untuk penerapan dan pencapaian SPM Sub Urusan Kebencanaan oleh Pemerintahan Daerah. Adapun besaran anggaran yang dialokasikan dan realisasinya pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.35
Alokasi Anggaran Penerapan SPM Sub Urusan Kebencanaan

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Anggaran	Realisasi	%
1	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)**			**2,887,329,150**	**2,553,993,891**	**88.46%**
	1	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**		**453,063,000**	**444,905,000**	**98.20%**
		1	Penyusunan kajian risiko bencana Kabupaten/Kota	300,000,000	299,995,300	99.99%
		2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)	153,063,000	144,909,700	94.67%
	2	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**		**1,647,544,650**	**1,412,754,371**	**85.75%**
		1	Penyusunan rencana penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	0	0	0%
		2	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota	0	0	0%
		3	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	0	0	0%
		4	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	0	0	0%
		5	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	0	0	0%
		6	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	78,075,000	78,039,750	99.95%
		7	Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota	0	0	0%
		8	Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana Kabupaten/Kota	1,136,493,000	1,135,034,521	99.87%

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Anggaran	Realisasi	%
		9	Penyusunan rencana kontijensi	0	0	0%
		10	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	96,755,650	88,928,100	91.91%
		11	Penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana	0	0	0%
		12	Pelatihan keluarga tanggap bencana alam	0	0	0%
		13	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	49,921,000	45,150,000	90.44%
		14	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	0	0	0%
		15	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	41,300,000	41,150,000	99.64%
		16	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	245,000,000	24,452,000	9.98 %
		17	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	0	0	0%
	3	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**		**337,570,850**	**293,179,215**	**86.85%**
		1	Respon cepat Kejadian Luar Biasa penyakit/wabah Zoonosis prioritas	0	0	0%
		2	Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota	44,100,000	9,575,000	21.71%
		3	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	38,468,3500	35,814,000	93.10%
		4	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	240,627,500	234,590,215	97.49%
		5	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	14,375,000	13,200,000	91.83%
		6	Respon cepat bencana non alam epidemi/wabah penyakit	0	0	0%
	4	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**		**449,150,650**	**403,155,305**	**89.76%**
		1	Penyusunan regulasi penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	0	0	0%
		2	Penguatan kelembagaan bencana Kabupaten/Kota	38,400,500	37,868,850	98.62%
		3	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	63,435,000	44,623,000	70.34%
		4	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	247,315,150	221,207,455	89.44%
		5	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	100,000,000	99,456,000	99.46%
		6	Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota	0	0	0%

Sumber data : e-SPM Kementerian Dalam Negeri

4.7.5 Dukungan Personil

Jumlah pegawai di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 sebanyak 52 orang dengan rincian :

a. Data ASN menurut jenis jabatan

No	Perangkat Daerah	Jabatan Struktural	Jabatan Fungsional Tertentu	Jabatan Fungsional Umum
1	BPBD	5	5	4
Total Pegawai		14		

b. Data ASN menurut jenjang pendidikan terakhir

No	Perangkat Daerah	Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan Terakhir					
		SD	SMP	SMA	DIII	S1	S2
1	BPBD	0	0	0	1	12	1
Total Pegawai		14					

4.7.6 Permasalahan dan Solusi

Dalam penerapan SPM oleh BPBD Kabupaten Nganjuk masih terdapat beberapa masalah dan kendala yaitu dukungan anggaran melalui APBD berkaitan dengan pemenuhan SPM terbatas sehingga banyak kegiatan yang menunjang untuk pencapaian SPM ditiadakan.

Berdasarkan pada permasalahan tersebut, maka solusi dan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan pemenuhan standar pelayanan minimal sub urusan bencana adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Dokumen Kajian Resiko Bencana harus segera dilegalitaskan sebagai dasar untuk mengoptimalkan dan menyelaraskan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Nganjuk.
2. Perlunya perhatian khusus dari Kepala Daerah dengan dibantu Bappeda untuk merencanakan alokasi anggaran SPM sesuai aturan yang berlaku karena BPBD berkewajiban melakukan penerapan SPM sub urusan bencana yang dijamin pelaksanaannya dan sanksinya sesuai amanat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Pasal 20 yaitu Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang tidak melaksanakan SPM dijatuhi sanksi administratif.
3. Harus membangun kerjasama lintas sektoral untuk optimalisasi penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sub Urusan Bencana.

4. Indikator dan formula pelayanan SPM bisa ditetapkan sendiri pada awal tahun perencanaan sehingga penetapan target bisa menyesuaikan APBD yang ada, yang pada akhirnya capaian kinerja pada tahun tersebut dapat terukur maksimal.
5. Sub kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota realisasi anggaran kurang dari 50 % dikarenakan adanya BTT dari Propinsi Jawa Timur yaitu pemberian bantuan air bersih kepada warga yang mengalami kekeringan.

4.8 URUSAN SOSIAL

4.8.1 Jenis Pelayanan Dasar

Sebagaimana amanah dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota, bahwa pelayanan dasar yang diwajibkan untuk dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial

   Kriteria penerima layanan rehabilitasi adalah sebagai berikut :

   1) Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus; dan
   2) Masih ada perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus.

b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial

   Kriteria penerima layanan rehabilitasi adalah sebagai berikut :

   1) Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus; dan
   2) Masih ada perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus.

c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial

   Kriteria penerima layanan rehabilitasi adalah sebagai berikut :

   1) Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus; dan
   2) Masih ada perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus.

d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial

   Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis dilakukan terhadap kepala keluarga, istri/suami, dan anaknya. Kriteria penerima layanan rehabilitasi adalah sebagai berikut :

1) Perseorangan atau kepala keluarga berusia 19 (sembilan belas) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun;
2) Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus;
3) Tidak memiliki tempat tinggal tetap; dan
4) Masih ada perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang peduli.

e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota.

Kriteria penerima layanan rehabilitasi per satu kali kejadian bencana adalah sebagai berikut :

1) Jumlah pengungsi/penyintas sebanyak 1 (satu) sampai dengan 50 (lima puluh) orang;
2) Dampak bencana meliputi 1 (satu) daerah kabupaten/kota; dan/atau
3) Adanya surat penetapan bencana dari bupati/wali kota.

Berdasarkan pada uraian di atas, Pemerintah Kabupaten Nganjuk secara berkala melaksanakan pemenuhan standar pelayanan minimal tersebut dengan merencanakan, menganggarkan, melaksanakan serta mengevaluasi implementasi program, kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan SPM bidang sosial.

4.8.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota, bahwa dalam rangka pemenuhan capaian SPM Bidang Sosial diperlukan penetapan target pada awal perencanaan Tahun 2024. Penetapan target tersebut difungsikan sebagai langkah awal perencanaan serta pengukuran atas kemampuan Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam mewujudkan capaian standar pelayanan minimal bidang Sosial. Adapun penetapan target SPM sesuai dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut :

Tabel 4.36
Target Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti	100%	Setiap Tahun
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti	Jumlah Anak Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti	100%	Setiap Tahun
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti	100%	Setiap Tahun
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Jumlah Warga Negara Gelandangan dan Pengemis yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial di Luar Panti	100%	Setiap Tahun
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Warga Negara Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	100%	Setiap Tahun

Dalam penetapan target pencapaian sebagaimana yang disebutkan di atas, perlu didukung oleh beberapa instrumen dan indikator pengukuran yang spesifik dan terukur. Oleh sebab itu, diperlukan aturan teknis dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang mengiringi regulasi tersebut. Dalam rangka mewujudkan pencapaian target SPM bidang sosial yang optimal, Kementerian Sosial telah menetapkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada standar Pelayanan Mininal Bidang Sosial di daerah Provinsi dan di daerah Kabupaten/Kota, menjelaskan bahwa terdapat beberapa standarisasi yang perlu diterapkan oleh Dinas Sosial dalam memenuhi kriteria standar pelayanan minimal. Standarisasi tersebut terdiri dari standar teknis pembiayaan pemenuhan pelayanan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana.

4.8.3 Realisasi

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial menjadi salah satu bagian terpenting dalam mewujudkan *good governance* dan *good goverment* di Kabupaten Nganjuk. Menciptakan sebuah tatanan pemerintahan yang transparan, akuntabel, adil dan merata dapat terwujud secara komprehensif dengan berupaya mencapai keberhasilan atas kinerja dari setiap urusan penyelenggara pemerintahan termasuk urusan bidang sosial. Oleh sebab itu, standar pelayanan minimal bidang sosial hadir sebagai tolok ukur perwujudan sinergitas atas layanan pemerintah kepada masyarakat di bidang sosial. Berikut kami tampilkan pengukuran pencapaian kinerja standar pelayanan minimal bidang sosial :

Tabel 4.37
Alokasi Anggaran Penerapan SPM Bidang Sosial

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM	**TUNTAS PARIPURNA**			**100.00%**
1.	***Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti***				***100.00%***
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (Bobot 80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00%**
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	1.113	1.113	0	100%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (Bobot 20%)				**20.00%**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	**100.00%**
	1. Layanan data dan pengaduan (orang)	260	260	0	100.00%
	2. Penyediaan permakanan (orang)	31	31	0	100.00%
	3. Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat (orang)	5	5	0	100.00%
	4. Penyediaan sandang (orang)	1	1	0	100.00%
	5. Penyediaan alat bantu (orang)	229	229	0	100.00%
	6. Penyediaan perbekalan kesehatan (orang)	5	5	0	100.00%
	7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial (orang)	260	260	0	100.00%
	8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas terlantar (orang)	260	260	0	100.00%
	9. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK (orang)	3	3	0	100.00%
	10. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (orang)	1	1	0	100.00%
	11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (orang)	31	31	0	100.00%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (orang)	3	3	0	100.00%
	13. Layanan rujukan (orang)	24	24	0	100.00%
2.	***Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti***				***100.00%***
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (Bobot 80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Jumlah Yang Belum Terlayani**	**80.00%**
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	5.802	5.802	0	100%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (Bobot 20%)				**20.00%**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	100.00%
	1. Layanan data dan pengaduan (orang)	1.440	1.440	0	100.00%
	2. Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat (orang)	1.440	1.440	0	100.00%
	3. Penyediaan permakanan (orang)	6	6	0	100.00%
	4. Penyediaan sandang (orang)	6	6	0	100.00%
	5. Penyediaan perbekalan kesehatan (orang)	5	5	0	100.00%
	6. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial (orang)	1.440	1.440	0	100.00%
	7. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar (orang)	1.440	1.440	0	100.00%
	8. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK (orang)	6	6	0	100.00%
	9. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (orang)	6	6	0	100.00%
	10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (orang)	6	6	0	100.00%
	11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (orang)	6	6	0	100.00%
	12. Layanan rujukan (orang)	1	1	0	100.00%
3.	***Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti***				***100.00%***
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (Bobot 80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00%**
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	144	144	0	100%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (Bobot 20%)				**20.00%**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	**100.00%**
	1. Layanan data dan pengaduan (orang)	18	18	0	100.00%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	2. Penyediaan permakanan (orang)	18	18	0	100.00%
	3. Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat (orang)	9	9	0	100.00%
	4. Penyediaan sandang (orang)	9	9	0	100.00%
	5. Penyediaan alat bantu (orang)	1	1	0	100.00%
	6. Penyediaan perbekalan kesehatan (orang)	5	5	0	100.00%
	7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial (orang)	18	18	0	100.00%
	8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas terlantar (orang)	18	18	0	100.00%
	9. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK (orang)	11	11	0	100.00%
	10. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (orang)	1	1	0	0.00%
	11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (orang)	18	18	0	100.00%
	12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (orang)	11	11	0	100.00%
	13. Layanan rujukan (orang)	7	7	0	100.00%
4.	***Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti***				***100.00%***
	Ya ada Rehabilitasi Sosial Dasar Khusus nya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti				
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (Bobot 80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00%**
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	101	101	0	100%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (Bobot 20%)				**20.00%**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	**100.00%**
	1. Layanan data dan pengaduan (orang)	11	11	0	100.00%
	2. Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat (orang)	11	11	0	100.00%
	3. Penyediaan permakanan (orang)	11	11	0	100.00%
	4. Penyediaan sandang (orang)	8	8	0	100.00%
	5. Penyediaan perbekalan kesehatan (orang)	5	5	0	100.00%
	6. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial (orang)	11	11	0	100.00%
	7. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis (orang)	11	11	0	100.00%
	8. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau	3	3	0	100.00%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan (orang)				
	9. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (orang)	8	8	0	100.00%
	10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (orang)	11	11	0	100.00%
	11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (orang)	3	3	0	100.00%
	12. Layanan rujukan (orang)	8	8	0	100.00%
5.	***Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota***				***100.00%***
		Ya Terjadi Bencana			
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (Bobot 80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Jumlah Yang Belum Terlayani**	**80.00%**
	A. Jumlah yang Harus Dilayani	641	641	0	100%
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (Bobot 20%)				**20.00%**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	**100.00%**
	1. Penyediaan permakanan (orang)	327	327	0	100.00%
	2. Penyediaan sandang (orang)	130	130	0	100.00%
	3. Penyediaan tempat penampungan pengungsi (orang)	126	126	0	100.00%
	4. Penanganan khusus bagi kelompok rentan (orang)	50	50	0	100.00%
	5. Pelayanan dukungan Psikososial (orang)	8	8	0	100.00%

Sumber data : e-SPM Kementerian Dalam Negeri

Pencapaian terhadap pengukuran standar pelayanan minimal bidang sosial secara umum telah menunjukkan capaian keberhasilan yang cukup tinggi bagi Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Namun hal tersebut masih menyisakan beberapa hal yang memerlukan pemecahan permasalahan, antara lain berkaitan dengan realisasi atas standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.

4.8.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja yang ditetapkan dalam APBD untuk penerapan dan pencapaian SPM Bidang Sosial oleh Pemerintahan Daerah. Adapun besaran anggaran yang dialokasikan dan realisasinya pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.38
Alokasi Anggaran Penerapan SPM Bidang Sosial

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Anggaran	Realisasi	Serapan
	BIDANG SOSIAL			**14,858,062,850**	**14,192,235,823**	**95.52%**
1	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**			**1,129,618,450**	**1,126,664,088**	**99.74%**
	1	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**		**1,058,064,800**	**1,055,923,588**	**99.80%**
		1	Penyediaan permakanan	0	0	0%
		2	Penyediaan sandang	0	0	0%
		3	Penyediaan alat bantu	0	0	0%
		4	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	0	0	0%
		5	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	37,216,800	36,224,800	97.33%
		6	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	536,500,000	536,245,000	99.95%
		7	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	0	0	0%
		8	Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	0	0	0%
		9	Pemberian layanan data dan pengaduan	0	0	0%
		10	Pemberian layanan kedaruratan	484,348,000	483,453,788	99.82%
		11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	0	0	0%
		12	Pemberian layanan rujukan	0	0	0%
	2	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**		**71,553,650**	**70,740,500**	**98.86%**
		1	Penyediaan makanan	71,553,650	70,740,500	98.86%
		2	Penyediaan sandang	0	0	0%
		3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	0	0	0%
		4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	0	0	0%
		5	Pelayanan dukungan Psikososial	0	0	0%
2	**PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA**					
		1	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	1,369,143,400	1,326,888,586	96.91%
		2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	12,089,917,200	11,488,615,149	95.03%

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Anggaran	Realisasi	Serapan
		3	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	269,383,800	250,068,000	92.83%

Sumber data : e-SPM Kementerian Dalam Negeri

4.8.5 Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM. Jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM pada Dinas Sosial PPPA Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut :

a. Data ASN Menurut Jenis Jabatan

No	Perangkat Daerah	Jabatan Struktural	Jabatan Fungsional Tertentu	Jabatan Fungsional Umum
1	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6	9	4
Total Pegawai		**19**		

b. Data ASN Menurut Jenjang Pendidikan Terakhir

No	Perangkat Daerah	Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan Terakhir					
		SD	SMP	SMA	DIII	S1	S2
1	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0	0	0	0	18	1
Total Pegawai		**19**					

4.8.6 Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang Sosial di Kabupaten Nganjuk, masih mengalami beberapa kendala dan permasalahan. Adapun permasalahan dan kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Dukungan anggaran melalui APBD berkaitan dengan pemenuhan SPM terbatas;
2. Validitas data PMKS/PPKS belum akuntabel;
3. Sarana dan prasarana untuk pelayanan Rehabilitasi Sosial di luar panti masih kurang;
4. Jumlah SDM dalam Penanganan Kasus PMKS/PPKS maupun SPM masih kurang;
5. Pemberian bantuan kepada PMKS/ PPKS masih seputar bantuan untuk kebutuhan dasar ataupun rehabilitasi, hal ini belum bisa menyentuh substansi dari pengentasan permasalahan/kemiskinan hingga tuntas.

Berdasarkan pada permasalahan tersebut, maka dapat diberikan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan pemenuhan standar pelayanan minimal adalah sebagai berikut :

1. Membangun data yang berkualitas dan Melaksanakan Integrasi Aplikasi Data Pokok Kependudukan;
2. Membangun kerjasama lintas sektoral untuk optimalisasi penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial;
3. Peningkatan Sarana & Prasarana layanan Rehabilitasi Sosial;
4. Perlu dilakukan monitoring dan pendataan yang lebih rinci terhadap efektivitas program/kegiatan yang dilakukan untuk penanganan PMKS/ PPKS untuk dicari kendala dan masalahnya sebagai bahan evaluasi untuk kebijakan yang akan datang;
5. Pemberian bantuan diharapkan dapat berupa sebuah bantuan kontinuitas untuk PMKS/ PPKS yang tidak mempunyai potensi. Sedangkan yang mempunyai potensi bisa berupa pemberian keterampilan, bimbingan dan modal untuk usaha, ataupun pembukaan lapangan kerja yang bisa menyerap lebih banyak tenaga kerja.

BAB V
PENUTUP

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah melalui berbagai program dan kegiatan merupakan wujud nyata pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk, yang terdiri atas 24 (dua puluh empat) urusan wajib, 5 (lima) urusan pilihan dan 5 (lima) fungsi penunjang urusan pemerintahan serta pelaksanaan tugas pembantuan.

Berdasarkan hasil capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024, secara umum mencapai kinerja yang baik. Semua ini tidak terlepas dari partisipasi aktif seluruh komponen Pemerintah Kabupaten Nganjuk mulai dari tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dukungan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA), Stakeholders yang menjadi mitra kerja dan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Nganjuk.

Namun, masih terdapat beberapa kendala dan hambatan yang menyebabkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah belum optimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, baik dari aspek sumber daya manusia, sarana prasarana, regulasi maupun anggaran. Setiap perangkat daerah diharapkan mampu mendokumentasikan dengan baik seluruh data yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, termasuk Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mulai dari IKK Makro, IKK Outcome (hasil), IKK Fungsi Penunjang, dan dokumen pendukung lainnya.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024 ini disusun untuk memenuhi pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Harapan kami, laporan ini dapat menjadi referensi dan bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan di tahun yang akan datang.